



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201928038, 30 Januari 2019

## Pencipta

Nama : **SUPADIYANTO, S.SOS.I., M.I.KOM**  
Alamat : Sragan, Sragan Banaran XV, RT/RW 001/031, Kel/Desa Sendangmulyo, Kec. Minggir, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta , Sleman, Di Yogyakarta, 55562  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **SUPADIYANTO, S.SOS.I., M.I.KOM**  
Alamat : Sragan, Sragan Banaran XV, RT/RW 001/031, Kel/Desa Sendangmulyo, Kec. Minggir, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta , Sleman, Di Yogyakarta, 55562  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Masa Depan Indonesia, Bangkit Atau Bangkrut! Prisma Pemikiran Progresif Di Berbagai Surat Kabar**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 9 November 2018, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000133387

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001





# **Masa Depan Indonesia, Bangkit atau Bangkrut!**

**(Prisma Pemikiran Progresif  
di Berbagai Surat Kabar)**

**Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom.**

**Editor: Sukarno, SIP, SS & Fitratun Annisya, SE  
Penerbit Sukarno Pressindo**



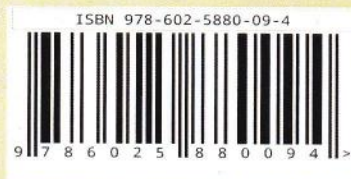
Buku dahsyat ini berisi analisis dan pendapat mengenai berbagai problematika multikompleks yang menjerat bangsa Indonesia. Masalah-masalah aktual di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan, pangan, energi, teknologi, dan industri media masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan nasional. Soal skandal korupsi misalnya, sampai sekarang menjadi momok paling menakutkan yang menelikung birokrasi di Indonesia—sejak era kolonialisme, Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi.

Buku ini sengaja disusun menjadi empat prisma pemikiran besar. Yakni: Babak Konvergensi dan Ekonomi Politik Media, Babak Problematika Kontemporer, Babak Kebangkrutan, dan Babak Kebangkitan. Kelebihannya mampu mengungkap berbagai problematika nasional dengan cara sederhana, santun, namun tetap kritis dengan mengedepankan alternatif solusi yang relevan dijadikan pegangan para pembuat kebijakan publik. Kupasan disampaikan dengan cara menarik, populer, di mana konten-kontennya telah mengalami seleksi ketat oleh para redaktur opini di berbagai surat kabar. Sebab artikel-artikel dalam buku ini telah terpublikasikan di berbagai surat kabar lokal dan nasional. Daya gedor gagasan yang tersurat maupun tersirat—penuh dengan ide cemerlang, kreatif, progresif, dan multiperspektif. Kelebihan buku ini—yang tidak dimiliki oleh buku lain di pasaran adalah—justru karena konten-konten pemikiran dalam buku ini pernah diapresiasi oleh ribuan, bahkan ratusan ribu orang di Tanah Air.

Sosok penulis buku ini, sangat fenomenal. Karena berasal dari keluarga petani yang sangat miskin dan tinggal di desa, jauh dari kehidupan modern. Namun keahliannya dalam membuat artikel—sejak 18 tahun silam, telah mengantarkannya menjadi kolumnis, dosen, narasumber, peneliti, sekaligus penegak hukum di bidang penyiaran. Layak, buku ini harus dibaca para pemimpin dan calon pemimpin. Para calon presiden, calon wakil presiden, calon menteri, calon anggota legislatif DPRD/DPR RI/DPD RI juga tepat membaca buku gres ini. Momentum Pemilu 2019, merupakan pintu gerbang paling menentukan apakah Indonesia akan bangkit? Atau sebaliknya, bakal bangkrut? Indonesia berpotensi besar menjadi bangkit kalau dikelola oleh para pemimpin yang profesional. Sebaliknya, Indonesia menjadi bangkrut jika dikelola oleh para pemimpin yang koruptif, manipulatif, dan tidak visioner.

Kehadiran buku ini pada "tahun politik", amat tepat dijadikan salah satu referensi utama (rujukan) bagi para mahasiswa, pelajar, guru, dosen, peneliti, dan aktivis dunia pergerakan, bahkan masyarakat awam untuk memajukan pembangunan nasional. Layaklah berbagai surat kabar nasional dan lokal seperti: Kedaulatan Rakyat, Koran Jakarta, Koran Sindo, Suara Karya, Bernas, Suara Pembaruan, Wawasan, Lampung Post, Harian Umum Pelita, Harian Jogja, Barometer, Jogja Raya (Jawa Pos Group), Meteor, Jateng Pos, Jogjakarta Post, dan Haluan Kepri, dan masih banyak lagi—kerap memberikan ruang dan waktu kepada penulis buku ini untuk menyampaikan gagasannya.

**Penerbit Sukarno Pressindo**  
**Karanggawang Barat RT 05 RW 14**  
**Tembalang, Kota Semarang 50274**  
**HP. 081228494410/08976759734**  
**Email: sukarnopressindo@gmail.com**  
**www.sukarnopressindo.com**



*Masa Depan Indonesia,  
Bangkit atau Bangkrut!*

(Prisma Pemikiran Progresif di Berbagai Surat Kabar)

**Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom.**

Editor: Sukarno, SIP, SS & Fitratun Annisya, SE

**Penerbit Sukarno Pressindo**

**2018**

Masa Depan Indonesia, Bangkit atau Bangkrut!  
(Prisma Pemikiran Progresif di Berbagai Surat Kabar)

**Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom.**

**ISBN: 978-602-5880-09-4**

Setting and Layout : **Anis**

Cover Design: **Sukarno**

Editor: **Sukarno, SIP, SS dan Fitratun Annisya,SE**

**Penerbit:**

PENERBIT SUKARNO PRESSINDO

**Redaksi:**

Karangawang Barat RT 005 RW 014 Kel. Tandang,

Kec. Tembalang Kota Semarang 50274

No HP. 081228494410; 08976759734

Email: [sukarnopressindo@gmail.com](mailto:sukarnopressindo@gmail.com); [sukarnopress@gmail.com](mailto:sukarnopress@gmail.com)

Website: [www.karnopress.com](http://www.karnopress.com) & [www.sukarnopressindo.com](http://www.sukarnopressindo.com)

Cetakan pertama: November 2018

Penerbit Sukarno Pressindo menerima kiriman naskah (puisi, cerpen, novel, buku). Naskah merupakan hasil karya sendiri/bukan plagiat, tidak menyinggung SARA, tidak bertentangan dengan Pancasila&UUD 1945.

Naskah diketik rapi, kirim ke: [sukarnopressindo@gmail.com](mailto:sukarnopressindo@gmail.com)

Hak Cipta © Penulis

Hak cipta ada pada penulis. Hak cipta dilindungi oleh UU.

Dilarang menggandakan, memperbanyak, atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, dengan cara apa pun dan untuk tujuan apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## Kata Pengantar

Saat saya menulis pengantar buku ini, jarum jam menunjukkan pukul 06.30 WIB tanggal 9 November 2018. Besok, kalender Masehi tercetak tanggal 10 November 2018 merupakan Hari Pahlawan. Saat ini para politisi, partai politik, dan tim sukses para calon anggota legislatif (DPRD/DPR/DPD RI) dan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) sibuk berkampanye Pemilu 2019—meski masih secara terbatas.

Padahal baru saja bangsa ini diterpa rentetan musibah alam mulai dari gempa bumi di Lombok, Palu, dan musibah kecelakaan pesawat terbang Lion Air JT 610 di Perairan Tanjung Karawang Jawa Barat. Bencana sosial lainnya yakni ditetapkannya para pejabat negara sebagai tersangka dan terdakwa sejumlah kasus korupsi. Sebagai generasi muda yang terlahir di tahun 1980-an, saya turut prihatin atas berbagai penderitaan yang masih menimpa mayoritas penduduk bangsa ini. Pada era 1998-an, ketika Orde Baru mau lengser, saya masih duduk di bangku SMA Negeri 1 Minggir Kelas II. Hobi saya sejak duduk di bangku SD adalah membaca buku dan koran, menyimak berita yang disiarkan televisi-radio. Ketika kerusuhan Mei 1998 berkejolak, saya rajin menyimak siaran radio *Voice of America* (VOA), memantau televisi hitam putih milik tetangga, dan membaca koran di perpustakaan sekolah.

Pertanyaan yang berkecamuk dalam benak saya waktu itu

adalah mengapa *kok* bisa sampai terjadi tragedi berdarah setragis dan sedahsyat itu? Padahal zaman itu bukan lagi zaman penjajahan (kompeni), bukan lagi zaman “komunis”! Di mana dalam waktu sekejap terjadi kerusuhan (konflik) di mana-mana, pembakaran gedung dan pertokoan, pembunuhan, penculikan, dan juga bahkan aksi kriminalitas seperti: pemerkosaan, penjarahan pun turut “menggila” pada masa itu.

Kalau tragedi semacam itu berulang, bagaimanakah masa depan bangsa ini? Sejarah membuktikan bahwa Kerajaan Sriwijaya hanya bertahan selama 512 tahun (sejak 671 s/d 1183). Nasib Kerajaan Majapahit, sebagai lanjutan dari Kerajaan Singosari—hanya bertahan 233 tahun sejak 1294 s/d 1527 (Slamet Muljana, 2013). Uni Soviet yang sehebat itu, runtuh setelah mencapai usia 69 tahun juga terhitung sejak tahun 1922 s/d 1991 (Mannsbach, R. dan Rafferty, K. 2012; Hafid Adim Pradana, 2016).

Kita semua tidak menginginkan di masa mendatang, Indonesia mengalami nasib seperti kerajaan-kerajaan dan negara di atas. Yakni tinggal namanya saja. Karena siapa yang bisa menduga, pada 30 Agustus 1999—Indonesia telah kehilangan salah satu provinsi yaitu Timor Timur (Lorraine Rangga Boro, 2014), yang kini menjadi negara sendiri (Timor Leste). Kita semua tidak menginginkan adanya perpecahan (disintegrasi) di negeri ini. Kita tidak menginginkan misalnya wilayah Aceh dan Papua yang selama ini santer berhembus kabar untuk “memerdekakan diri” sebagaimana strategi yang dilakukan oleh Timor Timur dahulu terulang kembali. Saya sebagai orang kampung, yang dilahirkan di pinggiran daerah

bernama: Jalan Ki Srogo Padukuhan Sragan Banaran RT 01/RW 31, Sendangmulyo, Minggir, Sleman, Yogyakarta; berada tepat di pinggiran Kali Progo (Sungai tapal batas antara Kulonprogo dan Sleman)—merasa prihatin atas aksi radikalisme, terorisme, dan disintegrasi—yang berpeluang besar memecah belah eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun setelah lebih dari 20 tahun tragedi berdarah tersebut berlalu (baca: dampak Reformasi 1998), bangsa ini belum pulih benar dari dampak jangka panjang atas kondisi buruk di atas. Angka kriminalitas masih tinggi. Kejahatan korupsi semakin meningkat. Penegakan hukum yang lemah. Angka pengangguran dan kemiskinan masih tetap tinggi dan harga-harga kebutuhan hidup terus meningkat tajam. Bahkan dalam bidang pelayanan publik, dalam dunia pendidikan dan kesehatan, sebagian besar penduduk bangsa ini masih belum bisa menikmati akses pelayanan dunia pendidikan yang mencerdaskan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

Kondisi-kondisi nyata di atas sangat memicu keprihatinan saya. Sebagai bentuk keprihatinan menyikapi berbagai persoalan bangsa tersebut, saya ungkapkan melalui berbagai karya tulis ilmiah populer (artikel/opini) yang termuat di berbagai surat kabar di Indonesia. Buku ini berjudul: ***"Masa Depan Indonesia, Bangkit atau Bangkrut! (Prisma Pemikiran Progresif di Berbagai Surat Kabar)"*** yang ada di tangan pembaca ini merupakan kumpulan artikel milik saya yang pernah termuat di berbagai surat kabar lokal dan nasional yaitu: Koran Jakarta, Koran Sindo (Harian Umum Seputar Indonesia), Suara Karya, Kedaulatan Rakyat, Bernas Jogja, Suara Pembaruan,



Wawasan, Lampung Post, Harian Umum Pelita, Harian Jogja, Barometer, Jogja Raya (Jawa Pos *Group*), Meteor, Jateng Pos, Jogjakarta Post, dan Haluan Kepri terhitung sejak November 2009 hingga November 2018. Sejatinya masih ada ratusan artikel lagi milik saya yang terserak termuat di berbagai surat kabar lokal dan nasional terhitung sejak tahun 2000 sampai sekarang. Namun karena keterbatasan ruang dan waktu, sengaja dipilih artikel-artikel yang progresif saja. Kendati gagasan-gagasan dalam buku ini pernah termuat di berbagai surat kabar, semoga saja wacananya masih tetap relevan dengan konteks kekinian dan di masa mendatang. Saya berharap besar, pemikiran-pemikiran tersebut berkontribusi positif bagi upaya perbaikan bangsa.

Sebagai salah satu intelektual muda, berasal dari keluarga kelas bawah (pinggiran)-non partisan, saya memiliki tanggung jawab moral berat yakni tidak hanya mengungkap berbagai kejanggalan yang dihadapi masyarakat melalui tradisi kritik-mengkritik saja, namun saya tetap berusaha semaksimal mungkin menghadirkan berbagai tawaran solusi cerdas-progresif. Tawaran solusi tersebut tidak sekadar saya wacanakan saja, namun sebagian juga sudah saya implementasikan dalam tataran dan kemampuan, serta kapasitas saya sebagai "*wong ndeso*".

Buku ini sengaja direkonstruksi menjadi empat prisma/babak pemikiran besar yakni: Babak Konvergensi dan Ekonomi Politik Media, Babak Problematika Kontemporer (berisi permasalahan kompleks terkini), Babak Kebangkrutan, dan Babak Kebangkitan. Tidak ada maksud lain dari penerbitan buku ini, kecuali untuk

memberikan kesadaran bahwa bangsa ini harus dibangkitkan secara optimal. Potensi-potensi budaya, intelektual, fisik, dan spiritualitas seluruh elemen bangsa perlu diberdayakan guna mengukuhkan kedigdayaan. Jika tidak, bangsa ini segera bangkrut dan tidak bangkit lagi. Bisa saja NKRI runtuh, bukan karena akibat serangan musuh dari luar (invasi militer dsb.), namun karena faktor internal (dari dalam) sendiri.

Terima kasih kepada berbagai surat kabar yang sudah memuat berbagai artikel saya. Tak lupa saya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak penerbit (Soekarno Pressindo), bersedia menerbitkan buku ini sehingga dapat dinikmati seluruh pembaca di Tanah Air dan luar negeri. Selamat membaca! (\*)

*Yogyakarta, 09 November 2018*

**Hormat saya,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Supadiyanto', with a horizontal line extending to the right.

**Supadiyanto, S.Sos.I, M.I.Kom.**

# Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	viii
Pendahuluan	1
KONVERGESI DAN EKONOMI POLITIK MEDIA	
Konglomerasi Media	5
KPI dan Cetak Biru Penyiaran	10
Masalah Baru Regulasi Penyiaran Digital	15
Masa Depan LPP TVRI dan RRI	20
Media Penyiaran untuk Kedaulatan NKRI	23
Politisasi Media Massa	26
<i>Hoaks</i> dan Cerdas Bermedia	28
Medsos Perlu UU Tersendiri	31
Dampak (Sinetron) TV terhadap Watak Anak	34
Matematika Politik Pilgub Jateng	39
Sinergi Keluarga dan Negara dalam Mendidik Anak	44
Taktik Memberdayakan Penduduk Miskin	48
Mudik, Reunifikasi, dan Ekonomi Lebaran	52
PROBLEMATIKA KONTEMPORER	
Globalisasi dan Ketidakadilan Universal	57
Melawan Fenomena "Deindonesianisasi"	61
Pemilu 2014 dan Manuver Politik ala Ken Arok	65
ICT, Solusi Masalah Kemiskinan dan Pengangguran	70



Berlomba menjadi Pejabat Antikorupsi	73
Artis Vs Artis, Siapa Menang?	76
Membongkar Relasi Media, Politik dan Demokrasi	81
Pilgub Jateng dan Politik Hegemoni	84
Memberdayakan Energi Alternatif	89
Peta Kekuatan 10 Parpol	93
Artis, Politikus dan Dunia Berpura-pura	97
Politik dan Diskriminasi Gender	101
Parpol, Kekuasaan dan Konflik Kepentingan Bernegara	104
Komodifikasi Skripsi, Tesis dan Disertasi	109
Media Massa dan Kaderisasi Pemimpin	112
Relasi Media Massa dan Sistem Demokrasi	115
Politik Transaksional	118
Relasi Korupsi dan Kemiskinan di Jateng	121
Menyoal Data Keluarga Miskin dan Kaya	124
Ruang Kompetisi Semakin Sempit	128
Pengumuman SBMPTN dan Sukses Kuliah	132
Habis Lulus SMA/K, Bingung?	137
Lebaran, Laburan, Leburan, dan Liburan	140
Refleksi 185 Tahun Kabupaten Bantul	144
Menjadikan Harian Jogja sebagai Identitas Jogja	148
Darurat Sektor Pertanian	151
 BABAK KEBANGKRUTAN	
Menggoyang Kekuasaan Cikeas	155
Mengintip Kredibilitas Capres 2014	158
Resafel Kabinet dan Agenda Pemilu 2014	161
Mengamankan Agenda Reformasi	165

De-eksistensi KPK	168
Godaan Syahwat Kekuasaan	171
TNI dan Syahwat Kekuasaan	174
Dereligiuitas Wakil Rakyat	177
Paket Ekonomi dan Liberalisasi	180
Histeria Miss Universe 2011	183
Mental Korupsi di Gunung Kidul	186
Antara Teroris dan G30S/PKI	189
Pilkada, Istana dan Keraton	193
Kalau Harga BBM Naik	196
Menyoal Rekrutmen CPNS	200
Beda Tipis Parpol dan PT	203
Parpol, Korupsi, dan Ruwetnya Demokrasi	207
Mengenal Tabiat Bangsa Israel	211
BABAK KEBANGKITAN	
Kembali Ke Khittah Reformasi '98	215
Mengembalikan Citra Parpol	218
Dwitunggal Pemimpin-Rakyat	221
Impor Beras dan Solusi Krisis Pangan	224
Mengatasi Krisis Air dan Pangan di Musim Kemarau	227
Spirit Baru Paska Lebaran	231
Reevaluasi Manajemen Mudik Lebaran	234
Supremasi Hukum dan Perburuan Koruptor	238
PLN Di Tangan Dahlan Iskan	241
SEA Games dan Nasionalisme	244
SEA Games dan Kebangkitan Olahraga	247
Memberdayakan Penduduk Lansia	251

Prokontra Publikasi Karya Ilmiah	254
Polemik Publikasi Karya Ilmiah	257
Jurnalistik Masuk Kurikulum Pendidikan	259
Apa Kabar Mahasiswa Pengusaha?	261
Kisah Hidup yang Menggugah	263
Menunggu Kejutan Pasca <i>National Summit</i> 2009	266
Media Massa, Isu Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal	269
Menjaga Independensi, Profesionalitas, dan Integritas (Komisioner) KPID DIY demi Mewujudkan Kualitas Media	
Penyiaran di DIY yang Istimewa, Bermartabat, dan Mencerdaskan Publik	276
Penutup (Kesimpulan)	289
Sumber Referensi (Daftar Pustaka)	292
Profil Penulis	299



## Pendahuluan

**P**erjalanan Orde Reformasi genap berusia 20 tahun pada 21 Mei 2018 kemarin. Pertanyaannya, hasil pembangunan apa sajakah yang benar-benar sudah dirasakan penduduk bangsa ini? Puncak prestasi penguasa adalah ketika berhasil menjamin kesejahteraan lahir dan batin setiap warga negara. Ketika masih dijumpai realitas sosial yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25.949.800 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018); tak perlu diragukan lagi, pemerintah gagal menjalankan tugas dalam menjamin kesejahteraan “material” dari seluruh penduduk Indonesia-sebagai amanah Pancasila sila ke-5. *Kok amat sederhana ya parameternya?*

Memang benar, untuk apa menggembarkan-gemborkan jumlah kenaikan pendapatan negara, kalau kenyataan di lapangan jumlah pengangguran semakin bertambah. Buat apa menyusun proposal pembangunan nasional yang “melangit”, kalau ternyata jumlah utang luar negeri beserta “bunga rente-nya” semakin besar menembus angka Rp 5.425 triliun (Bank Indonesia, 2018).

Usia kemerdekaan bangsa ini genap 73 tahun pada 17 Agustus 2018 kemarin. Sudah tiga rezim kekuasaan yang mengatur segala ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Orde Lama di bawah pemerintahan Soekarno sudah tumbang. Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, pun telah sirna. Orde Reformasi yang dikuasai oleh sejumlah penguasa, mulai era Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Joko Widodo-pun tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mengetahui, apakah Orde Reformasi akan terus bertahan hingga sepanjang Orde Baru berkuasa? Kita semua masih gelap mata tentang masa depan Orde Reformasi, apakah pada “Pemilu 2019 besok” akan terus berlanjut ataukah tergantikan oleh penguasa lain yang membawa angin perubahan.

Setiap rezim atau penguasa selalu menciptakan istilah khas. Yang menamai Orde Lama, bukanlah Soekarno. Yang memberikan nama Orde Baru juga bukan otomatis Soeharto. Begitu juga mengenai julukan Orde Reformasi; Habibie, Gus Dur,

Megawati dan SBY, serta Joko Widodo; hanyalah pelaku sejarah di dalamnya. Sangat besar peluangnya Orde Reformasi bisa tergantikan oleh nama orde yang lainnya. Misalkan setelah Orde Reformasi lengser, lantas muncul Orde Pasca Reformasi atau Orde Revolusi atau Pembaharuan, siapa yang mampu menebak?

Sepanjang Orde Reformasi yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun, masih terdapat banyak cela menimpa bangsa ini. Apa sajakah itu? Cela-cela ini menjadi dosa sejarah yang akan terus merugikan hajat hidup sekitar 260 juta jiwa negeri ini. Dalam bidang politik, semakin banyak politisi dan pejabat negara (penguasa) yang tersangkut kasus korupsi. Korupsi adalah permasalahan klasik yang selalu menjerat dunia kekuasaan di berbagai negara. Termasuk di Indonesia.

Di zaman prakemerdekaan, kasus korupsi umumnya dilakukan oleh orang pribumi yang dipercayai pemerintahan kolonial menjadi pejabat lokal. Pada masa Orde Lama, para pelaku kejahatan korupsi diprakarsai oleh mereka yang dekat kekuasaan (Istana Negara). Di masa Orde Baru, praktik korupsi dilakukan oleh Soeharto dan kroninya. Kendati hingga wafatnya, tidak ada satu putusan hukum di pengadilan tingkat manapun memvonis Soeharto melakukan kejahatan korupsi.

Pada era Orde Reformasi ini justru kejahatan korupsi dilakukan menurut asas pemerataan dari pusat hingga daerah (dilakukan oleh pejabat eksekutif, yudikatif dan legislatif). Merujuk data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, terdapat hampir 200 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Ingat, data di atas resmi dikantongi pemerintahan era SBY. Di masa pemerintahan Joko Widodo, apakah kasus korupsi menjadi lebih sedikit, atau justru sebaliknya? Tentu saja, menurut hemat penulis, sesungguhnya lebih banyak lagi kasus korupsi yang dilakukan para kepala daerah namun kini tak/belum terungkap. Bak fenomena gunung es (salju) di mana pucuknya menyembul, namun dasarnya yang lebih besar terendam air es yang membuatnya tidak tampak.

Penegakan hukum di masa Orde Reformasi ini juga masih tergolong tidak tegas. Ketidaktegasan aparat penegak hukum semakin kentara dengan melihat banyaknya kasus korupsi dan

penyalagunaan kekuasaan lainnya, yang tidak selesai bahkan mengendap dan akhirnya didiamkan saja. Terlibatnya para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, KPK, pejabat pengadilan, pengacara dalam berbagai kasus korupsi maupun rekayasa kasus hukum, mempertegas bagaimana kualitas penegakan hukum masih cukup lemah.

Di bidang pendidikan, berapa banyak dana keuangan negara yang digelontorkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air? Tapi mengapa hingga kini masih banyak dijumpai kasus anak putus sekolah serta Sarjana menganggur? Biaya pendidikan yang tidak terjangkau? Tentunya permasalahan lain yang semakin memperburuk kualitas pendidikan nasional.

Memang benar ada sejumlah prestasi yang dibanggakan sepanjang rezim Orde Reformasi. Seperti penyelenggaraan pesta demokrasi yang semakin jujur, demokratis. Pendapatan negara naik cukup signifikan. Angka kemiskinan dari tahun ke tahun menurun. Pertumbuhan ekonomi tiap tahun selalu mengalami kenaikan. Namun kita menilai, sejumlah prestasi di atas, tidak sebanding dengan cela atau dosa sejarah yang sudah dilakukan pemerintahan Orde Reformasi.

Dalam buku berjudul: “***Masa Depan Indonesia, Bangkit atau Bangkrut! (Prisma Pemikiran Progresif di Berbagai Surat Kabar)***” ini dipaparkan berbagai permasalahan kebangsaan sekaligus tawaran solusi atas masalah-masalah yang muncul, yang terangkum dalam empat babak yakni: Konvergensi dan Ekonomi Politik Media, Problematika Kontemporer, Babak Kebangkrutan, dan Babak Kebangkitan. Dipersilakan menyimak kupasannya sampai tuntas sebagaimana yang tertera di bawah ini. (\*)



**KONVERGENSI DAN  
EKONOMI POLITIK MEDIA**

## Konglomerasi Media<sup>1</sup>

**E**ra konvergensi media yang melahirkan para konglomerat media menyebabkan terjadinya pemusatan kepemilikan media massa, dan timbulnya tarik ulur antara idealisme pers, kepentingan bisnis dan kepentingan politik. Industri media massa di Indonesia kini dikendalikan sejumlah pemilik modal yang terkonsentrasi, yang mengarah ke oligopoli media, bahkan monopoli kepemilikan media.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Yanuar Nugroho, dkk. serta Merlyna Lim (2012), ada 13 grup perusahaan media raksasa (swasta) menghegemoni berbagai jaringan media cetak, elektronik dan media online di Indonesia. Mereka adalah MNC Group, Kompas Gramedia Group, Elang Mahkota Teknologi, Mahaka Media, CT Group, Beritasatu Media Holdings (Lippo Group), Media Group, Visi Media Asia, Jawa Pos Group, MRA Media, Femina Group, dan Tempo Inti Media serta Media Bali Post Group (KMB). Konsentrasi kepemilikan industri media terjadi sebagai konsekuensi logis yang tak dapat terelakkan dari kepentingan para pemilik modal dalam mendorong perkembangan industri media di Tanah Air. Bangsa ini hanya memiliki tiga perusahaan media massa yang bisa dikatakan milik publik, yakni: TVRI, RRI, dan Antara. Itupun keberadaannya, selama ini lebih dikatakan sebagai “milik penguasa” bukan milik publik atau rakyat.

Jelaslah adanya oligopoli media, yang mengarahkan terciptanya monopoli media massa mengancam hak publik dalam mengakses informasi, sebab perusahaan media massa dikendalikan para pemilik modal dan digunakan untuk mengeruk keuntungan. Tentunya media massa menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan bagi mereka yang mencari kekuasaan.

---

<sup>1</sup> Supadiyanto. (2013). *Konglomerasi Media*. Koran Jakarta edisi 27 Februari 2013.

Hal ini terutama terjadi dengan sejumlah pemilik media yang erat terhubung ke partai politik.

Sebagai contoh sederhana, Aburizal Bakrie (pemilik Visi Media Asia yang sekaligus menjadi Ketua Umum Partai Golkar), Surya Paloh (pemilik Media Group dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat), Harry Tanoesoedibjo (pemilik MNC Group dan sekaligus politikus Partai Hanura, sebelumnya pernah bergabung dengan Partai Nasional Demokrat), Dahlan Iskan (bos Jawa Pos Group sekaligus pejabat pemerintah yang kini menjadi Menteri BUMN), dll.

Sehingga munculnya persepsi publik yang menguatkan bahwa kepentingan para pemilik media mengancam hak warga dalam memperoleh informasi yang jujur dan netral, karena para pengusaha media menggunakan media sebagai alat kampanye politik untuk memengaruhi opini publik. Singkatnya, media telah menjadi sebuah mekanisme sistematis bagi para pengusaha dan politikus dalam menyampaikan kepentingan mereka sambil mendapatkan keuntungan dari bisnis.

Dengan demikian akan terjadi kompetisi bisnis sekaligus kompetisi politik, sebab para pengusaha media tersebut juga merangkap profesi sebagai politikus, yang berkeinginan kuat menjadi pejabat negara di berbagai lembaga eksekutif maupun legislatif. Membaca peta pers dari masa ke masa, memang sangat menarik. Budaya bermedia massa memiliki relasi sangat kuat dengan terciptanya sejarah perjalanan bangsa. Sebab, dengan melihat berbagai kliping (koleksi) berita-berita yang sudah disajikan media massa cetak maupun elektronik; kita bisa melihat berbagai realitas politik maupun skenario politik yang tersembunyi di balik pemberitaan tersebut.

Pada masa prakemerdekaan, media massa dijadikan alat perjuangan dalam menggelorakan semangat perjuangan mengusir kaum penjajah. Para penulis, wartawan dan pemilik media massa berkolaborasi bersama dengan mendirikan berbagai penerbitan media massa, yang digunakan untuk membangkitkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, dalam mengusir kaum penjajah. Para praktisi media di atas, kemudian menjadi tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Adam Malik, HOS Cokroaminoto, Ki Hajar Dewantara dll. Pada masa



prakemerdekaan, ideologi pers yang berkembang saat itu dikenal sebagai Pers Perjuangan. Arah dan tujuan didirikannya berbagai perusahaan media massa, benar-benar dikerahkan untuk memperjuangkan nasib rakyat, terbebas dari penindasan yang dilakukan oleh negeri penjajah.

Di masa Orde Lama, media massa dikendalikan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan membangun kedigdayaan berbudaya politik. Atmosfer tersebut menciptakan adanya politisasi media massa, di mana setiap partai politik cenderung memiliki media massanya masing-masing. Media massa yang ada diterjemahkan sebagai kepanjangan tangan dari partai-partai politik. Era tersebut dikenal sebagai Pers Partisipan (Hill and Sen, 2000).

Sedangkan di era Orde Baru, media massa diatur untuk mendukung kemajuan pembangunan nasional. Keberadaan pers dimanfaatkan oleh penguasa sebagai kekuatan ampuh bagi penguasa untuk mendukung legitimasi dan hegemoninya atas publik. Ada banyak kasus pembredelan yang terjadi pada berbagai perusahaan media, akibat tidak sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan penguasa Orde Baru. Pada masa itu, pers dikenal sebagai Pers Pancasila atau Pers Pembangunan.

Di zaman Orde Reformasi ini, media massa menjadi sangat liberal (bebas), bahkan berubah menjadi kekuatan yang ampuh dalam mengontrol pusat-pusat kekuasaan. Dan kecenderungan yang terjadi selama ini, malahan para praktisi media massa termasuk para konglomerat media massa di Tanah Air berkeinginan kuat menjadi penguasa politik. Entah dengan bergabung atau mendirikan organisasi politik atau dengan mendeklarasikan keikutsertaannya dalam pesta demokrasi 5 tahunan bernama Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah.

Menurut pandangan penulis, model pers semacam ini disebut sebagai "Pers Kontemporer". Di mana pers menjadi alat meraup keuntungan (bisnis) sekaligus sebagai jembatan politik untuk menguasai kursi-kursi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Klop dengan teori ekonomi politik media yang pernah disodorkan oleh para tokoh *Frankfurt School* Jerman, menekankan adanya misi bisnis dan misi politik yang tersembunyi di balik industri media

massa. Di mana dalam praktiknya, para konglomerat media massa menggunakan perusahaan yang dimiliki sebagai “ladang bisnis” sekaligus “alat politik” untuk mendapatkan kekuasaan. Akibatnya, keprofesionalitasan para praktisi media massa (terutama wartawan) menjadi hilang, sebab terdekete oleh kepentingan para pemilik modal (pengusaha media massa).

Pertanyaan yang kerap kali muncul, apakah sebaiknya para politikus dilarang keras memiliki perusahaan media massa? Pertanyaan ini sesungguhnya sebagai refleksi kolektif atas kekhawatiran publik mengenai keprofesionalitasan media massa dalam menyampaikan berbagai informasi, yang dinilai sangat bias seiring dengan kepentingan para pemilik media massa yang bersangkutan. Pertanyaan di atas akan mudah dimentahkan, sebab setiap orang bebas dan berhak mendirikan perusahaan media massa; tanpa peduli status atau latar belakang profesi setiap orang. Artinya, para politikus memiliki hak yang terbuka lebar untuk memiliki berbagai perusahaan media massa. Yang ditekankan untuk diatur adalah bagaimana agar para politikus tersebut tidak menyalahgunakan perusahaan media massa yang dimiliki untuk kepentingan pribadi dan tidak mengakomodasi kepentingan kolektif.

Herman dan Chomsky (2000) pernah menyatakan bahwa para elit kekuasaan dan elite bisnis berkolaborasi mengatur isi media, sehingga berakibat pada penyusupan corong-corong propaganda oleh segelintir orang dalam kebebasan pers yang dijiwai demokrasi dan liberalisme. Chomsky, kritikus keturunan Yahudi yang sangat vokal dalam mengkritisi berbagai kebijakan yang digulirkan pemerintahan Amerika Serikat, mengalisis adanya konspirasi para elite yang melakukan kontrol pemberitaan dan informasi; sehingga media menjadi alat kepetingan politik, militer, ekonomi, dan kultur kalangan eksklusif. Dan para wartawan sekadar dijadikan “pion politikus” dan industriawan untuk mencari keuntungan. Dengan lain kata, atas nama kepentingan bangsa, para penguasa mengatur pemberitaan sesuai dengan keinginan mereka. Adapun atas nama pertumbuhan ekonomi, para pebisnis melakukan hal sama.

Namun belajar dari kasus lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto pada Mei 1998, ternyata kemampuan mengontrol kebudayaan dan politik melalui kepemilikan, pelarangan dan sensor media massa tidak mampu menjamin secara sempurna atas kontrol terhadap konten yang memang telah menjadi kebutuhan dari masyarakat yang berubah menuju demokrasi. (\*)

## KPI dan Cetak Biru Penyiaran<sup>2</sup>

**M**asa jabatan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Periode 2013-2016 secara resmi akan habis pada akhir Juli 2016 mendatang. Kini Panitia Seleksi Calon Anggota Komisioner KPI Periode 2016-2019 bersama dengan Komisi I DPR RI secara estafet tengah melakukan rekrutmen komisioner KPI. Tak disangka-sangka, di tengah badai kritik dan pandangan sinis terkait eksistensi KPI; ternyata animo masyarakat mendaftar menjadi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat cukup tinggi.

Mereka berasal dari berbagai disiplin ilmu, profesi, suku, daerah, agama, maupun gender. Terbukti sejak dibuka pendaftaran pada 12-26 April 2016 ada 689 pelamar yang mengajukan aplikasi ke Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2016-2019. Dari ratusan pelamar tersebut, terdapat 5 komisioner KPI Pusat 2013-2016 (petahana) yang maju lagi, dan juga para petahana komisioner KPID dari berbagai daerah.

Meskipun setelah diseleksi Tahap I (persyaratan administratifnya) yang lolos hanya sebanyak 201 pelamar saja. Pada seleksi tahap II (penilaian tulisan pribadi) yang lolos tinggal 118 pendaftar. Setelah diadakan seleksi tahap III (tes psikologis), para pelamar yang dinyatakan lolos sebanyak 47 orang saja. Dari 47 nama tersebut, hanya ada 1 petahana komisioner KPI Pusat yang lolos dan sejumlah petahana komisioner KPID; sedangkan sisanya rata-rata berprofesi sebagai akademisi, peneliti, tokoh masyarakat, dan para aktivis. Adapun 47 pelamar yang lolos tersebut sudah mengikuti seleksi wawancara di hadapan Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Periode 2016-2019 pada 13 Juli 2016 kemarin.

---

<sup>2</sup> Supadiyanto. (2016). *KPI dan Cetak Biru Penyiaran*. Harian Bernas edisi 25 Juni 2016.

Hasilnya, pada tanggal 27 Juni 2016 Panitia Seleksi melalui Menteri Komunikasi dan Informatika RI menyerahkan sebanyak 27 kandidat kepada Komisi 1 DPR RI untuk diadakan uji publik. Dari 27 pelamar tersebut nanti Komisi 1 DPR RI akan menjatuhkan pilihan (menetapkan) sebanyak 9 calon komisioner KPI Pusat yang akan diserahkan dan ditetapkan oleh Presiden RI (Joko Widodo).

Publik memiliki kepentingan utama untuk mengawal agar Panitia Seleksi dan DPR RI benar-benar bisa menghasilkan para komisioner KPI Pusat yang baru nanti profesional. Kegamangan (bayang-bayang dari rasa ketakutan) yang dimiliki oleh para komisioner KPI Pusat dalam menegakkan regulasi di bidang penyiaran di negeri ini, tentu bisa merugikan publik. Mengingat keberadaan lembaga penyiaran baik radio maupun televisi saat ini sangat strategis dan vital dalam mempengaruhi keputusan para elit politik dan tokoh masyarakat. Bahkan keberadaan lembaga penyiaran juga sangat berpengaruh besar pada perilaku dan gaya hidup masyarakat luas. Karena efek terpaan isi media penyiaran yang bisa melampaui batas wilayah maupun batas negara ini, menjadikan media penyiaran memiliki karakteristik khusus. Soal perizinan (legalitas), soal dampak isi siaran, dan soal cetak biru penyiaran nasional hingga kini masih menjadi problematika serius yang dihadapi bangsa ini. Lemahnya kewenangan KPI Pusat maupun Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam menegakkan regulasi di bidang penyiaran, mengakibatkan progresivitas para komisioner KPI dalam menindak berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran (khususnya swasta dan berlangganan) cukup rendah.

Menurut hemat penulis, para komisioner KPI Pusat 2016-2019 yang nanti terpilih memiliki pekerjaan besar berhubungan dengan regulasi penyiaran dan upaya penegakannya. Para komisioner baru KPI Pusat yang terpilih harus menguasai dan memahami hal-hal sebagai berikut ini:

Pertama, mereka harus menguasai secara mendalam mengenai regulasi di bidang penyiaran sekaligus mendukung lahirnya regulasi baru di bidang penyiaran. Regulasi-regulasi di bidang penyiaran tidak cukup hanya dipahami saja, namun juga

harus memahami bagaimana implementasinya di lapangan. Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang selama ini menjadi tulang punggung dalam dunia penyiaran, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi penyiaran yang beralih ke ranah digital.

Pengembangan media penyiaran berbasis pita lebar (*broadband*) dengan memanfaatkan jaringan kabel fiber optik menjadi keniscayaan yang tidak bisa dibendung lagi. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang sudah meluncurkan proyek Palapa Ring Barat di Batam pada medio Juni 2016, menjadi babak baru dalam bidang telekomunikasi, media, dan penyiaran itu sendiri. Proyek Palapa Ring Barat tersebut akan diintegrasikan dengan Proyek Palapa Ring Tengah dan Timur. Dengan begitu, seluruh kabupaten/kota se-Indonesia akan dilalui jaringan kabel fiber optik. Fiber optik merupakan saluran transmisi terbuat dari serat kaca/plastik; di mana teknologi ini mampu mengirimkan data dalam bentuk audio, visual, maupun multimedia dengan kecepatan cahaya. Adapun teknologi ini dimanfaatkan untuk keperluan koneksi Internet, telpon, media penyiaran, bisnis dan sebagainya dengan keluaran (*out put*) yang sempurna jika dibandingkan dengan teknologi analog. Untuk sederhananya, jaringan fiber optik itu ibarat jalan tol (*raya*) yang menghubungkan berbagai kota/kabupaten, provinsi, bahkan lintas negara di dunia ini melalui kabel fiber optik bawah laut (*samudera*).

Tentunya teknologi ini akan mengubah bagaimana perilaku dan konsumsi bermedia baik cetak, elektronik, maupun online; termasuk media penyiaran sendiri. Logislah kalau kemudian regulasinya pun harus disinergisasikan dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini. Dengan peralihan teknologi analog menuju digital ini, ada banyak peluang usaha dan potensi bisnis yang bisa digarap untuk menggerakkan sektor perekonomian nasional khususnya. Termasuk juga untuk menggerakkan sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, dan sebagainya. Pengaturan masalah ini agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial dibutuhkan peran sentral negara (*pemerintah*) dan seluruh elemen masyarakat.



Kedua, kini usia KPI Pusat sudah 13 tahun (berdiri sejak 2003 sampai sekarang). Namun hingga sekarang belum ada catatan sejarah mengenai penindakan tegas secara hukum yang dilakukan oleh KPI Pusat. KPI Pusat belum pernah sekalipun melakukan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) yang dimiliki oleh berbagai lembaga penyiaran yang selama ini dinilai melakukan pelanggaran serius. Artinya, para komisioner KPI Pusat selama ini "tidak memiliki nyali" untuk merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi RI untuk mencabut IPP sejumlah lembaga penyiaran bermasalah.

Bahkan belum pernah ada catatan dari kinerja komisioner KPI Pusat memberikan denda administratif yang besarnya bisa sampai miliaran rupiah yang diberikan kepada lembaga penyiaran yang pernah melanggar. Masalah ini lebih kepada keberanian dalam menggunakan kewenangan KPI "yang terbatas". Memang secara regulasi, KPI Pusat tidak memiliki hak untuk mencabut ataupun memberikan IPP (baik baru maupun perpanjangan). IPP menjadi otoritas dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI.

Inilah persoalan serius yang sesungguhnya harus "digugat". KPI sebagai representasi dari rakyat (masyarakat) bidang penyiaran, artinya posisinya sejajar dengan keberadaan para wakil rakyat di legislatif (DPR/DPD/DPRD), seharusnya memiliki otoritas penuh untuk mengatur mengenai IPP (termasuk perizinan) ini. Adanya dualisme dalam bidang perizinan penyiaran ini, yang selama ini menjadi pemicu rendahnya kewenangan dan posisi tawar KPI/D di mata para pengelola Lembaga Penyiaran (Lembaga Penyiaran Publik/LPP, Lembaga Penyiaran Swasta/LPS, Lembaga Penyiaran Berlangganan/LPB, maupun Lembaga Penyiaran Komunitas/LPK).

Keberanian para komisioner KPI Pusat yang baru harus berani mendukung penguatan institusi KPI/D melalui reformasi regulasi penyiaran yang baru yaitu dengan memasukkan klausula KPI/D memiliki otoritas penuh untuk memberikan maupun mencabut IPP (baru dan perpanjangan). Sikap tegas ini menjadi solusi cerdas untuk mengatur industri media penyiaran

di Tanah Air yang selama ini hanya dikuasai oleh sejumlah pemilik modal saja.

Ketiga, para komisioner KPI Pusat yang terpilih nanti juga harus memiliki cetak biru penyiaran nasional. Selama ini bangsa ini sama sekali belum memiliki cetak biru atau arsitektur penyiaran di negeri ini. Dominasi 13 grup raksasa media (Kompas Gramedia Group, Jawapos Group, MNC Group, Media Indonesia Group, dll.) yang menguasai industri media massa di Indonesia saat ini, menunjukkan betapa regulasi penyiaran kita masih sangat "liberalis-kapitalis". Sementara penguatan terhadap LPP maupun LPK yang selama ini tertelindas oleh superioritas LPS dan LPB, masih sangat rendah. Keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam bidang bisnis media memang harus segera ditegakkan, sebab jika hal itu gagal dilakukan; niscaya masa depan demokrasi di negeri ini terancam.

Semoga Komisi 1 DPR RI yang menjadi palang pintu terakhir dari penentuan 9 nama komisioner KPI Pusat Periode 2016-2019 yang baru, terbuka kesadarannya untuk itu. KPI adalah lembaga negara independen yang sangat strategis dalam menentukan peradaban bangsa ini. Di tengah gempuran media asing merunyam di Indonesia, sementara media nasional dan media lokal semakin "tidak karuan" isi siarannya; KPI menjadi harapan terakhir untuk memperbaiki kondisi media penyiaran kita. Harapan baru itu terletak pada 9 komisioner baru KPI Pusat 2016-2019 yang terpilih. Rakyat menanti gebrakan, segera! (\*)

## Masalah Baru Regulasi Penyiaran Digital<sup>3</sup>

**B**erbicara masalah penyiaran digital—memang sangat krusial (pelik). Berbeda dengan penyiaran analog. Pasalnya hingga kini belum ada landasan hukum yang kuat (kokoh) untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Secara hukum, regulasi bidang penyiaran di negeri ini belum cukup akomodatif dan implementatif terhadap penyiaran berbasis digital. Sebab selama ini regulasi penyiaran yang dipakai masih bersifat analog (konvensional).

Salah satu watak regulasi (peraturan/norma/hukum) yaitu harus bersifat visioner, memberikan kepastian hukum, dan mampu mengantisipasi berbagai kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi, media, dan informatika, grafika, dan transportasi (Telematikagrtrans). Kecepatan temuan teknologi baru dalam bidang Telematikagrtrans begitu luar biasa, sementara faktanya tidak diikuti dengan temuan lahirnya hukum (regulasi) baru yang mengatur mengenai kemaslahatan dari implementasi berbagai Telematikagrtrans tersebut.

Bila hukum penyiaran tidak tanggap zaman, dapat dipastikan percepatan pembangunan di bidang penyiaran juga tertinggal jauh dari negara tetangga yang sudah mengandalkan penyiaran berbasis digital dan fiber optik. Dengan demikian, penyiaran berbasis digital adalah sebuah keharusan, tuntutan zaman yang tidak bisa dihindarkan lagi. Penyiaran digital adalah keniscayaan di masa kini dan yang akan datang.

Di tengah belum jelasnya nasib penyiaran digital tersebut, namun secara tiba-tiba kita dikejutkan dengan langkah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Rudiantara mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

---

<sup>3</sup> Supadiyanto. (2016). *Masalah Baru Regulasi Media Penyiaran (Bagian 1 dan 2)*. Harian Bernas edisi 13 Juli dan 14 Juli 2016.

(Permenkominfo) RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran pada 8 April 2016. Bersamaan itu Menkominfo RI menunjuk langsung TVRI untuk melakukan ujicoba peralatan penyiaran “digital” bekerjasama dengan 36 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebagai penyedia program siaran (konten). Argumentasi (dalih) yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menerbitkan Permenkominfo RI yang baru tersebut adalah untuk kepentingan penelitian aspek teknis maupun non teknis terkait penyelenggaraan telekomunikasi, informatika, dan penyiaran.

Padahal kalau dicermati detail, tidak ada satu katapun pada seluruh pasal dalam Permenkominfo RI yang baru tersebut menyebut kata “digital”. Namun banyak pihak yang meyakini Permenkominfo RI yang baru tersebut menjadi dasar hukum untuk melangsungkan penyiaran berbasis digital. Aneh, memang! Jauh sebelumnya, Permenkominfo RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) yang dikeluarkan oleh Menkominfo RI waktu itu (Tifatul Sembiring) pada 22 November 2011 telah dibatalkan oleh PTUN Jakarta Timur dalam sidang putusan perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT pada 5 Maret 2015. Berkat gugatan dari Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) yang diwakili oleh Bambang Santoso (Ketua) dan Mohammad Agung Dharmajaya (Sekretaris Jenderal) serta Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) diwakili Imawan Mashuri (Ketua); akhirnya Permenkominfo RI di atas akhirnya membatalkan 33 Keputusan Menteri (Kepmen) tentang Lembaga *Multiplexing* (MUX) yang berlaku di Indonesia.

Sampai sekarang pemerintah melalui Menkominfo RI masih melakukan upaya hukum (jalur kasasi) di Mahkamah Agung, di mana hasilnya masih nihil sampai sekarang. Padahal pemerintah sudah terlanjur menerbitkan ratusan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada berbagai Lembaga Penyiaran Digital. Khusus di DIY ada 22 Lembaga Penyiaran Digital di mana sebagian sudah menerima IPP dan siap melakukan uji coba siaran namun terkendala karena tidak memperoleh kanal dari pemegang MUX. Hingga kini, sebagai

konsekuensi dari putusan hukum yang belum tetap, Menkominfo RI menghentikan (menunda) proses penyiaran digital di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah layanan siar Yogyakarta dan sekitarnya.

Kebijakan Menkominfo memberikan otoritas pada para pemegang MUX (kepada 33 Lembaga Penyiaran Digital) yang *notabene*-nya adalah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) atau yang dikenal dengan istilah LPS "*eksisting*" dinilai tidak memberikan keadilan sosial dalam berbisnis media penyiaran khususnya bagi para pengelola Lembaga Penyiaran Swasta Lokal (LPSL).

Kini Menkominfo RI menunjuk TVRI sebagai representasi dari "negara" untuk mencoba bersiaran digital. Menurut hemat penulis, langkah Menkominfo RI tersebut kurang tepat. Seharusnya pemerintah dan DPR RI justru mempercepat lahirnya UU Penyiaran yang baru. Ketika Menkominfo RI hanya menunjuk sebanyak 36 LPS untuk menyuplai isi siaran yang ditayangkan oleh "TVRI digital"; bisa memicu kecemburuan sosial bagi lembaga penyiaran lainnya yang tidak dilibatkan dalam uji coba teknologi telekomunikasi, informatika, dan penyiaran tersebut sejak medio Juni sampai Desember 2016 mendatang.

Artinya, kebijakan tersebut riskan digugat oleh sejumlah elemen masyarakat sebab tidak memberikan kesempatan sama bagi setiap kalangan masyarakat dalam menggunakan hak bermedia. Pada satu sisi, saat ini masih sangat sedikit tersedia peralatan pendukung untuk menerima siaran digital. Televisi yang beredar dan dimiliki oleh masyarakat di negeri ini masih analog, sehingga membutuhkan alat bantu bernama *Set Top Box (STB)* atau semacam konverter untuk bisa menangkap sinyal digital melalui televisi analog. Artinya kesiapan pemerintah termasuk pihak kedua (swasta) dalam menyediakan STB belum ada. Pabrik atau perusahaan televisi berteknologi *Digital Video Broadcasting (DVB-T)* juga belum masif, bahkan banyak toko peralatan elektronik yang ragu (takut) menjajakan televisi berteknologi baru (digital) tersebut sebab tidak laku di pasaran. Sebelum semua peralatan teknologi pendukung penyiaran digital tersebar merata di tengah masyarakat tersedia, sebaiknya uji

coba teknologi penyiaran digital dilakukan secara terbatas saja dulu (dengan model *pilot project*) dan sekaligus menunggu regulasi induknya terlahir (ada).

Sebab ketika belum tersedia regulasi yang jelas, kepastian hukum di bidang media penyiaran menjadi belum ada. Mengingat industri media penyiaran merupakan industri yang sangat rakus akan modal (kapital), padat tenaga kerja (sumber daya manusia), dan padat teknologi; pemerintah yang berkuasa harus lebih bijaksana dan tidak tergesa-gesa (*grusa-grusu*) dalam mengeksekusi kebijakan penyiaran digital.

Apalagi saat ini akan terjadi pergantian "kekuasaan" di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, mengingat masa kepengurusan KPI Pusat bakal habis sebentar lagi. Peran para komisioner KPI Pusat dalam mengarsiteki terciptanya tatanan bisnis media penyiaran yang pro publik dan memberdayakan masyarakat sangat penting dan strategis.

Melihat draf RUU Penyiaran baru yang santer beredar belakangan ini (dalam dua versi), menunjukkan sejumlah keprihatinan terkait masa depan KPI/D yang hanya akan diposisikan sebagai "polisi isi siaran" saja. Sedangkan masalah legalitas pengurusan pendirian perusahaan media penyiaran diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah melalui Menkominfo RI. Publik harusnya berperan aktif dalam mengawal terciptanya regulasi di bidang penyiaran yang bisa memberikan keadilan sosial dan perlindungan hukum yang kuat kepada para audiens dari terpaan informasi dan siaran yang merugikan (buruk).

Sejatinya ada banyak pasal krusial muncul dalam draf RUU Penyiaran baru yang bisa membahayakan masa depan penyiaran dan kedaulatan negeri ini. Salah satunya bolehnya pihak asing memiliki saham perusahaan di media penyiaran di Indonesia sampai angka 20 persen. Tentunya, kepemilikan saham asing dalam industri media massa di Indonesia akan berpengaruh besar pada kebijakan redaksional maupun korporasional pada perusahaan "blasteran" tersebut. Terbukti saat ini saja sejumlah lembaga penyiaran swasta sudah beramai-ramai menyiarkan program siaran asing dari India, Amerika Serikat, Turki, Korea, China, dan sebagainya.



Kembali lagi kepada masalah pokok mengenai regulasi penyiaran digital, sesungguhnya negeri ini sudah tertinggal jauh dari negara-negara lain. Malaysia sudah duluan melangkah maju dengan bersiaran digital sejak 1998. Sementara Singapura mulai tahun 2004. Jerman telah mencoba siaran digital sejak tahun 2003 di Berlin, dan dua tahun kemudian di Munich. Menyusul Inggris, pada tahun 2005 sudah memulai memberlakukan siaran digital dan mematikan siaran analog. Amerika Serikat sendiri sudah berkomitmen bersiaran digital pada 17 Februari 2009. Meskipun negeri ini sudah tertinggal jauh, bukan berarti langsung boleh "menghalalkan" segala cara untuk bersegera bersiaran digital. Benahi dahulu regulasi di bidang penyiaran. Bila memang belum ada regulasinya, langkah yang harus dilakukan yakni membuat regulasinya terlebih dulu dengan menyinergikan berbagai regulasi yang berhubungan dengan dunia penyiaran, telekomunikasi, pers, dan informasi publik.

Sebagaimana diketahui bersama, induk regulasi penyiaran digital saat ini belum ada. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah berulang kali akan diganti, hingga kini masih belum jelas nasib kepastiannya. Memang DPR RI 2014-2019 saat ini tengah menggodok RUU baru menggantikan UU RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang pernah ditarget masuk Program Legislatif Nasional (Prolegnas) dan dipatok selesai akhir tahun 2015; realitasnya hingga sekarang belum juga tuntas. Logislah, regulasi penyiaran digital masih pelik hingga sekarang. Menkominfo RI jangan memperpelik masalah dengan mengeluarkan Permenkominfo RI atau produk hukum lainnya yang justru "kontraproduktif nan kontroversial". (\*)

## Masa Depan LPP TVRI dan RRI<sup>4</sup>

**K**ita patut prihatin atas nasib Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI sekarang. Ada empat persoalan berat menimpa LPP TVRI dan RRI. Pertama, minimnya pemirsa/pendengar yang loyal. Keoknya mutu siaran TVRI dan RRI jika dibandingkan dengan berbagai stasiun televisi dan radio swasta memicu rendahnya audiens mengakses dua lembaga penyiaran plat merah itu. Kalah bersaingnya LPP TVRI dan RRI dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) seiring banyaknya pilihan suguhan acara yang dimiliki. Penonton dan pendengar pun saat ini bebas memilih acara yang disukai cukup dengan menekan tombol atau menggeser kanal.

Masalah kedua yaitu masalah regenerasi karyawan TVRI dan RRI. Hal ini menjadi masalah besar sejak 19 tahun terakhir (1998-sekarang). Karena sejak Orde Reformasi sampai sekarang, manajemen LPP TVRI dan RRI dilarang melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Akibatnya, proses regenerasi atau peremajaan pegawai LPP TVRI dan RRI menjadi stagnan. Mayoritas pegawai LPP TVRI dan RRI kini telah berusia "sepuh". Sebagai gambaran, jumlah pegawai TVRI saja sudah mencapai 6.000 orang. Tingginya usia pegawai di atas 50 tahun mengakibatkan aspek produktivitas, kreativitas, dan inovasi menjadi rendah. Sebagai contoh TVRI Yogyakarta, saat ini memiliki 245 pegawai terdiri atas 130 pegawai berusia di atas 50 tahun (53,1 persen), 48 pegawai berusia 46-50 tahun (19,6 persen), sisanya berada direntang usia 25-45 tahun. Tantangan ini menjadi kendala berat bagi pihak manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai mengingat faktor usia "senja" tersebut.

Jumlah pegawainya yang "gemuk" juga memicu terjadinya pemborosan belanja pegawai. Bandingkan dengan postur

---

<sup>4</sup> Supadiyanto. (2017). *Masa Depan LPP TVRI dan RRI*. Harian Bernas edisi 21 Juli 2017.

manajemen sebuah TV Swasta nasional hanya memiliki 800 pegawai, namun mampu bersiaran selama 24 jam/hari dan memiliki 50 lokasi transmisi/pemancar. Sementara dana operasional yang dihabiskan hanya sebesar Rp 500–600 miliar per tahun. Berbeda dengan manajemen TVRI yang setiap tahunnya menghabiskan dana lebih dari Rp 1 triliun. Tentunya perkara ini menjadi masalah kronis yang harus segera ditanggulangi oleh manajemen TVRI. Problematika serupa juga menimpa RRI, karena memiliki pegawai yang sebagian besar berusia "senja".

Ketiga, persoalan serius yang dihadapi LPP TVRI dan RRI adalah pemborosan anggaran operasional. Anggaran operasional TVRI selama tahun 2016 tercatat Rp 1.065.527.291.000. Sementara RRI menelan Rp 945.702.910.000. Itupun LPP TVRI masih berutang sebesar Rp Rp 140.688.690.813. Jika dianalisis, sebagian besar anggaran operasional TVRI dan RRI tersebut habis digunakan untuk biaya belanja pegawai. Ingat, karyawan TVRI dan RRI secara nasional berjumlah sangat besar, wajar harus dirampingkan. Rencana penggabungan manajemen TVRI dan RRI (RTRI) melalui pelahiran Rancangan Undang-Undang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang saat ini tengah digodok oleh Komisi I DPR RI berbarengan dengan RUU Penyiaran baru, menjadi langkah strategis untuk melakukan efisiensi dan perampingan pegawai LPP TVRI dan RRI.

Terakhir, persoalan serius yang dihadapi TVRI dan RRI adalah merebut pasar iklan. Berdasarkan data Nielsen 2016, belanja iklan televisi nasional masih didominasi kelompok MNC Group yaitu RCTI memperoleh pendapatan iklan sebesar Rp 9,9 triliun, MNCTV Rp 7,9 triliun, Global TV Rp 5,4 triliun. Sementara Indosiar memperoleh Rp 7 triliun, SCTV Rp 8,8 triliun, Trans TV Rp 4,525 triliun, Trans 7 Rp 4,525 triliun, ANTV Rp 6,6 triliun, Kompas TV Rp 1,3 triliun, NET Rp 1 triliun, dan TVRI Rp 44,4 miliar. Ternyata perolehan pendapatan iklan TVRI jauh tertinggal dari pendapatan iklan milik NET yang terbilang pemain baru. Memang besar atau kecilnya pendapatan iklan dari sebuah stasiun televisi maupun radio sangat bergantung berapa banyak jumlah pemirsa atau pendengar yang loyal kepada

program-program yang ditayangkan/disiarkan oleh stasiun televisi maupun radio. Kemampuan para pekerja media dalam memproduksi dan menyiarkan program-program yang mampu memenuhi kebutuhan akan hiburan, informasi, dan pendidikan, serta kontrol sosial menjadi kunci bagi manajemen televisi maupun radio untuk memikat hati pemirsa maupun pendengar. Lantas berefek pada besarnya pemasang iklan yang memasang di media bersangkutan.

Manajemen LPP TVRI dan RRI memiliki kelemahan dalam hal pemasaran, dan sisi tersebut menjadi pekerjaan berat yang harus segera teratasi dengan baik. Di luar negeri, pengelolaan lembaga penyiaran publik sebagian besar dengan mengandalkan iuran penyiaran dan memiliki pangsa pasar cukup tinggi. Radio BBC di Inggris didanai dari iuran penyiaran dan memiliki *market share* sebesar 57,7 persen. Sama halnya pengelolaan *ARD&ZDF* di Jerman, *RAI* di Italia, *Swedish Radio/TV* di Swedia. Australia memiliki *ABC&SBS*, *MTV/MR* di Hungaria, *NPO* di Belanda, dan *ERR* di Estonia mengandalkan pajak dan APBN sebagai sumber pembiayaannya operasionalnya (Masduki, 2017).

Agar lebih prospektif, TVRI dan RRI ke depan (*quo vadis*) harus didesain dengan model pengelolaan manajemen lembaga penyiaran publik yang idealnya disuplai pendanaan oleh publik sekaligus APBN. Jadi tidak hanya mengandalkan dari pendanaan APBN saja; sehingga kebijakan tersebut dapat lebih mendekatkan rasa kepemilikan pemirsa dan pendengar di Nusantara terhadap LPP TVRI dan RRI. Tentu saja semuanya bergantung pada para pemegang kebijakan bernegara dan kesungguhan dari publik sendiri untuk lebih mencintai LPP TVRI dan RRI. (\*)

## Media Penyiaran untuk Kedaulatan NKRI<sup>5</sup>

**T**ulang punggung hukum penyiaran selama ini menggunakan regulasi berbasis analog, segera berganti ke regulasi baru berbasis digital. Kini Komisi 1 DPR RI tengah menyusun draf Undang-Undang Penyiaran baru. Eksistensi Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran dipandang tidak relevan lagi sesuai tuntutan zaman. Kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika, grafika, dan transportasi (Telematikagrtrans) berjalan sangat pesat. Sementara problematika dalam industri media penyiaran sangat kompleks karena berbenturan dengan masa depan demokrasi dan kedaulatan bernegara.

Media penyiaran menjadi kunci strategis dalam menjamin kedaulatan bernegara. Prihatin, saat ini berbagai media penyiaran menyiarkan berbagai konten negatif berpotensi mengancam kedaulatan bernegara. Ada lima model program/tayangan media penyiaran yang mengguncang kedaulatan bernegara. *Pertama*, konten pornografi. *Kedua*, tayangan sarat dengan kekerasan verbal maupun non verbal. *Ketiga*, tayangan berita-berita tendensius, tidak netral, dan cenderung menyesatkan (*hoax*). *Keempat*, tayangan/program asing dari Amerika Serikat, India, Turki, Korea Selatan, China, Malaysia. *Kelima*, tayangan-tayangan iklan pengobatan alternatif yang menyesatkan publik.

Lima jenis tayangan media penyiaran di atas, jelas berdampak negatif pada perilaku audiens (penonton dan pendengar). Terutama bagi kelompok audiens yang berada di rentang usia anak-anak maupun remaja. Di sinilah perlunya regulasi bidang penyiaran yang bersifat tegas; sehingga mampu menjamin publik mendapatkan informasi menyehatkan dan mencerdaskan. Untuk menjamin media penyiaran terbebas dari lima jenis konten

---

<sup>5</sup> Supadiyanto. (2017). *Media Penyiaran untuk Kedaulatan NKRI*. Harian Jogja edisi 4 Mei 2017.

media penyiaran berbahaya di atas, hanya bisa dilakukan dengan menempuh lima langkah kebijakan terintegrasi.

*Satu*, penyusunan Undang-Undang Penyiaran yang baru; sebagai bentuk pembaruan atas UU Nomor 32/2002. Saat ini Komisi I DPR RI tengah menyusun draf Undang-Undang Penyiaran yang baru, diharapkan regulasi tersebut menjamin terwujudnya kualitas media penyiaran, menjaga kedaulatan bernegara, dan menjamin kesejahteraan pekerja media. *Dua*, para penegak hukum harus tegas menegakkan regulasi media penyiaran dan pers.

*Tiga*, kesadaran para pekerja media dalam mengimplementasikan regulasi-regulasi penyiaran. Banyaknya pelanggaran yang masih dijumpai dalam berbagai tayangan di media televisi maupun radio menunjukkan rendahnya kesadaran para pekerja media dalam menerapkan regulasi media. *Empat*, kekritisan para pemirsa dan pendengar media penyiaran dalam menyikapi tayangan-tayangan media. Audiens yang kritis dan berani bersikap dengan melaporkan temuan-temuan mereka ke berbagai lembaga penegak hukum media penyiaran, menjadi langkah penting untuk menjamin terselenggaranya kualitas media penyiaran ideal. Tanpa keterlibatan audiens dalam mengkritisi isi siaran; mustahil para penegak hukum media penyiaran bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. *Lima*, para pengiklan harus semakin selektif dalam mensponsori atau memajang iklan pada program-program acara yang mencerdaskan; bukan sekadar memajang iklan pada tayangan-tayangan yang paling banyak digemari audiens.

Dominasi kepemilikan berbagai perusahaan media penyiaran oleh segelintir pengusaha, berdampak pada penyeragaman konten oleh media berjaringan. Akibatnya, audiens dipaksa menikmati isi siaran serupa (seragam). Program "Jakartanan" dan program asing mendominasi isi media penyiaran berjaringan. Inilah yang mengancam program-program siaran lokal (daerah). Minimnya stasiun-stasiun televisi berjaringan (berinduk di Jakarta) menayangkan program siaran lokal membuktikan kedaulatan para pekerja media lokal-berjaringan di daerah sangat tergantung pada kebijakan pemilik modal. Hal ini menyebabkan konten-konten media penyiaran tidak diproduksi



para pekerja media lokal, tidak pula mengangkat potensi daerah lokal. Buruknya, tayangan yang disuguhkan tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Jika hal ini didiamkan, media penyiaran khususnya televisi berjaringan hanya menjadi panggung bagi pemilik modal, penguasa, dan selebriti di Jakarta, bahkan mancanegara. Mengingat media penyiaran (televisi dan radio) memiliki implikasi strategis dalam membentuk watak dan karakter audiens, serta menjamin kedaulatan bernegara; seharusnya para pemegang kebijakan di negeri ini memprioritaskan lahirnya regulasi penyiaran yang demokratis, dan berkeadilan sosial. Silang sengkabut regulasi-regulasi media penyiaran selama ini harus diakhiri dengan menyusun arsitektur hukum penyiaran yang lebih komprehensif, visioner, dan pro publik. Media penyiaran kita harus menjamin kedaulatan NKRI. Bukan sebaliknya, justru mengancam kedaulatan bernegara. (\*)

## Politisasi Media Massa<sup>6</sup>

**D**i zaman Orde Reformasi, media massa menjadi sangat liberal (bebas), bahkan berubah menjadi kekuatan yang ampuh dalam mengontrol pusat-pusat kekuasaan. Kecenderungan yang terjadi selama ini, malahan para praktisi media massa termasuk para konglomerat media massa di Tanah Air berkeinginan menjadi penguasa politik. Entah dengan bergabung atau mendirikan organisasi politik atau dengan mendeklarasikan keikutsertaannya dalam pesta demokrasi lima tahunan bernama pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilu kepala daerah.

Dari analisis politik, pemilu dan pilkada merupakan agenda lima tahunan yang menjadi ajang pertarungan politik paling nyata antara para politikus, pemilik modal (pebisnis), akademikus, peneliti dan massa. Sah-sah saja para pemilik media massa memiliki kepentingan besar dalam berbagai momentum politik berupa pesta demokrasi. Sebab hajatan politik berupa pemilu dan pilkada, akan mengubah tatanan politik dalam skala nasional dan lokal. Implikasinya sangat luas, pergantian kepemimpinan nasional maupun lokal berpengaruh besar pada berbagai kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan hingga pertahanan dan keamanan.

Dalam teori ekonomi politik media, sebuah gagasan yang dimunculkan oleh kelompok pemikir dari *Frankfurt School* Jerman, menyatakan bahwa berbagai kebijakan redaksional yang digulirkan oleh perusahaan-perusahaan media massa sangat terdektesi oleh berbagai kepentingan ekonomi (bisnis) dan kepentingan politik (kekuasaan) dan menihilkan pengaruh idealisme dalam mendirikan media massa.

---

<sup>6</sup> Supadiyanto. (2013). *Politisasi Media Massa*. Suara Karya edisi 25 Juni 2013. Diekspos juga di situs milik Bawaslu Jateng dan Rumah Pemilu.

Hal ini menyebabkan adanya fenomena persekongkolan (konspirasi) antara para politikus dan pengusaha media massa. Sebab para politikus memiliki kepentingan untuk mempublikasikan berbagai pemikiran dan gagasannya agar diketahui publik, sedangkan media massa membutuhkan sumber-sumber berita yang mampu menarik minat dari kalangan pembaca, pendengar dan pemirsa.

Dengan terjunnya para pengusaha media massa (konglomerat media), teori politik ekonomi media massa tersebut seolah lebur dalam satu pihak. Kini para pengusaha media massa itu sekaligus yang menjadi politikusnya.

Artinya, mereka akan menggunakan perusahaan media massa yang dimiliki sebagai alat propaganda. Yakni menyosialisasikan berbagai manuver-manuver politik maupun nonpolitik yang dimiliki oleh pengusaha media massa yang telah berprofesi ganda menjadi politikus tersebut, untuk merealisasikan keinginan atau cita-cita (ambisi) politik para pemilik media massa atas kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Politik hegemoni dan hegemoni politik akan mendera kehidupan bangsa ini, ketika negeri ini dikuasai oleh para politikus yang notabene-nya para pemilik atau konglomerat media massa. (\*)

## **Hoaks dan Cerdas Bermedia<sup>7</sup>**

**H**oaks artinya cerita bohong atau olok-olokan (Kamus Inggris-Indonesia). Dalam kaidah jurnalistik, berita bohong bertentangan dengan semangat Undang-Undang RI Nomor 40/1999 tentang Pers, Undang-Undang RI Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, dan 10 Elemen Jurnalisme (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, 2006, 2007). Berita bohong dalam konteks agama artinya fitnah. Nyatanya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan.

Hukum di Indonesia sudah akomodatif dalam mengantisipasi dampak *hoaks*. Ironisnya, penegakan hukum atas regulasi tersebut oleh para penegak hukumnya masih lemah. Termasuk masyarakat memiliki kesadaran rendah dalam memerangi *hoaks*. Padahal berita bohong dapat menyebabkan kriminalitas, korupsi, dan kejahatan lain.

Masyarakat kini mudah mendapatkan beragam informasi dari banyak sumber. Dari telpon seluler, televisi, radio, surat kabar, media daring, media sosial, maupun perangkat elektronik (gawai) lain. Era Revolusi Industri babak ke-4 (RI 4.0) ditandai dengan pendigitalisasian teknologi pada berbagai sektor kehidupan, mengakibatkan terjadinya luapan informasi. RI 4.0 ditandai pertumbuhan pengguna Internet yang menembus hampir 4,5 miliar orang, sedangkan pemakai Internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang. Angka di atas menunjukkan digitalisasi informasi menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Digitalisasi teknologi juga terjadi pada bidang medis (kedokteran) melalui pengembangan riset mengenai sel punca (*stem cell*). Di sektor mekanik, penemuan teknologi robot manusia siber (*bio robotic cyber*) dan teknologi nanometer sangat monumental. Percepatan teknologi terus terjadi pada berbagai bidang kehidupan di era RI 4.0.

---

<sup>7</sup> Supadiyanto. (2018). *Hoaks dan Cerdas Bermedia*. Harian Jogja edisi 30 Oktober 2018.

Eksistensi manusia sekarang tidak bisa lepas dari berbagai perangkat gawai. Seolah manusia tunduk pada teknologi gawai. Rutinitas kehidupan kita tak bisa lepas dari berbagai piranti elektronik. Teknologi telekomunikasi menjadikan manusia sebagai penerima informasi dan pemroduksi informasi. Kita diposisikan sebagai konsumen informasi sekaligus produsen informasi (prosumen). Dampak positifnya membuat masyarakat menjadi serba mengetahui informasi karena disuplai banyak data. Mereka menjadi lebih cerdas. Namun dampak negatifnya, masyarakat menjadi bingung karena disugahi beragam informasi. Munculnya *hoaks* sebagai dampak buruk dari masyarakat yang cenderung mengalami kebingungan (kegalauan) di tengah "luapan" informasi saat ini.

*Hoaks* sengaja diproduksi dan ditebar oleh individu maupun kelompok untuk meraup keuntungan pribadi atau kolegiat. Masyarakat yang sedang bingung dan "linglung", jelas mengalami kegalauan. Kesempatan ini dimanfaatkan para "oportunis" dengan menyodorkan informasi yang sesat agar menjadikan informasi tersebut sebagai kebenaran.

Dalam konteks politik, masyarakat disugahi berbagai kampanye Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. *Hoaks* menjadi informasi yang diproduksi oleh mereka yang berhubungan dengan tim sukses atau bahkan diproduksi oleh pihak asing untuk memecah belah masyarakat. Sebab momentum kampanye Pemilu 2019 menyebabkan masyarakat terkotak-kotak oleh kepentingan politik sesaat serta berbagai motif lain, berpotensi besar memicu konflik. *Hoaks* dengan mudah diyakini kebenaran oleh siapapun. Masyarakat awam dan bahkan yang berpendidikan tinggi bisa menjadi korban berita sesat tersebut.

Cerdas bermedia merupakan solusi bijak untuk menangkal segala bentuk *hoaks*. Dalam teori komunikasi, setiap perusahaan media di Indonesia memiliki latar belakang sejarah. Mereka memiliki "*historical background*" yang menjadi bingkai (*framework*) dan kebijakan korporasi media dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Beredarnya *hoaks* di tengah masyarakat, harus disikapi cerdas. *Pertama*, ketika kita mendapatkan tebaran informasi,

harus pastikan dari manakah sumbernya. *Kedua*, dengan melakukan pengecekan ulang terhadap pihak-pihak atau orang-orang yang dicatut dalam informasi tersebut. *Ketiga*, jangan pernah meneruskan berita atau informasi selama kita tidak memiliki data akurat. *Keempat*, masyarakat harus cerdas dalam memilih, memilah, dan menentukan perusahaan media yang menjadi sumber referensinya.

*Kelima*, menanamkan kesadaran kepada masyarakat untuk memiliki kemampuan memahami berbagai regulasi. *Terakhir*, mengingat dampak buruk adanya *hoaks* mengakibatkan berbagai kerugian material, imaterial, psikologis, dan sosiologis terhadap masyarakat; maka wajib bagi aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Mahkamah Agung untuk menegakkan hukum. Harapannya, masyarakat semakin cerdas dalam bermedia dan bertanggungjawab dalam menyebarkan informasi. (\*)

## Medsos Perlu UU Tersendiri<sup>8</sup>

**K**omunikasi semakin dinamis seiring perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika. Setiap orang kini bisa dengan mudah dan cepat saling berinteraksi melalui jejaring media sosial (medsos), termasuk melalui internet.

Akibatnya, jumlah pengguna internet dan medsos tumbuh sangat pesat. Ini memicu perubahan gaya hidup, tren bisnis, konsumsi media, laju perekonomian, pertukaran budaya, sampai pola komunikasi.

Medsos seolah menjadi trend setter pergaulan karena penggunaannya mencapai sekitar 121 juta. Ini terdiri atas 71,6 juta pemakai *Facebook* (54 persen), 19,9 juta *Instagram* (15 persen), 14,5 juta *YouTube* (11 persen), 7,9 juta *Google plus* (6 persen), dan 7,2 juta *Twitter* (5,5 persen). Data tersebut dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016.

Kini, anak-anak muda tidak *up date* kalau belum memiliki medsos. Mereka bahkan sangat ketergantungan. Menurut penelitian, anak-anak muda kota besar tidak tahan tidak menyentuh medsos sebentar saja. Orang desa pun berlaku sama. Di warung angkringan, pasar, pos kampling, bahkan di sawah, banyak yang menggunakan medsos.

Membengkaknya jumlah pemakai medsos, tanpa dibarengi kesadaran etika akan menimbulkan gejala. Sangat dimungkinkan, yang tidak memiliki kesadaran beretika, medsos hanya akan dijadikan “tong sampah” menebarkan kebencian, meluapkan amarah, memaki, dan meluapkan kekecewaan. Medsos juga menjadi alat sesat pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Sebagai salah satu alat komunikasi, medsos bisa dijadikan medium menyebarkan pornografi, berita bohong (*hoaks*),

---

<sup>8</sup> Supadiyanto. (2017). *Medsos Perlu UU Tersendiri*. Koran Jakarta edisi 18 November 2017.



terorisme, transaksi narkoba, penghasutan, adu domba, gosip, dan perilaku buruk lainnya. Kasus pencemaran nama baik, penipuan, perjudian, pornografi sering menyeret para pemakai ke pengadilan.

Ini karena pengguna tidak menyadarinya sebagai ruang publik. Secara substansi, ketika menggunakannya otomatis informasi yang bersifat pribadi pun menjelma menjadi informasi publik. Kesadaran inilah yang perlu dibangun para pengguna medsos agar selalu berhati-hati. Ini secara filosofis memang sebagai media bersosialisasi atau pergaulan.

Sifatnya komunikasi persahabatan, bukan untuk bisnis atau profesional seperti pers. Ruang privat dan publik dalam medsos mengharuskan setiap orang menyadari perundang-undangnya. Ranah privasi yang merupakan domain pribadi serta hak asasi memiliki kebebasan berekspresi untuk memenuhi kebutuhan ego.

Sementara itu, ranah publik menjadi hak masyarakat untuk memiliki akses seluasluasnya dan jaminan mendapat perlakuan setara di hadapan hukum. Medsos bisa menerabas ruang pribadi sekaligus publik, tanpa terhalang ruang waktu karena mengandalkan internet maupun frekuensi.

Banyak yang telah menjadi korban medsos, di antaranya Prita Mulyasari, dari Tangerang melawan Rumah Sakit Omni Internasional. Kemudian, Florence Sihombing (mahasiswa S2 Program Kenotariatan UGM) yang divonis dua bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 31 Maret 2015 karena mengunggah makian kepada warga Yogya.

Lalu, ada Ariel (Nazril Irham) tahun 2010 karena kasus pornografi. Satu lagi, kasus Nur Arafah, pelajar SMA asal Bogor, divonis 2 bulan 15 hari karena menghina di *Facebook*. Pada ranah positif, medsos juga banyak untuk berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi publik. Contoh untuk kampanye politik, gerakan penggalangan dana sosial kemasyarakatan, membantu korban bencana alam.

Kemudian iklan layanan masyarakat, sarana pembelajaran berbasis online. Eksistensi medsos dalam ruang demokrasi semakin diperhitungkan berbagai pihak. Selama ini publik telah mengenal konsep trias politika terdiri atas eksekutif, yudikatif,

legislatif. Kemudian menjadi quarta politica ditambahkan elemen pers sebagai pilar keempat.

Kini konsep tersebut berkembang dengan masuknya medsos sebagai pilar kelima dalam negara demokrasi. Fakta tersebut menunjukkan betapa medsos yang dulu hanya dipandang sebelah mata sebagai medium pergaulan atau say hello, kini telah naik kelas sebagai media sepadan pers.

Hanya, ini tidak bisa dikendalikan orangperorang atau bahkan institusional/ lembaga sebagaimana pers. Sebab medsos yang sifatnya interaktif, personal sekaligus kolektif, dan boarderless (tak terkekang ruang waktu). Kehadiran medsos di tengah masyarakat, satu sisi menjadi medium untuk mempercepat berbagai perubahan sosial (positif ) di tengah kompleksnya problematika.

Namun pada aspek lain, menjamurnya penggunaan medsos berdampak negatif maraknya kasus pornografi, pencemaran nama baik, penyebaran berita palsu, perjudian, prostitusi *online*, terorisme, hingga penipuan. Etika bermedsos serta penegakan hukum menjadi solusi atas berbagai masalah tadi.

Negeri ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur masalah medsos. Sudah seharusnya bangsa memiliki undang-undang (UU) medsos. Sistem perundang-undangnya masih dicantolkan pada regulasi media konvensional, seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Negara membutuhkan regulasi khusus mengenai medsos agar bisa digunakan sebagai pewarta warga yang membangun nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan persahabatan. Tujuan akhirnya adalah nilai-nilai profesionalitas dilandasi semangat humanitas dan hati nurani. (\*)

## Dampak (Sinetron) TV terhadap Watak Anak<sup>9</sup>

**B**erbagai televisi kini marak kembali menayangkan sinetron bergenre laga-petualangan-mistik. Sebut saja sinetron berjudul: Ganteng-Ganteng Serigala (GGS), 7 Manusia Harimau, dan sebagainya. Kalau dicermati lagi, tayangan sinetron di atas ditengarai memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku anak-anak maupun remaja. Salah satu musibah yang patut kita sesalkan yaitu tewasnya seorang bocah bernama Hasrandra di Rokan Hulu (Riau) pada Selasa (28/4/15) akibat dikeroyok teman-temannya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, mereka mengeroyok Hasandra (bocah kelas 1 SD Yayasan Islam Zaidar Yahya) karena terinspirasi sinetron 7 Manusia Harimau yang tayangkan oleh sebuah televisi swasta berjangkaran. Musibah itu hendaklah menjadi perhatian besar bagi para pemangku dunia pendidikan. Para guru sekolah dan orang tua harus semakin mewaspadai berbagai perilaku yang cukup membahayakan bagi keselamatan jiwa anak-anak. Adanya tayangan televisi yang disiarkan selama 24 jam *non stop* memberikan kesempatan luas (terbuka) kepada setiap orang untuk menonton. Apalagi kini pesawat televisi bukan menjadi barang mewah lagi. Saat ini setiap keluarga bahkan ada yang memiliki lebih dari satu pesawat televisi. Apalagi kini siaran televisi bisa diakses mudah menggunakan komputer, *laptop*, maupun telpon seluler yang terkoneksi jaringan Internet.

Berkat kecanggihan teknologi inilah yang kemudian membuka kesempatan terbuka kepada semua pihak (termasuk anak-anak) untuk mengaksesnya dengan mudah. Tanpa adanya pengawasan ketat dari berbagai pihak, sangat besar

---

<sup>9</sup> Supadiyanto. (2016). *Dampak Sinetron Terhadap Watak Anak*. Harian Bernas edisi 9 Juli dan 11 Juli 2016.

kemungkinan anak-anak akan berperilaku sesuai dengan rujukan tontonan yang disimaknya.

Di samping adegan-adegan kekerasan, yang cukup memprihatinkan bersama adalah sinetron-sinetron di televisi saat ini kebanyakan menayangkan adegan hura-hura (foya-foya), pacaran, pesta, hidup manja, dan kebiasaan buruk lain. Bahkan kekerasan verbal (dalam bentuk ucapan/lisan) juga kerap kali mendominasi tayangan televisi tersebut. Memang tidak diragukan lagi, bahwa dampak media penyiaran terhadap perilaku anak-anak dan remaja di Tanah Air cukup besar.

Guru sebagai pendidik dan mitra berproses kreatif dari para pelajar, semestinya mulai menanamkan kesadaran kepada para peserta didik untuk melek terhadap berbagai program tayangan/siaran televisi. Kesadaran bermedia dari para guru terlebih dahulu harus dimunculkan terlebih dahulu. Pembiaran atau pembebasan para pelajar untuk menonton tayangan televisi sesuka hati mereka, jelas menjadi ancaman nyata. Persepsi yang beredar di kalangan masyarakat awam selama ini yang mengaku bahwa membiarkan anak-anak menonton televisi lebih aman daripada bermain di luar rumah; perlu diubah paradigmanya mulai dari sekarang juga. Sebab media televisi bisa menjelma menjadi "monster" yang sangat membahayakan masa depan anak-anak di negeri ini—manakala tidak diatur ketat.

Dalam konteks tersebut, eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menjadi sangat strategis (penting) untuk menciptakan tatanan dunia penyiaran (infrastruktur) maupun kualitas tayangan-tayangan televisi yang menyehatkan. Ketegasan dan kedisiplinan KPI/D dalam menindak berbagai program tayangan televisi yang merugikan serta mengancam keselamatan publik; menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya dampak buruk (negatif) dari tayangan/program televisi. Para orangtua di rumah juga harus selalu mengontrol serta memberikan pengarahan kepada anak-anak mereka agar mampu memilih program-program tayangan televisi yang mencerdaskan, mendidik, menginspirasi, dan memberikan sumber informasi.

Secara fisiologis, para pelajar (SD, SMP, SMA/K/MA) memang secara fisik belum memasuki usia dewasa. Mereka masih dikategorikan dalam masa anak-anak dan remaja. Kecenderungan yang terjadi dalam dunia anak-anak yaitu perilaku untuk bermain-main. Mereka menjadikan seluruh sektor kehidupan ini sebagai arena bermain. Psikologi belajar yang berlaku dalam dunia anak-anak adalah proses imitasi (meniru) dan repetisi (mengulangi). Mereka akan mudah menirukan perilaku orang-orang dewasa di sekitar mereka. Orang-orang yang mereka tiru tersebut bisa berasal dari dunia nyata maupun khayalan (rekaan/imajinasi).

Celaknya, tokoh-tokoh di dunia televisi juga kerap kali menjadi idola dambaan dari anak-anak. Manakala kita menanyakan kepada anak-anak kita; siapakah yang menjadi idola mereka. Spontan mereka akan menyebutkan satu persatu tokoh kartun yang pernah ditayangkan di televisi. Karena tokoh-tokoh yang mereka sukai biasanya memiliki karakter sebagai jagoan (hebat, kesatria), lucu (humoris), serta menarik. Anak-anak memang belum bisa membedakan secara jelas dan tegas manakah tokoh yang baik dan benar. Dalam benak mayoritas anak hanya menggemari tokoh yang hebat, ampuh, menarik, jagoan, dan humoris. Jadi mereka tidak memprioritaskan karakter tokoh yang baik dan benar.

Sementara kecenderungan perilaku para remaja yaitu suka kebebasan (tidak terkekang), mulai menyukai lawan jenis kelamin (dampak masa transisi dari anak-anak menuju dewasa), suka mencoba hal-hal baru, dan semacamnya. Misalnya setelah menonton tayangan sinetron tertentu, para pelajar menirukan gaya rambut "*njegrak*" dari pemain sinetron yang diidolakan. Tentu hal tersebut akan berbahaya jika perilaku yang dicontoh merupakan perilaku buruk.

Anak-anak dan remaja merupakan dua pihak yang sangat rentan (riskan) terdampak tayangan televisi yang tidak menyehatkan. Perilaku mereka akan mudah terpengaruhi (terprovokasi) untuk menirukan perilaku berbagai tokoh (fiktif maupun non fiktif) yang ditampilkan di layar kaca. Celaknya, banyak guru dan orang tua yang hingga kini belum menyadari bahwa tayangan-tayangan yang disuguhkan berbagai televisi

berjaringan maupun lokal, bisa menjadi ancaman serius bagi kehidupan anak-anak dan remaja.

Tayangan yang tidak mendidik, sejatinya tidak hanya dalam sinetron saja. Tayangan yang menampilkan kekerasan fisik dan sekaligus kekerasan verbal tidak hanya hadir dalam program sinetron. Melainkan juga pada program kartun, yang selama ini diidentikkan dengan tayangan untuk anak-anak. Banyak film kartun yang juga menampilkan kekerasan fisik berupa adegan pemukulan, penusukan, peperangan, dan sebagainya. Kartun-kartun juga banyak menayangkan kekerasan verbal seperti umpatan, makian (ungkapan kasar), hardikan, ejekan, pelecehan, cemoohan, dan sebagainya.

Para guru, orang tua, dan semua pemerhati dunia pendidikan harus semakin mengawasi secara ketat perilaku anak-anak dan remaja dalam menonton televisi. KPI/D juga harus semakin tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang dilakukan berbagai lembaga penyiaran. Begitupun para praktisi media penyiaran mestinya juga wajib memproduksi dan menayangkan program-program yang informatif, edukatif, inspiratif, namun tetap menghibur secara sehat. Sebab saat ini, negeri ini masih sangat minim tayangan televisi yang berkualitas tinggi.

Satu sisi, hal ini menjadi problematika pelik dalam dunia penyiaran. Mengapa pelik? Sebab di tengah minimnya program-program televisi bermutu tinggi (baik); kesadaran audiens (pemirsa) untuk mengkritisi berbagai tayangan televisi masih cukup rendah. Mereka berasumsi cukup dengan membeli seperangkat pesawat televisi plus antenanya; mereka bisa mendapatkan tontonan gratis sepanjang hari.

*Nah* pemahaman yang keliru inilah yang mulai dari sekarang harus ditanamkan dalam benak pemirsa. Peralnya, frekuensi yang digunakan berbagai stasiun televisi tersebut menggunakan (lebih tepatnya meminjam) domain (milik) publik. Sehingga program acaranya harusnya memberikan pencerahan (pencerdasan) bagi publik. Artinya ketika publik merasa dirugikan dengan tayangan-tayangan yang ada, mereka berhak untuk menggugat berbagai lembaga penyiaran tersebut.

Persoalannya menjadi semakin pelik, sebab para pemasang iklan masih menjadikan nilai kepemirsaaan (*rating*) sebagai tolok ukur untuk menjatuhkan pemasangan iklan mereka pada program yang memiliki *rating* tinggi. Jadi para pengiklan bukan menjatuhkan untuk memasang iklan pada program televisi yang bagus (baik); tetapi lebih memprioritaskan pada program acara yang ditonton banyak pemirsa. Walaupun program acaranya berkualitas buruk, namun kalau jumlah pemirsanya tinggi; mereka tetap akan memilih program tersebut.

Minimnya program televisi yang berkualitas baik, sejatinya juga bisa menjadi peluang dan tantangan besar bagi para praktisi media penyiaran, akademisi pada kampus-kampus yang memiliki spesifikasi dunia penyiaran (komunikasi) untuk menghasilkan karya-karya intelektual bermutu tinggi dalam bidang penyiaran. Masa depan dunia pendidikan di negeri ini—salah satunya bergantung besar pada kualitas dunia penyiaran di Tanah Air. Mari kita bersama menciptakan dunia penyiaran yang mampu memajukan peradaban bangsa. (\*)

## Matematika Politik Pilgub Jateng<sup>10</sup>

**A**da tiga momentum pesta demokrasi 5 tahunan yang waktu dan lokasinya relatif berdekatan, sangat menarik dijadikan bahan kajian atau penelitian. Yakni Pilgub DKI Jakarta 2012, Pilgub Jawa Barat 2013, dan Pilgub Jateng 2013. Oleh para politikus nasional, tiga momentum politik di atas dijadikan ajang uji coba “kesaktian” dalam meracik kemampuan ideologi politik masing-masing parpol menjelang Pemilu 2014. Adakah pelajaran/hikmah yang bisa ditarik dari Pilgub DKI Jakarta dan Pilgub Jabar bagi kepentingan Pilgub Jateng 26 Mei 2013?

Mari kita analisis bersama. Pilgub DKI Jakarta yang berlangsung 2 kali putaran, yang akhirnya memenangkan Joko "Jokowi" Widodo dan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keduanya adalah bukan penduduk asli Jakarta, atau bahkan sama sekali tidak pernah tinggal lama di Jakarta. Mereka diusung oleh koalisi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, dan memperoleh dukungan sebanyak 2.472.130 suara (53,82 persen). Kemenangan Jokowi-Ahok, dapat dikatakan sebagai antitesa atas besarnya partai politik koalisi pengusung tidak menjadi faktor dominan dalam memenangkan Pilgub. Sekaligus dalam Pilgub Jakarta ini menjadi "kematian" dari ilmu statistik, sebab hampir semua lembaga survei yang mengukur elektabilitas (tingkat keterpilihan seseorang) salah/keliru dalam memprediksikan hasil akhir Pilgub ini.

Dalam Pilkada Jabar yang berjalan sekali putaran, telah memenangkan pasangan Ahmad "Aher" Heryawan-Deddy "Dedi" Mizwar yang diusung oleh PKS, PPP, Partai Hanura, dan PBB dengan 6,515 juta suara (32,39 persen). Keduanya adalah putra asli Jabar. Kemenangan Aher-Dedi merupakan antitesa atas efek politik kolejial. Publik harus ingat benar, bahwa

---

<sup>10</sup> Supadiyanto. (2013). *Matematika Politik Pilgub Jateng*. Barometer edisi 1 April 2013.



sebelum hari H pencoblosan Pilgub Jabar tersebut, perhatian masyarakat tertuju pada dua berita besar di mana KPK menetapkan dua petinggi PKS dan Partai Demokrat sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor daging sapi dan kasus proyek Hambalang. Ternyata berita tersebut tidak memberikan sentimen negatif pada publik terhadap kandidat yang diusung oleh PKS dalam Pilgub Jabar. Pilgub Jakarta adalah kemenangan kolegal PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, sedangkan Pilgub Jabar menjadi kemenangan kolektif PKS, PPP, Partai Hanura dan PBB. Dalam dua Pilgub di atas, Partai Demokrat dan Partai Golkar sekadar menjadi penonton saja.

Tentunya, dalam Pilgub Jateng yang dihelat tanggal 26 Mei 2013 besok, dua parpol di atas tak mau kehilangan muka lagi. Mereka akan mengerahkan segala daya, strategi, taktik dan kampanye yang mampu menghegemoni masyarakat Jateng. Pilgub Jateng 26 Mei 2013 bakal diikuti oleh 3 pasang kandidat yakni: Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmojo (koalisi Partai Demokrat, PAN dan Partai Golkar), Ganjar Pranowo-Heru Sujatmoko (PDI Perjuangan), Hadi Prabowo-Don Murdono (koalisi PKS, PKB, Partai Gerindra, PPP, PKNU, Partai Hanura). Tak ada kandidat dari jalur independen. Pada Pilgub Jateng 2008 silam, Bibit Waluyo diusung melalui PDI Perjuangan bersama Rustriningsih; namun pada Pilgub Jateng 2013, langkahnya berbeda. Petahana ini menggunakan "kendaraan politik" lain, yakni koalisi besar antara Partai Demokrat, PAN dan Partai Golkar

Berdasarkan jumlah kursi di DPRD Jateng, duet Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmojo yang diusung koalisi Partai Demokrat, PAN dan Partai Golkar disokong sebanyak 37 kursi wakil rakyat. Ganjar Pranowo-Heru Sujatmoko dijagokan PDI Perjuangan didukung 23 kursi wakil rakyat, sementara Hadi Prabowo-Don Murdono yang diunggulkan oleh koalisi PKS, PKB, Partai Gerindra dan PPP didukung sebanyak 40 kursi wakil rakyat. Namun dalam praktiknya, tidak selalu pasangan kandidat yang diusung oleh parpol atau koalisi parpol yang memiliki jumlah kursi wakil rakyat tertinggi memenangi pesta demokrasi tersebut, sebab masih banyak faktor lain yang menentukan kemenangan akhir setiap pasangan kandidat.

Sikap politik dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan dan sosial juga tidak bisa diabaikan dalam konstelasi politik Jateng, sebab sekecil apapun suara yang tersisa; sangat menentukan hasil akhir dari Pilgub Jateng 2013. Apalagi hanya ada tiga pasang kandidat saja yang maju dalam Pilgub Jateng 2013. Artinya, jika masing-masing kubu memiliki kekuatan yang sama/persis, tiga pasang kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng di atas masing-masing bisa berbagi persentase dukungan yang sama, yakni 33,3 persen. Kendati peluang terjadinya hal di atas sangat kecil.

Secara kalkulasi politik, jelaslah pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmojo yang diusung oleh koalisi parpol besar-tengah, memiliki kekuatan "sosial-politik" yang lebih besar dibandingkan dengan dua pasangan lain. Jadi dalam konteks pertempuran politik Pilgub Jateng kali ini, yang bertarung di sini bukanlah Ganjar Pranowo-Heru Sujatmoko Vs Hadi Prabowo-Don Murdono, tetapi adalah perebutan suara politik antara Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmojo versus Ganjar Pranowo-Heru Sujatmoko dan koalisi Hadi Prabowo-Don Murdono. Sebab dalam ilmu politik kontemporer, petahana selalu diposisikan sebagai "musuh bersama" oleh para kandidat non petahana.

Mari kita tilik keunggulan dan kelemahan masing-masing kandidat. *Pertama*, Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmojo merupakan pasangan petahana dan akademikus. Kelebihan yang dimiliki, Bibit Waluyo telah memiliki investasi prestasi selama menjabat sebagai Gubernur Jateng periode 2008-2013. Terlepas dari baik atau buruk prestasinya, sejumlah kemajuan sudah dirasakan publik Jateng. Sehingga beliau memiliki massa loyal, dan dapat dipastikan setiap penduduk Jateng sudah mengenal atau minimal pernah mendengar nama Bibit Waluyo. Sedangkan Sudijono Sastroatmojo memiliki keunggulan intelektual murni, sebab beliau adalah seorang guru besar yang jembar wawasannya. Terutama dalam mengelola dan manajemen pendidikan di Jateng. Kiprah keduanya tidak bisa disangsikan lagi. Kelemahan yang dimiliki oleh duet pasangan ini adalah justru terletak pada faktor Bibit Waluyo sendiri, terutama menyangkut masalah etika politik.

Bagi publik Jateng yang "melek politik", sebagaimana yang ada dalam tradisi politik di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, adalah sebuah pantangan bagi para politikus atau pejabat negara yang berpindah haluan pada parpol yang berbeda. Dalam etika politik yang benar, ketika setiap orang menjatuhkan pilihan politik pada sebuah parpol, maka seumur hidup yang bersangkutan harus tetap berada di parpol tersebut. Sedangkan kita mengetahui persis, bagaimana Bibit Waluyo dalam Pilgub Jateng 2008 silam diusung oleh PDI Perjuangan. Dan kini Bibit Waluyo melakukan "lompatan maraton" dengan menjadikan koalisi Partai Demokrat, Partai Golkar dan PAN sebagai "keputusan" politik. Inilah ketidakkonsistensian sikap politik Bibit Waluyo, yang berpeluang besar akan menjadi "kecacatan etika berpolitik" yang bersangkutan. Kelemahan ini hanya bisa diatasi dengan tepat oleh Bibit Waluyo dengan memberikan keterangan yang memadai dan argumentasi logis kepada publik atas pilihan dan keputusan politik tersebut.

Sementara itu, pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono memiliki keunggulan dalam hal manajemen kebirokrasian. Pengalaman kerja Hadi Prabowo sebagai orang nomor tiga di Jateng, menjadi sisi kompetitif yang dimilikinya. Kinerja Don Murdono dalam memimpin Kabupaten Sumedang Jabar, juga relevan dijadikan keunggulan kompetitifnya. Kelemahan yang dimiliki dua kandidat ini sangat jelas, tingkat popularitas dua tokoh ini cukup dikenal, namun hanya di kalangan tertentu saja.

Sedangkan duet Ganjar Pranowo-Heru Sujatmoko, yang diusung oleh partai tunggal PDI Perjuangan, secara kompetitif memiliki keunggulan dalam hal kekuatan massa di tingkat bawah. Ganjar Pranowo sangat populer di kancah Solo Raya, dan Heru Sujatmoko juga tidak kalah tenar di kawasan Jateng bagian barat (Purbalingga dan sekitarnya). Kelemahan yang dimiliki, justru karena sikap "kepercayaan diri" PDI Perjuangan yang secara institusional tidak melakukan "poligami politik" alias koalisi dengan parpol lain. Langkah ini merupakan keputusan politik yang berani, namun sangat berisiko besar atas berbagai kemungkinan terburuk. Sebab atmosfer politik saat ini sangat beda jauh dengan iklim politik pada Pilgub Jateng 2008 silam.

Dibutuhkan kerjasama (koalisi) antarpol yang "mesra" dalam menggolkan kandidatnya agar dipilih dan diyakini mampu menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2013-2018. Sehebat apapun strategi politik yang dilancarkan masing-masing tim sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, yang paling menentukan adalah pilihan rakyat. Ada 27 juta penduduk se-Jateng yang memiliki hak memilih pada Pilgub 26 Mei 2013 mendatang, sangat menentukan siapakah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2013-2018. Apakah sosoknya adalah tokoh baru atau wajah lama. Rakyat harus semakin cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. (\*)

## **Sinergi Keluarga dan Negara dalam Mendidik Anak<sup>11</sup>**

**S**inergisitas antara keluarga dan negara dalam mendidik anak menjadi kata kunci untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beradab, bermutu baik, jujur, dan cerdas. Banyaknya kasus yang melibatkan anak-anak dalam dunia gelap (kejahatan) yang terjadi belakangan ini menunjukkan buruknya/gagalnya proses pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan formal yang dikelola negara (pemerintah).

Sebagaimana diketahui bersama, anak-anak adalah aset bangsa yang wajib dijamin kehidupannya mendapatkan perlindungan, dan pelayanan secara optimal dalam berbagai bidang kehidupan. Sebab anak sebagai aset bangsa yang menjadi calon penerima estafet kepemimpinan nasional. Sudah dapat dipastikan jika anak-anak berkualitas buruk dalam pendidikannya, praktis ketika remaja, dewasa, hingga yang bersangkutan menjadi manusia lanjut usia (manula) hidupnya juga tidak berkualitas. Sebaliknya, bila anak-anak berkualitas baik dalam pendidikannya, sudah dapat dipastikan perjalannya menjadi remaja, dewasa, dan manula juga memberikan keluaran maksimal (positif/bermanfaat) bagi kemajuan dan peradaban bangsa ini.

Anak-anak merupakan masa depan bangsa yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan mutlak dari keluarga dan negara (dalam hal ini pemerintah). Bahkan negara berkewajiban secara khusus memperlakukan anak-anak dengan perlindungan berlapis-lapis. Hal ini tertuang dalam berbagai regulasi yang secara khusus memberikan perlakuan dan jaminan luar biasa kepada anak-anak di negeri ini. Ada banyak regulasi (peraturan/norma) yang secara khusus menegakkan

---

<sup>11</sup> Supadiyanto. (2016). *Sinergi Keluarga dan Negara dalam Mendidik Anak*. Harian Bernas edisi 2 Juli 2016.

keberadaan anak-anak harus dilindungi di manapun dan kapan saja.

Termasuk Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas menyebut kata anak pada beberapa pasal di dalamnya. Misalnya, UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa: fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara. UUD 195 Pasal 28 B ayat 2 mengungkapkan: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun regulasi lainnya yang memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi dan hak fitrahnya tercermin dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, serta masih banyak regulasi lainnya yang menempatkan anak-anak sebagai "aset bangsa" yang harus diprioritaskan untuk dijamin keberadaannya. Dengan demikian, anak-anak wajib mendapatkan hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan pertumbuhan maksimal dari keluarga, masyarakat, dan negara sendiri. Berbagai norma dalam kitab suci (Quran, Injil, Weda, dan Tripitaka) juga banyak menyitir dalam ayat-ayat sucinya terkait dengan kemaslahatan anak-anak.

Namun faktanya, hingga kini masih banyak anak-anak di negeri ini yang mengalami tindak kekerasan (baik secara fisik, psikologis, maupun mental), pelecehan seksual maupun pemerkosaan, eksploitasi kerja anak-anak, dan tindakan negatif lainnya. Pada saat bersamaan, banyak juga ditemui kasus-kasus kriminalitas di mana anak-anak menjadi pelaku dan atau korbannya. Apalagi perilaku anak-anak zaman sekarang juga cukup memprihatinkan. Etika, sopan santun, adat istiadat, dan perilaku anak-anak yang lahir di zaman modern ini semakin kehilangan kejutidirian. Banyak anak yang tidak lagi berbicara dengan sopan kepada orang tua atau orang yang lebih tua.

Ada banyak faktor yang turut berpengaruh mengapa anak-anak zaman sekarang semakin kehilangan nilai-nilai etika, dan kesopanan. Faktor yang paling besar berpengaruh pada perilaku anak-anak sekarang adalah model pendidikan dalam keluarga dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Dua faktor ini paling dominan yang menyetir karakter dan perilaku anak-anak. Jika anak-anak hidup dan dibesarkan dalam keluarga "yang urakan"; maka sudah dapat dipastikan perilaku anak yang dihasilkan juga sama. Mereka akan bersikap nakal dan mulai berlatih melakukan kegiatan kriminal secara kecil-kecilan sebagai representasi "ajaran" dari keluarga yang membesarkannya. Begitupun dengan lingkungan di sekitar anak-anak tinggal turut berkontribusi dalam membentuk watak (mental/karakter), psikologi, keterampilan, dan kecerdasan mereka.

Abainya peran negara dalam menangani masalah anak-anak yang kini hidup di keluarga miskin dan sangat berkekurangan secara material maupun imaterial; menjadi problematika serius di kemudian hari. Memang negara (pemerintah pusat dan daerah) memiliki banyak keterbatasan untuk menangani sebanyak lebih dari 250 juta penduduk negeri ini.

Apalagi jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) awal Januari 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per September sebanyak 28,51 juta orang, padahal pada September 2014 kuantitas penduduk miskin masih di angka 27,73 juta. Artinya dalam setahun terakhir saja terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 780 ribu orang. Secara geografis, jumlah penduduk miskin paling banyak mendominasi tinggal di Pulau Jawa sebesar 15,31 juta jiwa. Sementara sisanya tersebar di Sumatera sebesar 6,31 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara 2,18 juta jiwa, Sulawesi ada 2,19 juta jiwa, Maluku sebanyak 1,53 juta jiwa, dan Kalimantan sebesar 0,99 juta jiwa, dan ada juga yang menetap di Papua.

Dengan semakin tingginya angka kemiskinan, potensi terjadinya "penelantaran" anak-anak maupun ketidakbisaan memenuhi hak-hak anak untuk bisa hidup dengan lebih baik

menjadi semakin besar juga. Sebab masalah kemiskinan ini memicu mata rantai masalah sosial lainnya yang lebih kompleks. Misalnya masalah kriminalitas, kekerasan/tawuran, kecemburuan sosial, korupsi, pemerkosaan/pelecehan seksual, eksploitasi anak, dan lain sebagainya.

Keluarga sebagai basis dari pendidikan bagi anak harus diperkuat lebih dahulu baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kualitas finansial dan kesehatan mereka. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang memiliki orangtua dan anak yang saling memberdayakan sehingga tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk bisa menjalankan fungsi tersebut, keluarga harus memahami berbagai nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, nilai-nilai normatif, dan nilai-nilai kemanusiaan. Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan penguatan kepada setiap keluarga yang lemah secara ekonomi, lemah secara intelektual, dan lemah secara sosial; agar mereka mampu memberdayakan kehidupan keluarga mereka. Sinergisitas antara keluarga, masyarakat, dan negara dalam mendidik anak-anak merupakan rahasia untuk menciptakan peradaban bangsa yang semakin maju.

Keluarga sebagai entitas dasar, ibarat fondasi sebuah rumah harus dibangun dan diperkokoh terlebih dahulu agar bangunan yang didirikan tidak roboh (rusak). Sementara masyarakat itu ibarat tiang-tiang (tembok/dinding) yang menyangga atap-atap bangunan yang berdiri di atas fondasi rumah itu, harus diperkuat juga agar terpaan angin, hujan, panas, dan pergerakan dari air maupun hewan-hewan liar tidak membahayakan penghuni rumah tersebut. Aspek masyarakat harus diperkuat juga agar kehidupan anak bisa terjamin dari pengaruh buruk dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan negara dalam hal ini diilustrasikan sebagai atap rumah yang berdiri di atas fondasi dan tiang penyangganya agar para penghuni di dalamnya tidak terguyur dinginnya air, dan panasnya terik matahari. Atap dalam hal ini disamakan peran negara sebagai pelindung bagi anak-anak dari potensi-potensi yang bisa menyakiti maupun membahayakan masa depan mereka. (\*)



## **Taktik Memberdayakan Penduduk Miskin<sup>12</sup>**

**P**ernah dalam sebuah forum/seminar nasional, penulis mendebat "keangkuhan intelektual" seorang profesor (ekonom) yang sekaligus menjadi rektor sebuah perguruan tinggi swasta ternama di Indonesia. Penulis mempertanyakan bagaimana mungkin bisa merampungkan masalah kemiskinan di Indonesia, sementara yang sibuk memikirkan masalah kemiskinan adalah orang-orang kaya yang asyik melontarkan berbagai gagasannya, bertempat di hotel-hotel megah atau kampus-kampus ternama; tanpa melibatkan kehadiran orang-orang miskin itu sendiri?

Dengan angkuhnya, sang narasumber tadi menjawab lontaran kritik di atas dengan mengemukakan bahwa orang-orang miskin tidak bisa diajak untuk berpikir. Mereka tidak memiliki kepedulian bahwa hidup mereka miskin dan menikmati kemiskinan mereka. Sebuah jawaban yang sangat angkuh dan egoistik, sebab terpotret bagaimana sang profesor ditakdirkan terlahir dari keluarga kaya dan tidak pernah hidup menjadi orang miskin. Model jawaban yang dilontarkan oleh narasumber yang sudah berbicara di berbagai forum nasional bahkan Internasional tadi, dapat dijadikan representasi jawaban dari para pemimpin nasional maupun pemimpin daerah yang tidak pernah merasakan hidup menjadi orang miskin.

Bahwa orang miskin tidak pernah berpikir, adalah jawaban yang sangat menyesatkan. Orang-orang miskin adalah kelompok orang yang sesungguhnya tidak mendapatkan hak untuk dapat mengakses sumber-sumber kemakmuran, seperti sumber informasi, sumber kekuasaan, sumber pendidikan dan sumber kesehatan. Mereka tertakdirkan lahir dalam keluarga miskin, sehingga harus melakukan lompatan budaya dan

---

<sup>12</sup> Supadiyanto. (2013). *Taktik Memberdayakan Penduduk Miskin*. Barometer edisi 19 Maret 2013.

strategi untuk memperjuangkan hidupnya dalam kondisi yang lebih menjanjikan. Mereka harus melepaskan diri dari lingkungan keluarga yang miskin terlebih dahulu, dengan cara memberdayakan diri terlebih dahulu, melalui berbagai upaya kreatif, bisnis, bekerja dan ikhtiar keras lain, yang besarnya upaya tersebut harus lebih besar dibandingkan mereka yang sudah ditakdirkan hidup dan terlahirkan dalam keluarga kaya dan terpelajar. Dengan begitu, argumentasi yang dibangun dan diajukan oleh sang profesor di atas dengan sendiri terpatahkan. Bahwa dengan tidak melibatkan orang-orang miskin dalam forum-forum ilmiah, adalah cara yang salah dan bias secara keilmuan.

Sudah sepantasnyalah berbagai forum-forum ilmiah yang mengangkat tentang solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan atau pengangguran dan problema sosial yang lainnya, wajib melibatkan orang-orang miskin, atau bekas orang miskin yang sudah sukses menjadi orang kaya. Sehingga mereka benar-benar pernah atau sudah menghayati benar, bagaimana susahanya menjadi orang miskin dan tidak berdaya. Berbeda dengan para narasumber berbagai forum dan penguasa di negeri ini yang mayoritas adalah orang-orang kaya, berkuasa, dan tidak pernah berstatus menjadi orang miskin.

Realitas sosial bernama “kemiskinan absolut” harus dipecahkan dengan memberdayakan orang-orang miskin baik secara sistemik maupun kebijakan yang langsung menjadikan orang-orang miskin dapat berpikir kritis, berwawasan luas dan memiliki rasa optimisme dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan kompetisi yang tidak adil dan mendiskreditkan orang-orang miskin, kendatipun mereka menjadi kelompok mayoritas.

Jangan lagi ada pemonopolian sumber-sumber kemakmuran struktural oleh sekelompok orang berkuasa yang kaya raya dan terpelajar. Pemonopolian sumber-sumber kemakmuran (seperti harta berupa uang, tanah, kendaraan, aset, bangunan, perusahaan dll.) oleh kelompok orang yang kaya, berkuasa dan cerdas; sebab hanya akan melahirkan kemiskinan absolut. Solusi tepat untuk itu adalah mendistribusikan sumber-sumber kemakmuran tadi kepada masyarakat miskin.

Bukan diberikan secara gratis dan langsung habis, tetapi dengan metode kreatif yang mampu merangsang dan memberdayakan kemampuan orang-orang miskin untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif sehingga menghasilkan pendapatan bagi keluarga yang bisa mengangkat status sosial mereka. Naik “kasta sosial”, dari keluarga miskin menjadi keluarga kaya-raya dan berpendidikan.

Bersandarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) September 2012, total penduduk miskin se-Indonesia per September 2012 sebesar 28.594.640 orang (11,66 persen), atau mengalami penurunan angka sebesar 0,3 persen, atau sebesar 537.760 orang, jika dibandingkan data per Maret 2012 yang sebesar 29.132.400 orang (11,96 persen).

Propinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 4.863.410 orang. Sementara Propinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah penduduk miskin yakni sebanyak 4.960.540 orang. Di peringkat ketiga, adalah Propinsi Jawa Barat, karena di sana tinggal sebanyak 4.421.480 orang. Sedangkan DKI Jakarta dan Propinsi DIY menorehkan angka sebesar 366.770 penduduk miskin dan 562.110 penduduk miskin.

Bagaimana kita menginterpretasi data yang disajikan oleh BPS di atas? Terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin, apakah lantas membuat kita pantas senang? Ataukah dengan model penginterpretasian data yang lain, di mana jumlah orang yang tidak miskin di atas; jauh lebih berlimpah ruah? Bukankah masih ada sebesar 209.405.360 penduduk yang tidak tergolong miskin; jika total penduduk Indonesia adalah 238 juta jiwa?

Satu hal yang sangat dicemaskan dalam peradaban bangsa ini adalah kultur kepemimpinan nasional atau kepemimpinan lokal masih dikuasai oleh golongan kelas menengah ke atas. Lebih tepatnya dimonopoli (hegemoni) oleh kekuasaan kelas atas (elit). Para pemimpin nasional, coba Anda data dan sebutkan satu persatu saja, mayoritas adalah “para miliarder atau triliuner”; yang tidak pernah hidup miskin. Mereka berangkat dari keluarga kaya, ningrat (keturunan penguasa kerajaan) dan golongan terpelajar yang mengenyam pendidikan luar negeri (entah di Amerika Serikat, Timur Tengah dan negara lainnya).

Apakah SBY tergolong orang miskin, berapa total kekayaannya? Apakah Megawati Soekarnoputri pernah berasal dari keluarga miskin? Apakah Aburizal Bakrie pernah merasakan hidup melarat? Deret saja semua penguasa negara ini. Sri Sultan HB X, Bibit Waluyo, Hidayat Nur Wachid, Suryadharama Alie, Hatta Rajasa, dsb.; tanyakan apakah mereka pernah merasakan menjadi orang miskin? Mereka dilahirkan dan ditakdirkan hidup di tengah keluarga yang sudah mapan, hidup dengan penuh fasilitas; dan tidak pernah berstatus menjadi keluarga miskin. (\*)

## **Mudik, Reunifikasi, dan Ekonomi Lebaran<sup>13</sup>**

**G**elombang arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini relatif berlangsung aman dan terkendali. Jutaan orang merayakan Lebaran dengan cara pulang dari kota menuju kampung (mudik). Setelah itu mereka kembali ke lokasi tempat tinggal maupun tempat kerja mereka (balik). Sebuah kenikmatan luar biasa bisa melepas kangen (rindu) terhadap kampung halaman dan aneka kenangan di dalamnya.

Namun perpindahan jutaan manusia dari satu pulau ke pulau lainnya, satu kota/kabupaten ke kota/kabupaten lainnya dalam waktu bersamaan dengan berbagai moda (alat transportasi) yang ada seperti pesawat terbang, kereta api, bus, mobil, kapal laut, travel, taksi, dan sepeda motor; mengakibatkan arus mudik dan balik menjadi macet. Tradisi mudik dan balik Lebaran yang terjadi setiap tahun tersebut memiliki implikasi luas pada kehidupan manusia.

Salah satu manfaat besar dari adanya momentum Lebaran adalah reunifikasi dari berbagai kelompok orang yang pernah terhubung pada kesamaan institusi, kesamaan kampung kelahiran, kesamaan organisasi, maupun kesamaan lainnya. Reunifikasi merupakan penyatuan kembali tali silaturahmi (komunikasi) di antara sesama rekan sepermainan, teman sekolah, teman kuliah, teman berorganisasi, teman kerja, dan lainnya. Ada banyak pihak yang menginisiatifi diadakannya reuni selama musim Lebaran ini.

Misalnya reuni teman SMA seangkatan yang dilakukan oleh salah satu sekolah di Yogyakarta belum lama ini. Adanya jalan hidup yang berbeda-beda, tempat tinggal yang berlainan kota, dan kepentingan kerja atau hidup lainnya menyebabkan setiap orang harus rela berpisah untuk sekian lama. Anak-anak

---

<sup>13</sup> Supadiyanto. (2016). *Mudik, Reunifikasi, dan Ekonomi Lebaran*. Harian Bernas edisi 12 Juli 2016.

SMA/K/MA yang baru saja dinyatakan lulus sekolah terpaksa harus berpisah dengan teman-teman sekelasnya karena harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sebagian yang lain ada yang langsung bekerja, atau sebagian kecil memilih mengakhiri masa lajang dengan menikahi kekasihnya. Hidup adalah pilihan. Ada banyak pilihan-pilihan yang harus dipilih oleh setiap orang untuk menjalankan takdir hidup masing-masing. Banyak orang yang memilih bekerja merantau ke luar kota bahkan ke luar negeri. Semua dilakukan demi mencapai cita-cita hidup. Hidup untuk lebih baik, lebih sukses, dan lebih bahagia.

Reuni tentu menjadi ajang yang tepat bagi semua orang untuk berkumpul kembali, saling memberikan kabar kesuksesan masing-masing; dan juga bisa berbagai beban hidup. Reuni menjadi forum persaudaraan yang bisa menghidupkan kembali semangat kebersamaan, kenangan lama (memori) suka dan duka selama terikat pada suatu institusi atau organisasi yang sama. Mereka yang sudah sukses bisa memberikan rahasia kesuksesannya kepada teman lainnya yang belum sukses, agar mereka juga bisa sukses mereka yang sudah sukses besar. Sukses hidup bukan lantas didefinisikan sebagai sukses memiliki banyak harta, mobil mewah, rumah megah, tabungan dan aset besar, dan kekayaan material lainnya.

Sukses bisa diukur juga dari sisi intelektual dan rohaniah. Misalnya sukses kuliah sampai S3 hingga meraih gelar guru besar, sukses menjalankan ibadah haji ke Mekah, sukses mampu menghidupi ribuan karyawan dengan menjadi pengusaha, sukses menjadi politisi dengan membantu rakyat miskin, sukses memiliki banyak anak yang berhasil, sukses memiliki jaringan pertemanan yang sangat besar, sukses menjalani profesinya dengan kesungguhan hati, dan aneka sukses lainnya. Kesuksesan adalah buah dari ikhtiar yang terus-menerus diupayakan oleh setiap manusia. Kesuksesan menjadi ekstraksi cita-cita hidup yang banyak diburu oleh mereka yang kini tengah menimba ilmu, bekerja di kantor-kantor maupun lapangan, maupun mereka yang tinggal di rumah-rumah.

Reuni menjadi ajang keakraban dan komunikasi mengasyikkan bagi setiap orang yang pernah saling terbubungkan. Setelah bertahun-tahun tidak pernah bisa saling bertatap muka secara langsung, reuni saat musim Lebaran dapat dijadikan sebagai komunikasi bisnis serta gerakan untuk saling berbagi dan membantu. Betapa bahagianya kita manakala kita bisa berjumpa langsung dengan sahabat lama kita yang dulu pernah membantu kita. Betapa senang hati kita manakala kita masih diberikan umur panjang untuk menjalin komunikasi langsung dengan mantan pacar (kekasih) waktu SMP dulu. Tentunya dengan segala suka duka dan kenakalan yang pernah dialami oleh mereka yang pernah mengenyam di bangku sekolah SMP.

Di tengah kehidupan manusia yang semakin liberalistis dan kapitalistis, nilai-nilai kemanusiaan juga kian terkikis; reuni atau penyatuan kembali rasa persaudaraan dan persahabatan di antara sesama manusia menjadi esensial dan strategis untuk terus ditumbuhkembangkan. Meskipun teknologi telekomunikasi, media, informatika, grafika, dan transportasi (Telematikagrtrans) sudah sangat canggih, sehingga sangat membantu koneksi atau keterhubungan di antara setiap orang; reunifikasi antar teman atau kolega secara langsung pada waktu dan ruang yang sama yang sudah ditentukan sebelumnya, tidak akan pernah tergantikan sepanjang masa. Sebab pertemuan langsung atau kontak fisik tidak bisa digantikan dengan komunikasi melalui media massa.

Mudik Lebaran yang sudah ada sejak puluhan tahun silam di negeri ini, membuktikan bahwa tradisi untuk saling berkunjung dan maaf-memaafkan saat Lebaran tiba belum bisa digantikan dengan budaya maaf-memaafkan melalui media massa maupun teknologi telekomunikasi lainnya. Mudik dan reunifikasi menjadi dua momentum yang saling terhubung oleh momentum bernama Lebaran. Meskipun perayaan Idul Fitri sudah berlalu, namun semangat untuk saling memaafkan dan berkomunikasi secara langsung tetap relevan dilakukan untuk menumbuhkan semangat persaudaraan dan persahabatan.

Kita harus jujur mengakui bahwa di balik perayaan Lebaran, terkandung potensi ekonomi bangsa yang luar biasa besar.

Ekonomi Lebaran tersebut berdampak sistemik dalam menghidupkan pusaran bisnis di bidang transportasi, makanan dan minuman, wisata alam dan kuliner, komunikasi, media massa, dan lain sebagainya. Perputaran uang selama libur Lebaran tahun ini sangat besar. Memang banyak orang yang terkesan "menghabiskan" pendapatan/tabungan mereka selama Lebaran tahun ini untuk membahagiakan sanak famili maupun teman (tetangga). Hal itu dilakukan untuk memuliakan para "tamu" maupun sahabat yang didudukkan sebagai salah satu pilar utama penyangga kehidupan sosial yang lebih baik. Dengan memuliakan para tamu dan sahabat, diharapkan jalan rizki dan tangga kesuksesan hidup bisa tergapai lebih mudah dan cepat. (\*)



**PROBLEMATIKA KONTEMPORER**

## Globalisasi dan Ketidakadilan Universal<sup>14</sup>

**A**da tiga isu sentral yang paling sensitif dimunculkan pada era globalisasi ini. Pertama, terkait masalah politik; yang membicarakan tentang perebutan pengaruh antar kelompok, bahkan antarbangsa. Kedua, soal agama, yang sangat kental dengan rasa fanatisme dalam meyakini sebuah keimanan dan ideologi tertentu. Dan ketiga, yakni berhubungan erat dengan gender; di mana terjadi banyak ketidakadilan dan ketidaksetaraan hak dan kewajiban antara kaum lelaki dan wanita; entah dalam lingkup satu negara maupun antarnegara.

Tiga isu besar di atas, sejatinya saling berkorelasi; sebab dalam konstelasi politik global; ketiganya menjadi fondasi pokok dalam menggerakkan berbagai kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan-keamanan dalam konteks global (universal). Pada masa rezim Orde Baru berkuasa, pemerintah sangat bangga dalam membicarakan masalah globalisasi, pasar bebas dan kompetisi Internasional. Segala kekuatan bangsa ini dikerahkan untuk menyongsong kesiapan dalam menghadapi era globalisasi.

Pada masa Orde Reformasi, kekuatan bangsa ini terpecah dalam menyikapi adanya era globalisasi. Karena dalam praktiknya, globalisasi telah menindas bangsa-bangsa yang tidak memiliki kekuatan dan daya kompetisi global. Tiba-tiba saja kita dibuat kelimpungan ketika berbagai produk pertanian luar negeri yang berkualitas bagus, dan harga yang lebih murah dari harga produk pertanian lokal (nasional); ternyata mematikan nasib petani lokal di Indonesia yang jumlahnya puluhan juta orang. Kita juga begitu kelimpungan, melihat berbagai perusahaan multinasional yang berdiri di berbagai kota di Indonesia; ternyata menyerobot potensi pasar yang selama ini dipegang oleh pengusaha lokal.

---

<sup>14</sup> Supadiyanto. (2013). *Globalisasi dan Ketidakadilan Universal*. Harian Umum Pelita edisi 20 Maret 2013.

Singkat kata, ternyata globalisasi sangat merugikan bangsa-bangsa yang memiliki kekuatan ekonomi lemah dan sumber daya manusia yang masih relatif rendah; baik dari sisi ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Termasuk bangsa ini mengalami babak-belur yang luar biasa ketika era globalisasi telah mengkooptasi segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ibarat sebuah pertandingan tinju, era globalisasi menandingkan dua petinju yang berbeda kelas; tanpa memberlakukan aturan yang adil. Mentimun dibenturkan dengan durian; sehingga sudah pasti mentimun hancur lebur. Memang dari sisi percepatan informasi dan pengetahuan, era globalisasi telah memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Setiap orang dapat dengan mudah mengakses berbagai macam literatur. Sumbernya dapat dengan mudah diperoleh dengan mengandalkan teknologi internet (digital). Tetapi prasyarat inipun hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kemampuan literasi berbagai media massa. Bagi masyarakat awam yang masih buta huruf dan kemampuan ekonomi buruk, sumber informasi akan sangat sulit diaksesnya.

Globalisasi memang sangat menguntungkan bagi negara-negara yang secara ekonomi dan politik memiliki kekuatan yang besar dan kokoh. Kesejahteraan universal yang ingin disebar merata di berbagai negara, tidak bisa dilakukan melalui strategi globalisasi. Sebab globalisasi justru melahirkan penindasan dan pemerjaraan yang luar biasa pada penduduk yang lemah dan termarjinalkan. Kendati jumlah mereka mayoritas, namun karena tidak memiliki cukup kompetensi dan kecakapan dalam bidang ekonomi, politik dan sumber daya manusia; akhirnya mengakibatkan mereka terlempar dalam kelompok yang terhegemoni dan termiskinkan.

Keadilan global menjadi barang yang langka dan sulit terwujudkan pada era globalisasi. Kendati sudah ada persekutuan antara negara-negara berkembang dalam sebuah organisasi regional maupun Internasional, ternyata belum cukup efektif dalam menggugat dan melakukan perlawanan terhadap hegemoni negara-negara maju dan sejahtera. Lahirnya blok-blok negara maju dan miskin (berkembang), malahan semakin

menimbulkan jarak psikologi dan saling menguasai.

Secara jujur, negara-negara miskin dan berkembang harus mengakui bahwa peradaban globalisasi belum siap diikuti dan diberlakukan. Sebab hanya akan melahirkan sistem yang mengondisikan mereka semakin miskin, terjerat oleh utang luar negeri yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan dunia; di mana dalam konteks perekonomian; sesungguhnya lembaga-lembaga perbankan Internasional tersebut merupakan kepanjangan tangan dari negara-negara maju.

Penindasan yang dimunculkan oleh era globalisasi, memang mengakibatkan munculnya kesadaran bersama dari negara-negara miskin dan berkembang. Solidaritas sosial semakin kuat, tetapi dampak positif tersebut belum cukup dijadikan modal kuat dalam menghadapi hegemoni ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dilancarkan oleh negara-negara maju di era globalisasi.

Munculnya gerakan kesadaran sosial yang terjadi di berbagai "negara ketiga" untuk melakukan unifikasi, memang sangat positif dalam mengurangi dampak buruk yang dimunculkan oleh adanya globalisasi dengan karakter khususnya perdagangan bebas, liberalisasi informasi dan hegemoni pengaruh atau politik oleh negara superior. Misalkan saja di kawasan Asia Tenggara, munculnya ASEAN merupakan upaya kolegal untuk menangkis gempuran peradaban globalisasi yang menempatkan negara-negara berkembang berada pada posisi yang tidak menguntungkan.

Jepang dan China merupakan dua negara di Asia yang kita pandang memiliki potensi bagus dalam hal kekuatan ekonomi, politik dan strategi budaya pada era globalisasi ini. Namun negara-negara lainnya, masih tertatih-tatih dan terjerumus dengan berbagai persoalan klasik yang menjerat kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam hal mengatasi soal kemiskinan, pengangguran dan problematika sosial lainnya. Sementara negara-negara maju sudah jauh melangkah pada persoalan substansial, yakni bagaimana melipatgandakan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu memunculkan peradaban bangsa yang kompetitif dan tercerahkan.

Singkat kalimat, sebagai kesimpulan tulisan pendek; era

globalisasi yang kini mencengkeram segala peradaban berbagai negara, akhirnya melahirkan hegemoni kelompok bangsa yang menguasai teknologi, kekuasaan, kecerdasan dan kompetensi atas kelompok bangsa yang lebih lemah. Muncullah dominasi negara-negara yang makmur, kaya dan maju atas negara-negara miskin dan berkembang.

Hukum globalisasi tidak memberikan keadilan global bagi kelompok negara yang lemah, dan miskin (berkembang). Sebab, sumber daya manusia yang dimiliki tidak mampu melakukan perlawanan (kompetisi) *vis to vis* dengan kekuatan negara-negara maju yang sudah menghegemoni segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi terlebih dahulu. Ketidakadilan sosial dan ketidakadilan global menjadi realitas hidup di era globalisasi ini, yang patut mendapatkan sorotan tajam. Satu pertanyaan besar yang bisa dicetuskan; mungkinkah di tengah deraan peradaban globalisasi ini; bangsa-bangsa yang lemah, miskin (berkembang) dan minim sumber daya manusia melakukan perlawanan atau gerakan sosial; sehingga mereka mampu mengimbangi hegemoni atau dominasi negara-negara yang makmur? (\*)

## Melawan Fenomena "Deindonesianisasi"<sup>15</sup>

Sebagian penduduk negeri ini kini mulai merasakan benar adanya gejala-gejala "deindonesianisasi". Yakni fenomena sosial yang menunjukkan perubahan gradual pada kesejatian Indonesia menuju peradaban yang bukan Indonesia. Fenomena "deindonesianisasi" tersebut mengakibatkan realitas kesejatian diri bangsa Indonesia tinggal separuh saja, sedangkan setengahnya lagi bukan Indonesia.

Ada banyak contoh yang bisa menguatkan tren "deindonesianisasi" di atas. Misalkan, mengapa para penguasa yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif semakin banyak yang tersangkut kasus korupsi? Bukankah karakteristik dasar yang dimiliki penduduk bangsa ini adalah mental kejujuran. Berbagai kasus paradoks lainnya juga bisa dengan mudah kita jumpai di tengah terjadinya bencana alam. Mengapa ketika bencana banjir menimpa sejumlah daerah, banyak pemimpin yang berlomba-lomba menawarkan bantuan; tetapi ternyata di balik kebaikan itu mereka memiliki pamrih politik agar menang dalam Pilkada atau Pemilu?

Lagi, anak-anak muda zaman sekarang sudah hidup dalam abad keterbukaan. Segala informasi negatif atau positif, bebas diakses dengan mudah. Mereka kini tengah mengalami keterbingungan identitas diri, melihat realitas peradaban atau kebudayaan masing-masing negara yang sangat kontras. Mereka kini memiliki identitas ganda, identitas keindonesiaan mereka secara tak sadar, pelan-pelan ditanggalkan dan ditinggalkan; melihat kemerdekaan, kebebasan dan kenikmatan (kesenangan) mengonsumsi peradaban atau jenis kebudayaan milik bangsa asing yang lebih santai, nikmat dan seolah melegakan hati. Akibat kompulsifnya, bangsa ini telah

---

<sup>15</sup> Supadiyanto. (2013). *Melawan Fenomena "Deindonesianisasi"*. Harian Umum Pelita edisi 25 Januari 2013.

kehilangan separuh identitas kesejatiendirinya. Indonesia tinggal setengah, sedangkan separuh yang lainnya sudah berubah menjadi bukan Indonesia.

Untuk itulah bangsa ini harus memiliki kesadaran kolektif dalam berpolitik. Untuk menciptakan bangsa yang maju, setiap orang harus melek dunia politik. Pasalnya politik sangat berpengaruh pada kemaslahatan masyarakat. Menyangkut masa depan hajat hidup jutaan manusia. Dalam konteks Indonesia, yang kini dihuni sekitar 240 juta jiwa; ketidakpedulian atau ketidaktahuan masyarakat dalam politik akan menyengsarakan kehidupan ratusan juta penduduk bangsa ini.

Dalam konsep berpolitik, lahirlah terminologi pemimpin dan rakyat. Muncul pula istilah pemerintah dan negara. Lainnya, tercetus konsep demokrasi dan keterwakilan. Yang kemudian menciptakan pemikiran-pemikiran komprehensif yang secara prinsipiil bertujuan untuk memakmurkan dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara yang mengabaikan nasib kesejahteraan penduduknya adalah negara yang mengkhianati rakyatnya. Masing-masing orang, dalam konteks negara Indonesia, memiliki hak dasar yang sama, egaliter dan setara untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan dari negara. Yang kemudian dalam konteks demokrasi, fungsi negara ini diwakilkan melalui pemerintah yang berkuasa. Adanya pergantian penguasa (pemerintah) dengan siklus 5 tahunan, sejatinya memberikan kesempatan setiap orang (penduduk) memberikan kontribusi kemajuan pada kemakmuran dan kesejahteraan negara.

Dipilihnya sistem demokrasi, karena konsep tersebut memberikan keadilan sosial pada setiap lini. Kendati pun dalam praktiknya, suara mayoritas menjadi penentu tunggal atas berbagai fungsi kenegaraan yang ada. Superioritas kelompok mayoritas atas kelompok minoritas, menjadi lumrah dalam negara demokrasi. Berbahayanya adalah ketika suara mayoritas itu bernilai salah, maka nilai kesalahan tersebut diberlakukan dalam sebuah sistem kenegaraan. Sebab, tidak ada jaminan mutlak bahwa suara kelompok mayoritas itu selalu bernilai benar. Dan suara kelompok minoritas (tersingkirkan) itu selalu bernilai salah.

Berdasarkan sejarah politik di berbagai negara, termasuk di Indonesia; kekuasaan pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudikatif) selalu dikuasai oleh mereka yang kaya secara finansial, cerdas, dan memiliki dukungan kuat dari media massa. Bermodalkan kekayaan yang berlimpah, seseorang mudah mendirikan sebuah organisasi partai politik atau bergabung dengan partai politik yang ada; sehingga memuluskan langkah dalam menguasai berbagai jabatan politik. Dengan kecerdasan mumpuni, seseorang gampang meracik skenario politik dengan menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh-tokoh kunci dan massa, sehingga melancarkan jalannya menuju kekuasaan-kekuasaan yang berpuncak pada Istana Negara. Sedangkan bermodalkan dukungan kuat dari media massa, popularitas dan setiap langkah politik yang dilakukan seseorang akan selalu dikenal, dikenang dan diketahui oleh publik melalui berbagai media cetak dan elektronik.

Ketidakadilan dalam perebutan jabatan kekuasaan (pemerintahan) adalah minimnya kesempatan orang miskin, orang bodoh atau kurang terpelajar dan tidak memiliki akses yang kuat kepada jaringan media massa mampu menduduki jabatan politik yang dimaksudkan di atas. Padahal kuantitas kelompok masyarakat dalam tiga kategori di atas adalah mayoritas. Sehingga sangat sah kebenarannya, bahwa suara minoritas yang memiliki tiga modal dalam mengakses kursi-kursi jabatan (sebagai pemimpin atau penguasa) menghegemoni (memonopoli) ketidakberdayaan suara mayoritas yang umumnya miskin, bodoh dan tak memiliki akses terhadap media massa.

Apa yang terjadi ketika kekuasaan hanya dimonopoli kalangan elite (orang kaya, cerdas dan penguasa media massa)? Bagaimanakah memberdayakan tiga kelompok mayoritas di atas (orang miskin, orang bodoh dan tidak memiliki akses terhadap media massa) sehingga mampu memiliki kesadaran politik yang kuat, dengan harapan mereka bisa berubah menjadi orang kaya, orang terpelajar dan kuat dalam mengakses sumber-sumber informasi melalui media massa.

Yang terjadi adalah pertarungan politik antara politikus (yang *notabene*-nya mereka ini adalah orang-orang kaya, cerdas dan



menguasai jaringan media massa) yang berambisi merebut atau mempertahankan kekuasaan mereka, dengan memanfaatkan suara mayoritas (penduduk). Dalam hal ini; rakyat, penduduk atau masyarakat di Indonesia masih diidentikkan dengan kelompok yang lemah baik secara finansial, intelektual maupun sumber daya informasinya. Masyarakat tidak menyadari selama ini hanya dijadikan "jembatan politik" bagi kepentingan para politikus, entah yang mengusung semangat nasionalisme, relijijusisme atau kombinasi keduanya.

Ketidacerdasan masyarakat dalam berpolitik, akhirnya mengakibatkan keprihatinan sendiri yang menimpa masyarakat. Penduduk tetap miskin dan bodoh, kendati pun kekuasaan di negeri ini selalu berganti-ganti. Sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi; nasib sebagian besar penduduk bangsa ini masih dalam kondisi lemah, miskin, dan tidak berdaya. Sejak pemerintahan Soekarno diganti Soeharto, kemudian diduduki oleh Habibie; beralih ke Gus Dur, berpindah kekuasaan ke Megawati Soekarnoputri dan sekarang dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono; masih ada puluhan juta penduduk miskin, puluhan juta penduduk yang bodoh (buta huruf), dan puluhan juta penduduk yang lemah dalam mengakses sumber-sumber informasi melalui media massa. Sementara invasi peradaban dan kebudayaan bangsa asing yang lebih menjanjikan liberasi, kemegahan, kemewahan yang memabukkan dan kebebasan tanpa batas; begitu mendayu-dayu di hadapan kita.

Kita menakutkan, identitas kesejatian diri keindonesia kita yang kini tinggal separuh ini, lama kelamaan akan habis tergerus, hingga tak tersisakan lagi. Kita harus segera menghentikan terjadinya gejala "deindonesianisasi" sekarang juga, melawannya dengan gerakan "nasionalisasi keindonesiaan" kita melalui penyadaran berpolitik publik. Rakyat, penduduk, masyarakat atau publik harus cerdas berpolitik, kaya secara finansial, cerdas secara intelektual dan kuat dalam mengakses media massa. Itulah yang kita impikan bersama; tak terlalu penting dengan sistem pemerintahan dan bentuk negara apa yang diterapkan. (\*)

## **Pemilu 2014 dan Manuver Politik ala "Ken Arok"<sup>16</sup>**

**B**erbagai manuver politik yang dilancarkan para politikus nasional maupun politikus lokal mulai awal tahun 2013 ini, dapat dimaknai sebagai politik pendongkrak popularitas pribadi maupun institusional (organisatoris). Sebagai contoh sederhana, langkah pengunduran diri Harry Tanoesoedibjo dari struktural Partai Nasional Demokrat (Nasdem)—belum lama ini, jangan sekadar diinterpretasikan sebagai konflik internal Partai Nasdem.

Namun fenomena politik tersebut harus dipandang sebagai manuver politik yang dimainkan oleh tokoh politik maupun institusional partai politik. Bahwa ada perbedaan kepentingan politik antara dua pucuk pimpinan dalam Partai Nasdem yakni Surya Paloh dan Harry Tanoesoedibjo, memang harus kita akui. Namun siapa yang mafhum, bahwa langkah tersebut merupakan manuver institusional "Partai Nasdem" untuk menyedot perhatian publik. Memang benar, berita pengunduran Harry Tanoesoedibjo dari Partai Nasdem memberikan dampak negatif. Namun kita juga harus mengetahui bahwa pemberitaan tersebut memberikan kontribusi positif pada popularitas nama Partai Nasdem sebagai "pemain politik baru". Jadi, langkah politik di atas dapat dipandang sebagai manuver politik cerdas secara institusional Partai Nasdem.

Dalam sejarah klasik kerajaan di Indonesia, ada kisah tokoh fenomenal bernama Ken Arok yang menerapkan politik bumi hangus. Ken Arok berasal dari kasta sudra (orang miskin) berniat menjadi penguasa. Langkah-langkah itu berhasil direalisasikannya melalui manuver politik yang bernama "politik bumi hangus". Yakni memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, memberdayakan kelemahan yang dimiliki musuh-musuh

---

<sup>16</sup> Supadiyanto. 2013. *Pemilu 2014 dan Manuver Politik ala Ken Arok*. Jateng Pos-Jogjakarta Pos edisi 26 Januari 2013.

politiknya, untuk menggolkan ambisi politik yang dimiliki Ken Arok.

Prototipe Ken Arok, secara positif merupakan contoh pemimpin yang sukses memprakarsai adanya keadilan sosial. Sebab, pemimpin bukan menjadi hak bagi orang-orang kaya atau pun mereka yang berdarah ningrat. Melainkan juga, menjadi hak mutlak bagi orang-orang miskin. Secara negatif, manuver politik yang dijalankan Ken Arok menghalalkan segala macam siasat, bahkan dengan menghabisi nyawa (membunuh) lawan politik.

Energi positif yang harus diapresiasi dari Ken Arok adalah kerja keras dan tak kenal putus asa (tekad kuat) untuk mewujudkan cita-cita. Kecenderungan yang terjadi mendekati Pemilu 2014 ini adalah adanya pengadopsian politik "negatif" yang dimiliki Ken Arok. Banyak politikus yang menghalalkan berbagai macam cara. Termasuk dengan jalan mencuri uang negara (korupsi), propaganda hitam (melancarkan politik fitnah), dan manuver-manuver politik yang intinya membohongi keluguan publik.

Di mata para politikus nasional dan lokal, Pemilu 2014 mendatang yang meliputi Pemilu Legislatif (9 April 2014) dan Pemilu Presiden (9 Juli 2014) merupakan medan pertarungan politik yang sesungguhnya. Sebab sudah tak ada peluang lagi bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mencalonkan atau dicalonkan kembali dalam Pemilu Presiden 2014. Artinya, saat ini adalah masa-masa akhir kekuasaan SBY. Unikny, ada satu pola kecenderungan sejarah yang selalu menimpa nasib para Presiden RI ketika memasuki masa-masa akhir kekuasaan.

Presiden Soekarno, sebagai presiden pertama yang berkuasa di era Orde Lama; yang terpilih tanpa melalui jalur Pemilu atau konsensus dari wakil rakyat; ketika mengakhiri masa pemerintahannya meninggalkan citra buruk pada tahun 1966. Sebab, beliau dilengser dengan cara yang halus melalui kudeta "Supersemar". Presiden RI kedua yakni Soeharto, juga meng-*ending*-i kekuasaannya dengan noda hitam; yakni melalui proses pengunduran diri akibat desakan dari gerakan massa (*people power*) tahun 1998. Sekali lagi, akhir pemerintahan yang

buruk juga menimpa Presiden Habibie, sebab pertanggungjawabannya ditolak oleh lembaga wakil rakyat, sehingga secara otomatis menganvaskan karier politiknya akibat kasus Referendum Timor Timur (baca: Timor Leste). Sedangkan ujung pemerintahan Presiden Gus Dur pun tercatat sangat buruk, sebab beliau harus berhenti berkuasa di tengah jalan karena adanya *impeachment*. Hanya akhir pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang boleh dikatakan berakhir manis, kendati kenyataannya kepemimpinannya dinilai gagal; sebab dalam Pemilu Presiden 2004; ia kalah dalam Pemilu Presiden 2004 yang diadakan secara langsung.

Pertanyaannya sekarang, apakah Presiden SBY akan mengakhiri pemerintahannya dengan *happy ending* atau *tragic ending*-kah? Jika SBY mampu meninggalkan kursi kepresidenannya dengan tinta emas yang dahsyat, dengan warisan prestasi luar biasa; tentunya beliau lah satu-satunya presiden yang dapat dikatakan sebagai "presiden lima melati". "Presiden lima melati" maksudnya presiden yang mampu mengakhiri setiap masa pemerintahannya dengan harum, manis dan membahagiakan. Bahkan kalau tidak ada aturan yang bersifat mengikat; maka sosok bersangkutan masih memiliki kesempatan sangat besar menjabat sebagai presiden kembali.

Sangat terlihat bahwa SBY sedang berusaha keras mendesain peta hidupnya mencapai predikat tersebut. Dalam sisa kekuasaannya ini, SBY akan tampil maksimal dengan mempersembahkan seluruh kemampuannya pada masa kekuasaannya yang tersisa. Tampilan merakyat, sebagaimana yang berhasil diperankan oleh Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta berusaha diaplikasikan dalam menjalankan kursi kekuasaannya. Tipikal pemimpin seperti Joko Widodo memiliki karier politik ke atas yang sangat menjanjikan (prospektif). Kesuksesan Joko Widodo dalam "mencitrakan sosoknya" sebagai pemimpin rakyat; tampaknya akan direadaptasi dan diadaptasi secara gradual dan terintegratif oleh SBY.

SBY yang sejak lama menerapkan politik pencitraan, secara perlahan-lahan menggeser arah kebijakan politiknya menjadi pemimpin rakyat. Bukan lagi model pemimpin yang berjarak dengan rakyat. Jarak sosiologis, psikologis, intelektual maupun

fisik yang terjadi antara para pemimpin dan rakyat; menjadikan komunikasi dua belah pihak berjalan timpang, searah sebagaimana sistem komando dalam budaya militer-kepolisian; dan menjadikan model komunikasi politik yang dibangun dan dikedepankan adalah politik citra. Inginnya selalu tampil sempurna, baik ucapan maupun tampilannya.

Kendati realitasnya, ada realitas politik yang ditampilkan oleh sosok politikus tersebut yang buruk, tercela dan dibenci publik. Namun dengan politik pencitraan di atas, realitas buruk di atas, bisa dipoles, dicitrakan menjadi sesuatu yang tersembunyikan, dan bahkan berubah menjadi bagus. Padahal politik pencitraan tersebut, sangat merugikan kepentingan publik. Sebab menutup atau merekayasa realitas sejati dengan realitas semu atau pseudo (tersamarkan).

Melalui pembentukan pemimpin-rakyat; atau bisa saja di balik menjadi rakyat-pemimpin; akan menjadikan langkah-langkah politik yang dibangun oleh para politikus menjadi lebih membumi, merakyat, tidak berjarak dengan masyarakat yang menjadi patron kehidupan. Namun dalam kamus perpolitikan, justru masa-masa akhir kekuasaan; kebanyakan dimanfaatkan oleh sejumlah pemimpin untuk memaksimalkan pengerukan keuntungan material bagi pribadi, kelompok maupun institusi partai politik. Banyaknya para pemimpin atau pejabat negara yang tersangkut dalam skandal korupsi pada masa-masa akhir kekuasaannya, menjadi bukti nyata bahwa ada cara-cara yang berbeda yang dilakukan para pemimpin dalam menyikapi masa-masa akhir kekuasaan. Apakah mereka menerapkan politik pengharuman nama, ketika akan merebut kekuasaan; mempertahankan kekuasaan hingga mengakhiri kekuasaan; atautah mengaplikasikan politik pengerukan keuntungan pribadi setinggi-tingginya ketika berkuasa atau ketika mengakhiri masa kekuasaannya.

Tetapi jelas, secara sadar atau tidak, manuver-manuver politik "negatif" ala Ken Arok berpeluang besar diadopsi oleh para politikus nasional maupun lokal untuk memuluskan ambisi-ambisi politik mereka untuk menguasai berbagai kursi jabatan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kalau hal tersebut

yang terjadi, rusaklah etika politik maupun etika sosial dalam pergulatan dunia politik di negeri ini. (\*)

## ICT, Solusi Masalah Kemiskinan, dan Pengangguran<sup>17</sup>

**S**eluruh *stakeholders* bangsa harus berani jujur mengakui, masalah terpokok yang dihadapi bangsa ini berkenaan problema ekonomi (finansial). Mengapa demikian? Jumlah utang luar negeri Indonesia kini mencapai Rp 2 ribu triliun dan dipastikan jumlahnya terus menggelembung besar. Sisi lain, jumlah penduduk miskin negeri ini mencapai hampir 30 juta jiwa dan jumlah pengangguran nasional hampir 10 juta jiwa.

Pertanyaan yang relevan terlontarkan, mampukah *Information and Communication Technology (ICT)* membangkitkan kembali potensi Indonesia secara optimal (reoptimalisasi) segera terbebas dari jeratan krisis ekonomi, melalui upaya melahirkan jutaan pengusaha dalam berbagai sektor industri?

ICT adalah teknologi terampuh yang akan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Rendahnya penguasaan dan pemberdayaan ICT di negeri ini menjadikan mutu perekonomian Indonesia jauh tertinggal dibanding negara tetangga, bahkan dengan Malaysia dan Singapura.

Bila dipetakan, ada 10 negara termakmur sedunia. Mereka adalah Qatar, pendapatan per kapita Rp 811 juta per tahun, Luxemburg Rp 715 juta per tahun, Norwegia Rp 477 juta per tahun, dan Singapura Rp 475 juta per tahun. Negara termakmur lainnya adalah Brunai Darussalam, pendapatan per kapita Rp 438 juta per tahun, Amerika Serikat Rp 429 juta per tahun, Hongkong Rp 403 juta per tahun, Swiss Rp 395 juta per tahun,

---

<sup>17</sup> Supadiyanto. (2012). *ICT, Solusi Masalah Kemiskinan dan Pengangguran*. SKH Kedaulatan Rakyat edisi 26 Juni 2012 dan sebagian gagasannya dipresentasikan dalam International Seminar&National Symposium bertajuk: “*Global Competitiveness Through Research Supporting Commercial Industry*” di Hyatt Regency Hotel Yogyakarta, Sabtu (23/6/2012).

dan Belanda sebesar Rp 365 juta per tahun, serta Australia Rp 354 juta per tahun. Indonesia masih jauh dari peta negara-negara sejahtera (makmur) tersebut.

Padahal Indonesia adalah bangsa yang besar. Bukan hanya besar dalam jumlah penduduknya dan besar dalam konteks luas wilayahnya. Melainkan juga memiliki kebesaran peradaban, kebesaran kearifan lokal dan kebesaran jiwa. Bermodalkan itu, kita yakin bangsa ini akan bangkit dari berbagai keterpurukan.

ICT merupakan alat utama untuk mempercepat kebangkitan bangsa ini, dari berbagai bidang kehidupan. Ingat, bangsa ini memiliki jutaan anak muda yang menyimpan energi sejarah dan energi kebangkitan yang luar biasa. Dengan memprovokasi setiap anak muda bangsa ini termasuk para mahasiswa menjadi mahasiswa pengusaha, kelak ketika lulus dari bangku PT, mereka benar-benar sudah menjadi pengusaha sejati. Pengangguran nasional yang jumlahnya jutaan jiwa serta penduduk miskin yang berjumlah mendekati angka 30 juta jiwa, hanya bisa ditanggulangi secara sistematis melalui penciptaan pengusaha secara massal.

Tidak ada jalan keluar lain yang lebih cepat dan murah, kecuali dengan cara demikian. Dengan mengoptimalkan program mahasiswa pengusaha, dengan jumlah mahasiswa seluruh Indonesia yang lebih dari 4,65 juta jiwa, kita merasa optimistik problematika sosial dan ekonomi yang menelikung bangsa ini dapat di atasi. Dan sekarang tinggal kita lihat bersama, seberapa besar komitmen dan kinerja para generasi muda seluruh Indonesia dalam mewujudkan misi tersebut.

Guna menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, salah satu kunci terpenting yaitu dengan mengandalkan pada pembangunan berbasis ICT. Segala potensi bangsa ini harus dikerahkan sepenuhnya untuk menguasai ICT. Pasalnya sebuah bangsa dengan otomatis menjadi negara miskin ketika tak menguasai ICT. Dengan lain kata, ada relasi kuat antara dunia ICT, taraf hidup kesejahteraan masyarakat, melek media massa dan pengetahuan serta kokohnya perekonomian nasional.

Satu program sederhana tapi bersubsansi besar, yakni mendorong lebih dari 50 juta pelajar dan mahasiswa Indonesia memiliki kecakapan dalam dunia ICT. Kalau memungkinkan



bekali setiap pelajar dan mahasiswa tersebut sebuah *laptop/notepad* yang terkoneksi internet. Langkah sederhana tersebut, memotivasi mereka memiliki kreativitas, pengetahuan dan mempunyai jiwa *entrepreneurship*.

Kita tutup tulisan ini dengan sebuah pertanyaan, mampukah seluruh elemen bangsa ini bahu-membahu mengangkat derajat kekokohan dan kemandirian perekonomian nasional melalui penguatan dan penguasaan dunia ICT, sehingga terlahir minimal 4,76 juta pengusaha? (\*)

## Berlomba menjadi Pejabat Antikorupsi<sup>18</sup>

**K**PK, pengadilan, kepolisian dan lembaga penegak hukum lain terus menggalakkan pemberantasan korupsi di berbagai bidang kehidupan. Kasus demi kasus korupsi akhirnya dapat terbongkar mulai dari skandal korupsi yang merugikan negara dalam jumlah triliunan, miliaran hingga berkisar jutaan rupiah saja. Pelakunya ternyata bukan siapa-siapa. Melainkan mereka yang dulu menduduki jabatan sebagai penguasa alias pejabat negara. Entah yang duduk di lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif.

Para koruptor yang tidak lain para pejabat negara tersebut, juga dulu kebanyakan dipilih langsung oleh rakyat. Melalui berbagai pesta demokrasi seperti Pemilu dan Pemilukada yang menelan biaya negara cukup besar. Mereka adalah kader-kader terbaik yang dimiliki partai-partai politik. Hanya ada satu, dua saja yang bukan berasal dari unsur partai politik.

Hikmahnya ada dua hal. Pertama, rakyat turut berkontribusi dalam melahirkan para koruptor. Mereka yang memilih langsung melalui Pemilu dan Pemilukada. Dua, para pejabat negara adalah para pelaku yang punya kans terbesar menjadi koruptor. Sebab merekalah yang membuat peraturan dan mengelola keuangan negara.

Tidak mungkin petani gurem yang miskin dan tinggal di pegunungan menjadi koruptor di berbagai birokrasi negeri ini. Maka yang perlu ditekankan saat ini adalah, melakukan gerakan nasional antikorupsi. Mengajak para pejabat negara berlomba-lomba menjadi pejabat antikorupsi. MUI harus mengeluarkan fatwa haram menjadi koruptor. Lembaga pendidikan harus memasukkan kurikulum antikorupsi dalam mata pelajaran di sekolah. Termasuk perguruan tinggi, mestilah mengekstraksikan kurikulum berbasis antikorupsi dalam

---

<sup>18</sup> Supadiyanto. (2012). *Berlomba menjadi Pejabat Antikorupsi*. Harian Umum Suara Karya edisi 3 Juli 2012.

perkuliahan. Kalau perlu para pejabat negara wajib dikontrol selama 24 jam penuh. Setiap pergerakan dan tindakannya disadap demi kepentingan negara. Tentunya untuk bisa melakukan hal itu, memerlukan payung hukum berupa perundang-undangan.

Dengan menstimulusi para pejabat negara memiliki mental antikorupsi dapat ditempuh melalui berbagai metode, disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Setiap bupati, walikota dan gubernur dipaksa secara sistematis menjadi koordinator gerakan nasional tersebut. Sehingga sangat lucu, kalau sampai ada bupati, walikota maupun gubernur yang tersangkut kasus korupsi. Menurut pandangan penulis, cara ini sangat efektif dalam mempersatukan kesadaran kolektif dalam memberantas berbagai virus korupsi beserta derivasinya.

Siapa saja yang relevan dilibatkan dalam gerakan nasional ini? Semua elemen masyarakat, harus terlibat di dalamnya. Namun yang terpokok, para pelaku lembaga penegak hukum mestinya memprakarsai dalam gerakan nasional tersebut. Indonesia punya potensi kejujuran dan kearifan lokal yang bisa disinggungkan dengan upaya pemberantasan korupsi.

Dari 33 propinsi dan ratusan kabupaten/kotamadya di Indonesia pastilah memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan ikon dalam upaya pemberantasan korupsi. Target utamanya, menghilangkan praktik korupsi di seluruh Tanah Air. Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terbebas dari berbagai skandal korupsi akan membawa dampak kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat.

Beranihlah para pejabat negara berlomba-lomba menjadi pemberantas korupsi dan penegak hukum. Dengan mengamankan dan menyelamatkan uang negara, berbagai program pembangunan dapat diselamatkan, masyarakat miskin dan lemah dapat diberdayakan. Hingga angka kemiskinan dan pengangguran serta kebodohan dapat diminimalisir.

Bangsa ini membutuhkan para pemimpin yang memiliki mental antikorupsi. Kita pernah merasa bangga terhadap pemerintahan Orde Lamanya Soekarno. Tapi kita juga pernah dikecewakan oleh pemerintahan tersebut. bak *dejavu* sejarah, bangsa ini pernah pula mengagung-agungkan pemerintahan

Orde Baru, tetapi kita juga pernah dikecewakannya. Idem juga dengan peristiwa di atas, kita tidak ingin dikecewakan oleh pemerintahan Orde Reformasi.

Dalam konteks kesadaran sejarah, kita tidak memandang lagi Anda berasal dari partai politik mana. Agama Anda juga apa, tidak lagi kita pertanyakan dalam kesadaran sejarah di masa mendatang. Yang lebih pokok adalah bagaimana kejujuran Anda. Bagaimana sepak terjang dan perilaku Anda dalam kehidupan sehari-hari bergaul dengan keluarga, tetangga dan masyarakat.

Indonesia membutuhkan ajaran agama terbarukan yang mengajarkan kepada setiap orang kejujuran. Bukan ketidakjujuran yang akhirnya melahirkan kesengsaraan. Yang dibutuhkan Indonesia adalah partai politik yang mengajarkan akan tata nilai kejujuran, bukan cara berpolitik yang koruptif dan membodohi rakyat. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin yang jujur dan patuh hukum. Bukan malah sebaliknya, seolah-olah patuh hukum, tetapi di belakang layar berpraktik korupsi atau kejahatan intelektual model lainnya. (\*)

## Artis Vs Artis, Siapa Menang?<sup>19</sup>

Pilgub Jawa Barat bakal dihelat pada tanggal 24 Februari 2013 mendatang. Ada tiga fenomena menarik yang bakal terjadi dalam Pilgub Jawa Barat 2013. *Pertama*, terjadi pertarungan antara kandidat yang berlatar belakang artis dan antar non artis. *Kedua*, pertarungan intelektual antara petahana, yakni Ahmad Heryawan (Gubernur Jabar 2008-2013) dan Dede Yusuf (Wakil Gubernur Jabar 2008-2013), yang sama-sama menjagokan diri menjadi Gubernur Jabar 2013-2018. *Ketiga*, majunya kandidat independen dalam Pilgub Jabar 2013 yang bakal menambah “seru” pesta demokrasi 5 tahunan di Jabar.

Tampaknya ambisi para artis untuk beralih profesi menjadi pejabat eksekutif maupun legislatif semakin kentara (kuat) di negeri ini. Terbukti benar, semakin banyaknya artis yang menjagokan diri menjadi wakil rakyat atau kepala daerah, menguatkan postulat di atas. Perhelatan antar artis untuk memperebutkan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi dalam Pilgub Jabar 2013.

Di mana terdapat tiga artis nasional yang bertarung memperebutkan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Tiga artis tersebut yakni Dede Yusuf Macan Effendi, Rieke Diah Pitaloka dan Deddy Mizwar. Adapun lima pasangan yang akan berlaga dalam Pilgub Jabar pada 24 Februari 2013 mendatang adalah Dikdik M. Arif Mansyur-Nana Suryana Toyib, Irianto MS. Syafiuddin-Tatang Farhanul Hakim, Dede Yusuf-Lex Laksamana Zaenal, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar dan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki.

Kesuksesan para artis menjadi kepala daerah dan wakil rakyat di negeri ini, disinyalir menjadi pemicu utama kenapa para artis itu kepincut menjadi pejabat negara. Modal ketenaran (popularitas) yang dimiliki para artis, berkat aktingnya di dunia

---

<sup>19</sup> Supadiyanto. (2013), *Artis Vs Artis, Siapa Menang?*. Harian Umum Pelita edisi 15 Januari 2013.

teve dan media lain; menjadi nilai plus bagi mereka. Meski praktiknya, banyak juga artis-artis yang keok dengan kandidat lain, melalui Pemilu maupun Pilkada. Kegagalan Marisa Haque dalam Pilgub Banten, Andre "OVJ" Taulani di Pilkada Tangerang dsb. Bisa menjadi pelajaran penting; bahwa sisi popularitas tidak menjamin kesuksesan seseorang dalam memenangkan pesta demokrasi.

Dari sisi etika politik, majunya sejumlah artis dalam panggung politik; bukan sesuatu yang patut dihakimi buruk atau baik. Sebab dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak untuk maju, berkiprah menjadi pemimpin dalam skala nasional maupun lokal, bahkan Internasional. Para artis adalah warga negara, yang memiliki hak sama untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah atau jabatan publik lain.

Dari segi profesionalitas, tentu saja para artis yang berniat menjadi pejabat publik, sebagaimana yang dilakukan Dede Yusuf, Deddy Mizwar dan Rieke Diah Pitaloka dalam Pilgub Jabar 2013, mengharuskan yang bersangkutan segera meninggalkan dunia artis. Sebab dunia artis itu, duaniannya seni peran, berakting. Lebih lugunya, dunia artis itu dunia berpura-pura. Para artis itu harus segera meninggalkan profesi keartisanannya, dan segera mengubah haluan menjadi pemimpin yang mengayomi masyarakat. Dunia ingar-bingar, kehidupan yang eksklusif harus segera dicampakkan oleh para artis. Untuk mengubah pola hidup artis yang sudah mendarah daging itu, tentu bukan persoalan yang gampang. Dibutuhkan perjuangan hidup yang amat keras dan keyakinan tinggi.

Jadi para artis yang terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah nanti, harus bersikap profesional. Segera tinggalkan dunia keartisan mulai dari sekarang. Sebab dunia politik bukan dunia seni peran, bukan pula dunia seni pertunjukan. Dunia politik menyangkut kemaslahatan hajat hidup banyak orang. Dalam konteks Pilgub Jabar 2013, kandidat gubernur dan wakil gubernur mendatang sangat penting dalam menentukan masa depan dan kesejahteraan hidup jutaan penduduk Jabar.

Sedangkan dari sisi keterpilihan, memang para artis memiliki peluang yang lebih besar menang ketimbang kandidat bukan

artis. Sebab kandidat artis, telah memulai kampanye politiknya jauh hari melalui saluran televisi, radio dan media massa lain. Masyarakat Jabar telah jauh hari mengenal sosok mereka, paling tidak dari gaya para artis itu berakting di televisi. Hanya saja, hal ini tidak menutup kemungkinan kandidat non artis untuk memenangi perhelatan Pilgub. Sebab, penduduk Jabar semakin cerdas dalam menentukan pilihan terbaik mereka.

Citra dunia artis nasional memang kurang begitu baik hingga kini. Persoalannya sederhana saja. Kisah hidup rumah tangga berbagai keluarga artis yang berakhir dengan perceraian dan kemudian nikah lagi dan kemudian terjadi perceraian lagi, mengakibatkan publik tidak suka pada kehidupan para artis. Secara profesi, tidak ada yang salah dengan pekerjaan sebagai artis. Sebab tugas mereka adalah memberikan hiburan. Menghibur adalah pekerjaan yang mulia, sebab bisa membebaskan banyak orang terhindar dari rasa bosan dan perasaan stres atau tertekan.

Jabar merupakan propinsi yang memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang sangat tinggi, tersebar dalam 17 kabupaten dan 9 kota. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 38 juta jiwa, menjadikan Propinsi Jabar sangat strategis menjadi kawasan industri, mengingat posisinya berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Maka dari itu, hajatan Pilgub 2013 mendatang, menjadi momentum mahapenting dalam menentukan masa depan pembangunan Jabar selama 5 tahun ke depan.

Pertanyaannya, siapa di antara 5 kandidat itu yang punya kans menang paling besar? Kuncinya berada di tangan pemilih sendiri. Jika penduduk Jabar merasa puas dan mengaku senang dengan kepemimpinan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf sejak 2008 hingga sekarang; bukan tak mungkin dua tokoh ini akan menjadi opsi pilihan pertama dan kedua. Namun jika kepemimpinan dua kandidat itu dinilai publik gagal dan koruptif, dengan sendirinya pilihan penduduk Jabar akan menjatuhkan opsinya pada kandidat lain atau kandidat baru.

Lantas, bagaimana kans kandidat yang berasal dari jalur independen, bukan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik? Belajar dari Pilkada di berbagai daerah di

Indonesia, peluang mereka untuk memenangi pesta demokrasi sangat kecil. Secara empirik, dari sejumlah pesta demokrasi tingkat lokal (daerah), baru ada empat pasangan calon kepala daerah dari jalur independen yang berhasil memenangkan Pilkada. Mereka adalah Irwandi Yusuf–M Nasir (Gubernur-Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam), Christian N. Dillak-Zacharias P. Manafe (Bupati-Wakil Bupati Rote Ndou, NTT), O.K. Arya Zulkarnain-Gong Martua Siregar (Bupati-Wakil Bupati Batubara, Sumut), Aceng Fikri-Raden Dicky Chandra (Bupati-Wakil Bupati Garut, Jabar), Saifullah-MG Hadi Sutjipto (Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo).

Tentunya jika pasangan Dikdik M. Arif Mansyur-Nana Suryana Toyib yang berangkat dari jalur independen mampu memenangi Pilkada Jabar 2013, akan mengulangi sejarah perpolitikan di Jabar, di mana pernah ada pasangan dari jalur independen di Kabupaten Garut (Jabar) yang pernah memenangi Pilkada. Meski peluang itu sangat kecil, mengingat kompetitor lain didukung oleh politik pencitraan yang kuat, dana kampanye besar dan mesin partai politik yang solid.

Siapa pun pasangan yang nantinya bakal memenangi Pilgub Jabar 2013, mereka harus mampu mengedepankan nilai-nilai kearifan lokalitas Jabar, sebagai benteng pertahanan ekonomi, benteng pertahanan budaya dan benteng pertahanan sosial dari berbagai gempuran industrialisasi multinasional yang semakin menjamur di Propinsi Jabar.

Para intelektual kampus yang berada di Jabar wajib hukumnya dalam menemukan tokoh “reformis” yang mampu membawa perubahan postur wajah Jabar menjadi propinsi yang paling terdepan di Indonesia. Ada 19 PTN dan 41 PTS yang berdomisili di Jabar, artinya sentra-sentra kaum intelektual tersebut harus mampu mengawal terlahir dan terpilihnya kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2013-2018 yang jujur, cerdas, profesional dan progresif.

Kita tunggu saja siapakah pemenang Pilkada Jabar 2013, apakah artis atau non artis. Apakah dari jalur independen atau non independen. Apakah para petahana pemenangnya atau pendatang baru? Atau apakah hasilnya akan mengejutkan publik, sebagaimana hasil Pilkada DKI Jakarta beberapa bulan lalu



SUPADIYANTO, S.Sos.I., M.I.Kom.

yang mampu mengantarkan Joko Widodo sebagai pemenang.  
(\* )

## Membongkar Relasi Media, Politik dan Demokrasi<sup>20</sup>

Media massa memiliki kekuatan penuh (*powerfull*) untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi. Perkembangan dunia yang semakin liberalis, ternyata mampu menggeser fungsi media massa. Semula media massa berperan sebagai alat perjuangan, bergeser haluan menjadi alat pengeruk keuntungan (bisnis pengusaha) dan kemudian beralih menjadi alat propaganda bagi para pengusaha dan penguasa (meraih kekuasaan dan keuntungan bisnis).

Noam Chomsky melihat media dalam era kapitalis liberal, sarat konspirasi. Gejalanya terlihat ketika bisnis media mulai diatur oleh tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan politik dan uang. Para elite kekuasaan dan elite bisnis berkolaborasi mengatur isi media. Akibatnya, kebebasan pers yang dijiwai demokrasi dan liberalisme, tersusupi propaganda segelintir orang. Dalam konteks ini, tupoksi media massa melenceng dari koridor idealisme. Dalam teori normatif, media harus menjalankan fungsi sebagai milik publik, dan mencerdaskan publik.

Buku berjudul: "*Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*" yang ditulis Henry Subiakto dan Rachmah Ida (2012) membeberkan bagaimana korporasi media global, nasional dan lokal menjadi institusi bisnis dan berubah sebagai kepanjangan tangan para politikus. Bahkan kini semakin banyak pengusaha media yang menjadi politikus.

Banyak pemilik media massa yang terjun dalam konstelasi politik praktis, untuk menjadi pejabat legislatif maupun eksekutif. Dalam komunikasi politik, kedudukan media menjadi semacam "*public relation*". Sebab kemampuan media massa menyebarkan berbagai informasi penting dalam waktu sekejap dan menebas

---

<sup>20</sup> Supadiyanto. (2013). *Membongkar Relasi Media, Politik, dan Demokrasi*. Koran Jakarta edisi 18 Januari 2013.

sekat ruang dan waktu; memposisikan media massa sebagai mercusuar informasi publik.

Di masa postmodern ini, banyak partai politik memiliki media massa. Tujuannya, sebagai strategi politik untuk membangun komunikasi politik dengan konstituen (simpatisan). Yang terjadi adalah perang wacana, adu argumentasi dan pertarungan antarmedia; di mana media massa yang memiliki massa kuat dan politik pencitraan yang bagus akan menghegemoni informasi. Sebaliknya pihak yang tak memiliki media massa, semakin terkerdilkan dan terkalahkan oleh daya ekspos yang dilakukan oleh berbagai media massa.

"Chomsky menganalisis adanya konspirasi para elite yang melakukan kontrol pemberitaan dan informasi. Dengan menggunakan istilah *manufacturing consent*, tokoh kritis ini melihat media menjadi alat kepentingan politik, ekonomi, dan kultur kalangan eksklusif. Menurutnya para *gate keeper* media menjadi pion politikus dan pengusaha untuk mencari keuntungan," tegas penulis buku ini pada Bab Kekuasaan Media (*Media Power*) yang termuat pada halaman 104.

Dengan demikian idealisme media sebagai pengontrol kekuasaan dan ruang publik telah tereduksi menjadi wahana politis dan ekonomis bagi pemilik media yang berkonspirasi dengan para pemegang kekuasaan. Keberadaan media yang dikelola dengan mengandalkan suplai dana dari anggaran negara, entah sebagian atau penuh; praktis secara hukum pasar bebas tak mampu bersaing dengan korporasi media swasta nasional maupun media lokal yang telah menerapkan prinsip konspirasi politik-ekonomi di atas. Yang terjadi, komodifikasi dan kapitalisasi berbagai produk media massa. Bahkan konten-konten yang disiarkan maupun dimuat di berbagai media memiliki misi politis dan ekonomis, untuk mengukuhkan kepentingan para pemilik modal (pengusaha) dan penguasa.

Perlunya regulasi dan kebijakan dalam industri media massa yang sesuai dengan karakter dan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus kearifan global, menjadi tuntutan yang harus segera diimplementasikan. Kalau tidak, risikonya, media massa tidak akan bisa sehat. Sebab hanya dihegemoni oleh mereka yang memiliki kekuatan modal dan kekuasaan.

Keunggulan buku tersebut yakni mampu mengupas berbagai fenomena teraktual dalam bidang media, komunikasi, politik dan demokrasi dari berbagai perspektif. Kelemahannya, kupasan yang dihasilkan masih belum mendalam. Entah karena alasan praktis atau maksud lain, pembagian bab demi bab dalam buku tersebut terkesan sebagai "*review*" saja dari berbagai buku referensi yang dijadikan rujukan, bukan melakukan sintesis; sehingga kurang maksimal menemukan formulasi baru untuk mengatasi berbagai problematika multikompleks yang membelenggu dunia media massa. (\*)

## Pilgub Jateng dan Politik Hegemoni<sup>21</sup>

**P**ropinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah bakal mengelat Pilgub (Pemilihan Gubernur) dalam waktu berdekatan. Pilgub Jateng dihelat 26 Mei 2013, sedangkan Pilgub Jawa Barat diselenggarakan 24 Februari 2013. Hanya beda 3 bulan, lebihnya 2 hari. Uniknyanya, suhu politik menjelang Pilgub di dua propinsi yang bertetangga tersebut, sangat kontras. Dinamika Pilgub Jabar sangat fluktuatif, bahkan sensitif menimbulkan gesekan (konflik) di tingkat *grassroot*. Sementara atmosfer politik dalam Pilgub Jateng terkesan apatis, *adem-ayem* saja.

Indikasinya jelas, hingga menjelang 4 bulan hari H Pilgub Jateng, belum ada peta politik yang bersifat pasti. Belum ada satu pun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur partai politik maupun independen yang berani mendeklarasikan diri jauh hari sebelumnya.

Yang terjadi sekarang, masih terjadi perang wacana antar kandidat, bahkan kecenderungannya yang akan tampil dalam Pilgub Jateng 2013 ini hanyalah para petahana. Mereka adalah Bibit Waluyo, yang kini masih menjabat sebagai Gubernur Jateng; Rustriningsih (Wakil Gubernur Jateng) dan Hadi Prabowo (Sekda Propinsi Jateng). Dalam ilmu politik, itu yang dinamakan fenomena pecah kongsi.

Di luar tiga nama itu, belum ada satu pun parpol kelas besar maupun menengah yang berani memunculkan nama-nama kandidat lainnya. Apalagi nama-nama kandidat dari jalur independen. Menyimak kecenderungan ini, jika benar nanti hanya ada tiga kandidat yang bertarung dalam Pilgub Jateng 2013, menunjukkan begitu apatisnya dinamika perpolitikan di Jawa Tengah.

---

<sup>21</sup> Supadiyanto. (2013). *Pilgub Jateng dan Politik Hegemoni*. Wawasan edisi 22 Januari 2013.

Andaikan saja Joko Widodo gagal dalam Pilgub DKI Jakarta, dan kemudian ikut bertanding dalam bursa Pilgub Jateng 2013; tentu saja peta politik Pilgub di Jawa Tengah akan sangat menarik. Kesuksesan Joko Widodo terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, sesungguhnya memberikan kepercayaan diri yang luar biasa pada PDI Perjuangan untuk memunculkan kandidat yang memiliki tipikal kepemimpinan yang dimiliki Joko Widodo yang merakyat, dekat dengan kalangan menengah ke bawah dan tidak mengedepankan politik citra. Pada aspek lain, kesuksesan Joko Widodo mantan Walikota Surakarta menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta, juga memberikan dampak psikis bagi para politikus Jateng untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan setiap langkah, tindak-tanduk maupun ucapan.

Sebab setiap ucapan dari para politikus yang menyalahi etika kemaslahatan sosial, bisa saja menghancurkan kredibilitas yang bersangkutan. Belum adanya satu pun partai politik di Jateng yang berani mendeklarasikan paket calon gubernur dan wakil gubernur, sangat mungkin juga untuk melakukan pengefisienan dana kampanye. Sehingga partai politik dan para kandidat tidak usah mengeluarkan dana kampanye yang besar, terutama sebelum masa kampanye Pilgub Jateng secara resmi dimulai.

Tapi yang paling mendasar, dalih logis kenapa tidak banyak kandidat yang bermunculan dalam Pilgub Jateng hingga sekarang, menunjukkan kepada publik bahwa para politikus memandang sangat berat untuk bersaing melawan para petahana; sehingga mereka lebih memilih pasif saja; setidaknya menunggu "barisan" partai politik atau kelompok organisasi kemasyarakatan-keagamaan yang merasa tidak terpuaskan dengan para kandidat yang akan maju dalam Pilgub; menginisiasi untuk memunculkan kandidat lain di luar para petahana atau pejabat struktural kekuasaan.

Dibandingkan dengan peta politik di Jawa Barat, memang sangat jauh berbeda dengan peta politik di Jawa Tengah kini. Di Jawa Barat, jauh hari sebelumnya, para kandidat entah yang berangkat dari jalur partai politik atau gabungan partai politik maupun jalur independen; getol melakukan manuver-manuver

politik maupun politik penyosialisasian (propaganda) baik secara terang-terangan (vulgar) atau tidak langsung. Adapun lima pasangan yang akan berlaga dalam Pilgub Jabar pada 24 Februari 2013 mendatang adalah Dikdik M. Arif Mansyur-Nana Suryana Toyib, Irianto MS. Syafiuddin-Tatang Farhanul Hakim, Dede Yusuf-Lex Laksamana Zaenal, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar dan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki.

Pemilu 2014 yang semakin dekat, mengondisikan para politikus nasional terutama para Ketua Umum dari berbagai Partai Politik menerapkan politik hegemoni. Di mana setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada, kandidat yang diusung oleh setiap partai politik bersangkutan harus bisa memenangi pemilihan langsung 5 tahunan tersebut.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah bagi mereka dalam memenangkan pertarungan politik yang sesungguhnya di tingkat nasional, yakni perebutan kursi-kursi legislatif (Pemilu Legislatif) dan perebutan jabatan presiden-wakil presiden (Pemilu Presiden) dan menempatkan kader-kader partai politiknya duduk menjadi menteri dan pos-pos strategis yang setara dengan kekuasaan tersebut.

Dengan demikian Pilgub Jawa Tengah dan Jawa Barat yang hampir berdekatan itu menjadi pertarungan politik, tidak hanya melibatkan politikus lokal saja. Tetapi juga menarik hasrat para politikus nasional untuk mengintervensi hasil akhir dalam pesta demokrasi tersebut. Sebagai contoh sederhana saja, bagaimana logika politik yang dimainkan oleh PKS, di mana mereka rela mempertaruhkan martabat kepartaipolitikannya, dalam Pilgub DKI Jakarta 2012 sampai berani memajang Hidayat Nur Wachid, mantan Ketua Umum PKS tersebut sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Dengan cara berpikir normal, karier politik Hidayat Nur Wachid secara prestisius sudah habis. Untuk diharapkan bisa memenangkan Pilgub DKI Jakarta saja, ia telah gagal.

Padahal di masa Pemilu 2009, Hidayat Nur Wachid pernah diwacanakan untuk dipasang menjadi salah satu Capres RI dari PKS. Nalarnya, sudah turun berada derajat "nilai komoditas politik" yang kini dimiliki oleh Hidayat Nur Wachid, dari Capres menjadi Cagub, itupun gagal. Apakah pada Pemilu 2014 nanti

PKS akan berani melontarkan gagasan untuk mengusung Hidayat Nur Wachid sebagai salah satu Capres RI?

Tentu saja hal tersebut tidak akan dilakukan oleh partai politik tersebut, sebab langkah itu sama saja dengan "teknik blunder" partai politik bersangkutan. Belajar dari kasus politik pertarungan martabat yang dilakukan PKS di atas, tentu saja akan memberikan lampu merah pada partai politik lainnya untuk menghindarkan diri dari langkah blunder, yakni memajang para mantan Ketua Umum partai politik sebagai calon gubernur atau bahkan calon bupati/walikota di Indonesia.

Dalam konteks Pilgub Jateng 2013, keminimalisasian kandidat yang muncul sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, hendaknya jangan sampai terjadi akibat ketakutan para politikus non petahana dalam merebut kursi kekuasaan. Semakin banyak munculnya calon gubernur dan wakil gubernur; bahkan dari jalur independen, paling tidak sebanyak satu atau dua pasang kandidat, akan memberikan warna tersendiri bagi dinamika politik di tingkat lokal. Minimal bisa memberikan alternatif opsi (pilihan) bagi para pemilih di Jawa Tengah yang jumlahnya puluhan juta orang tersebut.

Memang kans para kandidat dari jalur perseorangan (independen) amat tipis dalam memenangi Pilgub Jateng. Tapi keunggulan yang dimiliki kandidat dari jalur perseorangan yakni kedekatannya secara fisik maupun psikologis dengan masyarakat, sebab mereka tidak berangkat dari rumah politik bernama partai politik yang citranya belakangan ini semakin terpuruk, diharapkan semakin memperbesar peluang kemenangan mereka.

Belajar dari Pilkada di berbagai daerah di Indonesia, secara empirik, dari sejumlah pesta demokrasi tingkat lokal (daerah), baru ada empat pasangan calon kepala daerah dari jalur independen yang berhasil memenangkan Pilkada.

Mereka adalah Irwandi Yusuf–M Nasir (Gubernur-Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam), Christian N. Dillak-Zacharias P. Manafe (Bupati-Wakil Bupati Rote Ndou, NTT), O.K. Arya Zulkarnain-Gong Martua Siregar (Bupati-Wakil Bupati Batubara, Sumut), Aceng Fikri-Raden Dicky Chandra



SUPADIYANTO, S.Sos.I., M.I.Kom.

(Bupati-Wakil Bupati Garut, Jabar), Saifullah-MG Hadi Sutjipto  
(Bupati-Wakil Bupati Sidoardjo). (\*)

## Memberdayakan Energi Alternatif<sup>22</sup>

Duet pemerintahan Jokowi-JK dan Kabinet Kerja harus segera menyadari benar bahwa stok (cadangan) minyak bumi sebagai sumber energi utama akan mengalami kepunahan (habis) dalam waktu cepat atau lambat. Apalagi minyak bumi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi komoditas yang riskan mengalami fluktuasi harga (naik-turun) sebagai dampak perpolitikan dunia. Implikasinya, roda pemerintahan dan perekonomian sebuah bangsa mudah sekali tergoyahkan akibat adanya kenaikan harga BBM.

Dalam sejarah perminyakan dunia, harga BBM cenderung selalu mengalami kenaikan. Dampak sitemik kenaikan harga BBM, pasti menimpa berbagai sektor kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam. Maka kita harus bisa mencari sumber energi alternatif pengganti BBM yang berharga murah, mudah dan praktis. Hal ini merupakan tantangan para peneliti dan intelektual kampus berkompetisi dalam menemukan energi-energi alternatif terbaharui (bukan berbasis pada fosil). Sebab jika kita menggantungkan diri pada sumber energi berbahan dasar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, keberadaan energi tersebut tidak berlangsung lama.

Salah satu sumber energi alternatif yang dapat dijadikan solusi bagi masa depan dan ramah lingkungan adalah energi matahari. Para peneliti dan intelektual harus bisa menangkap energi matahari (surya) tersebut menjadi energi alternatif pengganti BBM. Bukankah sinar matahari selalu bisa ditemukan di berbagai penjuru dunia. Penelitian-penelitian ilmiah harus dikerahkan menuju ke sana. Dengan cara demikian, akan merangsang dan menemukan inovasi-inovasi revolusioner yang bisa bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia.

---

<sup>22</sup> Supadiyanto. (2014). *Memberdayakan Energi Alternatif*. Suara Karya edisi 11 November 2014.

Di samping energi matahari, energi lain yang bisa dieksplorasi lebih dalam lagi yakni materi berupa air dan udara yang ada di muka bumi. Kreativitas dan kecerdasan para peneliti dan intelektual kampus dalam mengubah materi berupa air dan udara menjadi energi alternatif, diharapkan juga mampu mengatasi masalah krisis BBM yang terjadi di Indonesia, bahkan tingkat dunia. Prihatinnya, aktivitas penelitian yang berorientasi pada penemuan energi alternatif pengganti BBM, jumlahnya sangat terbatas. Ketidakantusiasan kalangan peneliti menemukan sumber energi alternatif pengganti BBM, disinyalir akibat tradisi akademik di lingkungan perguruan tinggi juga masih rendah.

Yang kita dengar selama ini, para pejabat negara cuman mengusulkan solusi cepat mengatasi krisis BBM yakni dengan jalan membangun kilang-kilang baru di Indonesia. Memperbanyak kilang minyak bumi di Tanah Air, menurut hemat penulis, hanya merupakan solusi jangka pendek. Sebab jumlah minyak bumi di Indonesia, entah yang sudah diketahui keberadaannya maupun yang belum terdeteksi, sangat terbatas. Langkah mengimpor BBM dari Timur Tengah yang dikenal sebagai ladang minyak bumi, pun bukan cara bijaksana.

Pasalnya langkah tersebut sangat riskan terjadi praktik korupsi. Di samping itu menyedot anggaran negara yang jumlahnya cukup besar. Seperti dalih yang dikemukakan oleh pemerintah Jokowi-JK, rencana menaikkan harga BBM per dalam waktu dekat ini dikarenakan kondisi keuangan negara tidak mampu lagi menutup defisit anggaran BBM yang harganya terus meroket. Memang dalam kuartal terakhir tahun ini, terjadi tren penurunan harga minyak bumi di dunia, yang kini masih menyentuh angka USD 84 per barel. Kendati demikian, subsidi negara untuk harga BBM di pasaran terus mengalami kenaikan daritahun ke tahun. Artinya manakala terjadi kenaikan harga minyak bumi di dunia, akan menjadi teror bagi stabilitas perekonomian Indonesia. Kondisi buruk semacam ini tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut.

Nurani sebagian besar anggota DPR RI (wakil rakyat) hasil Pemilu Legislatif 2014 dalam memandang rencana kenaikan harga BBM patut dipertanyakan. Apakah mereka sudah bekerja

secara profesional, dalam menyuarakan aspirasi masyarakat? Atau sekedar mereka menjadi kepanjangan suara pejabat negara (penguasa)? Padahal kita mafhum, jumlah penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan lebih dari 28 juta jiwa (data BPS Maret 2014). Belum lagi ditambah jumlah penduduk menganggur dan anak putus sekolah.

Membahas masalah kebijakan per-BBM-an nasional, teranglah terkait erat perkara dunia politik dan industri (bisnis). Idealnya, bangsa ini harus mengakhiri masa keruwetan manajemen per-BBM-an dalam negeri ini melalui terobosan baru. Yakni menemukan energi alternatif pengganti BBM secepatnya. Kalau sumber energi alternatif pengganti BBM tersebut sudah ditemukan dan diproduksi secara massal dengan harga terjangkau, kita meyakini perekonomian bangsa ini tidak akan mudah terteror oleh lonjakan harga BBM sebarang tingginya.

Melihat kondisi riil di lapangan, untuk mengatasi masalah harga BBM yang semakin mahal tidaklah mudah. Apalagi konsumsi BBM di Indonesia tergolong tinggi di dunia. Kenyataannya memang demikian. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 240 juta jiwa, permintaan kebutuhan akan BBM khususnya jenis premium dan solar terus meningkat dari hari ke hari. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor (angkutan umum, bis, truk, dan sepeda motor) di Indonesia sudah mencapai lebih dari 70 juta unit. Di mana 52 juta unit di antaranya merupakan kendaraan sepeda motor. Data tersebut dirilis BPS tahun 2009 lalu. Tentu saja jumlah kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2014 ini bertambah besar lagi.

Sedangkan jika ditilik dari angka konsumsi BBM di Indonesia, pada tahun 2008 lalu saja sudah mencapai 1,6 juta barel per hari (bph). Padahal pada tahun 2006 lalu mencapai 1,84 juta bph. Memang belum ada data pasti berapa angka konsumsi BBM di Indonesia pada tahun 2014. Namun dengan berasumsi total kebutuhan konsumsi BBM tahun 2012 lalu mencapai 1,6 juta bph, maka dalam sebulan sudah menghabiskan 48 juta bph. Hitung saja berapa jumlah anggaran negara yang harus dibayarkan untuk mensubsidi harga BBM tersebut?

Berdasarkan data PT Pertamina (tahun 2006), kemampuan produksi BBM nasional hanya mencapai 40,9 juta kilo liter atau turun sekitar 3,9 persen dibandingkan tahun 2005. Jelaslah angka tersebut belum mampu menutup jumlah kebutuhan BBM secara nasional. Total kapasitas terpasang kilang minyak bumi PT Pertamina (Persero) dan milik swasta baru mencapai sekitar 1.156 juta barel per hari yang digunakan untuk mengolah minyak bumi produksi dalam negeri maupun impor untuk menghasilkan berbagai produk BBM dan non BBM.

Akibat minimnya produksi minyak bumi dalam negeri, pemerintah menetapkan kebijakan impor minyak bumi rata-rata sekitar 500 ribu barel per hari. Sangat logis jika kondisi keuangan negara Indonesia sangat rentan goyah dan limbung akibat kenaikan harga minyak bumi. Satu-satunya cara cerdas mengatasi masalah besar itu terkait krisis BBM dan kian mahalannya harga BBM, hanyalah terletak pada kemampuan para peneliti dan intelektual kampus dengan secepat mungkin menemukan sumber energi alternatif pengganti BBM. Kapankah itu, kita selalu mengharapkannya. (\*)

## Peta Kekuatan 10 Parpol<sup>23</sup>

**K**PU Pusat (Selasa, 8 Januari 2013) telah menetapkan sebanyak 10 partai politik (Parpol) yang berhak mengikuti Pemilu 2014. Yakni Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP dan Partai Hanura. Secara geneologis, 10 Parpol itu dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, Parpol berhaluan nasionalis. Kedua, Parpol menganut ideologi religius. Ketiga, Parpol kombinasi nasionalis-religius atau religius-nasionalis.

Parpol yang sangat jelas mengusung semangat nasionalis adalah Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Sementara Parpol dengan emblem religius adalah PKB, PKS, PPP dan PAN. PAN sengaja penulis letakkan pada bagian terakhir, karena ia bisa ditempatkan sebagai “Parpol transformatif”. Di mana dalam perjalanannya, PAN adalah Parpol yang dikonotasikan dekat dengan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, yang bertransformasi menjadi Parpol nasionalis. Jadi menurut penulis, PAN sangat tepat didudukkan dalam kelompok Parpol religius-nasionalis.

PKB, PKS dan PPP belum bisa dikategorikan menjadi Parpol religius-nasionalis, karena masih sangat kental dengan kelompok politikus muslim yang fanatik pada nilai-nilai religiusitas. Dan tiga Parpol tersebut, kini tengah berusaha keras mencitrakan diri sebagai Parpol berhaluan religius-nasionalis. Sebab sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini, keberadaan Parpol religius “selalu keok” dalam papan bidak percaturan politik nasional. Sebab secara kultural-historis, bangsa ini memiliki ketakutan luar biasa jika ideologi bangsa ini disetir menuju ideologi religius. Pengalaman-pengalaman traumatik

---

<sup>23</sup> Supadiyanto. (2013). *Peta Kekuatan 10 Partai Politik*. Harian Umum Pelita edisi 31 Januari 2013.

sejarah bangsa, menyebabkan paranoid kolegal terhadap kesadaran politik di Tanah Air. Di samping alasan ideologis di atas, secara politik; bangsa ini juga bukan negara agama (religius). Tetapi lebih relevan merupakan representasi negara sekuler-religius. Lebih tepatnya disebut sebagai negara nasionalis-religius.

Bukan model religiusnya dulu yang didahulukan, tetapi faktor nasionalisnya yang lebih duluan dimunculkan. Itulah alasan tepat mengapa Parpol baru yang terlahir di Indonesia banyak menonjolkan faktor kenasionalismenya. Ketimbang faktor religiusitas. Dan ada kecenderungan bahwa di masa mendatang, hanya Parpol berideologi nasionalis dan atau religius-nasionalis saja yang akan menghegemoni dan memiliki massa pengikut kuat. Terbukti sejak era Reformasi bergulir, Pemilu Legislatif selalu dimenangi oleh Parpol berhaluan nasionalis. Pemilu 1999 yang diikuti 48 Parpol dimenangi PDI Perjuangan, Pemilu 2004 diikuti 24 Parpol dimenangi Partai Golkar, dan Pemilu 2009 diikuti 38 Parpol dijuarai Partai Demokrat. Pada Pemilu 2014 nanti, apakah Parpol berhaluan religius dan religius-nasionalis di atas memiliki kans besar untuk merebut dominasi kemenangan Pemilu Legislatif? Angka statistik menunjukkan peluangnya sangat kecil. Kecuali ada mukjizat budaya dan “tragedi politik” yang tiba-tiba bisa membalikkan interpretasi masyarakat dalam berpolitik.

Secara statistik, peta kekuatan politik nasional hingga kini masih dikendalikan penuh oleh tiga Parpol nasionalis. Yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Demokrat. Kemunculan Partai Nasional Demokrat, sebagai satu-satunya Parpol baru yang berhak tampil dalam Pemilu 2014; tentu akan mengurangi jumlah kader-kader Parpol lama. Para pengagum dan kader Partai Nasional Demokrat ini jelaslah para mantan aktivis dan pengagum Parpol lama, sehingga otomatis bakal ada migrasi dan emigrasi kader/pemilih sebuah Parpol ke Parpol lain. Akibatnya, terjadi fluktuasi kader fanatik setiap Parpol di antara 10 Parpol peserta Pemilu 2014.

Pertanyaan menarik yang layak diprediksikan sekarang adalah, siapakah politikus yang memiliki kans paling besar menjadi Presiden RI 2014-2019? Masih sulit dikalkulasikan.

Kemenangan politik sebuah Parpol dalam Pemilu Legislatif 2014, bukan otomatis menjamin kandidat presiden dan wakil presiden yang diusung nanti; pasti memenangi kompetisi Pemilu Presiden tersebut. Sangat mungkin, gabungan Parpol kelas menengah sangat menentukan hasil akhir Capres manakah yang akan memenangi pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.

Marilah kita hitung matematika politik dan kekuatan politik dari 10 Parpol peserta Pemilu 2014. Kunci pentingnya adalah siapa tokoh penggerak masing-masing Parpol di atas. Partai Nasional Demokrat diarsiteki oleh Surya Paloh. Parpol ini masih sangat baru, sehingga peluang Surya Paloh diajukan menjadi Capres 2014 oleh Parpol besar (PDI Perjuangan, Partai Golkar maupun Partai Demokrat) sangat kecil, atau bahkan mustahil. Muhaimin Iskandar memegang kendali penuh PKB. Lutfi Hasan Ishaq mengomandoi PKS. Berturut-turut, Megawati Soekarnoputri masih menghegemoni PDI Perjuangan. Aburizal Bakrie "penguasa tunggal" dari Partai Golkar. Prabowo Subianto, tokoh sentral Partai Gerindra. Anas Urbaningrum memegang kunci Partai Demokrat. Sedangkan Hatta Rajasa, Suryadharma Alie dan Wiranto, masih menjadi "*commandante*" di tubuh PAN, PPP dan Partai Hanura.

Dari nama-nama di atas, siapakah yang layak dimunculkan menjadi Capres 2014. PKS, PPP, PAN, PKB, Partai Hanura, Partai Gerindra dan Partai Nasional Demokrat adalah kelompok partai kelas menengah yang punya potensi menyatukan suara sehingga mampu menjagokan politikus terbaiknya untuk di-RI-1-kan atau di-RI-2-kan. Tentu saja akan menjadi konspirasi dan kolaborasi yang sangat cantik untuk menandingi kebesaran jago-jago yang dimunculkan oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sehingga dari peta politik nanti, Parpol yang memiliki angka signifikan untuk bisa mengajukan Capresnya sendiri adalah tiga Parpol yang memiliki track record ampuh dalam Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 di atas; maka akan ada 4 pasang kandidat presiden-wakil presiden yang bakal bertarung dalam Pemilu Presiden pada 2014 nanti.

Siapakah pasangan Capres-Cawapres itu, tentu masih sulit diprediksi; karena masih akan menunggu hasil akhir Pemilu Legislatif 2014. Namun dari rel imajiner, kita bisa mensketsakan



bahwa pertarungan politik terpuncak pada Pemilu Presiden 2014 nanti akan terjadi *deal* politik kelas tinggi, di mana penentu kuncinya justru ditentukan oleh sikap politik dari Parpol kelas menengah. Sebab merekalah justru yang akan menjadi perebutan pengaruh di antara Parpol kelas besar. Setidaknya, kalau kita boleh berhipotesis, “tiga Parpol raksasa” itu adalah Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Mereka akan berlomba dalam menjalin konspirasi yang saling menguntungkan dengan “Parpol kelas menengah” seperti Partai Nasdem, PKB, PKS, Partai Gerindra, PAN, PPP dan Partai Hanura. Namun jika para politikus sentral Parpol kelas menengah tersebut justru melakukan manuver politik dengan menggalang poros sendiri; amat mungking Pemilu Presiden 9 Juli 2014 akan berlangsung dalam satu putaran (seperti dalam Pemilu Presiden 2009) atau sekaligus dua putaran (seperti dalam Pemilu Presiden 2004). Peluang keduanya punya potensi sama kuat, menyesuaikan dengan perkembangan politik pasca Pemilu Legislatif 9 April 2014.

Tapi ingat, semua analisis di atas masih bersifat semu (pseudo). Sebab dalam politik ada yang namanya dinamika. Sikap politik dan keputusan ratusan juta pemilih Indonesia bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kuat pada kecerdasan politik masing-masing orang dan faktor internal-eksternal yang melingkupinya. Belum ada jaminan bahwa dalam Pemilu Legislatif 2014 nanti; Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat akan keluar sebagai tiga Parpol dengan perolehan suara terbesar. Dan belum ada hukum politik bersifat pasti (rigit) juga bahwa 7 Parpol lain hanya akan terus berada di “kelas dua atau tiga” saja.

Siapa tahu Partai Nasional Demokrat yang baru itu bisa membikin kejutan politik sebagaimana “nasib” Partai Demokrat dalam Pemilu 2014 nanti. Siapa juga yang bisa menjamin perolehan suara Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat tetap besar, sangat mungkin hasilnya bisa terpuruk seperti yang tak terduga. Hukum politik itu sangat fluktuatif dan cair, tergantung pada kondisi zaman yang menggerakkan. (\*)

## Artis, Politikus dan Dunia Berpura-pura<sup>24</sup>

**D**alam teori kritikal, tugas utama seorang artis (aktor) adalah menghibur orang lain. Keahlian atau jasa yang dijualnya kepada publik adalah kemampuannya dalam memberikan hiburan. Dengan kata lebih sederhana, artis akan “melacurkan” kemampuan untuk menghiburnya tersebut, untuk mendapatkan imbalan materi maupun non materi.

Imbalan berupa materi itu bisa berwujud honor, upah, gaji, insentif dan harta bentuk lainnya. Sementara imbalan dalam bentuk non materi itu berupa popularitas, pujian, tepuk tangan, rasa kebanggaan dan pemujaan. Dalam konsep negara liberal, sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, artis ditempatkan sebagai kelompok orang yang dimiliki oleh publik. Dalam posisi demikian, seorang artis dilarang keras mengecewakan para pemujanya. Sebab, keartisannya secara prinsip mengandung prinsip milik publik.

Oleh para kelompok kapitalis (yang memiliki modal besar dan kekuasaan); para artis kemudian dijadikan komoditas utama untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Berbagai film, lagu, teater dan bentuk hiburan lainnya; “memberhalakan” para artis sebagai alat komoditas yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan finansial. Liberalisasi industri hiburan, kapitalisasi bisnis musik, komodifikasi tayangan-tayangan di berbagai media massa cetak dan elektronik, sesungguhnya menjadi representasi mutlak para pemilik modal (kapital) untuk meneguhkan eksistensi korporasi perusahaan bisnis mereka. Dan para artis tersebut, entah dalam kondisi sadar atau tidak sadar, diperjualbelikan secara material maupun non material.

Di Indonesia, banyak orang yang bermimpi menjadi artis. Katanya dengan menjadi artis akan menjamin kehidupan seseorang menjadi enak, hidup bahagia dan banyak dikenal

---

<sup>24</sup> Supadiyanto. (2013). *Artis, Politikus dan Dunia Berpura-pura*. Jateng Pos-Jogjakarta Post edisi 4 Februari 2013.

orang. Namun tidak sedikit pula kalangan yang tidak pernah bermimpi menjadi artis, sebab tahu segala jebakan-jebakannya. Anak-anak muda zaman sekarang, di mana alat-alat komodifikasi untuk menjadi artis sangat canggih menerpa mereka setiap saat dan di mana saja, memaksa mereka untuk hidup dalam budaya artis. Lama-lama mereka terperanjak juga menjadi artis.

Entah sekadar ingin menjadi artis kampung, artis kampus atau bahkan artis benaran. Tetapi secara kasat mata, kita bisa dengan mudah mendeteksi adanya perilaku kolektif yang serupa tengah menimpa anak-anak muda zaman sekarang. Yakni mereka berkeinginan menjadi artis. Padahal tahukah bahwa para artis yang mempunyai keahlian dalam menghibur orang lain itu juga membutuhkan yang namanya hiburan?

Mengapa tidak sedikit artis di Indonesia yang terjerembab dalam lubang hitam menjadi pengonsumsi obat-obatan terlarang seperti Narkoba atau minuman lain yang memabukkan? Patut dicermati, zat-zat seperti Narkoba, minuman keras (yang memabukkan) atau benda lainnya memiliki efek yang luar biasa jika bereaksi dalam tubuh manusia. Siapapun itu. Reaksi tubuh manusia ketika mengonsumsi zat-zat memabukkan tersebut, secara fisik menimbulkan kenikmatan yang luar biasa. Bisa memberikan kepuasan yang sungguh dahsyat. Bisa berimajinasi sesuai dengan kemauan pikiran mereka.

Dapat disimpulkan bahwa para artis yang mengonsumsi zat-zat yang berbahaya tersebut namun efeknya seolah menyenangkan bagi tubuh kita itu, tengah membutuhkan yang namanya hiburan juga. Dunia artis adalah dunia yang penuh dengan kepura-puraan. Kemampuan seorang artis dalam ber-acting di depan kamera, sehingga mampu memukau penonton televisi; merupakan bentuk kepura-puraan para artis dalam menampilkan profesionalitasnya. Dunia yang penuh kepura-puraan tersebut, mereka nikmati dan menjadi rutinitas keseharian yang tidak bisa dilepaskan.

Semakin senior seorang artis, ia akan semakin lihai dalam bermain kepura-puraan. Semakin junior seorang artis, mereka harus belajar keras untuk bisa menikmati hidup dalam keberpura-puraan. Hidup yang pura-pura tersebut, sialnya kerap

menjebak para artis dalam kehidupan yang nyata. Para politikus yang memiliki basis keartisan, harus berhati-hati dengan psikologi kepura-puraan tersebut.

Mereka bisa saja terjebak untuk menjadi politikus yang berpura-pura. Artinya berpura-pura menjadi politikus, padahal mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh harus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Apakah tidak bisa dilakukan seorang politikus-artis itu menjadi negarawan? Tentu saja sangat bisa, tergantung pada komitmen artis yang kini telah beralih profesi menjadi politikus tersebut dalam bersungguh-sungguh menjalankan tuntutan profesinya.

Sekarang mereka berada di dalam dua dunia yang berbeda. Artis, hidup dalam rutinitas kerja yang berpura-pura; sedangkan politikus harus hidup dalam rutinitas kehidupan nyata. Loncatan psikologi kerja yang berbeda habitat tersebut, tentu membutuhkan pola, strategi dan manajemen psikologi yang luar biasa. Sebelum jauh melangkah, pertanyaan yang tepat dilontarkan saat ini adalah; lebih mudah manakah seorang artis yang merancang karier menjadi politikus; ataukah seorang politikus yang ingin beralih menjadi artis?

Artis dengan keahlian keberpura-puraannya; dan politikus yang mahir dalam dunia keseriusan; akan sama-sama berat melaksanakan tugasnya ketika mereka saling bermigrasi (bergantian) profesi. Tetapi yang patut dicatat, artis yang sudah memiliki modal popularitas dan dekat dengan masyarakat; menjadi satu modal keunggulan yang bisa menjamin kemenangannya dalam proses pemilihan langsung dalam Pemilu atau Pemilukada di Indonesia.

Jika hanya faktor-faktor popularitas saja yang patut diperhitungkan oleh masyarakat pemilih dalam menentukan pilihan terhadap para politikus yang ada. Sementara para politikus yang akan beralih profesi menjadi seorang artis, juga pantas belajar lebih keras lagi; sebab mereka harus menata ulang kesadaran psikologis, intelektual dan fisiknya.

Fenomenalisasi sosial yang menunjukkan semakin banyaknya artis yang terjun dalam dunia politik (ingin menjadi politikus), patut diwaspadai oleh masyarakat. Sebab sangat sulit bagi para artis yang menjadi politikus untuk menjadi negarawan.

Sekadar menjadi politikus itu sangat mudah. Jika Anda memiliki uang, popularitas cukup, mempunyai koneksi dengan jaringan partai politik atau sebuah organisasi massa dan jaringan media massa; sudah sangat cukup bagi siapapun untuk sukses menjadi politikus. Sukses bisa dipilih dan didukung oleh para pemilih. Tetapi sangat sulit bagi para politikus untuk mencapai derajat sebagai seorang negarawan.

Yakni politikus yang berkomitmen hidup-mati mendarmabaktikan seluruh kemampuannya untuk memakmurkan masyarakat. Kenapa banyak partai politik di Indonesia di masa Orde Reformasi ini yang menjadikan artis tidak hanya sekedar dijadikan sumber hiburan, tetapi sebagai politikus? Sebab, mereka mengetahui bahwa itulah jalan cerdas dan jalan pintas untuk memudahkan seseorang tampil menjadi wakil rakyat, kepala daerah, menteri atau bahkan kepala negara dan wakilnya.

Bukankah telah terbukti bahwa peradaban politik di Indonesia sudah mencapai tahapan itu. Di mana para artis saling berebut melamar menjadi politikus di berbagai partai politik yang ada. Dan partai politik itu secara terbuka lebar memberikan institusinya sebagai jembatan keledai untuk memenuhi ambisi politik para artis, namun juga sangat menguntungkan pada kepentingan jangka pendek partai politik bersangkutan untuk menghegemoni kursi-kursi kekuasaan eksekutif maupun legislatif. (\*)

## Politik dan Diskriminasi Gender<sup>25</sup>

**S**alah satu isu yang paling sensitif diperbincangkan di ranah publik adalah persoalan gender. Mengingat kaitannya dengan persamaan dan keadilan distribusi hak dan kewajiban antara kaum lelaki serta kaum wanita dalam konteks berbagai sisi kehidupan. Sengaja penulis tidak menyebut kaum wanita di atas sebagai kaum perempuan. Sebab idiom perempuan cenderung berkonototasi negatif, yakni merendahkan kedudukannya.

Berhubungan dengan dunia politik, tentu saja sangat menarik jika disinggung dengan persoalan gender. Karena di samping masih sangat sedikit wanita yang terjun menjadi politikus; juga akibat stigmatisasi publik (*common sense*) yang menempatkan kaum wanita itu lemah, tak berdaya dan tidak memiliki kekuatan penuh dalam domain kekuasaan. Sehebat-hebatnya kaum wanita, sepintar-pintarnya mereka; ketika mereka sudah berkeluarga, harus tunduk dan hormat pada suami. Memang itulah idealnya seorang wanita, ia bisa ber-*partner* dengan baik dalam lingkungan keluarga maupun ketika berada di area publik. Wilayah domestik dan area publik, menempatkan wanita harus pandai-pandai dalam menyesuaikan diri (beradaptasi).

Bersandarkan data yang dimiliki Sekretariat Jenderal DPR RI (2009), jumlah anggota DPR RI tahun 1999-2004 yang berjenis kelamin wanita hanya berjumlah sebanyak 46 orang. Padahal total anggota DPR RI pada masa itu adalah 500 orang. Artinya, representasi kaum wanitanya hanya 9 persen saja. Jumlah di atas kemudian mengalami kenaikan pada masa pemerintahan tahun 2004-2009, di mana jumlah anggota DPR RI yang wanita sebanyak 61 orang (total anggota DPR RI adalah 550 orang). Memang ada peningkatan persentase sebanyak 2,09 persen jika

---

<sup>25</sup> Supadiyanto. (2013). *Politik dan Diskriminasi Gender*. Harian Umum Suara Karya edisi 9 Februari 2013.

dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah senator perempuan pada masa pemerintahan SBY-Boediono (2009-2014) sekarang ini adalah sebanyak 98 orang atau setara 17,66 persen (total 560 orang).

Memang dari tahun ke tahun, komposisi jumlah senator perempuan yang berkantor di Gedung Senayan Jakarta bertambah besar. Akan tetapi hal tersebut belum menunjukkan adanya kesadaran kolegal untuk menghilangkan stereotip terhadap eksistensi wanita yang dipandang lemah dan tak layak dengan dunia politik. Di zaman penjajahan, apalagi dalam kultur Jawa; posisi wanita memang selalu dinomorduakan. Dalam adat pernikahan saja, mempelai wanita harus didudukkan pada posisi sebelah kiri mempelai pria.

Hanya putri raja saja yang boleh duduk di sebelah kanan, ketika ia melangsungkan pernikahannya. Politisasi gender semacam inilah yang kemudian secara menahun memperlemah kedudukan wanita. Padahal secara fitrah, jiwa dan raga antara lelaki dan wanita memiliki proporsi yang sama. Hanya jenis kelaminnya saja yang membedakan. Artinya tidaklah adil, ketika dalam pengimplementasiannya posisi lelaki selalu nomor satu atas eksistensi wanita. Lelaki tidak boleh menindas wanita. Keduanya harus ber-partner dan bermitra. Memiliki kedudukan yang sama, egaliter dan sejajar.

Kepemimpinan wanita yang dahulu berkali-kali dipermasalahkan, di masa sekarang ini sudah tidak relevan lagi diperbincangkan. Kesadaran kaum wanita untuk menuntut persamaan hak, di negeri ini telah mendapatkan tempatnya seiring dengan lahirnya organisasi-organisasi wanita. Seperti Aisyiyah di lingkungan Muhammadiyah, PKK di area sosial kemasyarakatan dan bahkan dalam organisasi politik pun, sejak era Reformasi ini; kaum wanita sudah mendapatkan proporsi hak yang sama untuk menjadi pejabat eksekutif, yudikatif dan legislatif. Kesuksesan Megawati Soekarnoputri menjadi wakil presiden, yang kemudian menggantikan Gus Dur menjadi presiden; adalah puncak prestasi wanita modern di Indonesia.

Pemasangan hak-hak politik wanita untuk tampil di wilayah publik, termasuk dalam dunia politik yang penuh dengan pergulatan fisik, intelektual dan psikologis; hanya akan

melahirkan budaya patriarkisme yang otoriteristik dan menindas. Apalagi dalam sistem kenegaraan Indonesia yang mayoritas jumlah penduduknya lebih banyak kaum wanita. Pemberdayaan kaum wanita dan mendorong para wanita aktif dan masuk dalam dunia politik adalah langkah yang pantas dikembangkan dalam khasanah pembangunan nasional.

Jadi kaum wanita modern di Indonesia akan memiliki multitalenta. Satu, mereka akan lihai dalam mengelola kehidupan rumah tangga; khususnya dalam mendidik anak-anak dan bermitra dengan suami. Kedua, mereka akan memiliki aktivitas kerja di luar rumah yang semakin memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

Hal itu bukan berarti mengeksploitasi dan menuntut wanita untuk bekerja selama 24 jam mengurus wilayah domestik berkenaan dengan kehidupan rumah tangga dan mengurus soal publik (dunia politik, ekonomi, sosial, dll.). Tetapi dengan pembukaan kran keadilan dalam berpolitik tersebut, memberikan kesempatan (kans) yang sama kepada kaum wanita dan pria untuk saling memahami hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (\*)



## **Parpol, Kekuasaan dan Konflik Kepentingan Bernegara<sup>26</sup>**

**R**elasi antara partai politik sebagai institusi politik dan struktural kekuasaan negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) sudah waktunya dipisahkan secara jelas dan tuntas. Belum adanya aturan yang melarang keras adanya pejabat negara yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif merangkap jabatan struktural dalam kepengurusan partai politik, menyebabkan buramnya kondisi perpolitikan sekarang.

Para politikus yang kini menguasai jabatan-jabatan strategis di tiga lembaga pemerintahan di atas, pasti mengalami konflik kepentingan. Kepentingan yang bersifat kenegaraan dan kepartaipolitik. Secara sederhana, idealnya harus segera dirumuskan produk perundang-undangan politik baru yang melarang keras para pejabat publik (eksekutif, yudikatif dan legislatif) menjadi pengurus struktural partai politik. Dengan mengaplikasikan aturan ini, tidak akan ditemukan lagi seorang presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR/DPRD yang terintervensi atau mengintervensi dinamika dalam partai politik.

Tapi mungkinkah Indonesia bisa menginisiatif gagasan ini, di mana para penguasa negara dilarang keras menjadi pengurus struktural partai politik? Dua kepentingan yang menimpa kepemimpinan para penguasa negara ini, menyebabkan tidak efektifnya fungsi yang diemban. Sulit dan berat bagi para pemimpin bangsa ini bisa memikirkan, melayani dan memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada rakyat; ketika yang bersangkutan masih memikirkan karier politiknya dalam kepengurusan partai politik?

---

<sup>26</sup> Supadiyanto. (2013). *Parpol, Kekuasaan dan Konflik Kepentingan Bernegara*. Jateng Pos-Jogjakarta Pos edisi 11 Februari 2013.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Menteri Suryadharma Alie adalah Ketua Umum PPP. Menteri Muhaimin Iskandar juga seorang pimpinan PKB. Menteri Hatta Rajasa merupakan Ketua Umum PAN. Menteri Tiffatul Sembiring tergolong pengurus inti PKS. Gubernur Sri Sultan HB X termasuk pengurus pusat Partai Golkar. Masih banyak penguasa negara lainnya, entah yang menduduki jabatan legislatif, eksekutif maupun yudikatif adalah "tokoh-tokoh politikus" yang masih mengendalikan kepengurusan partai politik. Akibatnya, langkah-langkah mereka dalam menjalankan fungsi kekuasaan negara, tidak berjalan optimal.

Bahkan kekuasaan negara yang sudah berhasil dikuasainya tersebut, digunakan untuk "memakmurkan" kepentingan partai politik yang dimilikinya. Dalam hal ini dibutuhkan etika berpolitik yang mengedepankan hati nurani. Sebagai rakyat Indonesia, kita sendiri lah yang paling dirugikan. Ketika para penguasa negara tersebut memiliki kepentingan ganda, dalam menjalankan setiap kebijakan yang digulirkan. Jelaslah kesadaran diri dari para penguasa negara untuk segera mengundurkan diri dari kepengurusan struktural partai politik, menjadi langkah awal yang sangat mulia untuk mewujudkan peradaban berpolitik dan bernegara yang progresif.

Tidak bermaksud memuji, langkah mundur Anis Matta yang dulu menjadi anggota DPR RI seketika terpilih menjadi Presiden PKS menggantikan Lutfi Hasan Ishaq yang kini tengah menghadapi tuntutan hukum yang dilancarkan oleh KPK dalam kasus impor daging sapi; merupakan langkah awal dan tradisi berpolitik yang ideal.

Kita mengapresiasi langkah mundur tokoh-tokoh politik dari kepengurusan partai politik lainnya, ketika mereka sudah menjadi pejabat publik. Yang terjadi sekarang, justru para penguasa negara semakin menancapkan pengaruhnya pada sebuah atau lebih partai politik, untuk kepentingan karier politik masa depan yang bersangkutan.

Tantangan kita, beranikah SBY segera mengumumkan diri sudah bukan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Demikian juga Hatta Rajasa segera undur diri dengan tidak

menjadi Ketua Umum PAN, sebab ia sudah menjadi bagian dari kekuasaan negara. Langkah dan sikap tegas dari para penguasa negara dengan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik, memiliki implikasi positif pada banyak hal. Mengapa?

Pertama, fungsi alat-alat kenegaraan akan berjalan secara optimal. Tak ada lagi konflik kepentingan yang menghinggapi para penguasa negara tersebut, antara menjalankan fungsinya sebagai aparatur negara dan fungsinya sebagai politikus partai politik. Sulit menghilangkan batas/garis demarkasi politik antara fungsinya sebagai duta negara dan duta partai politik dalam diri setiap penguasa negara. Dengan mengundurkan diri atau melarang para penguasa negara menduduki kepengurusan dalam partai politik; dua kepentingan di atas dapat segera dipisahkan secara jelas dan tuntas.

Para penguasa negara tak perlu lagi melakukan kampanye politik dalam Pemilu maupun Pilkada, sebab mereka sudah terpisahkan dari kepengurusan struktural partai politik. Logikanya, para penguasa negara adalah milik publik; sudah bukan lagi mewakili kepentingan partai politik tertentu. Dengan menjadi anggota wakil rakyat, otomatis yang bersangkutan bukan lagi wakil dari partai politik. Melainkan mewakili rakyat, sehingga suara dan aspirasi yang dilakukan bukan mewakili kepentingan partai politik yang pernah menjadi rumah/kendaraan politiknya.

Kedua, kaderisasi dalam kepengurusan partai politik juga semakin cepat. Sehingga terjadi dinamika perpolitikan yang dinamis dan berjalan harmonis. Kita mencontohkan saja, bagaimana seorang penguasa negara selama belasan tahun, bahkan sampai puluhan tahun menjadi pengendali nomor satu dalam sebuah partai politik. Hal ini akan menghambat kaderisasi politikus dan peluang pemunculan tokoh politik yang baru. Satu contoh sederhana, bagaimana sejak era Orde Baru hingga sekarang, Megawati Soekarnoputri masih menjadi "tokoh politikus sentralistik" dalam lingkaran PDI Perjuangan (dahulu bernama PDI). Apakah tak ada politikus internal partai politik tersebut yang bisa menandingi kharisma dan pengaruh kekuatan Megawati Soekarnoputri.

Jika Indonesia berani menginisiatifi untuk melahirkan produk perundang-undangan yang melarang keras para penguasa negara merangkap jabatan ganda menjadi pengurus partai politik, merupakan langkah revolusioner, tidak hanya dalam babak sejarah baru perpolitikan tingkat nasional. Melainkan menjadi yang pertama di tingkat dunia. Sebab belum ada negara mana pun di atas jagat raya ini yang memiliki peraturan demikian. Padahal gagasan tersebut, sejatinya merupakan jawaban singkat dan orisinal untuk merampungkan berbagai penyebab yang menjebak kenapa banyak penguasa negara yang terlibat skandal korupsi, dan tidak efektif dalam menjalankan fungsi kekuasaannya.

Semoga tulisan pendek ini dapat membukakan cakrawala pengetahuan berpolitik penduduk Indonesia, yang sudah lama terkotak-kotak dalam lapis-lapis kepentingan politik, organisasi sosial tertentu, agama dan keyakinan tertentu dan perbedaan lainnya. Saatnya bangsa ini memulai babak baru sejarah perpolitikan. Harapannya, mendekati Pemilu 2014 mendatang; kesadaran berpolitik rakyat Indonesia yang berjumlah hampir 240 juta jiwa ini dan pemimpin nasional serta pemimpin lokal semakin tercerahkan.

Tidak lagi terjadi berbagai konflik kepentingan yang akhirnya menghambat percepatan pembangunan nasional bangsa ini. Kursi-kursi kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dalam negara yang menganut sistem demokrasi memang untuk diperlombakan (dikompetisikan) melalui peradaban berpolitik partai politik. Konsekuensinya terjadi kompetisi bebas, liar bahkan menghalalkan segala cara untuk menghegemoni berbagai kursi kekuasaan.

Etika politik akhirnya menjadi kesadaran yang tidak dimiliki para politikus. Yang ada hanyalah nafsu, ambisi dan kepentingan khusus untuk menguasai. Rakyat dijadikan ganjal perjalanan politik para politikus untuk meraih kekuasaan. Setelah kekuasaan diraih, para penguasa itu akan terus mempertahankan kekuasaan. Dan politikus lainnya beramai-ramai untuk merebut dan merobohkan kekuasaan para penguasa sebelumnya. Dunia penuh dengan kompetisi untuk saling menjatuhkan. Bukan untuk saling bekerjasama dan

bahu-membahu membangun sebuah negara yang kokoh dan beradab.

Partai politik tidak mengajarkan kepada kita untuk bagaimana menjadi rakyat yang baik. Tetapi yang diajarkan oleh partai politik adalah bagaimana cara menghegemoni pusat-pusat kekuasaan. Yang menjanjikan kemegahan, kemewahan dan kesenangan hidup yang bukan main enaknyanya. (\*)

## Komodifikasi Skripsi, Tesis dan Disertasi<sup>27</sup>

**S**ebuah papan seng terpajang pada batang pohon dekat sebuah PTN di Semarang. Papan tersebut bertuliskan begini. "Skripsi, Tesis, Disertasi: Hubungi Kami...". Titik-titik di atas diisi dengan nomor telpon seluler yang bisa dihubungi selama 24 jam. Rupanya papan reklame tersebut, tidak cuman satu saja. Ada banyak modelnya.

Ada yang berbentuk selebaran atau pamflet yang ditempel di lokasi strategis, ada pula yang berupa baliho. Fenomena di atas sesungguhnya juga mewabah di berbagai kota di Indonesia. Bahkan ada yang memajang iklan konsultasi akademik pembuatan karya ilmiah tersebut melalui surat kabar maupun media elektronik.

Sudah keterlaluan benar, modus bisnis intelektual (komodifikasi) yang menyerimpung nasib bangsa ini. Karya skripsi, tesis dan disertasi yang selama ini dijadikan makhkota intelektual para mahasiswa sebagai tanda kelulusan dalam menempuh suatu jenjang pendidikan tinggi; sudah mengalami pergeseran tata nilai, budaya dan bahkan cara pandang.

Bahkan kabarnya, cukup dengan menyerahkan uang (mahar intelektual) dalam jumlah tertentu pada sebuah bior konsultasi yang memajang layanan pembuatan skripsi, tesis dan disertasi di atas; seseorang bisa mudah mendapatkan seonggok karya ilmiah yang siap dijadikan bahan skripsi, tesis maupun disertasi. Tentu saja, harga layanan pembuatan karya ilmiah tersebut bandrolnya berbeda-beda. Harga jasa pembuatan disertasi, patokannya 3 kali lipat dari harga pembuatan skripsi. Dan harga pembuatan tesis, dua kali lipat dari harga pembuatan skripsi. Namun sekali lagi, angkanya bisa naik-turun, tergantung pada

---

<sup>27</sup> Supadiyanto. (2013). *Komodifikasi Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Harian Jogja edisi 16 Februari 2013.

daya tawar kedua belah pihak dalam menegosiasikan kemampuan dan kebutuhan finansial masing-masing.

Dalam konteks kejujuran ilmiah, yang selalu diagung-agungkan dalam lingkungan kampus, tentulah berdirinya biro jasa konsultasi penyusunan skripsi, tesis dan disertasi menjadi ancaman bagi kredibilitas dan daya intelektualisme para intelektual kampus. Sebab, karya ilmiah yang agung tersebut, merupakan produk rekayasa dari pihak ketiga, yang telah dibayar sesuai dengan jasa intelektualisme. Ada hukum transaksionalisme dagang intelektual yang tergadaikan dengan uang.

Bahwa penelitian yang seharusnya dilakukan oleh para mahasiswa untuk mengakhiri masa studinya, itu diwakilkan kepada pihak ketiga. Memang secara ekonomis, kehadiran jasa layanan pembuatan karya ilmiah tersebut sangat menguntungkan bagi dua belah pihak. Pertama, para mahasiswa bisa lebih cepat dan efektif dalam menyusun skripsi, tesis dan disertasinya; tanpa perlu bersusah payah menyusunnya. Memang benar, untuk membuat karya skripsi, tesis, disertasi yang bermutu baik, membutuhkan waktu bulanan, bahkan bisa sampai tahunan. Kedua, bagi para pemilik biro jasa "ilmiah" di atas, merupakan ladang bisnis yang sangat menggiurkan. Sebab dengan bermodalkan kecerdasan dan bank data yang dimiliki, mereka memperoleh pendapatan yang nilainya menggiurkan.

Tetapi tentu saja, realitas sosial yang terjadi dalam dinamika lingkungan kampus tersebut, akan mengerdilkan dan memandulkan kemampuan para lulusan perguruan tinggi dalam melakukan tradisi penelitian. Bakal terjadi kebobrokan ilmiah, sebab intelektualitas mereka begitu gampang digadaikan, ditukarkan dengan segepok uang. Siapa yang disalahkan, ketika banyak mahasiswa beramai-ramai menggunakan jasa layanan pembuatan karya ilmiah yang ditawarkan oleh biro jasa di atas? Apakah bisa kita menyalahkan sepihak para mahasiswa? Ataukah menyalahkan pihak biro jasa pembuatan skripsi, tesis dan disertasi tersebut? Ataukah justru kita menyalahkan dua pihak, ya mahasiswanya sekaligus pemilik biro jasa tersebut? Dan di manakah posisi yang relevan diperankan aparat penegak

hukum dalam kasus transaksional pembuatan karya ilmiah tersebut?

Problematika pendidikan tinggi di Indonesia memang sangat kompleks. Di tengah masih rendahnya tingkat produktivitas para mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan bernama penelitian, maraknya kasus "jalan pintas pembuatan skripsi, tesis dan disertasi" merupakan fenomena pembodohan intelektual yang harus dicermati dan diantisipasi.

Jangan sampai terjadi tradisi intelektual kampus di negeri ini dipermalukan di kalangan Internasional. Adalah pemerintahan negara Jerman, yang baru saja memermalukan negaranya sendiri, sebab gelar Doktor yang disandang oleh Menteri Pendidikan Jerman Annette Schavan dicabut (dibatalkan) pada 5 Februari 2013. Sebab karya disertasinya merupakan hasil plagiat. Hal tersebut berimbas buruk pada citra dan nasib kariernya sebagai Menteri Pendidikan Jerman.

Kita tidak menginginkan adanya penipuan publik dan modus-modus intelektual lain yang mampu mengelabui keorisinalitasan karya-karya intelektual yang dipersembahkan oleh para mahasiswa dan dosen di Indonesia. Tak ada gula, maka tak ada semut. Jadi jangan salahkan eksistensi berbagai biro jasa pembuatan skripsi, tesis dan disertasi di berbagai kota. Sebab ada banyak pelanggan yang mengerumuni mereka, yakni para mahasiswa yang ingin cepat lulus dan tidak perlu repot-repot lagi melakukan kegiatan penelitian. (\*)



## Media Massa dan Kaderisasi Pemimpin<sup>28</sup>

**K**ebudayaan media massa cetak dan elektronik, sesungguhnya tidak hanya mampu menjadi sumber penabur informasi dan berita. Media massa memiliki banyak fungsi. Di samping sebagai sarana bisnis, media massa juga dapat dioptimalisasikan untuk melakukan kaderisasi pemimpin. Terbukti benar, dalam periode sejarah perjalanan pers di Indonesia, media massa berfungsi strategis dalam melahirkan sosok-sosok pemimpin nasional bahkan Internasional. HOS Cokroaminoto, Soekarno, Ki Hajar Dewantara adalah tiga contoh personal yang memiliki back ground pernah aktif bekerja menjadi pemimpin redaksi surat kabar pada masa prakemerdekaan hingga pasca kemerdekaan.

Di masa kini, terbukti juga media massa mampu mencetak para pemimpin nasional maupun lokal yang memiliki kompetensi yang tidak diragukan lagi. Mereka pernah menduduki jabatan strategis dalam berbagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Menariknya, saat ini tengah terjadi tren menarik. Di mana para pengusaha media massa (pemilik media massa) berlomba-lomba menjadi penguasa. Entah mengincar jabatan kepala daerah, wakil rakyat bahkan sebagai presiden atau wakil presiden.

Sebut saja mereka adalah Dahlan Iskan, Surya Paloh, Chairul Tanjung, Hary Tanoesoedibjo dkk. Para pemilik dan pemimpin media massa memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang propaganda. Sebab mereka mudah memanfaatkan jaringan industri media massa yang dimiliki untuk kepentingan mereka. Dalam teori ekonomi politik, dinyatakan bahwa media massa menjadi media ideal untuk mengeruk keuntungan bisnis (ekonomi) maupun meraih kekuasaan (politik). Dalam konteks ini, melahirkan hubungan simbiosis mutualisme antara politikus dan

---

<sup>28</sup> Supadiyanto. (2013). *Media Massa dan Kaderisasi Pemimpin*. Harian Umum Barometer edisi 20 Februari 2013.

wartawan. Di mana wartawan membutuhkan narasumber untuk digali pendapatnya, sedangkan politikus membutuhkan panggung untuk menyosialisasikan berbagai gagasan mereka kepada publik.

Semakin banyaknya pemilik media, pemimpin media dan wartawan yang terjun langsung memperebutkan jabatan politik seperti ikut dalam Pilkada maupun Pemilu, merupakan pertanda zaman yang positif bagi perkembangan dunia demokrasi. Sebab mereka adalah calon-calon pemimpin terdidik melalui media massa. Maraknya praktisi media yang terjun dalam kancah politik, di masa kini sejatinya bukan hal baru lagi. Dulu, media dijadikan alat propaganda paling ampuh bagi politikus. Wajar, di masa prakemerdekaan dan Orde Lama; partai politik memiliki media massanya masing-masing. Hal ini memungkinkan para politikus mempropagandakan berbagai kebijakan strategis.

Tak hanya itu saja, para politikus bersaing mengemukakan argumentasi mereka melalui berbagai media massa. Dalam lingkup demokratisasi, keberadaan berbagai media massa sangat positif untuk mengontrol kekuasaan. Hegemonian informasi oleh segelintir media massa, akan melahirkan otoriterisme baru. Untuk itu dibutuhkan media publik. Hadirnya perusahaan media yang dimiliki individual atau keluarga, akan menciptakan kebijakan redaksi pro kepentingan pemilik modal.

Dalam demokrasi, idealnya dibutuhkan banyak media massa yang dimiliki publik. Sebagaimana TVRI, RRI, Kantor Berita Antara—yang merepresentasikan media milik publik. Sebab biaya operasional berasal dari APBN. Nahasnya, selama ini TVRI, RRI dan Kantor Berita Antara, citranya terlanjur diidentikkan dengan mediana pemerintah atau penguasa. Itulah salah satu alasan kenapa media publik di atas selalu kalah bersaing dengan media-media milik oleh korporasi keluarga atau individu (swasta).

Pemonoplian industri media massa nasional maupun lokal akhirnya melahirkan para konglomerasi media. Padahal kehidupan para wartawan (kuli tinta) di Indonesia relatif masih buruk. Artinya tingkat kesejahteraan mereka masih belum terjamin baik.

Kefektivitasan media massa dalam memengaruhi opini publik maupun sebagai penyebar popularitas, hingga kini masih diyakini sangat ampuh. Layaklah para politikus memanfaatkan media massa sebagai media propaganda dalam mendekati kepada publik. Hal ini terlihat sangat kentara ketika hajatan Pilkada atau Pemilu tiba. Para politikus berlomba memajang iklan di berbagai media.

Ada empat alasan kenapa media massa sangat prospektif dalam melahirkan para pemimpin yang berkarakter. Pertama, dengan media massa mampu mempopulerkan citra seseorang, atau sebaliknya, bisa mengandaskan tampilan seseorang. Siapa yang lihai memanfaatkan media massa akan mendongkrak tingkat kredibilitas. Namun siapa yang gagal memanfaatkan media akan menjadi bumerang yang mematikan langkah. Kedua, melalui media massa memberikan ruang publik kepada masyarakat dalam menuangkan segala gagasan dan informasi. Lahirnya para penulis, tokoh nasional dan orang-orang sukses bermula ketika seseorang mampu memberdayakan media massa. Atau pun menyiarkan gagasan mereka melalui radio, televisi maupun media online.

Ketiga, media massa sangat efektif dalam mencerdaskan publik. Keempat, media massa dapat membingkai sejarah secara rapi melalui berbagai berita dan informasi yang ditayangkan. Sehingga kita bisa melihat perjalanan sejarah sebuah bangsa, dengan membaca berbagai informasi yang disajikan berbagai media.

Media dan demokrasi memiliki hubungan erat. Negara yang tidak memiliki media massa yang beragam dan independen, otomatis akan menghilangkan dinamika demokrasi yang memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Namun masalah yang dihadapi media nasional dan lokal kini adalah kuatnya kekangan para pemilik modal. Saat ini ada gejala sosial menunjukkan bahwa para wartawan tidak takut kepada penguasa, tak gentar pada aparat penegak hukum. Namun mereka takut kepada para pemilik modal. (\*)

## Relasi Media Massa dan Sistem Demokrasi<sup>29</sup>

**S**eluruh elemen bangsa ini baru saja memperingati Hari Pers Nasional (HPN) pada Sabtu *Wage*, 9 Februari 2013 kemarin di Manado (Sulawesi Utara). Dalam momentum tersebut, berbagai tokoh pers nasional menyoroti persoalan-persoalan klasik yang menyerimpung dunia kewartawanan serta berbagai isu teraktual seperti masalah konvergensi media massa yang menciptakan para konglomerasi media. Jelaslah, momentum tersebut sangat penting dalam membawa berbagai perubahan sosial, budaya dan politik; yang bermuara pada terbentuknya negara yang demokratis.

Berdasarkan historinya, pers Indonesia amat menentukan gerak maju pembangunan nasional. Di masa prakemerdekaan, pers dijadikan andalan dalam memperjuangkan nilai-nilai perjuangan melawan kebiadaban kaum penjajah. Di masa Orde Lama, pers dijadikan sarana pemersatu kekuatan dalam membangkitkan kesadaran berpolitik. Di era Orde Baru, pers dikerahkan untuk menopang pembangunan nasional. Sedang di era Orde Reformasi, pers didesain untuk mendukung iklim demokrasi yang bercorak keterbukaan (transparansi), kebebasan bertanggung jawab (liberasi) dan semangat kebersamaan.

Dengan demikian, eksistensi pers (media cetak, media elektronik dan media online) dengan para praktisinya (wartawan) sangat strategis dan penting dalam konteks negara demokrasi. Di negara mana pun yang mengedepankan corak demokrasi, pers ditempatkan sebagai salah satu pilarnya. Pers didudukkan setara peran lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kredonya, pers memegang lima tugas pokok. Yakni berfungsi sebagai kontrol sosial, sumber informasi bertanggung jawab,

---

<sup>29</sup> Supadiyanto. (2013). *Relasi Media Massa dan Sistem Demokrasi*. Harian Umum Barometer edisi 26 Februari 2013.

mendidik dan menghibur. Peran pers sangat penting dalam menciptakan sistem negara demokrasi.

Satu tugas pokok pers lain, yang tak boleh dilupakan yakni sebagai institusi bisnis. Empat tugas pertama di atas (kontrol sosial, menginformasikan, mendidik dan menghibur) disebut sebagai idealisme pers. Dan fungsi terakhir (lembaga bisnis) merupakan fungsi praktis, sebab pers adalah perusahaan yang jika tidak memikirkan masalah bisnis; keberlangsungannya bisa terganggu, bahkan mati. Soal terakhir tadi, harus dipikirkan serius. Sebab menyangkut juga masalah kesejahteraan wartawan. Sebab kabarnya, tak sedikit jurnalis yang bekerja diupah dengan gaji di bawah standar UMR. Di samping soal kesejahteraan wartawan, salah satu isu sensitif yang menyerimpung kehidupan wartawan di Indonesia yakni masalah profesionalitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dewan Pers, hingga kini hanya ada sekitar 10 ribu wartawan profesional. Padahal sekarang saja ada 100 ribu - 125 ribu wartawan di Indonesia. Bahkan menurut Ketua Umum PWI Pusat Margiono, sekitar 70 persen wartawan di Indonesia (70 ribu–87.500 wartawan) sama sekali tidak/belum pernah membaca Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Implikasinya, sepanjang tahun 2011, Dewan Pers mencatat 1.000 pengaduan publik terkait pelanggaran KEJ. Dan setelah dilakukan penyelesaian, 80 persen dari aduan publik di atas (800 aduan) benar-benar terjadi (SKH Kedaulatan Rakyat edisi 27 September 2012).

Soal profesionalisme para wartawan di Indonesia memang menjadi bahan perdebatan. Uji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) yang mulai diberlakukan tahun 2011, bertujuan menjamin keprofesionalitasan wartawan. Berdasarkan data Dewan Pers, jumlah wartawan yang dinyatakan lulus uji SKW hingga 31 Januari 2013 sebanyak 2.887 orang. Jumlah itu terbilang kecil, jika dibandingkan total wartawan di Indonesia. Tercatat ada 100 ribu sampai 125 ribu wartawan di Indonesia yang kini bekerja di ribuan media massa cetak maupun elektronik.

Ada fenomena menarik yang penting diperhatikan oleh para praktisi media sekaligus publik menjelang Pemilu Legislatif 2014 (9 April 2014) dan Pemilu Presiden (9 Juli 2014). Tren

menunjukkan para pengusaha media massa maupun praktisi media massa terjun dalam gelanggang politik dengan menjadi pengurus partai politik, pendiri partai politik bahkan bersiap melamar menjadi calon anggota legislatif dan eksekutif.

Memang setiap wartawan berhak menyalurkan aspirasi. Misalkan dengan menjadi politikus. Ketika mereka berhasil menjadi anggota wakil rakyat atau pejabat eksekutif, tentu saja akan berkonsekuensi logis pada kenetralitasan mereka dalam melakukan fungsi kontrol sosial. Sebab tugas pokok pers, salah satunya mengkritisi dan memberikan kontrol sosial terhadap berbagai pusat kekuasaan. Kita menakutkan, ketika banyak wartawan dan pengusaha media terjun dalam gelanggang politik praktis, akan mengaburkan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Sehingga akan membelokkan arah demokrasi yang sudah dipancangkan melalui era reformasi.

Akan tetapi dengan semakin banyaknya praktisi media massa yang menjadi penguasa negara, dapat saja menjadi harapan besar bagi segenap kalangan terkait adanya perubahan sosial. Sebab kita meyakini, bahwa para praktisi media massa memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas terkait berbagai problematika berbangsa dan bernegara. Kita pernah memiliki presiden dan wakil presiden yang memiliki latar belakang sebagai wartawan atau pemilik perusahaan media massa. Mereka adalah Soekarno, Adam Malik dan Hamzah Haz. Akankah kepemimpinan bangsa ini di masa mendatang akan mengalami “dejavu sejarah”, dengan berhasilnya kembali para pemilik media massa atau praktisi media massa menjadi penguasa di negeri ini? (\*)

## Politik Transaksional<sup>30</sup>

**P**erilaku sebagian politikus di negeri ini semakin hari kian mencengangkan kita. Bagaimana tidak begitu. Terseretnya sejumlah tokoh politik yang selama ini kita yakini sebagai sosok yang jujur, cerdas, alim dan santun; dalam berbagai kasus korupsi telah membalikkan anggapan positif kita tentang kredibilitas para politikus.

Apalagi kalau sampai ada politikus yang notabene-nya wakil rakyat yang duduk di bangku DPR/DPRD maupun DPD RI, sangat menyakitkan sanubari publik. Sebab kasus tersebut telah menyobek kesadaran publik, bahwa para wakil rakyat sudah bukan orang-orang kepercayaan rakyat lagi. Melainkan mereka yang bekerja untuk meraih visi dan misi pribadi, di mana segala perbuatan yang dilakukan bukan untuk mewakili segala aspirasi yang disampaikan publik.

Ada semacam kredo yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa dunia politik itu sarat dengan tukar-menukar jasa; atau dalam bahasa perniagaan disebut sebagai proses transaksional. Artinya ada tukar-menukar jasa dan barang yang terjadi antara para politikus dengan konstituen yang diwakili maupun dengan partai politik. Dengan demikian, semakin banyaknya politikus yang terjerembab dalam skandal korupsi, menunjukkan kepada publik akan praktik politik transaksional tersebut.

Di masa kampanye politik dahulu, para politikus mengeluarkan banyak dana untuk membiayai kegiatan tersebut; maka dalam logika bisnis; modal yang sudah dikeluarkan tersebut harus kembali puluh atau minimal impas. Padahal besarnya gaji bulanan yang disediakan/diberikan oleh negara kepada para politikus yang menduduki berbagai jabatan legislatif, eksekutif maupun yudikatif; belum tentu mampu mengembalikan

---

<sup>30</sup> Supadiyanto. (2013). *Politik Transaksional*. Harian Umum Suara Karya edisi 27 Februari 2013. Diekspos juga oleh situs Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

besarnya modal yang pernah dihabiskan untuk membiayai dana kampanye.

Nafsu korupsi, sejatinya menjadi jalan pintas yang bisa menjebak bagi para politikus untuk mengembalikan atau mencari keuntungan setinggi-tingginya dalam jangka waktu singkat. Dalam konteks politik transaksional tersebut, partai politik sekadar menjadi jembatan politik yang bisa mengantarkan para politikus meraih berbagai jabatan publik yang diperebutkan secara bebas dan demokratis.

Nalarnya, politikus yang memiliki modal finansial yang kuat, akan dilirik oleh partai politik. Kendati pun ada faktor-faktor lain yang cukup berpengaruh pada kesuksesan seorang politikus memenangi pertarungan Pemilu maupun Pilkada. Misalkan dukungan massa dan relasinya dengan media massa, popularitas, dan bahkan keberuntungan (nasib).

Dalam kamus politik, empat faktor di atas menjadi daya tarik yang diperebutkan oleh para politikus. Dukungan massa dan relasinya dengan media massa, popularitas, keberuntungan (nasib) dan besarnya modal finansial; menjadi powerful yang mendukung eksistensi seorang politikus. Melalui penguasaan empat hal di atas, bisa mendongkrak rapot keterpilihan seorang politikus menjadi sang pemenang dalam berbagai pesta demokrasi.

Berdasarkan hasil pemikiran yang dilahirkan oleh para pemikir Frankfurt School yang notabene-nya berasal dari kalangan Marxisme; mengungkapkan teori menarik bahwa dunia politik adalah panggung transaksional antara kepentingan ekonomi (bisnis) dan politik (kekuasaan). Bahwa puncak kesuksesan politik adalah mampu meraih kekuasaan dan mampu meraup pundi-pundi ekonomi yang dapat menyejahterakan para politikus dan kelompoknya. Sedangkan teori ekonomi politik kekuasaan berparadigma kritis menyatakan bahwa puncak kekuasaan bukan untuk meraih kekuasaan dan mengakses sumber-sumber kemakmuran, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan bersama (publik). Teori terakhir ini kebanyakan hanya dijadikan bahan retorika, sedangkan praktiknya masih jauh dari harapan.

Logika politik transaksional, sadar atau tidak sadar, telah ikut memengaruhi jalannya kehidupan politik di Tanah Air. Sehingga



menyebabkan para politikus berpikir praktis dan menyederhanakan segala tujuan demi memenuhi ambisi untuk berkuasa. Di Indonesia profesi sebagai pejabat yang duduk di berbagai lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif; masih menarik minat banyak orang. Setidaknya bagi mereka yang kini aktif di berbagai organisasi sosial dan politik.

Politik transaksional memang bisa memuluskan ambisi para politikus menduduki berbagai jabatan mentereng. Akan tetapi akan mengakibatkan buruknya kualitas moral para politikus itu sendiri, sebab mereka berpikir bahwa dengan bermodalkan uang yang cukup besar bisa memuluskan karier politik para politikus itu. Maraknya kasus korupsi di Indonesia, telah membangkrutkan keuangan negara dan berdampak buruk pada nasib pembangunan nasional. Rakyatlah yang merugi kemudian, secara perlahan-lahan maupun bersifat segera. (\*)

## Relasi Korupsi dan Kemiskinan di Jateng<sup>31</sup>

**K**oran Sindo Jateng, metamorfosis dari Harian Seputar Indonesia Jateng pada edisi Jumat, 1 Maret 2013 menurunkan headline berjudul: "Kasus Korupsi Tak Kunjung Tuntas". Kupasan berita headline tersebut tidak saja menarik dari sisi konten. Tapi juga keberanian surat kabar ini dalam menampilkan wajah-wajah para koruptor yang notabene-nya pernah menjadi kepala daerah di lingkungan Jateng menjadi catatan tersendiri bagi publik.

Menurut hemat penulis, cara demikian menjadi hukuman sosial, di mana efek psikologis dan fisiknya jauh lebih berat ketimbang hukuman penjara yang dijatuhkan lembaga penegak hukum terhadap para koruptor tersebut. Kita memang sungguh memprihatinkan, kenapa birokrasi (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di Indonesia masih menjadi sarang para koruptor? Mudah-mudahan, kekuasaan adalah pusat dan peluang yang menarik siapapun yang menduduki kursi-kursi kekuasaan tersebut terjebak melakukan berbagai skandal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dengan cerdas, penduduk Jateng yang jumlahnya lebih dari 32 juta jiwa tersebut menjadi memahami kenapa secara nasional, Jateng menjadi sebuah propinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi nomor dua se-Indonesia. Data tersebut berdasarkan pada Biro Pusat Statistik (2 Januari 2013) yang mencatat sebanyak 4.863.410 penduduk miskin menetap di Jateng. Angka tersebut menyumbang sebesar 17,08 persen angka kemiskinan nasional yang totalnya mencapai 28.594.640 orang miskin. Angka kemiskinan di Jateng, hanya beda tipis dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia yang diduduki oleh Propinsi Jatim setinggi 4.960.540 orang.

---

<sup>31</sup> Supadiyanto. (2013). *Relasi Korupsi dan Kemiskinan di Jateng*. Koran Sindo edisi 4 Maret 2013.

Jelas ada hubungan yang sangat kuat antara tingginya praktik korupsi dengan terciptanya peradaban kemiskinan pada sebuah daerah, bahkan sebuah negara. Hipotesisnya, semakin tinggi tingkat kejahatan korupsi yang terjadi dalam birokrasi (pemerintahan), berbanding lurus dengan tingginya jumlah penduduk miskin pada sebuah daerah, bahkan negara. Dalam konteks lokalitas, terjerembabnya para kepala daerah maupun mantan kepala daerah di Jateng mengakibatkan hilangnya anggaran negara yang harusnya digunakan untuk memberdayakan kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah serta berbagai program atau kebijakan lain yang sudah ditetapkan untuk mengangkat harkat dan kesejahteraan masyarakat Jateng menjadi terhambat. Keluarga miskin menjadi tetap miskin atau menjadi lebih termiskinkan lagi, atau memunculkan orang-orang miskin baru sebagai konsekuensi logis dari gagalnya program pembangunan daerah sekaligus program pembangunan daerah.

Publik mengimpikan agar para birokrat (kepala daerah, wakil rakyat dan aparat penegak hukum) berkomitmen tinggi untuk tak melakukan berbagai bentuk korupsi. Jika melihat data koruptor di Jateng dalam 10 tahun terakhir ini, setidaknya dihadapkan pada 16 koruptor yang berlatarbelakang mantan kepala daerah di Jateng. Mereka adalah Marsaid, mantan Bupati Purworejo divonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan buku perpustakaan yang merugikan negara sebesar Rp 10,1 miliar. Trimawan Nugrohadi, mantan Bupati Wonosobo divonis 1 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai Rp 786,5 juta. Slamet Suryanto, mantan Walikota Surakarta divonis 1,4 tahun dalam kasus korupsi anggaran biaya tambahan sebesar Rp 6,9 miliar. Bambang Hendarso, mantan Bupati Rembang dalam kasus korupsi APBD 2005 sebesar Rp 6,8 miliar dan divonis 4 tahun penjara. Soemarmo HS, Walikota Semarang nonaktif, divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus suap RAPBD Kota Semarang senilai Rp 344 juta. John Manoppo, mantan Walikota Salatiga saat ini masih menjalani persidangan dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Jalan Lingkar Selatan. Fahriyanto, mantan Walikota Magelang divonis 2 tahun lebih 11 bulan dalam kasus

korupsi dana tak terduga dan pengadaan buku ajar senilai Rp 11,94 miliar.

Koruptor lainnya adalah Untung Wiyono, mantan Bupati Sragen dalam kasus korupsi keuangan kas daerah senilai Rp 42,5 miliar dan divonis 12 tahun penjara, membayar denda Rp 11 miliar. Tasiman, mantan Bupati Pati divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus korupsi APBD 2003. Probo Yulastoro, mantan Bupati Cilacap divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi APBD senilai 21,8 miliar. Kelik Sumrahadi, mantan Bupati Purworejo divonis 1 tahun penjara dalam kasus korupsi dana fasilitasi APBD 2006 senilai Rp 2,5 miliar. Bambang Guritno, mantan Bupati Semarang dalam kasus korupsi pengadaan buku senilai Rp 620 juta dan divonis 2 tahun penjara. Totok Ary Prabowo, mantan Bupati Temanggung divonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi dana bantuan Pemilu 2004 senilai Rp 6,5 miliar. Hendy Boedoro, mantan Bupati Kendal dalam kasus korupsi APBD 2003 dan divonis 7 tahun penjara. Agus Riyanto, mantan Bupati Tegal divonis 5,5 tahun karena terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi senilai Rp 3,9 miliar. Indra Kusuma, mantan Bupati Brebes divonis 2 tahun penjara terlibat dalam kasus korupsi pembangunan pasar dengan dana APBD 2003 (Koran Sindo Jateng edisi 1 Maret 2013).

Menurut data KP2KKN, terdapat 102 kasus korupsi dengan 184 tersangka. Dari 35 kabupaten/kotamadya di Jateng, hanya 3 daerah yang tidak ada laporan kasus korupsi yakni Kota Pekalongan dan Kabupaten Purbalingga serta Blora saja. Secara statistik, pemerataan kasus korupsi yang dilakukan oleh penguasa-penguasa lokal di daerah, semakin mengukuhkan bahwa skandal korupsi tak hanya terjadi di pusat kekuasaan (Jakarta). Namun telah menyebar hingga daerah, termasuk di Jateng (Supadiyanto, 2012). Publik menginginkan agar prahara korupsi yang menimpa bangsa ini, termasuk di Jateng harus segera dihilangkan dalam kamus perbirokrasian. (\*)

## Menyoal Data Keluarga Miskin dan Kaya<sup>32</sup>

**B**erapakah sejatinya jumlah orang kaya di Indonesia saat ini? Jawabannya sederhana saja. Pemerintah belum atau bahkan sama sekali tidak memiliki data akurat mengenai hal tersebut. Tetapi yang pasti, pemerintah sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi ini lebih “gemar” melakukan pendataan terhadap orang miskin. Wajarlah jika bangsa ini terus berada dalam kelompok negara-negara berkembang (miskin), karena secara tak sadar diri terus menjadikan paradigma kemiskinan sebagai kebijakan pembangunan nasional.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin di Indonesia hingga Januari 2012 adalah 29,89 juta jiwa. Sedangkan BPS pada 2 Januari 2013, melansir data anyar, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun menjadi 28.594.640 orang miskin; di mana menempatkan Jatim dan Jateng sebagai dua propinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar nomor satu dan kedua se-Indonesia; karena dua propinsi tersebut masing-masing dihuni oleh hampir 5 juta orang miskin.

Sayangnya, sejak rezim Orde Lama hingga rezim Orde Reformasi ini, pemerintah dalam hal ini BPS tidak pernah menyebutkan data sedikitpun mengenai berapa jumlah orang kaya di Indonesia? Akibatnya, terjadi pencitraan buruk bahwa jumlah orang miskin begitu banyak, tanpa ada pengimbangan data jumlah orang kaya yang tentunya jauh lebih banyak ketimbang jumlah orang miskin. Jumlah penduduk di Indonesia ada sebanyak 238 juta jiwa, berarti apakah kalau 29,89 juta penduduk dikategorikan miskin, apakah di luar angka tersebut dapat dikatakan sebagai penduduk kaya?

Berbagai surat kabar lokal dan nasional di Indonesia pada Jumat (9/3/2012) pernah menayangkan secara serentak daftar

---

<sup>32</sup> Supadiyanto. (2013). *Menyoal Data Keluarga Miskin dan Kaya*. Harian Umum Barometer edisi 4 Maret 2013.

orang terkaya (miliarder) sedunia. Menariknya, salah satu surat kabar nasional memuat berita berjudul: "Miliarder Indonesia Terbanyak". Tentunya dengan model pemberitaan tersebut, memunculkan rasa optimisitas kolektif bahwa Indonesia memiliki banyak penduduk kaya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Majalah Forbes, yang kemudian ditayangkan pada edisi 7 Maret 2012, terdapat sekitar seribu orang terkaya sedunia yang memiliki harta lebih dari USD 1 miliar. Berita yang paling menggetarkan adalah, dari para miliarder dunia tersebut, muncul 17 sosok miliarder berasal dari Indonesia.

Berita ini memiliki dua perspektif utama bagi publik di Indonesia. Satu, hal tersebut merupakan kabar yang menggembirakan. Karena banyak miliarder Indonesia yang juga sukses memiliki berbagai perusahaan sehingga hidup mereka terbilang sangat sukses. Dua, sebagian orang menilai hal tersebut merupakan kabar buruk. Bagaimana mungkin di tengah perekonomian nasional yang kian terpuruk, justru melahirkan para konglomerat kelas dunia yang jumlahnya malah bertambah. Jika dibandingkan tahun lalu, kali ini jumlah konglomerat Indonesia semakin bertambah, sebab pada tahun 2011 kemarin hanya tercatat sebanyak 14 miliarder Indonesia saja.

Secara gamblang, sebanyak 17 miliarder Indonesia tersebut antara lain: Budi Hartono, Michael Hartono, Low Tuck Kwong, Martua Sitorus, Sukanto Tanoto, Peter Sondakh, Achmad Hamami, Sri Prakash Lohia serta Chairul Tanjung. Miliarder Indonesia lainnya adalah Kiki Barki, Murdaya Poo, Edwin Soeryadjaya, Tahir, Hari Tanoesoedibjo, Garibaldi Thohir, Theodore rachmat dan Djoko Susanto. Jika diakumulasi harta milik 17 miliarder Indonesia di atas sebanyak USD 41,5 miliar. Dengan jumlah kurs Rp 9.163 per USD (Republika edisi 9/3/2012), maka total kekayaan 17 miliarder Indonesia adalah Rp 380,265 triliun.

Angka di atas cukup fantastis, bukan? Nominal di atas sudah setara dengan 20 persen dari total utang luar negeri Indonesia yang kini mencapai hampir Rp 2 ribu triliun. Andai harta tersebut dibagi rata kepada setiap penduduk Indonesia yang sekarang jumlahnya mencapai 238 juta jiwa, maka setiap orangnya

memperoleh jatah uang sekitar Rp 1.997.752. Ternyata kalkulasi matematika ekonominya luar biasa, bukan?

Di tengah angka kemiskinan nasional yang pada Januari 2012 kemarin masih mencapai 29,89 juta jiwa (data Biro Pusat Statistik Januari 2012), munculnya 17 sosok miliarder Indonesia versi Majalah Forbes, menunjukkan betapa rasa optimisme masih bisa terus ditumbuhkan dari perekonomian di Indonesia. Sekaligus di sisi lain menjadi amat ironis, bagaimana mungkin pemerintah bisa gagal dalam merumuskan masa depan ekonomi nasional, sedangkan masyarakat dunia menilai Indonesia memiliki banyak konglomerat kelas dunia.

Para konglomerat Indonesia seharusnya turut memikul rasa tanggung jawab dalam merumuskan masa depan perekonomian nasional. Dengan modal kapital yang mereka miliki, serta jaringan bisnis yang bekerja sampai level Internasional, para pengusaha dan miliarder Indonesia ditantang kepedulian sosialnya dalam memangkas habis angka kemiskinan nasional dan pengangguran di Indonesia. Dua masalah substansial di atas, harus bisa dikerjakan oleh para pengusaha. Tentunya dengan memberikan didikan dan pelajaran hidup kepada seluruh penduduk miskin dan menganggur di Indonesia. Sehingga mereka bisa mencapai prestasi sebagaimana mereka sendiri yang berstatus sebagai miliarder.

Hemat penulis, pemerintah akan sangat mengapresiasi kepada para pengusaha yang bekerja keras dan komitmen dalam membantu pemerintah dalam memberdayakan penduduk miskin dan penduduk menganggur. Kegagalan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran nasional, karuan saja berpengaruh besar pada percepatan pembangunan nasional. Parameter sederhana, untuk menilai derajat percepatan pembangunan nasional yakni menyimak angka statistik (jumlah) keluarga miskin dan penduduk menganggur dalam sebuah bangsa pada periode tertentu.

Terjadinya kenaikan harga Sembako dan kebutuhan hidup lain, serta melonjaknya harga pupuk sepanjang tahun 2012 ini, pastilah akan berdampak buruk pada sektor perekonomian. Sehingga sangat logis, nanti jumlah penduduk miskin dan pengangguran nasional meningkat secara signifikan. Publikasi

yang ditayangkan Majalah Forbes edisi 7 Maret terkait daftar orang terkaya sedunia yang menempatkan Carlos Slim Helu (Meksiko) dan Bill Gates (Amerika Serikat) sebagai orang nomor satu dan dua terkaya sedunia, serta menempatkan 17 miliarder Indonesia masuk daftar para konglomerat dunia tersebut, dapat menumbuhkan semangat optimistik bagi para pengusaha Indonesia. Bahwa mereka tetap mampu berkarya dan berprestasi menjadi orang-orang terkaya sedunia.

Tapi pada aspek lain, menimbulkan sinisme bagi mayoritas penduduk negeri ini, mengapa para konglomerat nasional tersebut tak mampu memperbaiki perekonomian nasional secara langsung? Berapa besar kiprah mereka sekarang dalam menjadikan penduduk miskin negeri menjadi tak berjarak dengan mereka yang kini berstatus kaya?

Data statistik itu sangat penting dan substansial. Perbedaan dalam menampilkan data, berpengaruh besar pada berbagai kebijakan pembangunan. Sekarang saja, masyarakat Jateng bingung; terkait data jumlah penduduk yang ditampilkan pemerintah. Versi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Jateng mencatat sebanyak 39,2 juta jiwa, tapi menurut Kementerian Dalam Negeri RI mendata sebanyak 32,9 juta jiwa. Manakah yang benar? Manakah yang harus dijadikan patokan (digugu)? Antara angka 39,2 juta dan 32,9 juta itu sangat beda jauh, kendati hanya terjadi penukaran letak pada angka kedua dan ketiga pada posisi dua bilangan di atas. Apakah antara Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Jateng dan Kementerian Dalam Negeri RI sedang mau beradu "kesaktian data", bukankah mereka sama-sama institusi pemerintah atau representasi dari negara? (\*)



## Ruang Kompetisi Semakin Sempit<sup>33</sup>

**B**erdasarkan data Bank Indonesia (Januari 2016) jumlah utang luar negeri (pemerintah dan swasta) Indonesia mencapai angka Rp 3.959,709 triliun (setara USD 304.593 juta). Angka tersebut melonjak lebih dari 1.500 triliun jika dibandingkan jumlah utang luar negeri tahun 2010 yang masih di angka Rp 2.428.956 triliun (setara USD 202.413 juta). Padahal penerimaan negara tahun 2015 hanya sebesar Rp 1.761,642 triliun saja. Memang dibandingkan penerimaan negara tahun 2010 kemarin (Rp 995,271 triliun) mengalami kenaikan, namun tidak sebanding dengan beban pengeluaran negara yang harus dikeluarkan.

Beban utang luar negeri bangsa ini semakin besar dari tahun ke tahun. Sementara penerimaan negara tiap tahun yang bersumber dari dalam negeri (pajak dan non pajak serta hibah) masih terpaut jauh dari nominal utang luar negeri tersebut. Akibatnya, sesungguhnya gerak ekonomi nasional bangsa ini sejatinya mengandalkan "ekonomi utangan". Apalagi serapan dana utangan di atas sebagian besar untuk keperluan pembayaran bunga utang pokok serta bukan untuk untuk kebutuhan ekonomi produktif.

Melihat realitas statistik di atas, sudah semestinya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) harus berkomitmen untuk menekan laju pertumbuhan utang luar negeri agar "kedaulatan ekonomi nasional" tidak terdekete oleh negara lainnya. Pemerintah yang baru saja merombak Kabinet Kerja Jilid II diharapkan mampu mengganti haluan ekonomi bangsa ini. Yang harus dilakukan saat ini adalah membangun ekonomi kerakyatan atau ekonomi berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari).

Bukankah pada masa kampanye Pilpres 2014 terdahulu, Jokowi-JK menggembar-gemborkan Ekonomi Berdikari, namun

---

<sup>33</sup> Supadiyanto. (2016). *Ruang Kompetisi Semakin Sempit*. Harian Bernas edisi 5 Agustus 2016.

malahan faktanya kini model pembangunan ekonomi yang dikembangkan justru berkebalikan dengan itu. Ekonomi yang berkembang saat ini cenderung berhaluan liberal. Ditandai dengan otoritas ekonomi pasar, dan pemilik kapital yang dekat pemegang kekuasaan yang menjadi pemonopoli pasar. Buktinya, kini Jokowi-JK justru terus mendongkrak jumlah utang luar negeri (warisan rezim atau penguasa sebelumnya). Utang luar negeri bukannya berkurang, namun terus naik.

Lainnya, kebijakan pemerintahan Jokowi-JK juga membuka kran selebar-lebarnya kepada para investor asing (mancanegara), bahkan melegalkan pemilikan saham perusahaan nasional oleh pemodal asing dalam jumlah besar. Tentu saja implikasi sosial dan ekonomi dari dua model kebijakan di atas sangat besar terutama pada "terjepitnya" posisi para pengusaha nasional dan lokal untuk berkompetisi secara adil di negeri sendiri.

Liberalisasi sektor ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK saat ini bisa saja semakin mengerdilkan kedaulatan ekonomi negeri ini. Konsep Ekonomi Berdikari adalah mengerahkan segala potensi ekonomi kerakyatan yang dimiliki oleh bangsa ini dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada para investor dalam negeri serta memberikan penguatan permodalan dan jaringan kepada mereka.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga menghidupkan ekonomi pedesaan dan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Khusus pada sektor penguatan ekonomi pedesaan, di mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, pemerintah wajib mendudukkan sektor ini dalam pembangunan strategis. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini hampir menyentuh angka 255 juta jiwa, tentu saja kebutuhan pangan menjadi kebutuhan primer yang akan selalu dibutuhkan.

Inilah posisi strategis para petani mengapa pada era modern ini posisinya harus dijadikan pilar strategis. Faktanya, saat ini keseriusan pemerintah memperhatikan nasib kesejahteraan para petani masih minimalis. Dana pembangunan negara untuk memajukan sektor pertanian masih kalau jauh dengan sektor

non strategis lainnya. Ketika ekonomi desa bisa bangkit dan maju, sudah dapat dipastikan gerak laju perekonomian nasional akan naik. Penggelontoran dana pusat kepada setiap desa di Indonesia melalui skenario dana desa, memang menjadi kebijakan luar biasa untuk memajukan perekonomian desa. Namun langkah itu belum cukup.

Bila dikaitkan dengan konsep Ekonomi Berdikari, sebaiknya setiap desa dijadikan pusat-pusat produksi kreatif bagi barang/jasa terutama yang berhubungan dengan sektor pertanian, perkebunan, kerajinan tangan, dan wisata desa. Lainnya mendorong pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan para pemuda/i di seluruh pedesaan. Dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pada jangka panjang kantong-kantong kemiskinan yang selama ini terkonsentrasi di areal pedesaan dapat teratasi dengan baik. Pastilah dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, misalnya dengan membiayai setiap pemuda/i kampung yang berprestasi untuk bisa menempuh kuliah di perguruan tinggi; akan mempercepat gerakan pembangunan di pedesaan tersebut.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kuantitas penduduk miskin se-Indonesia sekarang sebanyak 28.513.570 jiwa (di mana tersebar tinggal di desa sebanyak 17.893.710 orang dan 10.619.860 orang menetap di kota). Padahal pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin masih di angka 27.727.780 jiwa dan tahun 2013 ada sebanyak 28.553.930 orang miskin. Sejak dulu penduduk miskin terbesar tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, di mana angkanya masing-masing melebihi 4 juta orang miskin. Berdasarkan catatan sejarah, jumlah penduduk miskin terkecil di Indonesia dapat dicapai ketika pemerintahan Soeharto masih berkuasa bisa mencapai 22,5 juta jiwa saja (tahun 1996).

Artinya, dengan menggerakkan segala potensi ekonomi baik di desa maupun perkotaan, menurut hemat penulis, peluang pemerintahan Jokowi-JK untuk bisa menurunkan jumlah penduduk miskin masih sangat memungkinkan di masa

mendatang. Jika berbagai kebijakan pemerintahan bisa sinergis antar berbagai sektor, sementara pihak swasta juga berkomitmen kuat untuk membantu pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memberikan kesejahteraan yang layak kepada setiap karyawan (pegawai), sangat optimis pada akhir pemerintahan Jokowi-JK dapat mengepras angka kemiskinan minimal hingga mencapai angka 8 persen dari jumlah penduduk Indonesia saja.

Pekerjaan besar dalam menggerakkan Ekonomi Berdikari, selain dengan menghidupkan ekonomi pedesaan, menurunkan angka kemiskinan di desa, serta meningkatkan kualitas pendidikan para pemuda/i desa; juga harus mengepras jumlah pengangguran nasional yang masih cukup tinggi.

Jumlah pengangguran nasional hingga Agustus 2015 masih mencapai 7.560.822 jiwa. Memang angka tersebut lebih kecil jika disandingkan dengan jumlah pengangguran nasional misalnya pada tahun 2010 yang mencapai angka 8.379.882 orang. Namun yang memprihatinkan, ternyata jumlah pengangguran yang bergelar Sarjana dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan cukup tinggi.

Di tengah jeratan utang luar negeri yang semakin besar, angka kemiskinan dan pengangguran yang besar juga, serta penerimaan negara yang tidak begitu besar; pemerintahan Jokowi-JK bersama Kabinet Kerja Jilid II harus berkomitmen lagi untuk membangun Ekonomi Berdikari. Jika Soekarno terkenal dengan konsep Ekonomi Kepemimpinan, Bung Hatta dengan konsep Ekonomi Sosialis, serta Soeharto dengan Ekonomi Pancasila (Pembangunan), maka Jokowi harusnya mengandalkan Ekonomi Berdikari. (\*)

## Pengumuman SBMPTN dan Sukses Kuliah<sup>34</sup>

**P**anitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2016 akan mengumumkan hasil penjurangan calon mahasiswa baru berbagai PTN secara serentak pada Selasa, 28 Juni 2016 pukul 17.00 WIB melalui situs [www.sbmptn.ac.id](http://www.sbmptn.ac.id) maupun situs-situs yang dikelola PTN penyelenggara SBMPTN. Pengumuman SBMPTN 2016 juga bisa disimak di berbagai media cetak (koran) edisi Rabu, 29 Juni 2016. Sebagaimana diketahui bersama, sebanyak 721.314 peserta (lulusan SMA/K/MA) se-Indonesia mengikuti ujian tertulis SBMPTN pada Selasa, 31 Mei 2016 kemarin.

Padahal kuota yang tersedia hanya 99.223 kursi (mahasiswa baru) yang tersebar merata pada 78 PTN di Indonesia. Khusus di DIY, ada 4 PTN yang menyediakan kursi bagi mahasiswa baru sebanyak 4.503 kursi di UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, dan UPN Veteran Yogyakarta. Padahal jumlah pendaftar yang ikut tes SBMPTN khususnya di wilayah Yogyakarta sebanyak 30.321 orang. Dengan demikian tingkat kompetisi untuk memperebutkan kursi PTN sangat tinggi baik berlaku secara nasional maupun lokal.

Logikanya, sudah dapat dipastikan akan ada 622.091 pendaftar yang gagal atau tidak lulus SBMPTN 2016. Angka yang sangat fantastis. Mereka inilah yang kini dijadikan target pasar utama oleh para pengelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS) maupun PTN yang membuka jalur mandiri. Peluang pasar yang sangat tinggi, menandakan bahwa "bisnis perguruan tinggi" di Indonesia masih sangat prospektif. Secara ekonomi-bisnis, eksistensi perguruan tinggi sebagai "mercusuar keilmuan" di negeri ini menjadi institusi yang masih diandalkan oleh institusi birokrasi, swasta, maupun publik.

---

<sup>34</sup> Supadiyanto. (2016). *Pengumuman SBMPTN dan Sukses Kuliah*. Harian Bernas edisi 28 Juni 2016.

Begitu banyak perguruan tinggi negeri dan swasta berdiri di negeri ini. Khusus di lingkungan Yogyakarta saja, terdapat 106 PTS dalam bentuk universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi. Secara nasional, jumlah PTS dan PTN se-Indonesia sekitar 3.400 buah. Dengan begitu banyaknya PTN/S yang ada di Indonesia, mengindikasikan bahwa geliat industri perguruan tinggi terus menanjak dari tahun ke tahun. Namun sekaligus bisa membingungkan para calon mahasiswa untuk memilih perguruan tinggi favorit mereka untuk melanjutkan kuliah.

Karena minimalisnya informasi terkait petunjuk valid bagi para lulusan SMA/K/MA maupun orangtua/wali mereka untuk menemukan PTN/S yang berkualitas dan terjangkau secara kemampuan finansial; menyebabkan banyak kalangan mengaku kebingungan untuk menentukan pilihan ingin melanjutkan kuliah di kampus manakah di tengah ribuan PTN dan PTS yang ada di Indonesia ini. Hal ini disebabkan kesulitan para calon mahasiswa maupun orangtua murid mendapatkan suplai informasi yang memadai dari berbagai sumber/referensi mengenai keunggulan yang dimiliki oleh berbagai PTN/S di Indonesia. Untuk itulah, berdasarkan pengalaman penulis selama 16 tahun belakangan ini baik status penulis pernah menjadi mahasiswa sejumlah PTN dan PTS serta pernah menjadi dosen sejumlah PTN maupun PTS di Yogyakarta; berikut ini dibebaskan mengenai tips sederhana untuk membantu memilih dan menentukan perguruan tinggi yang tepat (berkualitas namun biaya kuliah terjangkau) untuk tempat kuliah bagi para lulusan SMA/K/MA.

Pertama, lihat akreditasi institusi maupun program studi yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang akan dituju. Hanya ada 3 kategori akreditasi, yaitu A, B, dan C. Perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi A artinya Amat Baik Sekali. Maksudnya secara kompetitif, perguruan tinggi yang mengantongi akreditasi A layak berkompetisi di tingkat Internasional. Sementara perguruan tinggi yang terakreditasi B (Baik Sekali) secara normatif layak berkompetisi di tingkat nasional.

Sedangkan perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi C (Cukup) hanya layak berkompetisi di tingkat lokal saja. Dengan demikian paling tidak para calon mahasiswa baru harus mencari

perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B. Termasuk nilai akreditasi untuk program studinya juga minimal B. Hati-hati jika ada perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi C atau bahkan belum terakreditasi baik secara institusi maupun program studi.

Kedua, cermati juga bagaimana kualitas dan kuantitas dosen (staf pengajar) yang dimiliki perguruan tinggi tersebut. Pada umumnya, perguruan tinggi yang baik akan menampilkan daftar dosen tetap yang mengajar pada program studi maupun kampus tersebut. Pastikan bahwa para dosen tetap yang mengajar pada perguruan tinggi tersebut telah bergelar minimal S2 (Master). Menjadi nilai plus jika perguruan tinggi tersebut memiliki dosen tetap yang bergelar Doktor maupun Profesor (Guru Besar). Pastikan juga bahwa para dosen tetap yang mengampu mata kuliah di perguruan tinggi tersebut memiliki hasil-hasil penelitian yang terpublikasikan pada berbagai jurnal ilmiah. Semakin banyak hasil penelitian yang terpublikasikan milik para dosen tersebut, akan semakin bagus kualitas intelektual yang dimiliki para dosen.

Ketiga, untuk mengetahui kualitas perguruan tinggi cukup mudah dengan melihat jejak rekam dari para lulusan (alumni) yang sudah dihasilkan oleh perguruan tinggi bersangkutan. Semakin banyak alumni yang dimiliki sekaligus telah berkarir pada berbagai instansi pemerintah, swasta maupun mandiri; menunjukkan kaliber dari kualitas perguruan tinggi bersangkutan. Mengingat saat ini kita hidup di era globalisasi, semakin besarnya jaringan luar negeri yang dimiliki oleh sebuah kampus akan meningkatkan kredibilitas institusi terkait.

Keempat, parameter yang bisa diferivikasi oleh para lulusan SMA/K/MA untuk mengetahui kualitas sebuah perguruan tinggi adalah fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki. Bangunan/gedung yang dimiliki seyogyanya adalah milik sendiri, bukan dari hasil menyewa. Pastikan fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, pusat studi, unit kegiatan mahasiswa, pusat kebugaran, dan fasilitas pendukung lainnya dimiliki oleh kampus tersebut. Semakin kecil atau sedikit fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki, dapat dikategorikan kampus tersebut kurang bonafit.

Kelima, pastikan kurikulum yang dimiliki sudah sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI. Kurikulum perguruan tinggi terimplementasikan melalui mata kuliah yang akan diberikan kepada para mahasiswa. Semakin implementatif dan visioner kurikulum dan daftar mata kuliah yang akan diajarkan pada para mahasiswa, semakin baik kualitas kurikulum tersebut. Awal Februari 2016 kemarin Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) baru saja merilis daftar pemeringkatan PTN/S se-Indonesia berdasarkan kualitas dari 4 parameter. Parameter itu terdiri dari kualitas SDM, kualitas manajemen, kualitas hasil penelitian terpublikasi, dan kualitas kegiatan mahasiswa. Data tersebut sangat tepat dijadikan referensi utama bagi para lulusan SMA/K/MA untuk menentukan pilihan dan kualitas perguruan tinggi yang diminatinya.

Sebaiknya juga sebelum para lulusan SMA/K/MA yang gagal SBMPTN 2016 mendaftarkan diri untuk kuliah di PTS maupun PTN dengan jalur mandiri; mereka harus mengumpulkan informasi lengkap yang bisa saja diperoleh dari Kantor Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang menaungi PTS pada setiap provinsi. Atau bisa juga mencari informasi dari saudara, rekan, tetangga maupun kenalan yang telah menempuh kuliah pada perguruan tinggi di suatu daerah. Dengan mendengarkan pengalaman dan nasihat dari orangtua, guru, tokoh masyarakat, dan jurnalis juga menjadi langkah bijaksana sebelum para lulusan SMA/K/MA menjatuhkan pilihan untuk melanjutkan studi lanjut ke suatu perguruan tinggi.

Sukses kuliah merupakan impian yang dimiliki oleh hampir seluruh lulusan SMA/K/MA. Mereka ingin merealisasikan impian dan cita-cita mereka menjadi manusia-manusia yang berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan negara. Kegagalan dalam SBMPTN 2016 jangan dimaknai sebagai kegagalan dari masa depan hidup. Maknailah sebagai pengalaman berharga dan kesuksesan yang tertunda.

Kesuksesan dan lulus SBMPTN 2016 juga terus jangan dimaknai sebagai kebanggaan diri sehingga menjebak seseorang untuk bersikap angkuh, sombong, dan arogan.



Maknailah sebagai ujian hidup untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi. Sukses kuliah (entah di bangku PTN maupun PTS) merupakan titik awal dari pencapaian kesuksesan hidup Anda. Selamat kepada para lulusan SMA/K/MA yang lulus SBMPTN 2016, semoga Anda menjadi mahasiswa teladan. Selamat juga kepada lulusan SMA/K/MA yang tidak lulus SBMPTN 2016, semoga Anda mendapatkan tempat kuliah yang lebih bagus. (\*)

## Habis Lulus SMA/K, Bingung?<sup>35</sup>

**S**aat ini dipastikan jutaan lulusan SMA/K, MAN se-Indonesia yang baru saja dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN) tengah mengalami “kegalauan nasional”. Mengapa bisa terjadi demikian? Sederhana saja. Mereka kini sedang kebingungan dan galau dalam menentukan langkah hidup setelah dinyatakan lulus UN.

Minimal ada empat pilihan hidup yang terbayang dalam benak mereka. Satu, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Entah dengan menempuh kuliah di PTN/S dengan jenjang Diploma maupun Sarjana. Dua, memilih bekerja dengan memasukkan surat lamaran kerja ketika ada peluang. Tiga, menikah dengan pilihan hidup mereka; atau bahkan dijodohkan oleh orang tua atau famili. Empat, memilih menganggur karena tidak termotivasi melakukan tiga langkah di atas.

Dari empat pilihan hidup di atas, idealnya para lulusan SMA/K lebih mengarahkan jangkarnya pada pilihan pertama dan kedua. Jangan sampai memberikan kesempatan untuk pernah memikirkan untuk mengambil jalan ketiga dan keempat. Sebab dua langkah tersebut memiliki risiko besar yang bisa mengandaskan masa depan seseorang. Para lulusan SMA/K yang baru saja dinyatakan lulus UN, jelas belum memiliki kesiapan mental dan finansial untuk menikah, bukan? Kalau *toh* mereka memaksakan kehendak untuk menikah dini, pasti menjadi beban bagi orang tua dan famili mereka. Apalagi jika mereka hanya menganggur, pasti berefek buruk tidak hanya pada diri sendiri; tetapi juga pada keluarga dan masyarakat.

Namun ketika para lulusan SMA/K di atas menjatuhkan pilihan pertama dan kedua, bukan tanpa risiko. Untuk bisa melanjutkan studi di bangku PTN/S; di samping dibutuhkan ketekunan belajar; yang terpenting adalah dukungan finansial mapan. Banyak anak

---

<sup>35</sup> Supadiyanto. (2014). *Setelah Lulus SMA/K Jangan Bingung*. Kedaulatan Rakyat edisi 3 Juni 2014.

lulusan SMA/K yang cerdas (pintar), namun karena tidak memiliki dukungan finansial memadai dari keluarganya, mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Kemiskinan yang menimpa sebuah keluarga, dapat menjadi hambatan besar yang membuat seseorang sulit mengakses pendidikan tinggi. Bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, masih ada peluang *kok* untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi.

Paling tidak ada dua strategi yang bisa ditempuh. Pertama, dengan mengakses beragam beasiswa pendidikan tinggi yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta bagi lulusan SMA/K yang cerdas tetap tidak mampu secara ekonomi. Keterbatasan jumlah beasiswa, sekaligus minimnya lembaga pendonor beasiswa; membuat kompetisi ketat dalam memperebutkan sebuah beasiswa kuliah.

Kedua, lulusan SMA/K yang baru saja lulus tersebut dapat melakukan perjuangan dengan langkah lain. Bila mereka tidak mampu mendapatkan beasiswa yang tersedia, satu-satunya cara yang masih bisa dilakukan yaitu dengan bekerja terlebih dahulu. Ada tiga keuntungan yang bisa diperoleh ketika para lulusan SMA/K langsung bekerja setelah lulus UN. Mereka akan mendapatkan pengalaman kerja, sekaligus mendapatkan gaji (pendapatan) yang dapat dijadikan sebagai “tabungan hidup”. Di samping itu mereka memperoleh relasi (jaringan) yang bisa diberdayakan untuk mendongkrak kesuksesan seseorang. Bahkan jika mereka kreatif, model bekerja sambil kuliah menjadi pilihan hidup yang sangat cerdas di era globalisasi ini. Kreativitas dan keuletan para lulusan SMA/K dalam menyikapi berbagai problema kehidupan, sangat menunjang karir akademik maupun karir kerja bagi mereka.

Karakter dan kecenderungan psikologis yang dimiliki anak-anak muda seusia 18-20 tahun yang masih “cukup emosional”, labil, dan ekspresif, anti pengekanan; jelas membutuhkan bimbingan dan nasihat dari keluarga, tokoh masyarakat dan sesama rekan sebaya. Hal ini penting dilakukan sebab mereka membutuhkan “tokoh idola” (*role model*) yang bisa dijadikan panutan agar mereka bisa hidup bahagia, dan merasa “merdeka” dalam menentukan pilihan hidup.

Sebelumnya publik bisa melihat selebrasi jutaan pelajar

SMA/K meluapkan kegembiraan dengan berbagai cara ekspresif setelah dinyatakan lulus UN pada 20 Mei 2014 kemarin. Dalam pandangan psikolog, euforia kegembiraan kalangan anak remaja di atas, adalah hal yang wajar (normal). Sebab pada momentum di atas, mereka benar-benar merasa merdeka, terbebas dari pengekangan ataupun beban hidup berat berupa penyelesaian pendidikan tingkat menengah. Hal itu bisa menjadi hiburan tersendiri di tengah iklim politik nasional yang kian memanas. Bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus UN, momentum tersebut seperti perasaan merdeka yang “tanpa batas”. Terbebas sesaat dari rutinitas “monoton” belajar di bangku sekolah. Bagi orang tua, kelulusan anak-anak mereka dalam UN; menjadi kebahagiaan spesial. Sebab mereka sudah selesai dalam membiayai pendidikan menengah anak-anak mereka.

Namun harus diingat, bahwa jalan hidup yang tengah ditempuh oleh jutaan lulusan SMA/K di Indonesia masih sangat panjang dan berat. Keseriusan mereka dalam menentukan pilihan langkah ke depan, menjadi kunci sukses untuk menapaki hidup yang lebih cerdas, bahagia, sekaligus sejahtera. Nasihat, bimbingan, dan perhatian dari anggota keluarga, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat terhadap keputusan yang diambil oleh para lulusan SMA/K, MAN yang baru saja merampungkan pendidikan kelas menengah sangat dibutuhkan untuk meminimalisir lahirnya generasi pengangguran. Jangan sampai para *fresh graduate* yang berusia produktif, justru menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Saatnya anak-anak muda itu merancang skenario hidup mereka dengan jalan yang cerdas dan menyenangkan. Selamat berjuang! (\*)

## Lebaran, Laburan, Lebaran, dan Liburan<sup>36</sup>

**R**amadan sebentar lagi berakhir, Idul Fitri atau Lebaran tiba. Dua momentum yang sangat diagungkan dalam ajaran agama Islam. Namun dampak ekonomi dan sosial dari dua helatan akbar tersebut juga sangat dirasakan tidak saja oleh umat Muslim. Umat non Muslim juga merasakannya. Hampir setiap orang merasa sangat berbahagia manakala menjumpai Hari Lebaran.

Lihatlah sekeliling kita saat ini sekarang. Berbagai *mall*, toko swalayan, pasar, dan pusat perbelanjaan dijubeli para calon pembeli yang memborong beraneka ragam kebutuhan Lebaran. Jalan-jalan raya juga dipenuhi dengan lalu lalang kendaraan bermotor berpelat luar kota. Mereka adalah pemudik-pemudik yang ingin merayakan Lebaran di kampung kelahiran. Stasiun, terminal, bandara, pelabuhan juga penuh sesak. Lalu lintas komunikasi melalui *e-mail*, telpon, SMS, dan pos juga mengalami lonjakan luar biasa.

Lebaran di negeri ini memang terbilang sangat unik (khas), berbeda dengan tradisi Lebaran di luar negeri. Khususnya di kawasan pedesaan dan pegunungan, Lebaran menjadi hari paling menggembirakan bagi mereka sebab mereka bisa bersilaturahmi dengan segenap anggota keluarga. Anggota keluarga yang merantau, pada saat Lebaran mengkhhususkan diri untuk pulang ke kampung halaman (mudik). Mereka ingin bersua dan bermaaf-maafan dengan segenap anggota keluarga, rekan, teman sepermainan dulu, maupun tetangga. Lebaran ini pada akhirnya melahirkan tradisi *sungkeman*. *Sungkeman* adalah prosesi permintaan maaf dari anak-anak kepada orang tua mereka, atau bisa juga anak muda kepada orang yang lebih tua atau dituakan.

---

<sup>36</sup> Supadiyanto. (2016). *Lebaran, Laburan, Lebaran, dan Liburan*. Harian Bernas edisi 4 Juli 2016.

Kata Lebaran sendiri berasal dari kata *lebar* (dalam bahasa Jawa). Pengucapan huruf "e" pada kata "*lebar*" sebagaimana ucapan "e" pada kata "jelas". *Lebar* artinya selesai atau usai. Lebaran maksudnya berakhir atau selesainya ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Masa peralihan dari bulan Ramadan menuju Syawal ini ditandai dengan gema takbir yang berkumandang seantero jagat raya. Namun Lebaran juga bisa diturunkan dari bahasa Indonesia yaitu lebar. Artinya luas atau dalam bahasa Jawa *jembar*. Lebaran maksudnya perluasan jiwa lapang dada dari cengkeraman hawa nafsu menuju semangat ketauhidan.

Secara filosofis dan prinsipil, dalam Lebaran mengandung tiga pesan kemanusiaan sekaligus. Yaitu laburan, leburan, dan liburan. Pertama, Lebaran mengandung makna *laburan*. Dalam konteks Lebaran (Jawa) muncul pula filosofi "*laburan*". *Laburan* berasal dari kata *labur* (Jawa) yang artinya putih, atau pemutihan. Lebaran adalah momentum *laburan* untuk saling maaf memaafkan di antara sesama umat manusia. Relasi antar manusia yang paling sederhana adalah hubungan antara anak dan orang tua; atau antara suami dan istri, atau antara adik dan kakak dan sebagainya.

Intensitas persinggungan (komunikasi) dalam satu keluarga berpotensi besar menimbulkan konflik. Konflik inilah yang kerap memicu lahirnya perbuatan kesalahpahaman, kekeliruan, dan kesalahan yang bisa dilakukan tanpa sadar. Dalam konteks Lebaran, mengapa dalam tradisi Jawa, saat Lebaran kita yang saat ini berposisi sebagai anak (jika masih memiliki orang tua) harus terlebih dahulu meminta maaf (*sungkem*) kepada anggota keluarga terutama kepada ibu dan ayah kita. Sebab secara badan wadak, dari merekalah kita bisa terlahir di muka bumi ini. Sangat pantaslah segala pengorbanan dan keprihatinan hidup dalam membesarkan dan mendidik anak-anak mereka mendapatkan penghargaan dan penghormatan setinggi-tinggi dari setiap orang.

Anak yang berbakti kepada orang tua mereka adalah kewajiban moral sekaligus kewajiban hakiki yang harus dilaksanakan oleh setiap anak. Ajaran agama Islam mengharuskan kepada setiap anak untuk berbakti kepada orang

tua mereka sampai meskipun dua orang tua mereka sudah meninggal dunia. Anak yang berbakti kepada dua orang tua selalu mendoakan bagi kebaikan kehidupan dua orang tua di akhirat kelak. Anak yang berbakti kepada dua orang tua juga selalu merawat dan memperhatikan mereka manakala mereka jatuh sakit, menjadi manusia lanjut usia (manula), dan segala kondisi yang ada. *Laburan* dalam Lebaran ini memutihkan segala kesalahan dan kekeliruan secara fisik, psikologis, maupun rohaniyah. *Laburan* yang sukses akan menjadikan setiap manusia putih bersih kembali sebagaimana kondisi bayi yang baru lahir. Tradisi Jawa sudah menyediakan wahana bernama sungkeman di atas. Walaupun sejatinya, *sungkeman* sebaiknya tidak hanya dilakukan setahun sekali ketika Lebaran tiba; melainkan ketika merasa memiliki kesalahan kepada pihak lain.

Kedua, Lebaran juga mengandung pesan makna *leburan*. *Leburan* berasal dari kata *lebur*, artinya leleh atau meleleh. *Leburan* artinya pelelehan. Apa yang dilelehkan? Yaitu segala kesalahan fisik (perbuatan) maupun masih dalam tataran pikiran (niat maupun keyakinan). Kesalahan yang pernah diperbuat kepada sesama manusia hanya bisa dihapus dengan pemberian maaf dari orang yang pernah dirugikan atau disalahi. Allah tidak akan pernah mengampuni kesalahan yang pernah diperbuat hamba-Nya manakala mereka belum meminta maaf kepada pihak-pihak yang pernah dirugikan tersebut. Adapun bagi orang yang dimintai maaf secara ikhlas oleh siapapun dan memberikan maaf kepadanya adalah semulia-mulianya akhlak seseorang.

Memang cukup berat memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah menyakiti baik fisik maupun hati seseorang. Betapa berat hati seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan, kemudian "terpaksa" harus memberikan maaf kepada pemerkosanya manakala yang bersangkutan meminta maaf. Sama beratnya kita memberikan maaf kepada para koruptor yang pernah mengambil kas negara. Sesungguhnya Lebaran menjadi momentum tepat bagi pertaubatan nasional bagi mereka yang benar-benar melakukan perbuatan keji yang merugikan publik.

Ketiga, Lebaran mengandung makna liburan. Libur panjang sebelum dan sesudah Lebaran yang panjangnya selama kurang

lebih 9-15 hari menjadi momen menggembirakan bagi para pelajar, mahasiswa, maupun kalangan pekerja. Mereka bisa memuaskan liburan Lebaran tahun ini dengan mengunjungi berbagai kota di Indonesia sambil berkunjung ke rumah famili. Liburan panjang kali ini juga menjadi sarana bersantai bagi para ibu rumah tangga yang selama ini berkuat mengurus kehidupan rumah tangga. Dengan menikmati masa liburan panjang pada Lebaran kali ini, diharapkan semangat kerja dan semangat perjuangan hidup selepas Lebaran bisa tumbuh bergelora tinggi.

Idul Fitri atau Lebaran yang menyimpan sejuta hikmah (*laburan, leburan, liburan*), hendaklah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menggerakkan energi positif dalam diri setiap manusia menjadi manusia pilihan, manusia bertakwa, dan manusia cerdas. Di samping Lebaran mengandung tiga pesan penting berupa *laburan, leburan, dan liburan*; juga menyimpan pesan moral berupa "*luberan*". *Luberan* berasal dari kata "*luber*" artinya meluap. *Luberan* artinya luapan rizki yang mengalir dari setiap Muslim yang pada saat Lebaran membuka pintu selebar-lebarnya (*open house*) kepada setiap tamu yang akan berkunjung ke rumah tersebut. Si puan/tuan rumah menyajikan beraneka ragam panganan, masakan, dan minuman untuk memuliakan para tamu yang berkunjung. Betapa murah hatinya setiap orang pada masa Lebaran tersebut.

Mereka tidak hanya melimpahkan rizki berupa makanan, tetapi juga meluapkan doa dan harapan kepada siapapun dengan berbagai kebajikan. Semoga Lebaran kita tahun ini menjadi Lebaran yang sangat berkesan di hati. Lebaran menjadi *laburan, leburan, luberan, dan liburan* kita bersama. (\*)



## Refleksi 185 Tahun Kabupaten Bantul<sup>37</sup>

**S**eluruh elemen masyarakat Bantul merayakan Hari Jadi ke-185 tahun Kabupaten Bantul pada 20 Juli 2016 kemarin. Usia Kabupaten Bantul jauh lebih tua dibandingkan dengan usia NKRI yang baru akan mencapai 71 tahun. Terhitung sejak Kabupaten Bantul lahir pada 20 Juli 1831 hingga saat ini tercatat sudah ada 29 Bupati yang memimpin daerah yang berbatasan dengan kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo, serta Kabupaten Sleman ini.

Ada banyak catatan yang bisa ditorehkan untuk mengukir perjalanan sejarah Kabupaten Bantul. Berbagai dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan turut mewarnai laju pembangunan di Kabupaten Bantul. Secara demografis, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta, jumlah penduduk Bantul sebanyak 927.958 jiwa atau 26,4 persen dari jumlah penduduk DIY (3.514.762 jiwa). Namun pada 2012 masih terdapat penduduk miskin sebanyak 284.923 orang atau mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 264.546 orang. Belum ada data aktual mengenai jumlah penduduk miskin di Bantul tahun 2013-2016. Namun merujuk data BPS Pusat, jumlah penduduk miskin di DIY hingga September 2015 sebesar 485.560 jiwa.

Dengan kemampuan pemerintah daerah menghasilkan pendapatan daerah (*local government revenues*) lebih dari Rp 2 miliar sepanjang tahun 2015 kemarin, menunjukkan bahwa potensi daerah Bantul masih sangat prospektif untuk dikembangkan. Jika dibandingkan dengan pendapatan daerah dengan kabupaten/kota lain di DIY, pendapatan daerah Bantul masih lebih tinggi jika disandingkan dengan Kulonprogo,

---

<sup>37</sup> Supadiyanto. (2016). *Refleksi 185 Tahun Kabupaten Bantul*. Harian Jogja edisi 21 Juli 2016.

Gunungkidul, maupun Kulonprogo. Pendapatan daerah Bantul pada tahun 2015 hanya terpaut 0,7 miliar dengan jumlah pendapatan daerah milik Kabupaten Sleman.

Secara kuantitatif, berikut ini ditunjukkan daftar pendapatan daerah. Pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Gunungkidul lebih dari Rp 1,6 miliar tahun 2015; Kabupaten Sleman setinggi Rp 2,7 miliar; Kotamadya Yogya sebanyak Rp 1,7 miliar, dan Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp 1,3 miliar. Pekerjaan berat yang harus diatasi oleh duet pemerintahan Suharsono-Abdul Halim Muslih (Bupati-Wakil Bupati Bantul 2016-2021) terutama mengatasi masalah kemiskinan dan pengembangan tata ruang kota.

Sejak Bantul dipimpin oleh Bupati pertama bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro (1931-1845), serta dilanjutkan oleh Raden Tumenggung Jayadiningrat (1845-1851) dan pejabat bupati lainnya sampai menjelang tahun 1945, Bantul memiliki kontribusi besar pada pencapaian perjuangan kemerdekaan NKRI. Sebelum terlahir Keraton Yogyakarta, pusat kerajaan pada masa itu tersentral di Kerta-Pleret (Bantul). Artinya Bantul pernah menjadi cikal bakal pusat pemerintahan pada zaman penjajahan. Sultan Agung, dan Ki Pemanahan yang merupakan sejumlah tokoh era dulu yang terlahir di Bantul sangat besar pengaruhnya bagi dinamika kemajuan era kerajaan pada masanya. Sedangkan para bupati sejak era kemerdekaan terhitung sejak KRT Djojodiningrat menjadi Bupati Bantul 1943-1947 dan dilanjutkan hingga peralihan Orde Lama menuju Orde Baru sampai Orde Reformasi ini, masing-masing kepemimpinan yang pernah menjabat Bupati Bantul telah memberikan warna baru bagi kemajuan Bantul.

Kemiskinan yang masih menjadi potret nyata sebagian warga Bantul yang tinggal di pedesaan dan pinggiran pantai, hanya bisa diminimalisir jumlahnya dengan memberdayakan penduduk miskin Bantul.

Ternyata sebagian besar penduduk miskin di Bantul adalah mereka yang berprofesi sebagai petani. Makanya pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ini juga harus melalui jalur pertanian. Penyempitan lahan pertanian, akibat terus tergusur oleh pengembangan pembangunan perumahan

dan gedung perkantoran; tentunya menjadi salah satu pemicu mengapa sektor pertanian semakin lesu di Bantul. Anak-anak muda Bantul juga semakin langka mau bergelut menjadi petani. Mereka lebih memilih bekerja menjadi buruh pabrik atau buruh bangunan atau merantau ke luar kota. Akibatnya, regenerasi petani menjadi timpang. Para petani di Bantul saat ini sebagian besar telah memasuki usia senja (tua). Namun tidak ada generasi yang siap menggantikannya. Pemerintah daerah harus membuat terobosan dengan menggulirkan kebijakan di bidang pertanian, agar semakin banyak anak-anak muda yang kembali ke sawah (menjadi petani).

Pembangunan mall, hotel, dan pusat-pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun wisata baru di Bantul yang kian marak saat ini satu sisi menjadi daya pengungkit dan penggerak sektor perekonomian baru. Namun pada aspek lain, juga berdampak negatif terutama dengan semakin terbengkelainya sektor pertanian. Untuk mengatasi hal tersebut, eksekutif harus bekerjasama dengan legislatif (DPRD Bantul) untuk menyusun peraturan daerah yang bisa menjadi jalan tengah agar dua sektor tersebut bisa berjalan sinergis, tidak saling mematikan. Peraturan atau regulasi yang prorakyat, tentulah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera direalisasikan.

Yang masih terlupakan saat ini adalah kelemahan pemerintah kabupaten Bantul yang tidak memprioritaskan untuk menggarap laut yang dimiliki oleh Bantul. Wisata sepanjang pantai yang sudah digarap serius saat ini baik oleh Dinas Pariwisata maupun Pemerintah Desa, menjadi nilai plus. Yang paling pokok lagi selain lebih menyeriusi lagi pembangunan wisata pantai, adalah menggarap potensi laut (ikan, dan sumber daya laut lainnya) yang dimiliki Bantul. Nelayan-nelayan yang dimiliki Bantul masih sangat minim.

Panjang pantai yang dimiliki Bantul sepanjang 17 km dengan luas laut 109,41 km. Ikan yang banyak dijumpai yaitu: tuna, bawal, layur, kakap, udang, dan sebagainya. Namun ironisnya, jumlah nelayan di Bantul hanya sebanyak 573 orang saja dengan kemampuan menghasilkan tangkapan ikan sebanyak 541.314 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul, 2013). Tidak tertariknya penduduk Bantul menjadi nelayan

sementara potensi laut Bantul sangat luar biasa, seharusnya bisa digarap serius oleh duet Suharsono-Abdul Halim Muslih agar bisa mendongkrak pendapatan daerah. Sekaligus bisa memberdayakan potensi ekonomi dari para penduduk sepanjang garis Pantai Selatan Jawa (Laut Kidul). Sebaiknya pemerintah daerah juga menggandeng berbagai perguruan tinggi yang ada di DIY untuk intensif mengelat riset (penelitian) di bidang kelautan, sehingga hasilnya bisa disinergikan untuk pengambilan kebijakan bagi pihak eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Menurut hemat penulis, pengoptimalisasian berbagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang terdiri atas: PT Aneka Dharma, Bank BPD DIY Cabang Bantul, PDAM Bantul, Bank Bantul, dan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati menjadi langkah taktis dalam hal efisiensi pengeluaran belanja daerah sekaligus menggaet produktivitas pendapatan daerah. Hanya saja pengelolaan berbagai BUMD di Bantul di atas yang belum cukup profesional, menyebabkan kontribusi bagi pendapatan daerah masih sangat kecil. Hal itu membuktikan dibutuhkan manajemen dan sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam menggarap kemajuan BUMD. Kini masyarakat Bantul menantikan kehadiran berbagai gebrakan dari para petinggi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ada di Bantul dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu memajukan pembangunan Bantul. Karena ekonomi Bantul pernah dirontokkan dengan musibah gempa bumi 27 Mei 2006 silam, maka untuk membangkitkan kekuatan ekonomi Bantul, penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus penguatan kultural sekaligus infrastruktur yang ada di Bantul menjadi dambaan bagi masyarakat. Selamat Hari Jadi ke-185 Kabupaten Bantul—20 Juli 2016! (\*)

## Menjadikan Harian Jogja sebagai Identitas Jogja<sup>38</sup>

Paling tidak ada dua momentum istimewa sekaligus yang terjadi pada Selasa, 20 Mei 2014 kemarin. Pertama, surat kabar ini (baca: Harjo) merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Kedua, bangsa ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Dua momentum yang sama-sama memiliki semangat pembaruan, kebangkitan menuju kondisi yang lebih unggul.

Sebagai pembaca, ada banyak hal yang bisa direfleksikan berkenaan dengan ulang tahun ke-6 Harjo kali ini. Di tengah suasana politik nasional yang semakin memanas, mengingat saat ini detik-detik yang paling menentukan dalam penentuan rotasi kepemimpinan nasional menjelang Pemilu Presiden 2014; kehadiran media cetak di tengah masyarakat masih sangat dibutuhkan.

Media massa sebagai pelita informasi yang memberikan pasokan referensi kepada publik melalui sajian berita dan informasi yang aktual, terpercaya, menarik, dan terdepan. Dalam teori komunikasi, media massa juga turut menjadi variabel yang mengarahkan pilihan dan keputusan yang diambil publik dalam menentukan solusi atas segala persoalan, termasuk dalam menentukan peta perubahan politik nasional.

Di tengah pertarungan politik dalam memperebutkan posisi RI 1 dan RI 2 serta selanjutnya sejumlah posisi strategis di kementerian dan jabatan setaranya; masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan jelas mengenai segala jejak rekam dari para Capres dan Cawapres yang bertarung pada Pemilu Presiden 2014. Dengan demikian, seluruh media cetak, termasuk Harjo harus berani menyajikan seluruh jejak rekam yang dimiliki para Capres-Cawapres secara berimbang,

---

<sup>38</sup> Supadiyanto. (2014). *Menjadikan Harjo sebagai Identitas Jogja*. Harian Jogja edisi 22 Mei 2014.

proporsional, dan mengedepankan paham imparisialitas-netralitas.

Kehadiran Harjo selama enam tahun ke belakang di kawasan Jogja dan sekitarnya, tentu telah memberikan kontribusi besar dalam kemajuan pembangunan di Provinsi DIY dan sekitarnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan turut memajukan pembangunan pada skala yang lebih luas lagi. Komitmen dan kontinuitas Harjo yang selalu hadir pagi hari telah menjadi "menu sarapan pagi" bagi sebagian besar warga DIY yang gemar membaca.

Di tengah kompetisi bisnis media massa yang semakin ketat juga, di mana terjadi lonjakan penggunaan teknologi Internet terutama di kalangan anak muda; turut mengubah tren publik dalam mengkonsumsi media massa. Harjo yang dikelola oleh anak-anak muda memiliki modal besar dalam merealisasikan lahirnya patron ideal antara pembaca, praktisi media (wartawan, pengiklan, pengusaha media), dan birokrat (legislatif, eksekutif, yudikatif). Tanpa adanya ikatan yang kuat antara pihak-pihak terkait, mustahil eksistensi media massa dapat hidup langgeng. Hal ini mengingat di era konvergensi multimedia ini, sudah cukup banyak media cetak yang berguguran (bangkrut); akibat berbagai faktor pemicu. Salah satu pemicu utamanya yakni mereka kehilangan pembaca setia. Termasuk di kawasan DIY dan Jateng, tercatat sejak era reformasi 1998 hingga 2014 ini, tidak sedikit media cetak yang akhirnya kini menjadi "almarhum".

Pembaca, sebagai salah satu faktor penentu kelanggengan media cetak; memang harus diposisikan sebagai "raja" dan "ratu". Mereka inilah sesungguhnya yang menjadi pemelihara keberlangsungan media cetak secara riil. Untuk itu informasi yang disajikan media cetak harus mampu memberikan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan kalangan pembaca. Pengadopsian teknologi telekomunikasi, media, dan informatika, gratika, dan transportasi (Telematikagratrans) dalam mengelola industri media massa, menjadi sebuah keharusan atau kewajiban yang tidak bisa dikesampingkan saat ini. Hal ini untuk menutup sisi kelemahan

media cetak yang hanya bisa diakses pertama kali pada pagi hari umumnya (harian pagi) dan siang hari (harian sore).

Dengan mengelaborasi antara Telematika dan media cetak, faktor kecepatan bisa dikejar dengan mengeluarkan edisi *electronic paper (e-paper)*, maupun edisi *online*-nya. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Harjo. Penulis selaku pembaca setia Harjo sejak edisi perdananya (20 Mei 2008) hingga sekarang, cukup merasa puas menikmati konten-konten yang disajikan oleh tim redaksi Harjo. Hanya saja rubrikasi yang diperuntukkan bagi anak-anak muda di Jogja dan sekitarnya lebih diintensifkan lagi.

Sebab di Jogja ini memiliki ratusan perguruan tinggi negeri dan swasta yang di dalamnya ada ratusan ribu mahasiswa dan dosen yang memiliki aktivitas intelektual dalam kesehariannya. Ruang ekspresi menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka, untuk menyalurkan berbagai gagasan yang dimiliki. Gerakan Harjo *roadshow* ke kampus, maupun kampung-kampung di berbagai penjuru DIY dan sekitarnya; tentu saja menjadi kegiatan literasi media yang akan semakin mencerdaskan masyarakat. Harjo harus bisa menjadi identitas lokal bagi penduduk DIY.

Berpindahnya kantor redaksi Harjo dari M.T. Haryono, lantas menuju Jalan Ipta Tut Harsono, dan terakhir kali ke Jalan A.M. Sangaji yang cukup dekat dengan Tugu Jogja, semoga semakin memberikan berkah tersendiri bagi kemajuan redaksi Harjo sekaligus pembaca setia Harjo. Warga DIY dan sekitarnya membutuhkan sajian media massa yang lebih cerdas lagi, sekaligus menghibur. Selamat ulang tahun ke-4 untuk Harjo.

(\*)

## Darurat Sektor Pertanian<sup>39</sup>

**A**presiasi masyarakat dalam pesta penyambutan presiden baru yang gegap gempita menjadi modal besar bangsa untuk mempercepat pembangunan nasional. Pertarungan politik antara legislatif dan eksekutif sebagai implikasi hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 berisiko besar memperlambat laju pembangunan nasional. Sebab untuk menyelaraskan gerak langkah pembangunan bangsa dengan negara maju lainnya, Indonesia harus lebih dulu menyatukan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Trias politika ini telah lama menjadi dasar politik nasional yang akan mewarnai proses “reunifikasi” berbagai kelompok masyarakat, seperti kalangan pers, lembaga pendidikan, LSM, korporasi, petani, dan pedagang. Kemampuan Jokowi-JK diharapkan dapat membawa berbagai perubahan positif pada sektor-sektor kehidupan yang selama ini masih dipandang sebagai kelas kedua, atau bahkan kelas ketiga. Di antaranya, pemerintah harus lebih fokus dalam membangun pertanian karena sektor agraris selama ini menjadi tulang punggung (*backbone*) bagi penyangga pangan.

Buktinya, jutaan penduduk berprofesi sebagai petani maupun buruh tani. Kebutuhan beras nasional untuk mencukupi pangan sebanyak 240 juta penduduk Indonesia juga masih pas-pasan. Ketidacukupan suplai dan kebutuhan beras nasional sering kali menjadi pembeda penguasa untuk memberlakukan impor sebagai langkah sangat dilematis bagi masa depan pertanian. Maka perlu diupayakan penggenjotan produksi beras nasional. Salah satunya dengan intensifikasi lahan di Jawa dan ekstensifikasi di pulau lain. Minimnya minat generasi muda menjadi petani yang mulai menggejala sejak 16 tahun silam menyebabkan ketersendatan regenerasi petani.

---

<sup>39</sup> Supadiyanto. (2014). *Darurat Sektor Pertanian*. Koran Jakarta edisi 24 Oktober 2014.



Saat ini, para petani sudah tidak produktif karena memasuki usia senja. Rata-rata usia mereka sudah berada di atas 50 tahun. Kondisi demikian jelas sangat membahayakan masa depan pertanian nasional. Apalagi, perguruan tinggi yang memiliki fakultas pertanian sangat sedikit. Orang-orang tua tersebut tak dapat lagi diharapkan dalam waktu lebih lama lagi untuk mengolah tanah karena sudah semakin renta.

Jika situasi demikian tidak disadari pemerintah, akan ketiadaan tenaga pertanian. Jadi, sekarang dapat dikatakan sebagai darurat pertanian. Harus ada program khusus menggalakkan pertanian agar diminati kaum muda. Generasi muda sekarang tidak tertarik mengolah tanah, ini harus diubah sehingga mereka senang bertani. Motivasi Pemerintahan Jokowi-JK harus mampu memotivasi generasi muda agar terjun ke dunia petani, seperti insentif untuk membuka usaha di bidang pertanian.

Ketidakterseriusan pemerintahan Orde Reformasi terhitung sejak dipimpin BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam membangun budaya pertanian mengakibatkan “jebloknya” sektor ini. Pertanian harus dijadikan isu untuk dikaji secara akademis (ilmiah) dan empirik (sosial) agar meningkatkan perhatian publik untuk sektor ini. Dibutuhkan pemimpin di lingkungan kementerian pertanian dan kehutanan yang benar-benar memiliki jejak rekam andal. Kesalahan Orde Reformasi, menempatkan para menteri yang sama sekali tidak berlatar belakang bidang pertanian (profesional).

Mereka hanya diangkat berdasarkan pada rekomendasi partai politik. Keberanian Jokowi-JK menempatkan sosok-sosok yang profesional, dari latar belakang pendidikan pertanian-kehutanan sangat penting. Bagian lain yang perlu mendapat perhatian khusus adalah sektor kelautan sebagaimana telah menjadi program utama kampanye Jokowi-JK. Sektor ini cukup strategis untuk disatukan dengan pembangunan sektor pertanian. Pembangunan tol laut akan memaksimalkan fungsi laut sebagai sarana produktif. Sinergi pembangunan darat (pertanian) dan lautan (melalui program tol laut) akan menjadi andalan di masa depan guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Sektor pertambangan, minyak, energi, dan gas yang sangat potensial

menjadi “lahan basah” bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus benar-benar dikendalikan.

Sebab hal itu sebagai potensi luar biasa sumber daya alam dan energi. Kesalahan manajemen atau pengelolaan sektor pertambangan, minyak bumi, energi, dan gas berdampak sistemik pada siklus kehidupan ekonomi. Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik selama Orde Reformasi, sangat berdampak buruk bagi kehidupan penduduk miskin. Data BPS Maret 2014, jumlah penduduk miskin masih di atas 28 juta jiwa, sebuah angka yang sangat tinggi. Makanya, rezim baru harus menempatkan para pemimpin di lingkungan kementerian yang menangani pertambangan, minyak bumi, gas, listrik, dan energi harus orang-orang yang berkomitmen tinggi melayani kepentingan publik. BUMN ini harus bisa dikelola untuk menyejahterakan rakyat dan memberikan keuntungan finansial bagi kas negara.

Jangan sampai pucuk-pucuknya hanya menjadikan BUMN sebagai pemain yang menggerogoti keuangan negara. BUMN yang merugi harus perlu dievaluasi dan disinergisasikan dengan badan usaha lainnya, termasuk milik daerah (BUMD). Lingkungan lain yang perlu mendapat perhatian utama adalah sumber daya manusia dan teknologi. Sektor ini menjadi sangat vital dalam upaya meningkatkan kompetensi penduduk untuk berkompetisi dengan negara lain. Kompetisi di era globalisasi yang bersifat terbuka dan cenderung liberal-kapitalistik menuntut sumber daya manusia sangat berkualitas, terampil, dan profesional. Pengelolaan berbagai lembaga pendidikan dari TK hingga PT secara profesional adalah kata kunci yang tidak bisa dikesampingkan.

Dengan meningkatkan mutu pendidikan warga, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap mutu kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa. Publik sangat berharap duet Jokowi-JK menjadi pembuka “jalan emas” menuju negara maju, beradab, dan berkeadilan sosial. (\*)

**BABAK  
KEBANGKRUTAN**

## Menggoyang Kekuasaan Cikeas<sup>40</sup>

**C**itra Partai Demokrat yang mampu menjadi pemenang Pemilu 2004 dan 2009, kini sudah mulai meredup. Persoalannya sederhana saja. Terjadi konflik internal dalam partai berlambang bintang *mercy* tersebut. Di samping itu, adanya isu korupsi yang dilakukan oleh sejumlah elit Parpol tersebut menjadi blunder yang semakin hari merontokkan kekokohan pengaruh partai tersebut hingga ke akar rumput.

Praktis juga daya tarik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pendiri Parpol tersebut, semakin terpuruk. Tak ayal berbagai survei menunjukkan secara kasat mata bahwa popularitas nama SBY, yang dulu bak magnet, sekarang mulai ramai dihujat dan dikritik oleh berbagai elemen masyarakat, terutama para aktivis mahasiswa.

Dan saat ini menurut hemat penulis, merupakan masa krusial bagi petinggi Partai Demokrat untuk menenangkan aneka konflik yang terjadi, khususnya yang menimpa para petinggi partai tersebut. Sejalan dengan itu, para politikus yang menjadi pengimbang pemerintahan yang berkuasa, seharusnya bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendongkrak atau menaikkan popularitas diri maupun Parpol mereka.

Dengan menjalankan manuver politik yang cerdas, kita menilai para petinggi partai besar lain di luar Partai Demokrat seperti Golkar, PDI Perjuangan, PKS dan lain sebagainya dapat mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat luas. Apalagi Pemilu 2014 tinggal 3 tahun lagi. Yang artinya berita negatif yang diembuskan oleh berbagai media massa cetak dan elektronik, yang menyoroti keganjilan dan konflik yang menimpa Partai Demokrat, menjadi kampanye gratis bagi pesaing (musuh politik) partai yang didirikan oleh Presiden SBY dkk tersebut.

---

<sup>40</sup> Supadiyanto. (2011). *Menggoyang Kekuasaan Cikeas*. Suara Karya edisi 14 Juli 2011.

Gejala-gejala akan terjadinya keruntuhan hegemoni dinasti Cikeas, yang diwakili oleh keluarga SBY dan kroni-kroninya, bisa dicitum dari kian santernya wacana pedas yang dihembuskan oleh banyak kalangan, yang pada intinya menyerang kekuasaan Istana Negara. Dengan dukungan berbagai data dan fakta yang dikeluarkan oleh kalangan intelektual melalui beragam seminar, dialog publik dan acara semacamnya, seperti yang diusung oleh Rizal Ramli, yang belakangan ini getol mengkritik kearogansian SBY beserta borok-borok yang telah dilakukannya.

Dunia politik bangsa ini secara hukum alam memang selalu berputar ritmis, terkadang berjalan berulang dan kerap juga mengalami percepatan. Roda zaman juga terus berputar. Tak ada yang abadi dalam dunia ini, kecuali perubahan demi perubahan. Apalagi kekuasaan. Ia akan beralih dari satu penguasa ke penguasa lain.

Tergantung pada garis takdir dan segala upaya yang dilakukan oleh umat manusia sebuah bangsa. Rezim Orde Lama hanya berkuasa selama 21 tahun. Rezim Orde Baru sendiri memegang kursi pemerintahan selama lebih kurang 32 tahun. Sedangkan kita tidak tahu, Rezim Orde Reformasi yang mulai dipegang oleh Presiden BJ Habibie, dilanjutkan oleh Gus Dur dan Megawati serta sekarang dipegang oleh SBY; bakal berakhir kapan? Apakah dapat bertahan hingga melebihi masa Orde Baru, atau seteguh pemerintahan semasa Kerajaan Majapahit yang bisa bertahan selama ratusan tahun? Tak ada ilmu yang bisa menjawab pertanyaan di atas. Karena bisa jadi, Orde Reformasi bisa jatuh di tengah jalan, sebagaimana nasib pemerintahan Orde Baru, yang berakhir dengan pahit. Entah apakah seandainya Orde Reformasi jatuh, akan terlahir periode baru atau Orde Pascareformasi? Semuanya masih abu-abu, belum jelas juntrungannya.

Masa depan tidak bisa dipastikan bagaimana kesudahannya. Yang bisa dilakukan manusia pada zaman ini adalah menghasilkan karya cipta peradaban terbaik, yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan zaman. Karena sangat logis, hukum atau keyakinan yang terbaik hari ini, bisa dianggap sudah kedaluwarsa pada peradaban zaman yang akan datang.

Dengan demikian, rezim yang berkuasa pada saat ini adalah produk terbaik yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Kecenderungan yang terjadi, manusia yang hidup pada zaman ini, umumnya selalu menyalahkan peradaban pada zaman sebelumnya. Dan manusia yang hidup pada peradaban zaman dahulu menyalahkan pendahulunya juga. Akhirnya menimbulkan siklus salah menyalahkan lintas peradaban (rezim) dari masa ke masa. Bukan sebaliknya, kita semakin dewasa dan mawas diri dengan berbagai pengalaman sejarah dan perjalanan peradaban zaman yang telah berlalu.

Maka dari itu, salah besar bagi bangsa ini, jika kita hanya berfokus untuk saling menjatuhkan kekuasaan. Bukannya membangun kekuasaan, sebagai satu kesatuan, tidak saling meniadakan. Mampukan para politikus yang kini menjadi pengkritik pemerintahan yang sedang berkuasa, melakukan tugasnya dengan baik. Yakni membangun kekuasaan baru, tanpa perlu menjatuhkan satu rezim, apalagi dengan dibarengi berbagai tindakan anarkis yang memakan banyak korban jiwa. Kita masih ingat betul berapa harga mahal sebuah demokrasi, ketika melengserkan Rezim Orde Baru. (\*)

## Mengintip Kredibilitas Capres 2014<sup>41</sup>

**H**engkangnya Surya Paloh dari Partai Golkar—belum lama ini, kian menegaskan konfigurasi perpolitikan nasional. Surya Paloh yang selama ini dikenal sebagai *elite* Golkar, sebelumnya bersama Sri Sultan HB X dan tokoh nasional lain mendeklarasikan Ormas Nasdem. Tak berselang lama, lantas lahir Partai Nasdem. Meski tak ada relasi langsung antara Ormas Nasdem dan Partai Nasdem, kabarnya Surya Paloh-lah sosok yang bakal di-Capres-kan oleh Partai Nasdem.

Kendati Pilpres kurang 3 tahun lagi, kini wacana Capres terus mengkristal. Pasca Aburizal Bakrie digadang-gadang Partai Golkar menjadi kandidat terkuat Capres 2014, menyusul kemudian Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) menyorongkan nama Sri Mulyani yang *notabene*-nya mantan Menteri Keuangan RI sebagai RI-1. Praktis berita tersebut meruntuhkan stigma publik, karir politik Sri Mulyani sudah berakhir di negeri ini, hanya karena bekerja di IMF. Justru karena jabatan strategisnya, Mulyani mudah menghimpun kekuatan kapital (modal) dan dukungan asing. Tak bisa ditampik, dalam berbagai hajatan demokrasi bernama Pemilu (Pilpres), campur tangan asing berpengaruh besar dalam mengantarkan kemenangan Capres-Cawapres.

Pasalnya untuk memenangi kompetisi Pilpres, setiap Capres-Cawapres harus didukung kendaraan politik (partai politik) yang solid, dan kapital yang besar sehingga mampu melakukan politik pencitraan sempurna dihadapan publik (konstituen). Bukankah IMF adalah pusat pundi-pundi uang dunia berkuasa? Di samping Aburizal Bakri dan Sri Mulyani yang dielu-elukan menjadi Capres, menurut analisa penulis, nama-nama seperti Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, Anas Urbaningrum dan Megawati Soekarnoputri, punya kans besar

---

<sup>41</sup> Supadiyanto. (2011). *Mengintip Kredibilitas Capres 2014*. Jogja Raya edisi 15 September 2011.

akan di-Capres-kan oleh partai-partai politik kelas menengah ke atas.

Saat ini memang masih sedikit partai politik yang berani mewacanakan Capres-Cawapres 2014. Persoalannya sederhana. Banyak politikus yang mengaku tidak etis membicarakan masalah Capres, sedangkan mereka masih menjalankan program-program pemerintahan SBY-Boediono. Kendati begitu, pemunculan sosok Capres perlu didorong sejak awal, agar publik semakin kenal dekat terkait jejak rekam para kandidat bersangkutan.

Golkar misalnya, kini sedang intensif menggodok 5 kader terbaiknya untuk ditetapkan sebagai Capres. Mereka adalah Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Agung Laksono dan Fadel Muhammad. Sedangkan PAN yang selama ini dikenal sebagai partai nasionalis-religius, juga mendengungkan Ketua Umumnya Hatta Rajasa sebagai Capres. Hingga saat ini, kita belum tahu persis keputusan PDI Perjuangan, apa tetap mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai Capres. Apakah juga Partai Demokrat akan mengusung Anas Urbaningrum yang *notabene*-nya Ketua Umum sebagai Capres, mengingat SBY sudah tak bisa di-Capres-kan lagi karena sudah menjabat selama 2 kali periode.

Kecuali ada manuver politik para politikus partai berlambang bintang *Mercy* tersebut dengan menjagokan SBY sebagai Cawapres (RI-2) dan Boediono atau kandidat lain sebagai Capres (RI-1). Tapi risikonya, langkah politik demikian kendati dilegalkan undang-undang, logika politik itu bisa menurunkan kredibilitas mereka. Saat ini pula kita belum bisa membaca arah peta politik PKB, PPP, PKS, mereka akan men-Capres-kan siapa?

Dinamika politik yang berjalan cepat dan tak mudah ditebak. Dalam praktik perpolitikan, yang tidak kenal istilah lawan dan kawan abadi, dunia politik menjadikan semua serbamungkin. Atau sebaliknya tidak mungkin. Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan politik, yang menjanjikan banyak kekuasaan, kewenangan, kekayaan dan kesenangan. Ada banyak motif kenapa seseorang mau dicalonkan diri atau mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden. Motif seseorang menjadi



Capres-Cawapres yang sulit dideteksi melalui radar inderawi, mengakibatkan masyarakat kebingungan menentukan pilihan.

Pendidikan politik kepada masyarakat, di mana penduduk negeri ini—menurut Rizal Ramli, 80 persennya berada di kelas menengah-bawah dan hanya 20 persen penduduk saja yang hidup menjadi keluarga kaya raya, perlu dibangkitkan. Upaya menyadarkan pengetahuan politik masyarakat kelas menengah-bawah ini bisa didorong melalui pendidikan politik berkelanjutan.

Pilpres bukan sekedar ajang pencoblosan gambar yang dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. Namun itu langkah penting dalam memilih pemimpin yang mampu memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan bagi 238 juta penduduk. Berarti menyangkut persoalan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bakal digulirkan selama 5 tahun ke depan. Seberapa besar komitmen dan kredibilitas para Capres-Cawapres tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menegakkan hukum.

Amat tepat bagi para politikus memunculkan nama Capres-Cawapres jauh hari sebelum hajatan Pilpres tiba, mulai sekarang. Agar masyarakat kelas menengah-bawah mempunyai persepsi dan kesempatan luas dalam mempelajari karakter dan kepemimpinan para Capres-Cawapres 2014. (\*)

## Resafel Kabinet dan Agenda Pemilu 2014<sup>42</sup>

**M**enurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sebanyak 16 kementerian diindikasikan kuat terlibat skandal korupsi. Taktis “isu *hot*” ini memantik rasa ketakpercayaan publik pada pemerintah berkuasa, di tengah getol memerangi ancaman terorisme. Akibatnya, citra pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II terpuruk. Merujuk hasil survei LSI, tingkat kepercayaan publik pada pemerintah anjlok hingga 15 persen. Semula 52,3 persen (Januari 2010) turun menjadi 37,7 persen (September 2011).

Menyikapi kondisi buruk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tinggal diam. SBY berencana merombak (*reshuffle*) kabinet dalam waktu dekat ini. Secara politik, wacana *reshuffle* kabinet bukan hal baru sepanjang perjalanan pemerintahan SBY periode kedua ini. Dalam strategi politik, melakukan *reshuffle* kabinet adalah hak prerogatif presiden yang dinilai sebagai solusi atas permasalahan terkaitnya buruknya kinerja pemerintahan, khususnya menyangkut kinerja para menteri. Teknisnya, mengganti para menteri berkinerja buruk, dengan sosok baru yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi.

Bercermin pada praktik *reshuffle* kabinet yang pernah dilakukan SBY, tetap saja presiden “terdekte” oleh kepentingan partai politik. Hasilnya, orang-orang yang didudukkan dalam kabinet lebih banyak didominasi oleh pesanan para petinggi partai politik. Bukan mereka yang ahli dalam bidangnya (profesional).

Bila kita jeli, pemerintahan SBY-Boediono genap berusia 2 tahun pada 20 Oktober 2011. Ternyata sepanjang 2 tahun pemerintahan KIB II, ada banyak catatan negatif yang ditorehkan.

---

<sup>42</sup> Supadiyanto. (2011). *Resafel Kabinet dan Agenda Pemilu 2014*. Wawasan edisi 10 Oktober 2011.

Kendati ada sejumlah prestasi yang patut dibanggakan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum sukses besar menangkap para koruptor. Buruknya, ada banyak pejabat negara (legislatif, eksekutif maupun yudikatif) yang terseret kasus korupsi.

Permasalahan pokok yang menjerat pemerintahan SBY-Boediono, minimal ada 5 problema kompleks. *Pertama*, isu skandal korupsi yang marak di 16 kementerian. Kasus terbesar yakni mencatat Menpora Andi Mallarangeng yang diduga terlibat kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang serta Menakertrans Muhaimin Iskandar yang diindikasikan kuat terjerat kasus suap program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (Papua).

Soal *kedua*, terkait banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak tuntas dalam pelaksanaannya. Dan soal *ketiga*, masalah pribadi sejumlah menteri, seperti menerpa Menpera Suharso Monoarfa yang digugat cerai istri (Carolina Kaluku). Sedangkan masalah *keempat*, berhubungan kian mahalnya harga Sembako (terutama beras) dan susahnyanya memiliki rumah. *Kelima*, terkait kesehatan sejumlah menteri yang dinilai mengganggu kinerja pemerintah.

Lima masalah itu (moralitas, penegakan hukum, kecekatan, kesehatan, dan kesejahteraan) yang menyebabkan kenapa akhirnya Presiden SBY berencana menggulirkan kebijakan *reshuffle* kabinet (*Suara Merdeka edisi 21/9/2011*). Menurut kalangan Istana Negara, kebijakan merombak kabinet dilakukan bukan karena desakan publik atau terdekete hasil survei sejumlah lembaga penelitian. Melainkan bertujuan mempercepat terjadinya perubahan. Dalih tersebut, kita nilai sebagai bahasa klise yang dilontarkan pihak Istana Negara. Palsunya pihak pemerintah tak ingin "kehilangan muka" dengan persoalan-persoalan yang menjerat para pejabat di "ring 1" Istana Negara. Artinya ada agenda politik yang ingin dicapai melalui perombakan kabinet tersebut.

Dampak politik adanya wacana *reshuffle* kabinet, sungguh dahsyat khususnya bagi mereka yang duduk di kursi kementerian dan pejabat setingkat itu. Masalahnya sederhana, banyak menteri (status quo) berharap cemas agar dirinya tetap

menjadi orang nomor satu di kementerian. Tapi juga bagi mereka yang merasa dekat dengan kalangan Istana Negara, berharap-harap agar dirinya dipanggil (atau dikontak) SBY untuk menjabat menteri baru. Implikasinya, dalam pekan-pekan terakhir ini dinamika politik nasional "semakin" panas.

Terjadi tarik ulur (tawar-menawar) antara SBY dan para menteri yang masih menjabat sekarang (*status quo*) serta para petinggi partai politik yang tak ingin kader terbaiknya dilengser dari kursi kementerian. Sebab jabatan sebagai menteri merupakan jabatan paling strategis menuju kursi kepresidenan. Melalui jabatan itu pula, popularitas seorang politikus atau seorang menteri langsung melesat, dikenal seantero Nusantara hingga mancanegara.

Sangat wajar, kendati praktik ini tak diekspos berbagai media massa dan diketahui publik, tetap saja lobi-lobi politik terjadi di internal Istana Negara semakin intensif. Kita tak bisa menafikan bahwasannya dunia politik, memang sarat dengan muatan kepentingan. Kalkulasi untung-rugi, sangat mendominasi kepentingan jangka pendek, menengah dan panjang. Sukses mendudukkan kader terbaik yang dimiliki sebuah partai politik, dinilai sebagai kepuasan tersendiri bagi keberhasilan partai politik. Hal itu menandakan, partai politik memiliki massa besar dan menjalin kedekatan dengan presiden dan wakil presiden.

Sisi positif dari kecenderungan ini, rasa persatuan dan kebersamaan antara partai-partai politik yang bisa mendudukkan kader terbaiknya di kursi kementerian sangat kuat. Sehingga ketika ada isu kurang sedang menerpa sebuah kementerian, mereka memiliki rasa solidaritas sosial dengan menggalang komitmen kebersamaan untuk menangkis isu yang tak mengenakan tersebut. Namun dampak buruknya, kekritisian para *elite* politik partai politik yang mampu mendudukkan kader terbaiknya di kursi kementerian, terhadap berbagai kebijakan yang digulirkan pemerintah sangat minus (kurang). Sehingga peluang mereka melakukan berbagai penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan terbuka lebar.

Dalam teori politik, wacana *reshuffle* kabinet yang sengaja digulirkan pemerintah, bertujuan untuk memecut kinerja para menteri agar lebih produktif dan berprestasi. Otomatis, *reshuffle*

kabinet menjadi semacam strategi *punishment* (ancaman/hukuman) yang diberikan kepada mereka yang berkinerja buruk.

Keuntungan SBY melalui siasat *pe-reshuffle*-an kabinet yakni mendongkrak citra positif kembali karena musykil para menteri baru itu bekerja seenaknya (entah pejabat menteri lama yang dipertahankan atau dilukir di kementerian berbeda atau benar-benar sosok baru). Pastilah mereka akan semakin meningkatkan kinerja, taat hukum dan bekerja sekuat tenaga mewujudkan berbagai program pembangunan nasional. Dengan lain kata, ada misi politik tersembunyi dari penguasa mengamankan jabatannya pada Pemilu 2014 mendatang, meski masih 3 tahun lagi. (\*)

## Mengamankan Agenda Reformasi<sup>43</sup>

**M**enjelang rezim Orde Baru lengser, banyak orang berharap adanya angin perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para aktivis kampus pada masa itu merasa optimis, paska lengsernya Soeharto dari tampuk kursi kepresidenan akan mengakhiri zaman pengekangan yang sarat dengan tindakan militerisme, otoriterisme dan koruptorisme.

Publik juga merasa yakin, krisis ekonomi dan gonjang-ganjing politik yang melanda bangsa ini pada masa menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto (Mei 1998), dapat berganti dengan masa yang lebih kondusif dan menjanjikan. Singkat kata, seluruh elemen bangsa ini berharap besar dengan berkuasanya rezim Orde Reformasi melalui pemerintahan BJ Habibie, kemudian dilanjutkan Gus Dur, Megawati dan SBY, bangsa ini bisa semakin makmur dan sejahtera.

Justru kenyataannya tidak demikian. Paska Orde Reformasi berkuasa selama hampir 14 tahun, hingga detik ini banyak masyarakat kecewa berat dengan kepemimpinan di berbagai institusi pemerintahan yang ada. Lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang menjadi elemen penting penyelenggara negara, dinilai banyak kalangan telah terjadi banyak penyimpangan. Kasus-kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah menjerat para pejabat negara di tiga institusi di atas, sehingga mereka rela mengkhianati amanah yang sudah diberikan rakyat.

Adanya Pilkada dan Pemilu langsung, yang memilih para pejabat negara mulai dari tingkat daerah hingga pusat, tidak menjamin terpilihnya pemimpin yang amanah dan terbebas dari skandal korupsi. Malahan para pemimpin pilihan rakyat tersebut, mulai mereka yang duduk menjadi wakil rakyat (DPR, DPRD dan

---

<sup>43</sup> Supadiyanto. (2011). *Mengamankan Agenda Reformasi*. Lampungpost edisi 19 Oktober 2011.

DPD RI), gubernur, bupati, walikota dan wakilnya hingga presiden-wakil presiden, sebagian besar tersangkut masalah hukum karena kasus korupsi dengan berbagai modus dan varian.

Agenda reformasi yang saat ini sudah melenceng jauh dari titik awal ketika semangat reformasi dihembuskan, harus diamankan oleh seluruh elemen bangsa ini. Dugaan korupsi yang menyangkut para pejabat negara pada "ring 1" Istana Negara, seperti kasus korupsi di Kemenakertrans dan Kemenpero RI, bahkan menurut data yang dikantongi *Indonesia Corruption Watch* (ICW), ada sekitar 16 kementerian di Tanah Air diindikasikan kuat terjadi praktik korupsi. Pembelokan agenda reformasi yang telah menyimpang jauh dari komitmen kolektif untuk menyejahterahkan rakyat dan menegakkan hukum di Nusantara, harus dihentikan saat ini. Tanpa ada kesadaran bersama terhadap agenda reformasi di atas, bangsa ini terjerumus dalam jurang kenistaan dan penderitaan.

Duet kepemimpinan SBY-Boediono yang mengklaim diri bahwa pemerintahannya berhasil mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat, dengan menyajikan data-data statistik yang memanggakan, sesungguhnya telah memperdayai masyarakat. Data-data yang disajikan oleh pemerintah melalui Biro Pusat Statistik (BPS), besar kemungkinan sudah mengalami pemolesan, agar jauh dari kesan buruk. Data kemiskinan diklaim pemerintah telah menurun jauh jika dibandingkan dengan 7 tahun lalu, ketika pemerintahan masih dipegang oleh Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz.

Angka pengangguran bahkan dikatakan berhasil dikepras sampai angka terkecil, kendati kenyataannya di kota-kota maupun berbagai pelosok pedesaan dan kampung banyak ditemukan orang yang tidak mempunyai pekerjaan (penghasilan) tetap.

Arah agenda reformasi saat ini, jelas sudah semakin kehilangan tujuan. Anggaran negara yang dihimpun dari hasil jerih keringat rakyat, banyak dihambur-hamburkan para penguasa. Hasilnya tak banyak dirasakan rakyat kecil. Bahkan sebagian besar anggaran negara tersebut telah hilang di tengah

jalan, akibat digasak oleh para pejabat negara yang berprofesi juga sebagai koruptor.

Sangat wajar jika sekarang banyak kalangan masyarakat yang tidak puas pada kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Rencana pemerintah *me-reshuffle* kabinetnya pada Oktober mendatang. Itu sebenarnya bagian cara taktis yang dilakukan SBY mengamankan kursi kekuasaan. Terpuruknya citra pemerintahan SBY-Boediono, karena banyak pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi, serta tergerusnya kepercayaan rakyat pada Partai Demokrat akibat banyak politikus dari partai berlambang bintang *Mercy* tersebut yang tersaruk skandal korupsi, disiasati SBY dengan membagi-bagikan kursi kekuasaan menteri, kepada orang-orang yang dinilai mampu mengamankan aset kekuasaan SBY.

Karier SBY sendiri saat ini tengah berada dalam posisi dilematis. Pada 3 tahun masa akhir pemerintahannya, SBY tidak ingin citranya terpuruk. Beliau menginginkan agar ketika ia mengakhiri karier politiknya di Istana Negara, namanya harum sebagai negarawan yang sukses mengantarkan bangsa ini menjadi salah satu negara makmur. Bukan lagi berada pada kumpulan negara yang terseok-seok dalam alam kemiskinan dan penderitaan. (\*)



## De-eksistensi KPK<sup>44</sup>

**D**i tengah proses penyeleksian pimpinan KPK yang baru, eksistensi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi kini tengah disorot publik. Mengingat kredibilitas para pimpinan KPK kian meredup akibat tersangkutnya petinggi KPK dalam kasus hukum. Chandra M. Hamzah dan Bibid Samad Rianto misalkan, pernah diisukan terlibat skandal korupsi tingkat tinggi. Sedangkan mantan pimpinan KPK, Antasari Azhar sudah terbukti melanggar hukum, hingga terpaksa mendekam di penjara.

Saat ini publik terus memantau perkembangan terkini terkait kinerja Pansel Capim KPK dan Komisi III DPR yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 8 Capim KPK paska Lebaran ini. Adapun 8 Capim KPK itu antaralain: Bambang Widjojanto, Yunus Husein (Kepala PPAK), Abdullah Hehamahua (Penasehat KPK), Handoyo Sudrajat (Deputi Pengawasan internal dan Pengaduan KPK), Abraham Samad (Advokat), Zulkarnain serta Adnan Pandupraja (Kompolnas) dan Aryanto Sutadi (Purnawirawan Polisi).

Untuk menentukan 4 calon pimpinan KPK dari 8 Capim KPK yang ada, yang nantinya akan bekerja bersama pimpinan KPK Busro Muqodas, bukanlah gampang. Pansela Capim KPK dan DPR RI harus meneliti dengan cermat terkait kredibilitas, kapabilitas dan profesionalisme para calon pimpinan KPK (2011-20014) itu. Keliru dalam menentukan sosok-sosok pimpinan KPK, berujung pada kebobrokan KPK secara institusional.

Wacana pendeeksistensian KPK oleh sejumlah pihak, jelas sangat bertentangan dengan hati nurani kita. Pasalnya orang atau pihak yang mewacanakan pembubaran lembaga penegak hukum, dapat disinyalir sebagai pihak yang melakukan tindak

---

<sup>44</sup> Supadiyanto. (2011). *De-eksistensi KPK*. Jogja Raya edisi 8 September 2011.

kejahatan melawan hukum. Termasuk juga bermaksud melindungi para koruptor. Upaya penghapusan (deeksistensi) KPK di masa kini, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Andai saja KPK yang selama ini diyakini masih memiliki nyali besar dalam mengendus setiap praktik kejahatan korupsi dihilangkan, tak bisa dibayangkan buruknya nasib penegakan hukum di negeri ini.

Salah satu pernyataan yang belakangan ini paling banyak menuai kontroversi yakni apa yang dilontarkan Marzuki Alie akhir Juli lalu. Di mana inti pernyataan kontroversial Ketua DPR RI tersebut, berkeinginan membubarkan KPK dan memaafkan para koruptor. Praktis *statement* tersebut langsung mendapatkan berbagai tanggapan keras dari banyak kalangan.

Tingkat kejahatan korupsi di Tanah Air hingga kini masih menempati posisi teratas di kawasan Asia Tenggara. Kenyataan tersebut menandai bahwa upaya penegakan hukum masih terlalu lemah. Celah-celah hukum yang dipermainkan oleh para pelaku korupsi juga masih menganga lebar.

Konspirasi antara para pelaku koruptor yang bergerak secara berjamaah, diskenario dengan sangat apik yang melibatkan oknum-oknum lembaga penegak hukum. Hukum menjadi barang dagangan, yang bisa diperjualbelikan. Di mana yang berkuasa dan memegang modal kuat, bisa dengan sangat gampang menguasai kebenaran hukum. Yang bersalah bisa saja lepas dari jeratan hukum, karena mereka bisa mengintervensi kebenaran hukum melalui kapital dan kekuasaan mereka.

Inilah ironi hukum yang terjadi di negeri ini. Sehingga banyak rakyat kecil yang menjadi tumbal. Akibatnya, hukum hanya milik penguasa, pengusaha dan pemilik modal. Jika pendeeksistensian lembaga penegak hukum dipermisifkan begitu saja seperti dengan membubarkan KPK, kita akan kehilangan kepercayaan publik.

Hukum hanya bisa ditegakkan dengan cara yang tegas pula. Ketika ada oknum dalam lembaga penegak hukum yang terbukti bersalah melakukan korupsi atau tindakan penyimpangan lain, solusi yang relevan ditempuh bukan membubarkan lembaga penegak hukumnya, melainkan cukup memproses secara adil, oknum bersangkutan. Indonesia adalah negara hukum, di mana

segala keputusan dan tindak-tindak setiap warga negara harus tunduk pada hukum.

Progresivitas KPK sebagai lembaga penegak hukum yang dikenal tidak pernah kompromi dengan para pelaku korupsi, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, mesti meningkatkan prestasinya dengan menjebloskan sebanyak mungkin pejabat negara atau pejabat publik yang melakukan kejahatan kerah putih. Ketika ada pejabat KPK yang terindikasi turut dalam konspirasi kejahatan korupsi berjamaah, mereka pantas dijatuhi hukuman yang setimpal.

Sebab tak ada satu warga negara pun di negeri ini yang kebal hukum. Jangankan aparat penegak hukum, presiden pun jika terbukti melanggar hukum, sangat pantas diadili di depan pengadilan. Mari kita tunggu bersama siapakah 4 pimpinan KPK yang baru nanti, yang akan menemani Busyro Muqaddas dalam menindak tegas para koruptor kelas kakap di negeri ini. (\*)

## **Godaan Syahwat Kekuasaan<sup>45</sup>**

**P**ada hakikatnya dunia politik dan kekuasaan itu masih memiliki daya tarik luar biasa besar bagi masyarakat. Terbukti setiap kali ada hajatan politik seperti Pemilu, Pilkada atau sekedar Pemilihan Kepala Desa saja, penduduk amat interaktif dalam setiap momentum di atas.

Gejala sosial itu menimbulkan indikasi positif dalam upaya menegakkan negara demokratis yang berkeadilan sosial. Namun patut disesalkan, setelah sukses menduduki jabatan politik, tak sedikit penguasa yang lantas lupa daratan. Mereka terseret masuk dalam gejalak syahwat kekuasaan. Satu jenis hawa nafsu manusia yang cenderung ingin menguasai dan memperdayai.

Penguasa yang sudah tercerabut nuraninya, mereka tergoda melakukan berbagai penyimpangan-penyimpangan kekuasaan dengan memanfaatkan jabatan mereka. Akhirnya merebaklah skandal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang secara ekstrem diotaki dan didalangi oleh para pemegang kekuasaan tersebut.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, sudah menjadi rumus baku, agar bisa menduduki jabatan bupati, gubernur, menteri, wakil rakyat, wakil presiden dan atau presiden, mewajibkan bagi seseorang yang memiliki ambisi dan keinginan tersebut harus terjun dalam dunia politik praktis. Lebih tepatnya langsung bergabung dengan aktif dalam berbagai aktivitas Partai Politik tertentu.

Atau menurut Undang-Undang yang berlaku sekarang, masih menawarkan jalur lain. Yakni melalui jalur independen dengan melalui jalur perorangan, akan tetapi membutuhkan biaya, jalan dan perjuangan yang sangat berat. Amat kecil kemungkinan seseorang yang tak pernah bergelut dalam hingar-bingar dunia

---

<sup>45</sup> Supadiyanto. (2011). *Godaan Syahwat Kekuasaan*. Lampungpost edisi 17 Maret 2011.

politik praktis, bisa menjadi penguasa legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Di Indonesia, dengan keberhasilan seseorang menjadi pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif atau jabatan setaraf dengan itu, bisa melambungkan citra personal, keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal. Citra sosial ini adalah perkara gengsi (harga diri) yang dipercaya bisa menaikkan perolehan rapot sosial di depan publik.

Adagium ini lantas mendudukkan status pejabat publik setara dengan artis atau aktor yang sangat dielu-elukan oleh masyarakat luas. Keberhasilan seseorang menduduki jabatan yang disebut di atas, secara otomatis juga menambah kekuatan dan kapasitasnya dalam melakukan berbagai kebijakan politik maupun non politik.

Bukan rahasia umum lagi, bahwa kemudian kekuasaan menjadi area perebutan banyak kalangan. Setiap musim Pemilu dan atau Pemilukada muncul politikus-politikus anyar yang siap memperebutkan simpati rakyat. Mereka yang berambisi menjadi penguasa itu, juga memiliki ragam motivasi dan ambisi. Ada yang termotivasi dengan menjadi pejabat, bisa semakin mudah dalam memakmurkan kehidupan rakyat. Ada yang idealis, namun ada juga para oportunist.

Para oportunist tersebut berambisi menjadi penguasa (pejabat publik) demi pemenuhan kebutuhan perut pribadi karena sudah tergoda dengan syahwat kekuasaan. Yang memudahkan seseorang kepada harta kekayaan yang berlimpah, kegampangannya dalam mendapatkan kepuasan nafsu syahwat dan kepuasan dalam bermanuver politik secara culas dan picik. Nurani yang ada dalam setiap insan, keberadaannya jangan sampai dikesampingkan. Atau malah dimatikan peranannya. Bagi penguasa, nurani adalah sumber petunjuk ilahi. Melalui bisikan yang berasal dari kedalaman nuranilah, para penguasa bisa dengan benar dalam menjalankan tugas-tugas kerakyatan.

Pada masa kontemporer ini, nurani terasa sudah begitu jauh dari kehidupan para politikus di negeri ini. Karuan saja, begitu banyak wakil rakyat yang tak peka lagi masalah-masalah kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh rakyat. Mereka disibukkan dengan urusan mereka masing-masing, urusan

Partai Politik yang pernah menjadi kendaraan politik mereka. Syahwat kekuasaan membikin perilaku sebagian pejabat dan politikus di negeri ini semakin rakus dengan harta dunia, kesenangan semu badaniyah.

Sistim politik yang merangsang para politikus bisa memainkan aksi akrobatik politis mereka, dengan berjungkir balik, meloncat-loncat dari satu kubu Parpol menuju Parpol lainnya, itu haruslah mendapatkan sentuhan perubahan. Agar atmosfer dan kehidupan politik di Indonesia tidak membodohi rakyat dan memancing para politikus untuk terus berperan seperti badut politik yang bisa mengganti-ganti wajah politik mereka.

Tak salah lagi untuk meluruskan nurani para penguasa dan politikus di negeri religius dan demokratis ini, Partai Politik sebagai rumah dan kendaraan politik adalah institusi yang bertanggung jawab atas semua itu. Maka dari itu para petinggi Parpol, menjadi teladan yang harus berperilaku santun dalam berpolitik.

Segala ucapan dan tindak-tanduk mereka harus berangkat dari kebenaran nurani. Bukan atas dasar syahwat kekuasaan (politik), yang cenderung ingin menguasai dan bertindak culas demi kepuasan ego para politikus dan penguasa. (\*)

## TNI dan Syahwat Kekuasaan<sup>46</sup>

**S**epanjang sejarah NKRI yang kini berusia lebih 66 tahun, TNI memiliki peran penting. Sahih selama hampir 40 tahun, kekuasaan presiden dipegang orang yang berlatar belakang militer. Soeharto, menguasai rezim Orde Baru hampir sepertiga abad. Lalu SBY, presiden di era Orde Reformasi selama dua periode.

Entah suka atau tidak, militer (TNI) memiliki akses kuat menuju Istana Negara. Memang dalam jagat politik, para anggota TNI dan Polri yang masih aktif tak punya hak politik menjadi pengurus atau anggota partai politik. Tapi para purnawirawan TNI memiliki hak politik seperti warga sipil. Kesannya, politik menjadi karier menjanjikan. Banyak purnawirawan militer bergabung mendirikan partai politik baru.. Prabowo Subianto misalkan, paska nonaktif dari TNI, langsung melabuhkan jangkar politik dengan mendirikan Partai Gerindra.

Bagi sebagian kalangan masyarakat, mantan pejabat TNI masih dipandang memiliki sosok kharismatik dan unggul dalam bidang kepemimpinan. Dibandingkan mereka yang latarbelakangnya sipil atau profesional. Melihat fenomena politik di atas, tak berarti pertanda buruk dalam sistem demokrasi. Jika dianalisa, terjunnya para mantan petinggi militer dalam kancah politik nasional, menandai era "Orde Barunisasi" begitu kuat. Terlebih banyak pemikir dan masyarakat yang menilai, rezim Orde Baru adalah pemerintahan yang secara umum dipandang paling berhasil dalam menyejahterakan rakyat ketimbang pemerintahan Orde Lama dan Orde Reformasi. Jujur, ditinjau dari kemakmuran rakyat, masa Orde Baru lebih terjamin jika dibanding sekarang.

Keterpukauan publik pada sosok-sosok politikus yang berlatar belakang militer, mudah dipahami. Karena gejala sosial di atas,

---

<sup>46</sup> Supadiyanto. (2011). *TNI dan Syahwat Kekuasaan*. Jogja Raya edisi 5 Oktober 2011.

ketegasan dan kepemimpinan militer yang serbadisiplin dan keras, mengondisikan pada masyarakat untuk mengidolakan tokoh berlatar belakang militer. Hal ini menjadi keuntungan politik bagi mereka yang pernah berkarir di jalur militer.

Persepsi ini hingga kini masih tumbuh subur dalam benak masyarakat. Namun berimplikasi pada dua hal. TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional mengalami dilematika sosial dan politik. Pada satu sisi TNI harus tetap menjaga keprofesionalitasan, idealisme sebagai tentara. Tugas mempertahankan negara dari serangan musuh dalam negeri terlebih luar negeri.

Pada aspek lain, TNI menjadi kendaraan politik yang amat canggih untuk meraih kekuasaan tertinggi negara. Artinya, secara kamuflikatif, TNI menjadi alat meraih ambisi kekuasaan (eksekutif maupun legislatif), yang biasanya diperebutkan para politikus profesional maupun masyarakat bawah.

Dalam peta politik, TNI berpeluang besar memainkan peran serbacanggih dan strategis. Para petinggi militer mulai dari Panglima TNI, Pangdam, Danrem, Dandim hingga Danramil memiliki informasi akurat dan terkini, mengenai apa saja yang terjadi di tengah masyarakat. TNI memiliki institusi-institusi profesional di berbagai daerah, didukung intelejen-intelejen terlatih dan terampil, tak sebagaimana masyarakat sipil umumnya. Secara fisik, jelas mereka lebih unggul dan terlatih karena ditempa berbagai latihan yang terpola, terukur dan terpadu. Wajar para politikus yang pernah menjadi mantan petinggi militer, memiliki kerja serba taktis dan efektif dalam membesarkan nama dan citra partai politik.

Soeharto sukses besar melalui kendaraan politik berupa Golkar. SBY berhasil menjadi besar berkat Partai Demokrat. Dan Prabowo Subianto menjadi semakin ternama popularitasnya karena Gerindra. Kita akui kegesitan Prabowo dalam memainkan peran politik dewasa ini, lebih canggih dan terstruktur ketimbang Aburizal Bakrie yang murni seorang pengusaha, atau Surya Paloh yang tulen seorang pebisnis media massa.

Kesadaran sejarah bangsa ini perlu dibangkitkan dari tidur panjang. Kalau memang seluruh elemen bangsa ini pernah



menghujat rezim Orde Baru, yang dikenal militeristik dan otoriter, mengapa masih mengidolakan para pemimpin yang pernah berkarir militer? Kendati pertanyaan ini tidak adil, sebab tak semua mantan pejabat militer yang menjadi politikus, berakses negatif dalam hal kepemimpinan dan kekuasaan. Mengapa kalau ratusan juta penduduk bangsa ini pernah traumatik dengan sejarah hitam Orde Baru, dalam Pilpres 2004 dan 2009, mereka memilih SBY yang *notabene*-nya seorang militer tulen? Sejarah berulang, ketika usia pemerintahan SBY mau menginjak 8 tahun, banyak aktivis mengkritiknya. Padahal sebelumnya, para pengkritik dan pendemo itulah yang dulu memilih SBY sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Hari Ulang Tahun (HUT) TNI yang dirayakan setiap tanggal 5 Oktober, menjadi momentum setiap elemen bangsa, merenungkan peran penting yang perlu dilakukan TNI. Para purnawirawan TNI tak haram terjun dalam politik, namun lebih baik jika pemikiran mereka dicurahkan melalui sektor-sektor nonpolitik. Langsung saja mereka terjun ke tengah masyarakat, dengan membawa bendera pemberdayaan masyarakat. (\*)

## Dereligiuitas Wakil Rakyat<sup>47</sup>

**K**epercayaan publik terhadap kinerja dan loyalitas para wakil rakyat dalam memperjuangkan nasib rakyat semakin surut dari tahun ke tahun. Bukti eksplisitnya dapat dilihat dari berita-berita negatif di media massa cetak maupun elektronik yang menimpa para wakil rakyat belakangan ini.

Imbas buruk pemberitaan-pemberitaan miring tersebut, otomatis membuat nalar publik semakin meragukan keprofesionalitasan ratusan wakil rakyat yang berkantor di Gedung Senayan Jakarta. Jika kecenderungan terakhir tadi dibiarkan terus berlarut, akhirnya rakyat tak akan percaya lagi pada eksistensi wakil rakyat dan partai politik.

Yang paling ditakutkan, negara demokrasi hanya akan tinggal retorika semata, karena para *elite* penguasa dan pejabat legislatif tak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. Pada satu sisi muncul juga gejala-gejala terjadinya pendangkalan atau bisa jadi pemusnahan nilai keimanan (dereligiuitas) para wakil rakyat. Kualitas religiusitas wakil-wakil rakyat sudah sepantasnya kita pertanyakan. Seiring dengan ditemukannya sejumlah kasus di mana para wakil rakyat bertindak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama seperti korupsi, pornografi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Perbuatan Arfinto (politisi DPR Fraksi PKS) yang ketahuan membuka konten porno saat yang bersangkutan mengikuti rapat paripurna membahas pembangunan gedung baru DPR—beberapa waktu lalu, menunjukkan betapa kualitas moral dan religius dari sebagian besar politisi yang berkantor di Gedung Senayan cukup merisaukan publik.

Padahal tugas para wakil rakyat adalah menyuarakan aspirasi rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk yang

---

<sup>47</sup> Supadiyanto. (2011). *Dereligiositas Wakil Rakyat*. Lampungpost, 17 Juni 2011.

jumlahnya lebih dari 237 juta jiwa. Ketika para wakil rakyat itu sudah melenceng jauh dari tujuan awal kenapa mereka dipilih menjadi wakil rakyat, tidak mewakili dan memperjuangkan nasib rakyat lagi, mereka harus diberhentikan dari jabatan yang amat mulia tersebut.

Kasus kedua yang menohok nilai religiusitas para wakil rakyat, terkait rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Bagaimana mungkin di tengah situasi perekonomian yang masih belum stabil ini, para anggota DPR RI tetap ngotot ingin membangun gedung baru berlantai 36 yang menelan biaya lebih dari Rp 1 triliun. Memang ada sebagian anggota DPR yang menentang rencana pembangunan gedung baru tersebut. Prokontra pembangunan gedung baru DPR di kalangan internal DPR RI sendiri menunjukkan betapa kompleksitasnya konstelasi peta politik dan mutu moralitas (religius) dari masing-masing pejabat legislatif.

Melihat fungsi ke depannya, pembangunan gedung baru DPR, dinilai banyak kalangan sebagai langkah yang hanya menghamburkan anggaran negara. Para wakil rakyat itu melupakan bahwa negara ini masih dihuni puluhan juta penduduk yang dinyatakan hidup di bawah garis kemiskinan. Kenyataan pahit juga menunjukkan ada jutaan orang menganggur dan masih banyak anak-anak karena ketiadaan biaya terpaksa tidak bisa mengenyam bangku pendidikan atau putus sekolah di tengah jalan.

Bertitik tolak dari rendahnya kualitas moral dan religius dari para wakil rakyat, pemerintahan yang dipimpin SBY-Boediono harus memikirkan serius upaya yang bisa meng-*up grade* nilai-nilai religius bagi para pejabat DPR RI. Apakah perlu setiap anggota DPR RI setiap tahunnya “dikarantina” pada sebuah lembaga khusus yang menangani masalah peningkatan kualitas religiusitas diri? Tetapi mendandani masalah religiusitas yang dimiliki oleh para wakil rakyat, tidak segampang dengan mengubah perilaku anak-anak dengan cukup memasukkan dalam lingkungan pondok pesantren.

Masalahnya menjadi ruwet, karena para wakil rakyat adalah orang-orang terpilih (kader) partai-partai politik. Mereka adalah orang-orang kepercayaan yang dimiliki oleh partai politik. Seperti

yang kita ketahui, kiprah para politisi di berbagai partai politik sangat beragam. Karena mereka berangkat dari partai politik dan latar belakang budaya, agama yang bermacam-macam juga. Sedangkan masalah moralitas dan religiusitas, di mata partai politik, selama ini belum menjadi wacana populer dan menjadi hal yang disubstansialisasikan. Banyak partai politik melupakan esensi penguatan sisi religiusitas dalam membangun sebuah tradisi berbangsa dan bernegara yang dilandasi atas dasar nilai keadilan dan kebenaran.

Akibat kecenderungan para politikus yang gemar berburu kursi kekuasaan, dan lupa memperjuangkan nasib rakyat, akhirnya para politisi di negeri ini terjebak menuju jalan pintas dengan menghalalkan segala cara. Nilai-nilai ajaran agama terkesampingkan, sedangkan strategi dan manuver-manuver politik yang bertujuan untuk menuju kursi kekuasaan menjadi orientasi pertama yang mereka agung-agungkan. Bagaimana mungkin mau mendandani kadar religiusitas para wakil rakyat, jika partai-partai politik sebagai rumah politik para wakil rakyat itu berasal, tidak terlebih dahulu mengubah budaya simplifikasi kekuasaan yang sudah tertanam dalam benak para pengurus dan kader partai-partai politik?

Hilangnya nilai-nilai moral dan religius dari kesadaran jiwa para wakil rakyat, praktis memicu terjadinya berbagai penyimpangan kelakuan yang berujung pada tindakan-tindakan melawan hukum dan melecehkan martabat manusia itu sendiri. Hingga *ending*-nya, sikap egoistik, koruptif dan manipulatif senantiasa menjadi karakter tersembunyi yang membudaya di lingkungan anggota legislatif. Di samping itu juga tindakan-tindakan senonoh, seperti mengakses situs porno, selingkuh dan pelacuran (baik pelacuran secara fisik maupun pelacuran intelektual) akan menjadi babak baru dalam sejarah kelegislatifan di negeri ini. (\*)

## Paket Ekonomi dan Liberalisasi<sup>48</sup>

Orde Reformasi cenderung semakin member kesempatan terbuka kepada pemodal asing memiliki saham berbagai perusahaan terbuka Indonesia. Kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi X belum lama ini pun mendorong searah. Pemerintah ingin mengundang investor asing dengan kesempatan selebar-lebarnya mendirikan atau menguasai saham-saham perusahaan Indonesia sampai 100 persen kepemilikan. Ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga pertumbuhan ekonomi nasional bisa meninggi.

Pada satu sisi, bisa jadi kebijakan tersebut meminggirkan pengusaha nasional maupun lokal dari kegiatan bisnis karena kalah bersaing dengan para konglomerat asing bersumber daya modal tak terbatas, sumber daya manusia lebih unggul, dan sumber daya teknologi jauh lebih modern. Paket Kebijakan Ekonomi X member kesempatan asing memiliki saham perusahaan bidang jasa pelayanan penunjang kesehatan hingga 67 persen, bisnis angkutan orang dengan moda darat sampai 49 persen, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi maksimal 49 persen. Kemudian, pengusaha asing bisa menguasai secara penuh sektor industri perfilman, termasuk peredarannya sampai 100 persen.

Paket juga mencoret 35 bidang usaha yang selama ini masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Di antaranya, industri *crumb rubber*, *coldstorage*, pariwisata (restoran, bar, kafe, rekreasi, seni, hiburan, dan gelanggang olah raga). Mereka juga bisa terjun ke industri perfilman, penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik yang bernilai 100 miliar rupiah ke atas. Sektor lain yang terbuka adalah pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi, perusahaan

---

<sup>48</sup> Supadiyanto. (2016). *Paket Ekonomi dan Liberalisasi*. Koran Jakarta edisi 17 Juni 2016.

jalan tol, pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, serta industri bahan baku obat.

Tampaknya, kebijakan ekonomi memang berorientasi kepentingan pasar asing. Liberalisasi ekonomi tersebut memberi ruang untuk menguasai pasar, sehingga pemilik modal akan menguasai sirkulasi barang, jasa, dan finansial di Tanah Air. Investor asing bisa mendirikan perusahaan multinasional baru dengan 100 persen saham atau gabungan dari para pengusaha asing. Cara lain, asing akan mengakuisisi perusahaan swasta maupun milik negara, sehingga terjadi kepemilikan saham silang antara pengusaha nasional dan asing.

Bisa juga asing “menitipkan modal” dengan meminjam atau menyewa nama pengusaha nasional/local. Ini secara legal formal nama pengusaha asing tidak terdeteksi. Langkah terakhir ini sudah berlangsung lama. Liberalisasi ekonomi tidak akan member kesempatan adil terutama masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapat kesejahteraan yang lebih baik. Sebab, masyarakat hanya menjadi kelas pekerja sekaligus pasar. Sementara, asing memperoleh keuntungan tenaga murah dan mendapat segmen pasar beraneka ragam yang masif.

Liberasasi ekonomi jelas akan mengandaskan kedaulatan bernegara lantaran ekonomi pasar yang dikuasai asing bakal merajalela. Sistem ekonomi nasional dengan mudah didikte kepentingan negara asing melalui kekuatan ekonomi para investor. Memang selama ini sistem regulasi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dsb.) yang terbit sejak era reformasi semakin berorientasi “liberal”. Contoh bisnis media penyiaran melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran member kesempatan asing menguasai saham perusahaan media penyiaran sampai 20 persen.

Bahkan dalam praktiknya, khususnya dalam bidang industri telekomunikasi, kepemilikan saham asing sudah mencapai hampir 90 persen. Lihat saja saham PT Telekomunikasi Indonesia Seluler Tbk (Telkomsel) 37,86 persen dikuasai *Singapore Telecom* dan publik asing. Pemerintah dan masyarakat Indonesia cukup memiliki 62,14 persen. PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) dikuasai Telekom Malaysia Berhad dan asing sebesar 85,07 persen. Sisanya milik

Telekomindo Primabhakti dan masyarakat Indonesia. Lebih prihatin lagi, pemerintah dan rakyat hanya memiliki saham 13,38% PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (Indosat). Sementara Singapore Technologies Telemidia Pte Ltd dan asing memegang saham 86,62 persen.

Penguasaan investor asing terhadap aset-aset penting bangsa tidak hanya pada sektor media penyiaran dan telekomunikasi. Mereka juga kokoh di perbankan mencapai 100 persen. Lihat komposisi Bank Danamon (68,83 persen asing), Bank Buana (61 persen), Bank UOBI (100 persen), Bank NISP (72 persen), Bank OCBC (100 persen), CIMB Niaga (60,38 persen). Kemudian di Bank BII (55,85 persen), Bank BTPN (71,6 persen), Bank Panin dan Bank Permata masing-masing dikuasai asing 35 persen dan 44,5 persen. Berdasarkan data Dirjen Migas (2009), penguasaan asing juga terjadi pada dunia perminyakan. Lihat saja saham asing di Chevron (44 persen), Total E&P (10 persen), dan Conoco Phillip (8 persen). Sedangkan Pertamina dan mitranya yang selama ini dianggap mencerminkan perusahaan murni nasional hanya menguasai 16 persen pasar nasional.

Asing juga pengendali sektor pertambangan, bisnis elektronik, perhotelan, dan jasa. Kebebasan ekonomi bisa berdampak positif demi percepatan dalam jangka pendek. Namun untuk waktu lama sesungguhnya bisa menjerumuskan.

Yang harus dilakukan sekarang penguatan modal dan jaringan para pengusaha nasional. Jangan sampai mereka kalah bersaing. Sebagai alternatif, perlu dikaji lagi peluang perkembangan ekonomi Pancasila. Jangan sampai nilai-nilai Pancasila tersisih budaya, ideologi, maupun wacana asing. (\*)

## Histeria Miss Universe 2011<sup>49</sup>

**D**i luar dugaan, akhirnya *Miss Leila Lopes* dari Angola berhasil dinobatkan menjadi *Miss Universe 2011* paska mengalahkan 88 kontestan lain dari berbagai negara dunia. Kontes kecantikan secepat atau yang lebih populer disebut *Miss Universe* yang baru saja usai dihelat di Sao Paulo, Brasil berlangsung selama tiga minggu (21 Agustus - 12 September 2011), dan menyedot perhatian publik luar biasa.

Puncak adu kecantikan tersebut yakni helatan malam *grandfinal Miss Universe 2011* yang dihelat pada 12 September di Hotel Hilton, Sao Paulo, Brasil pukul 21.00 waktu setempat (atau 13 September pukul 07.00 WIB). Di mana dalam kesempatan tersebut, sebanyak 89 wanita cantik dari negara berbeda-beda, termasuk dari Indonesia. Para kontestan saling bersaing meraih nilai tertinggi dalam tiga kategori, di antaranya baju renang, gaun malam, dan sesi wawancara. Adapun yang tercatat sebagai dewan juriya adalah Helios Castroneves, Connie Chung (U.S. Broadcast Legend), Isabeli Fontana (Supermodel Brasil), Vivica Fox (Aktris & Televisi Produser), Lea Salonga, dan Amelia Vega (*Miss Universe 2003*) serta Adrienne Maloof.

Di tengah histeria penyelenggaraan *Miss Universe*, hajatan tersebut menuai kritik dan kontroversi. Pasalnya oleh sebagian besar kalangan, adu kecantikan sedunia tersebut tak lebih dari pengeksploitasian dan publisitas gila-gilaan akan daya tarik tubuh wanita (sensualitas). Bagaimana tidak, puluhan wanita-wanita cantik sedunia, dalam ajang tersebut, dipamerkan dan diharuskan tampil mengenakan bikini (busana renang). Harapannya, bisa menampilkan lekuk-lekuk tubuh dan kemolekan ragawi mereka. Memang benar, dalam adu kecantikan tersebut juga dilakukan kompetisi kecerdasan yang

---

<sup>49</sup> Supadiyanto. (2011). *Histeria Miss Universe 2011*. Wawasan edisi 19 September 2011.



meliputi pengetahuan umum, ketrampilan dan kefasihan berbahasa asing serta bersosialisasi. Akan tetapi, sesi tersebut dinilai hanya sebagai "aksesoris" semata agar dibidang tidak vulgar seratus persen.

Tak ayal negara-negara yang sebagian besar penduduknya Muslim jarang yang mengirimkan wakilnya dalam ajang ini. Mesir, Libanon, Malaysia dan Indonesia, menjadi perkecualiannya, dan mengirimkan wanita tercantiknya agar bisa memenangi kompetisi kecantikan sejagat tersebut. Meski kenyataannya mereka gagal memenangi kontes tersebut.

Keikutsertaan kontestan asal Indonesia untuk kesekian kalinya, di mana dalam hajatan tersebut Indonesia mengirimkan *Miss Nadine Alexandra Dewi Ames*, praktis juga menuai kontroversial di Tanah Air. Nadine yang juga harus mengenakan bikini dalam ajang tersebut, kemudian dipamerkan kepada publik sedunia, ditentang keras oleh masyarakat. Masalahnya perilaku tersebut sangat bertentangan keras dengan nilai-nilai sopan santun, apalagi jika diukur dengan parameter norma agama Islam. Di mana Islam mewajibkan bagi setiap perempuan menutup aurat mereka.

Di tilik dari segi ekonomi, hajatan *Miss Universe* yang diprakarsai oleh taipan Donald Trump tersebut dominan merupakan kolaborasi dunia industri dan hiburan. Yang menjadikan perempuan sebagai komoditas atau alat utama penggaet penonton. Sehingga dari acara yang menelan dana sangat besar itu, diharapkan juga bisa mendatangkan keuntungan finansial yang lebih besar lagi. Wanita, seks dan kemewahan duniawi merupakan media hiburan yang paling manjur dijadikan alat pengeruk keuntungan terbesar sepanjang sejarah dunia. Dan terbukti jutaan bahkan miliaran umat manusia rela menyaksikan seremonial acara *Miss Universe* tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media massa cetak dan elektronik).

Secara politik, kompetisi kecantikan sejagat tersebut merupakan propaganda politik yang dilancarkan oleh negara-negara sekuler untuk menjangkarkan kepentingan politik mereka di berbagai negara dunia. Bagi negara-negara Muslim, hajatan tersebut banyak ditentang keras, karena bisa

menjerumuskan generasi muda pada pergaulan bebas dan perzinahan. Akan tetapi bagi negara-negara sekuler, justru hajatan tersebut menjadi suguhan acara yang paling layak diapresiasi dan dinikmati. Berbeda memang paradigma masing-masing kelompok negara tersebut, dalam memandang eksistensi *Miss Universe*.

Sementara itu secara ideologis, sangat terang bahwa *Miss Universe* mendapatkan banyak sorotan dari berbagai kalangan di dunia. Ada yang memandangnya sebagai sebuah *show* (pertunjukan) yang penuh dengan kreativitas, intelektualisme, seni, estetika dan kecantikan. Tetapi sebaliknya, ada juga yang mengklaim bahwa tontonan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama, karena lebih mengekspos kemolekan tubuh wanita.

Dalam ajang pemilihan ratu sejagat yang telah dimulai sejak tahun 1952 ini, ada fakta-fakta seru dan unik yang penting disimak. Bisa jadi negara Amerika Serikat adalah negara yang paling beruntung sepanjang penyelenggaraan *Miss Universe*. Alasannya, karena kontestan asal Amerika Serikat telah memenangkan kontes ini dan menyabet gelar *Miss Universe* sebanyak 7 kali, 8 kali sebagai *runner up*, dan 6 kali berada di peringkat ketiga.

Terlepas dari berbagai polemik (prokontra) menyikapi hajatan *Miss Universe*, yang selalu terkuak ketika hajatan bertaraf Internasional dihelat, senyatanya adu kecantikan sejagat itu menyebabkan histeria penduduk sedunia. Ada miliaran pasang mata yang memelototi pertunjukan malam final *Miss Universe* pada 12 September 2011 kemarin, entah mereka yang datang langsung ke Sao Paolo (Brasil), maupun cukup melalui tayangan media cetak maupun elektronik (televisi, radio maupun internet). Para penonton tersebut tidak hanya didominasi kalangan pria, tetapi banyak juga mereka yang tercatat sebagai perempuan, tidak tua maupun muda.

Histeria ini menjadi sebuah ironisme sosial, kendati hajatan tersebut dikritik keras karena banyak memamerkan lekak-lekuk tubuh wanita, diam-diam para pengkritik tersebut memelototi (mengagumi) kontes kecantikan sejagat raya tersebut. Aneh, tidak? (\*)

## Mental Korupsi di Gunung Kidul<sup>50</sup>

**D**i tengah bulan Ramadan, Kabupaten Gunungkidul bikin kejutan buruk sepanjang perjalanan pentas nasional. Hal ini terkait dengan ditetapkannya sebanyak 32 anggota dewan periode 1999-2004 sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Mereka disangka menerima tunjangan anggota dewan tahun anggaran 2003/2004 yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Diprediksikan akibat kasus tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 2,8 miliar, yang selama ini jadi bancakan dana tunjangan bagi anggota DPRD 2003-2004.

Di mata publik, berita di atas memiliki dua perspektif. *Pertama*, merupakan hal yang menggembirakan karena aparat penegak hukum sukses dalam menjalankan tugas mereka. Kendati pembongkaran kasus tersebut sudah terbilang terlambat, sebab kejadiannya sudah terjadi sekitar 7 tahun silam. Kedua, menjadi keprihatinan publik, karena para wakil rakyat sudah kehilangan rasa malunya pada rakyat. Mereka yang berani melakukan kejahatan korupsi, sama saja dengan mengkhianati kepercayaan publik.

Sebagai intelektual kampus, kita pantas mempertanyakan bagaimana mungkin para wakil rakyat yang selama ini menjadi orang-orang yang mewakili kepentingan banyak orang dan dipilih langsung oleh masyarakat, berani melakukan skandal korupsi? Pertanyaan lain yang relevan dimunculkan, mengapa dugaan kasus korupsi yang berskala besar tersebut baru terkuat sekarang, tidak dahulu kala ketika para tersangka masih aktif bekerja menduduki jabatan anggota legislatif? Tanda tanya yang lebih penting lagi, apakah hal itu sengaja dilakukan untuk merontokkan citra pemerintah daerah setempat, dimana Wakil Bupati Gunung Kidul (Imawan Wahyudi) baru saja dilantik, sehingga motif pembongkaran dugaan skandal korupsi tersebut

---

<sup>50</sup> Supadiyanto. (2011). *Mental Korupsi di Gunung Kidul*. Jogja Raya edisi 15 Agustus 2011.

lebih dominan dirasuki muatan politiknya ketimbang upaya penegakan hukum itu sendiri?

Fenomena para wakil rakyat (anggota DPR/DPRD) menjadi tersangka kasus korupsi, memang bukan hal baru lagi di negeri yang religius ini. Pada tingkat nasional, tentu kita tidak gampang melupakan daftar nama pejabat wakil rakyat yang pernah terseret skandal korupsi. Mari coba kita deret para terdakwa skandal korupsi tersebut. Mereka adalah Noor Adenan Razak (anggota Panggar Komisi IX DPR 1999-2004), Hamka Yamdhu (anggota DPR Fraksi Golkar Komisi IX), Al Amin Nur Nasution (anggota Fraksi PPP Komisi IV DPR RI 2004-2009), Yusuf E. (anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR 2004-2009), Sarjan Taher (anggota DPR 2004-2009 Komisi Kehutanan dan Pertanian dari Fraksi Demokrat), Azwar Chesputra (anggota Komisi Kehutanan (Komisi IV) DPR).

Di samping itu para anggota legislatif yang pernah tersangkut kasus hukum yakni Hilman Indra (anggota Komisi Kehutanan (Komisi IV) Dewan Perwakilan Rakyat), Fahri Andi Leluasa (anggota Komisi Kehutanan (Komisi IV) Dewan Perwakilan Rakyat), Bulyan Royan (anggota Komisi Perhubungan (Komisi V) DPR dari Fraksi Partai Bintang Reformasi 2004-2009), dan Abdul Hadi Jamal (anggota Komisi Perhubungan DPR RI Fraksi Amanat Nasional 2004-2009), Udju Djuhaeri (anggota Fraksi TNI Polri 1999-2004), Dudhie Makmun Murod (anggota DPR Fraksi PDIP 1999-2004), Endin Ahmad Jalaludin Soefihara (anggota DPR Fraksi PPP 1999-2004) serta Anthony Zeidra Abidin (Fraksi Golkar) dll.

Betapa demokrasi kemudian hanya menjadi sandiwara politik dan permainan sebagian elit penguasa saja. Wakil rakyat yang mestinya berkewajiban mengangkat derajat dan martabat rakyat, malahan beramai-ramai menyalahgunakan kekuasaan demi meraup keuntungan semu. Misi para politikus yang berambisi menjadi wakil rakyat serta pejabat publik lain, saat ini patut kita pertanyakan.

Bagaimana mungkin akan membangun sebuah negara yang kuat dan rakyatnya hidup sejahtera, kalau para wakil rakyat (anggota legislatif) koruptif? Pun pejabat eksekutif serta yudikatif turut melakukan kejahatan serupa, yakni praktik korupsi

berjamaah? Kesadaran para wakil rakyat dalam menjalankan amanah rakyat perlu dibangkitkan. Kuncinya terpulang kembali pada rakyat. Rakyat adalah masyarakat umum yang tidak menduduki jabatan politik maupun jabatan publik. Ketika ada hajatan Pemilu atau Pemilukada, mereka dijadikan objek kampanye sekaligus subjek kampanye massa. Mereka menggunakan hak pilihnya, entah dengan motif menyuarakan hati nurani atau sekedar memilih karena upah atau janji yang pernah diberikan pihak tertentu. Dalam struktur negara demokrasi, kedudukan rakyat dianggap penting. Tapi kenyataannya, mereka banyak dikesampingkan.

Para wakil rakyat yang terseret dalam berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, berarti telah mengkhianati amanah yang diberikan rakyat kepada mereka. Untuk mencegah agar rakyat tidak memilih para wakil rakyat yang bermental koruptif, mereka harus cermat dan tegas dalam mencermati prestasi dan jejak rekam para politikus di negeri ini.

Penegasan kembali kedaulatan hukum sebagai “panglima” dalam segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara, harus digelorakan kembali. Agar berbagai skandal korupsi yang akhirnya hanya menyengsarakan rakyat kecil dapat dicegah sedapat mungkin. Nah pantaskah para wakil rakyat yang pernah terindikasi dalam skandal korupsi, masih pantas disebut sebagai wakil rakyat? (\*)

## Antara Teroris dan G30S/PKI<sup>51</sup>

**S**ejurus pasca terjadi tragedi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Solo, Minggu (25/9/2011) lalu, publik bertanya, mengapa aksi terorisme masih terus terjadi di Indonesia? Padahal tokoh-tokoh teroris seperti Dr. Azhari, Noordin M. Top, Imam Samudra, Amrozi, dan Dulmatin dkk. sudah musnah?

Tragedi di atas terjadi hampir bertepatan dengan 46 tahun pasca peristiwa tragedi G 30 S/PKI. Di mana dalam upaya kudeta pada 30 September 1965 silam, sebanyak 6 jenderal tewas dibantai. Rangkaian selanjutnya telah menyebabkan pembersihan massal oleh pemerintah Orde Baru yang menewaskan ratusan ribu bahkan jutaan penduduk sipil yang diduga anggota komunis. Peristiwa bom *kamikaze* di Solo belum lama ini, yang menewaskan 2 orang (diduga salah satunya adalah pelaku bom bunuh diri) dan puluhan lain terluka, mencuat hanya selang beberapa hari setelah pihak Istana Negara menyatakan akan melakukan kebijakan *reshuffle* kabinet—Oktober mendatang. Apalagi kita masih ingat benar, pada 11 September 2001 silam pernah terjadi Tragedi WTC, yang memakan nyawa banyak orang.

Jika mengamati tragedi bom bunuh diri di salah satu gereja Solo tersebut, tampaknya ada pesan kuat yang ingin dilakukan pelaku peledakan maupun dalang intelektual di balik aksi terorisme itu. Dengan menjadikan gereja sebagai lokasi peledakan, mereka berkeinginan memantik adanya permusuhan antar pemeluk agama Nasrani dengan pemeluk agama lainnya.

Inti pertanyaan publik yang mengerucut adalah, apakah para teroris sengaja dikader atau diciptakan oleh “penguasa dan aparat keamanan” dalam kerangka mengalihkan isu nasional. Di mana saat citra pemerintah berkuasa terpuruk, mereka

---

<sup>51</sup> Supadiyanto. (2011). *Antara Teroris dan G30S/PKI*. Wawasan edisi 29 September 2011.

mengalihkan isu dengan memerintahkan para teroris meledakkan bom di sebuah daerah? Adakah juga relasi kuat antara modus yang dilancarkan para komunis melalui G 30 S/PKI untuk mendirikan sebuah negara komunis, dengan aksi para teroris yang disinyalir kuat mewujudkan negara agama (Islam)?

Menurut analisa penulis, aksi terorisme yang terjadi belakangan ini memiliki motif kuat berhubungan dengan kursi kekuasaan. Jadi arahnya mirip dengan modus "PKI" yang melancarkan aksi kudetanya, yang berpuncak pada penguasaan negara. Sangat mustahil jika para teroris itu bekerja sendiri-sendiri, tanpa ada koordinasi yang baik di antara mereka.

Keberanian seseorang melakukan bom bunuh diri, dibutuhkan mental militan, bernyali besar dan tidak takut akan kematian. Berbeda dengan aksi teroris yang melakukan peledakan bom tetapi dari jarak jauh. Ada peluang besar juga bahwa pihak intelejen, yang selama identik dengan badan yang mengamankan kepentingan penguasa (pemerintah) bukan kepentingan negara, menjadikan terorisme sebagai "senjata pamungkas" untuk menaikkan citranya.

Minimal melalui aksi terorisme tersebut, perhatian masyarakat bisa teralihkan menuju kasus terorisme. Berbagai skandal korupsi yang menimpa pejabat negara, yang memperburuk citra pemerintah belakangan, bisa ditinggalkan sementara waktu. Berbagai media massa otomatis juga mengalihkan perhatiannya dari isu-isu korupsi dan kepincangan lain, menuju berita-berita terkait terorisme.

Dalam sejarah perjalanan bangsa ini, kita sangat trauma berat dengan kasus komunisme yang menyebabkan kekacauan politik dan kerusuhan nasional. Pada masa modern ini, kita tidak ingin mengulangi sejarah kelam tersebut melalui kasus terorisme yang bisa meneror ketentraman masyarakat. Bukankah aksi-aksi yang dilakukan para teroris, dengan meledakkan bom di berbagai daerah, tak ubahnya aksi para komunis yang menggorok leher manusia, namun dengan alat yang lebih canggih? Bukankah juga belakangan ini wacana seputar terorisme menyeruak lagi di Tanah Air, seiring tragedi bom bunuh diri di gereja Solo (25/9) dan bom bunuh diri di masjid Cirebon (15/4) lalu?

Mencoba mengaitkan langsung antara masalah terorisme dengan komunisme, memang belum ada korelasi yang cukup signifikan. Terorisme berhubungan erat dengan persoalan aksi radikal yang sering disertai peledakan bom di berbagai tempat publik, hingga menelan banyak korban jiwa. Membincang masalah komunisme, menyangkut persoalan-persoalan ideologis yang menganggap bahwa keadilan sosial adalah penyamaan hak dan kewajiban bagi setiap orang tanpa perlu menyangkut-sangkutkan dengan persoalan teologis, bahkan harus terbebas dari persoalan religius.

Hanya kesamaannya, terorisme pada satu sisi bisa dipahami sebagai sebuah ideologi. Sebagaimana komunisme, juga sebagai pengejawantahan atas sebuah ideologi yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh komunis seperti Karl Max dan Lenin. Semenjak kehancuran negara Uni Soviet sebagai "kiblat politik" bagi komunisme Internasional, diakui isu komunisme perlahan-lahan seperti musnah.

Hingga kini, wacana komunisme—yang dulu pernah menjadi sejarah hitam bagi negeri ini, tampaknya telah sirna. Kendati Rusia dan China sebagai dua negara yang punya kans besar menjadi kiblat baru "ideologi komunis internasional", Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara *Super Power* di jagat ini sudah mengantisipasinya dengan manuver politik dan kebijakan luar negerinya.

Meski begitu ideologi terorisme dan komunisme, tidak bisa dipisahkan dari peradaban manusia. Keduanya pada masa mendatang; bisa saling berkompetisi. Para pelaku terorisme yang umumnya adalah orang-orang yang memiliki basis pemahaman keagamaan yang kuat, semisal dengan mengeksplotasi ajaran jihad dalam agama Islam, di kala melakukan aksi terorisme mereka tak segan menghancurkan target sasaran. Meski korbannya warga sipil yang tak berdosa.

Sementara para penganut paham komunisme, memiliki militansi yang luar biasa. Adanya negara-negara miskin dan melarat, adalah habitat subur bagi tumbuhnya generasi komunis. Menilik ideologi komunis dan ideologi teroris itu, memiliki *platform* sama dalam memperjuangkan tujuan hidup. Yakni



menghalalkan segala cara, termasuk membunuh warga sipil tak berdosa sekalipun.

Pengalaman pahit negeri ini akan bahaya komunisme, sudah terekam dalam sejarah bangsa ini di mana ada banyak penduduk di negeri ini yang dibunuh para penganut paham komunis. Pemerintah berkuasa (rezim Orde Baru) juga "membasmi" para penganut paham komunis itu dengan cara kurang beradab, tanpa melalui proses hukum atau pengadilan lebih dahulu.

Dan dalam catatan sejarah pula, bangsa ini sudah kerap terkena akibat buruk dari para penganut paham komunis dan teroris. Terakhir, kita pantas merisaukan jika nantinya di masa mendatang akan ada konspirasi yang begitu menakutkan terjadi di jagat raya ini. Yakni konspirasi antara dua ideologi terorisme dan komunisme. Semoga saja kekhawatiran penulis di atas tidak terbukti. (\*)

## Pilkada, Istana, dan Keraton<sup>52</sup>

**M**asa kampanye terbuka Pilkada Kota Yogyakarta telah usai secara damai. Masa tenang—selama beberapa hari, sebagai momentum berintrospeksi dan mendekatkan diri pada Tuhan. Tiga pasang kandidat Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, yang selama ini sudah berjuang keras menggaet hati para calon pemilih, tinggal menunggu hasilnya melalui pemilihan suara pada Minggu (25/9).

Masing-masing kandidat yang maju dalam Pilkada Kota Yogyakarta tersebut yakni Zuhrif Hudaya-Aulia Reza, Ahmad Hanafi Rais-Tri Harjun dan Haryadi Suyuti-Imam Priyono. Tak ada kandidat dari jalur independen. Peluang terjadinya Pilkada satu putaran sangat besar. Mengingat peta politik yang berkembang di masyarakat sudah mudah terbaca. Kendati begitu, tetap ada kans terjadinya Pilkada putaran lanjutan (kedua).

Pilkada Kota Yogyakarta menjadi menarik, jika dibandingkan dengan Pilkada daerah lain. Persoalannya, Pilkada kali ini terjadi di jantung Kota Yogyakarta, di mana di dalamnya terdapat eksistensi Keraton Yogyakarta. Dalam praktiknya, secara implisit Sultan HB X menyatakan di pihak netral.

Dengan membolehkan foto atau gambarnya dipajang di belakang spanduk milik masing-masing kandidat Walikota-Wakil Walikota Yogyakarta. Namun sebagian keluarga keraton yang terang-terangan mendukung salah satu calon, menjadi juru kampanye Pilkada Yogyakarta, merancukan persepsi yang diutarakan Sultan HB X bahwa keraton bersikap netral. Netral dalam konteks ini, bisa bermakna ambigu. Pertama, Keraton tidak memihak salah satu pun kandidat. Kedua, sekaligus keraton memihak kepada semua kandidat.

Di tengah kemelut Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang kini nasibnya masih gonjang-ganjing, Pilkada

---

<sup>52</sup> Supadiyanto. (2011). *Pilkada, Istana dan Keraton*. Jogja Raya edisi 26 September 2011.

Kota Yogya menjadi momentum tepat mem-*pressure* pemerintah pusat segera memberi payung hukum yang pasti dan final. Kesan selama ini SBY-Boediono memble, selalu mengulur-ulur masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Kabar terakhir, SBY-Boediono via Kementerian Dalam Negeri secara resmi telah mengusulkan adanya perpanjangan jabatan Gubernur-Wakil Gubernur DIY selama 2 tahun ke depan.

Berhubungan Pilkada Kota Yogya, di mana seluruh kandidat menyatakan kesepakatannya pada upaya penetapan Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DIY, menjadikan nilai plus bagi partai pengusung masing-masing kandidat. Tetapi mencermati itu, ada yang lucu dengan kenyataan itu. Bagaimana mungkin Fraksi Demokrat yang menginisiasi adanya wacana pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur di DIY, yang membuat pemerintah pusat selalu melakukan berbagai cara (trik) agar RUUK DIY bisa dilego dengan produk Undang-Undang yang lebih egaliter.

Aneh, salah satu kandidat yang diusung Partai Demokrat dalam Pilkada Kota Yogya, justru juga mendukung adanya penetapan status keistimewaan DIY. Artinya sepakat bahwa Sri Sultan HB X-Paku Alam IX sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Konsekuensinya, sepanjang sejarah ke depan, dipastikan tiap penjabat Raja (Sultan) Keraton Yogya dan Adipati Pakualaman (Paku Alam), otomatis menduduki jabatan Gubernur-Wakilnya. Dalam koridor ini, ada kebijakan politik yang bertentangan antara keputusan Partai Demokrat tingkat pusat dan Partai Demokrat tingkat Kota Yogya dan Propinsi DIY.

Sehingga Pilkada Kota Yogya menjadi ajang pertarungan kredibilitas, tak saja bagi tiga pasang kandidat, tapi juga bagi pihak keraton. Pihak keraton (khususnya Sultan) tak turun langsung ikut berkampanye atau menjadi juru kampanye salah satu calon. Tapi bisa jadi secara tersembunyi, dengan membiarkan keluarga dan kerabat Keraton Yogya ikut berkampanye (menjadi juru kampanye) salah satu kandidat, itulah pertanda "suara keraton".

Tak heran, Pilkada Kota Yogya, yang memperebutkan jabatan setingkat Walikota-Wakil Walikota, turut menyedot perhatian para politikus tingkat nasional. Tak kepalang tanggung, Prabowo

Subianto dan tokoh-tokoh nasional lain menjadi juru kampanye. Ini mengindikasikan, Pilkada Kota Yogya, menjadi pertarungan kredibilitas antara Keraton Yogya, Istana Negara dan para *elite* politik.

Ahmad Hanafi Rais (32 tahun) yang *notabene*-nya anak sulung tokoh reformasi Amien Rais, tak mau “hilang muka”. Untuk mendukung kelulusan jalan anaknya tersebut, Amien Rais turun tangan langsung menjadi juru kampanye bersama Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Secara tersirat, kita bisa membaca arah politik yang diinginkan Amien Rais. Yakni dengan mengorbitkan anaknya menjadi Walikota Yogya minimal untuk satu kali periode, atau dua kali periode. Sambil menunggu perubahan kebijakan pemerintahan terkait nasib RUUK DIY apakah dihapuskan atau tidak.

Setelah sukses menggolkan anaknya menjadi Walikota, tentunya Amien Rais masih punya langkah “skak”. Beliau mulai mendorong agar Hanafi Rais nanti bisa menjadi Gubernur DIY, dan kemudian secara pelan-pelan keluarganya bisa merangsek menuju Istana Negara. Menjadi Presiden RI? Benar atau tidaknya skenario politik ini, hanya waktu yang akan membuktikan. (\*)

## Kalau Harga BBM Naik<sup>53</sup>

**K**abarnya pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat ini. Dalihnya, ada tren kenaikan harga minyak bumi di dunia yang dipicu oleh berbagai faktor. Bahkan kini harga minyak dunia rata-rata sudah menyentuh hingga USD 115 per barel atau di atas perhitungan anggaran pemerintah USD 90 per barel. Dengan melihat angka di atas, sudah dapat dipastikan pemerintah akan menempuh jalan aman untuk mengamankan kondisi keuangan negara. Yakni dengan melakukan perubahan APBN 2012, seperti yang pernah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

Sepanjang dua periode pemerintahan, tercatat Presiden SBY sudah 3 kali pernah menaikkan harga BBM. Harga BBM jenis premium yang kini mencapai Rp 4.500 per liter, diperkirakan akan meroket hingga Rp 6-7 ribu per liter. Dipastikan kalau benar pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, akan memberikan efek ganda (efek domino) pada kehidupan riil masyarakat.

Dampak buruk yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah naiknya harga kebutuhan hidup seperti Sembako. Soalnya, BBM merupakan alat pertahanan ekonomi yang paling vital bagi seluruh lapisan masyarakat bangsa. Ada dua komoditas pokok yang sangat berpengaruh besar pada kemaslahatan hidup ratusan juta penduduk bangsa ini.

Pertama adalah BBM. Dan kedua yakni beras. BBM berhubungan dengan bahan bakar yang menggerakkan berbagai alat transportasi dan alat produksi masyarakat. Sedangkan beras, merupakan logistik utama atau makanan pokok bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Terganggunya produksi atau naiknya harga dua komoditas di atas, sangat

---

<sup>53</sup> Supadiyanto. (2012). *Kalau Harga BBM Naik*. Wawasan edisi 3 Maret 2012.

mengganggu nasib kehidupan masyarakat kecil. Terutama bagi mereka yang tergolong keluarga miskin.

Jatuhnya rezim Orde Lama dan Orde Baru, tidak lain juga akibat ketidakihaian pemerintah yang berkuasa waktu itu dalam mengelola BBM dan beras nasional. Penulis berani berspekulasi, kejatuhan Orde Reformasi juga bakal dikarena keteledoran pemerintah dalam mengelola masalah perberasan dan BBM. Beras dan BBM menjadi alat pertahanan ekonomi yang paling ampuh dalam memakmurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus sebaliknya, sebagai alat yang paling ampuh untuk menghancurkan kehidupan peradaban sebuah bangsa. Sejarah perjalanan bangsa ini sudah “terlalu kenyang” dengan modus politik yang bersinggungan dengan isu beras dan BBM. Maka jangan sampai terjadi jatuhnya Orde Reformasi di masa mendatang, juga gara-gara isu BBM dan beras.

Tak bisa dibantah lagi, bahwa aksi demonstrasi sejak awal tahun 2012 lalu mengalami peningkatan (eskalasi) di berbagai daerah. Terutama di kota-kota besar yang menjadi mercusuar dalam menggerakkan isu-isu nasional. Terjadi peningkatan jumlah pengangguran nasional, akibat maraknya pabrik-pabrik dan perusahaan yang memutuskan hubungan kerja para karyawannya. Otomatis jumlah orang miskin semakin membengkak. Kalau pada awal Januari 2012 lalu angka kemiskinan tercatat sebanyak 29,89 juta jiwa (data BPS), kontan angka statistiknya akan mengalami peningkatan signifikan.

Pertanyaannya, siapakah sesungguhnya yang diuntungkan dengan langkah pemerintah menaikkan harga BBM? Apakah rakyat diuntungkan? Apakah pengusaha juga tidak dirugikan? Yang jelas, pemerintah sama sekali tidak mendapatkan untung baik secara citra maupun finansial. Sesungguhnya pengelolaan BBM di Tanah Air selama ini masih dimonopoli oleh Pertamina, salah satu BUMN yang mengurus industri BBM. Apakah tidak mungkin, di masa mendatang, sektor swasta diberikan kewenangan yang sama untuk turut mengelola industri BBM. Terlalu “picik” pemerintah jika hanya memberikan privasi dan otoritas kepada Pertamina untuk memonopoli industri BBM.

Kita berharap juga Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN mampu menerapkan solusi cerdas dengan membuka kran bagi

kebebasan setiap pengusaha pribumi bergerak dalam bidang industri BUMN. Harapannya, masalah harga BBM tidak melulu menjadi kebijakan strategis dan otoriter bagi pemerintah. Melainkan menjadi kebijakan pasar yang lebih demokratis, sebagaimana harga beras dan harga air mineral. Adanya kompetisi antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam industri BBM, hemat penulis, akan memberikan alternatif harga yang merakyat. Karena ada kompetisi di sana, sehingga Pertamina sebagai pelaksana teknis atas mahal atau murahnya BBM tidak selalu dikambinghitamkan atas berbagai kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah.

Masih ada jalan pintas lain, agar harga BBM bisa dikendalikan dan tidak mencekik kehidupan masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memaksimalkan berbagai penelitian dan inovasi yang bisa menginspirasi adanya sumber bahan bakar baru di Indonesia. Wilayah ini menjadi tanggung jawab para peneliti dan akademisi kampus. Seyogyanya mereka semakin intensif dalam menggalakkan penelitian-penelitian revolusioner di masa mendatang. Misalkan saja mampu menyulap seluruh bahan bakar sepeda motor dan mobil di Indonesia yang jumlahnya jutaan kendaraan, bisa menggunakan energi surya.

Artinya tidak menggunakan energi BBM, yang cepat habis, hilang dan akhirnya musnah. Kalau minyak bumi sudah habis tersedot oleh mesin-mesin pompa (kilang) minyak bumi, bukankah sudah tidak ada lagi BBM? Dan pemerintah harus menyadari itu, serta hal tersebut sudah menjadi sebuah kepastian. Entah dalam jangka waktu 20 tahun mendatang, 40 tahun ke depan atau 100 tahun yang akan datang. Maka dari itu, karya-karya inovasi dalam bidang sumber energi alternatif perlu digalakkan guna mengantisipasi musnah atau habisnya minyak bumi dari dunia ini.

Satu hal aneh yang patut kita pertanyakan adalah, mengapa di tengah harga BBM yang mahal, dan akan terus mengalami kenaikan harga, justru permintaan masyarakat akan kendaraan motor dan mobil pribadi terus mengalami peningkatan tajam? Aneh bukan? Lantas mana yang benar dan sah, adanya rencana kenaikan harga BBM mestinya memberikan efek jera kepada para calon pembeli dan pengusaha kendaraan bermotor

dalam membatasi jumlah produksinya, tetapi kenapa malah berlaku hukum sebaliknya?

Ataukah adanya rencana kenaikan harga BBM itu cuman sebagai strategi (siasat) politik para pejabat negara (antara pejabat eksekutif dan yudikatif) untuk menaikkan gaji mereka dan memberikan peluang manis bagi mereka melakukan praktik-praktik korupsi dalam bidang per-BBM-an? (\*)



## Menyoal Rekrutmen CPNS<sup>54</sup>

**D**alam waktu dekat pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) berencana menggulirkan kembali kebijakan merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2012 ini. Yang membuat berbeda kebijakan kali ini adalah, pemerintah mempercayakan sepenuhnya proses perekrutan CPNS 2012 ini kepada 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dinilai layak menghelat kegiatan tersebut.

Adapun 10 PTN yang dimaksudkan di atas adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Perguruan tinggi lain yang ditunjuk menyeleksi proses perekrutan CPNS adalah Institute Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatra Utara (USU), Universitas Andalas (Unand) dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Dalihnya, pihak kampus yang sudah ditunjuk memiliki prestasi cemerlang dan sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan SPMB, atau yang dulu lebih dikenal sebagai UMPTN.

Bukan rahasia umum lagi, pada tahun sebelumnya perekrutan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan secara langsung. Praktik kecurangan dalam proses perekrutan CPNS model demikian, di samping memboroskan anggaran negara, memungkinkan terjadinya praktik curang yang melibatkan oknum internal lembaga pemerintahan bersangkutan. Kali ini lolos atau tidaknya para peserta ditentukan sepenuhnya oleh sistem seleksi yang dilakukan oleh pihak kampus.

Harapannya, terjadinya kecurangan dengan melibatkan pihak kampus semakin dipersempit atau kalau bisa ditiadakan sama

---

<sup>54</sup> Supadiyanto. (2012). *Menyoal Rekrutmen CPNS*. Koran Jakarta edisi 1 Februari 2012.

sekali. Hanya saja, tetap saja peluang terjadinya kecurangan tetap bisa saja terjadi ketika internal penyelenggara dalam hal ini pihak kampus ada juga yang bermental curang. Mencari para akademikus kampus yang memiliki kredibilitas tinggi dalam merekrut para PNS menjadi prasyarat mutlak agar benar-benar melahirkan PNS yang profesional.

Tak ada jalan lain untuk menghasilkan CPNS yang bermutu dan profesional kecuali dengan melakukan penyaringan dan pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka penyeleksian CPNS harus menggunakan sistem perekrutan aparatur negara yang harus transparan, jujur (bersih) dan objektif.

Berbagai kecurangan seperti praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perekrutan CPNS 2012 akan berpengaruh negatif pada hasil yang sangat mengecewakan seluruh lapisan masyarakat. Setelah lebih dari setahun pemerintah menghentikan proses perekrutan CPNS khususnya pada tahun 2011 kemarin, banyak pihak yang mengaku kecewa.

Di tengah jumlah pengangguran yang terus melambung tinggi, kini ada sekitar 8,5 juta pengangguran, serta 29,89 juta jiwa penduduk miskin, profesi PNS masih sangat diharapkan oleh sebagian penganggur tersebut. Apalagi para pengangguran khususnya yang bergelar Sarjana (lulusan PTN/S) juga cukup tinggi. Salah satu faktor pemicu lahirnya para pengangguran bergelar Sarjana yakni banyaknya lulusan PTN/S yang terlalu menggantungkan diri untuk menjadi PNS. Kenyataan yang terjadi, setelah mereka melamar, melakukan tes ujian/wawancara, dalam perjalanannya dinyatakan gagal atau tidak diterima. Mereka sungkan untuk bekerja selain menjadi PNS. "Penyakit" inilah yang kemudian melahirkan para Sarjana pengangguran, yang terobsesi sepenuhnya hanya menjadi PNS.

Melihat data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) hingga Desember 2011, jumlah PNS se-Indonesia sebanyak 4,7 juta orang. Angka tersebut sudah termasuk para tenaga honorer sebanyak sebanyak 921 ribu orang dan 53 ribu sekretaris desa. Jika ditambah dengan anggota TNI sebanyak 450 ribu personil dan anggota Polri sebesar 378 ribu orang. Dengan demikian

beban anggaran negara untuk menggaji para PNS, anggota Polri dan TNI tiap tahun sangat besar.

Melihat besaran APBN 2012, anggaran untuk membiayai 4,7 juta aparatur negara (PNS) tersebut mencapai Rp 215,7 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan sebesar 10 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Atau mengalami kenaikan sebesar Rp 32,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi kita melihat, banyak PNS yang kinerjanya bisa dibilang tidak baik. Pelayanan publik yang dilangsungkan berbagai abdi negara tersebut banyak yang tidak sesuai harapan rakyat. Kasus korupsi juga kerap menimpa para PNS, bahkan sebagian yang lain kerap menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Dengan demikian, peran 10 PTN di Indonesia dalam menyeleksi para calon aparatur negara yang profesional dan memiliki kinerja yang baik, menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan birokrasi yang jujur, bersih dan berwibawa serta terbebas dari skandal korupsi. (\*)

## Beda Tipis Parpol dan PT<sup>55</sup>

**M**engamati perilaku para politikus, wakil rakyat dan pejabat negara belakangan ini, publik dibuat semakin bingung membedakan perbedaan Partai Politik (Parpol) dan Perseroan Terbatas (PT). Dalam pelajaran ekonomi, PT merupakan perusahaan yang dimiliki secara bersama oleh para pemilik saham, di mana tujuan didirikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan setingginya, dengan modal atau cara yang semurah-murahnya. Logika bisnis semacam ini akhirnya menjebak para pengusaha melakukan praktik penghalalan berbagai cara.

Kenyataan buruk seperti inilah yang juga menimpa kecenderungan para pengurus Parpol serta elite-elite politikus di negeri ini. Tak ada perbedaan antara Parpol dan PT, sebagai dua institusi yang bekerja dalam ranah berbeda, karena sama-sama hanya ingin mengeruk keuntungan. Yakni sumber kekayaan, kekuasaan dan popularitas.

Implikasi negatifnya teramat terang. Legitimasi Parpol sebagai institusi berkumpulnya para wakil rakyat dan politikus yang peduli pada nasib kesejahteraan rakyat, dari masa ke masa terus mengalami penurunan mutu luar biasa. Persoalannya sederhana saja. Parpol bukan lagi tempat kondusif bagi siapapun yang ingin memberikan sumbangsih pikiran, tenaga dan kedermawanan sosialnya terhadap segala upaya membangun peradaban bangsa yang maju, beradab dan demokratis.

Kini Parpol telah berubah ikon menjadi semacam perusahaan bisnis atau semacam PT tadi. Masalahnya, Parpol hanya dijadikan para politikus atau pemilik modal sebagai kendaraan politik untuk meraih berbagai jabatan di tingkat eksekutif, legislatif hingga bahkan yudikatif. Inilah yang mengakibatkan

---

<sup>55</sup> Supadiyanto. (2011). *Beda Tipis Parpol dan PT*. Wawasan edisi 23 Desember 2011.

kenapa para wakil rakyat dan pejabat negara yang diusung oleh kebanyakan Parpol tidak dapat bekerja secara profesional, padahal mereka juga dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada maupun Pemilu. Ada begitu banyak kasus korupsi yang membelit para kepala daerah. Sepanjang 2011 ini saja, tercatat setidaknya 148 kepala daerah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi.

Tak sedikit pula wakil rakyat yang tersandung skandal korupsi. Realitas politik dan sosial ini bukan hal baru dalam jagat perpolitikan nasional, sepanjang Parpol masih diposisikan hanya sebagai "PT" yang bertugas menggolkan jago-jagonya. Sehingga kompetisi yang terjadi antar Parpol menjadi tidak sehat. Masing-masing berusaha menjatuhkan musuh-musuh politiknya dengan cara-cara yang tidak beretika dan bermoral.

Kembali ke masalah prinsipil, bahwa politik adalah seni untuk mengatur tatakrma kekuasaan, tata negara dan segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang muara akhirnya pada pencapaian kesejahteraan rakyat. Dalam pengejawantahannya, ternyata politik diterjemahkan secara bebas sebagai seni berkonspirasi dan berkreasi untuk merebut kekuasaan dengan berbagai kewenangannya. Bagi mereka yang sudah menduduki jabatan-jabatan kekuasaan yang dimaksudkan, politik ditransliterasikan sebagai upaya mengamankan kembali kursi kekuasaan dari lawan-lawan politik yang berusaha menjatuhkan hegemoni kekuasaan mereka.

Kita bisa belajar dari sejarah, bagaimana masing-masing penguasa antar rezim masih dalam satu negara, saling menjatuhkan. Misalkan melalui berbagai pernyataan yang kita nilai sudah melenceng jauh dari fatsun politik dan etika kultural kita sebagai masyarakat yang mencintai budaya saling hormat-menghormati dan bergotong-royong. Apakah kita pernah mendengar, penguasa Orde Baru "mendewakan" penguasa Orde Lama? Apakah kita lebih banyak mendengar penguasa Orde Reformasi "meneladani" kiprah para penguasa Orde Lama dan Orde Baru? Di antara sesama mantan presiden saja selama satu masa orde kekuasaan, misalkan antara Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY sendiri, yang mengklaim diri sebagai

penguasa-penguasa Orde Reformasi, kerap kali bersitegang dan saling menjatuhkan.

Persoalannya cukup sepele saja. Mereka berada dalam garis demarkasi politik yang berbeda-beda, melalui kendaraan Parpol yang berlain jenis pula. Pertanyaannya, apakah menjamin jika misalkan satu rezim dikuasai hanya oleh Parpol yang sama, menjamin terjadinya “kemesraan politik” di antara sesama penguasa negara ini? Tidak juga, yang bisa menjamin terwujudnya kemesraan politik adalah kesamaan visi dan misi dalam membangun kemajuan bangsa ini.

Perbedaan cara pandang dalam memajukan bangsa di antara para pemimpin nasional maupun pemimpin daerah, menjadikan ketakarharmonisan program pembangunan yang sudah disusun oleh para pemimpin bangsa yang terdahulu. Yang kita butuhkan saat ini adalah kesamaan konsep, pemikiran dan visi ke depan dalam menggapai masa depan bangsa. Idealnya, siapapun yang berkuasa di negeri ini, program pembangunan jangka pendek, menengah dan panjangnya harus sama, seide dan setujuan. Sementara ini yang terjadi, pergantian puncak kekuasaan di pusat maupun daerah, selalu identik dengan pergantian kebijakan. Tradisi buruk ini menjadi fatal, karena selain memboroskan anggaran negara saja, juga tidak cukup efektif dalam membangkitkan gairah seluruh elemen bangsa dalam memberikan kemampuan terbaik mereka. Pihak yang merasakan secara langsung dampak dari kecenderungan berpolitik ini adalah rakyat. Mereka yang memilih para penguasa, tetapi mereka sekaligus menjadi korban atas kekuasaan yang tidak amanah.

Apa mungkin cita-cita mempersamakan persepsi, tujuan dan visi-misi para penguasa bangsa ini dalam satu traktat, fatsun maupun konsensus politik bersama, padahal dinamika politik yang berkembang di Tanah Air ini sudah tidak sehat. Jelas langkahnya menjadi sangat sulit, tetapi bukan tidak ada jalan menuju ke arah sana. Caranya dengan mendandani dulu tugas pokok dan fungsi Parpol sebagai pengusung aspirasi rakyat. Optimalisasikan kedudukan Parpol sebagai alat perjuangan bersama, alat mensejahterakan rakyat. Bukan malah dijadikan sebagai alat bagi para pemilik modal dan politikus untuk meraih

libido dan ambisi kekuasaan mereka, menduduki jabatan-jabatan publik yang menjanjikan kemegahan, kekayaan, popularitas dan surga dunia.

Jangan jadikan Parpol sebagai Perseroan Terbatas (PT), tempat berkumpulnya sejumlah pemilik modal dan politikus yang haus akan kekuasaan saja. Beranikan fatsun politik kolektif bangsa ini dikerahkan total untuk mencapai tujuan yang amat mulia di atas? Atau kita akan berada dalam kondisi perpolitikan yang bebal dan koruptif selamanya. (\*)

## **Parpol, Korupsi, dan Ruwetnya Demokrasi<sup>56</sup>**

**B**ukan rahasia umum lagi bahwa partai politik menjadi sarangnya koruptor. Para politisi memanfaatkan partai politik demi meraih kekuasaan di berbagai tingkatan mulai dari legislatif hingga eksekutif. Akibatnya, keberadaan partai politik menjadi kendaraan politik para politisi dalam merealisasikan ambisi mereka dalam menduduki jabatan-jabatan mentereng di atas.

Dalam sejarah kepartaipolitikannya, Indonesia pernah “dipaksa” cuman memiliki tiga partai politik saja dan kini menggelembung menjadi puluhan partai politik peserta Pemilu. Sisi negatif model demokrasi sistem multipartai yakni terjadi pemborosan uang negara yang sangat besar, digunakan untuk mengelat berbagai pesta demokrasi untuk memilih para pejabat eksekutif dan legislatif yang bakal duduk di pusat hingga daerah. Pemilihan secara langsung, yang dimulai sejak era Orde Reformasi, lebih tepatnya mulai Pemilu 2004 hingga sekarang, ternyata tidak menjamin terpilihnya para pejabat negara dan wakil rakyat yang amanah dan terbebas dari praktik korupsi. Publik menjadi kecewa berat.

Justru model pemilihan langsung melalui Pemilu, Pilpres dan Pilkada semakin memboroskan anggaran negara. Bahkan rentan terjadi praktik manipulasi, korupsi serta konflik di tingkat masyarakat. Pemilihan langsung yang dinilai sebagai mekanisme yang paling demokratis, tidak terbukti efektif dalam mewujudkan terciptanya birokrasi yang jujur, amanah, profesional dan merakyat.

Lantas di manakah letak kesalahannya? Apakah terletak pada kekeliruan para pemilih (dalam hal ini rakyat) yang memilih para calon pejabat eksekutif dan legislatif, padahal mereka

---

<sup>56</sup> Supadiyanto. (2012). *Parpol, Korupsi dan Ruwetnya Demokrasi*. Wawasan edisi 3 Februari 2012.



benar-benar sudah bebas menentukan pilihan ketika dalam bilik pengumuman suara. Ataukah memang masyarakat belum mempunyai kecerdasan politik dalam menentukan pilihannya? Atau mungkinkah dari para calon pejabat eksekutif dan legislatif yang ditawarkan kepada publik tersebut, memang tidak ada satupun yang profesional?

Terpokok dalam model pemilihan secara langsung adalah perlunya ditumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengenali secara utuh profil dan jejak rekam setiap calon yang maju dalam Pilkada, Pemilu Legislatif maupun Pilpres. Kalau para pemilih hanya mengandalkan pilihan pada orientasi fanatisme partai politik tertentu, hasilnya bisa ditebak seperti sekarang. Banyak pejabat negara dan wakil rakyat yang dulu dipilih langsung rakyat, justru terlibat skandal korupsi. Kita bisa menghitung sendiri daftar pejabat negara dan wakil rakyat yang dulu pernah kita pilih, tersangkut skandal korupsi dan akhirnya mendekam di penjara.

Biaya anggaran negara yang sangat besar untuk melangsungkan pemilihan langsung baik melalui Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pilpres ternyata tidak sebanding dengan terpilihnya para pejabat negara di tingkat eksekutif dan legislatif yang profesional. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dana anggaran Pemilu 2004 sebesar Rp 4,4 triliun. Sedangkan pada Pemilu 2009, anggaran negara yang dihabiskan untuk mengelat pesta demokrasi 5 tahunan itu sebanyak Rp 21,9 triliun. Tentunya untuk anggaran Pemilu 2014 dipastikan angkanya jauh lebih tinggi lagi dari sebelumnya.

Dan dana tersebut belum termasuk anggaran negara untuk mengelat Pilkada di berbagai kabupaten, kotamadya dan propinsi di Indonesia dalam 7 tahun belakangan ini, yang bila ditotal bisa melebihi nominal anggaran penyelenggaraan Pemilu 2004 dan 2009. Pasalnya masing-masing kandidat dan tim sukses umumnya membelanjakan dana kampanye yang berasal dari para kandidat, partai politik dan penggalangan dana secara massal.

Indonesia memiliki 33 propinsi, 399 kabupaten dan 98 kotamadya tentu saja akan membutuhkan energi dan materiil yang sangat besar untuk melangsungkan adanya Pemilu dan

Pilkada di seluruh Nusantara. Artinya penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat nasional maupun daerah (lokal) membutuhkan anggaran negara sangat besar dan tak praktis. Meski sisi positifnya, sistem tersebut sangat demokratis dan mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Eksistensi partai politik menjadi serbadilematis pada posisi demikian. Satu sisi bisa digunakan sebagai organisasi politik untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan nasib rakyat. Tetapi pada aspek lain, sangat rentan dimanfaatkan oleh para politikus guna mengeruk keuntungan pribadi. Guna memperbaiki kualitas politik di Indonesia, secara sederhana harus dilakukan dengan menumbuhkan terlebih dahulu kesadaran berpolitik rakyat kelas menengah dan bawah. Terutama kalangan masyarakat miskin dan minus akses informasi.

Dengan jumlah penduduk sebesar 238 juta jiwa, sementara di dalamnya terdapat sekitar 29,89 juta jiwa penduduk miskin dan 8,5 juta jiwa pengangguran, menjadikan problematika tersendiri dalam mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat kelas bawah. Sangat ideal, jika demokrasi di Tanah Air harus dikerahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat, mengikis habis realitas kemiskinan dan pengangguran serta menciptakan negara maju yang kokoh perekonomiannya.

Tekad di atas mustahil dapat direalisasikan jika para elit politik yang kini duduk di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak memiliki kesadaran tinggi dalam merealisasikan komitmen dan cita-cita demokrasi di atas. Termasuk juga para calon anggota legislatif dan calon menteri, calon bupati, walikota, gubernur dan para wakilnya serta calon presiden dan wakil presiden harus memiliki kesadaran sama.

Kita tidak antipati pada kehadiran partai politik serta para politisinya. Indonesia sangat membutuhkan kehadiran partai politik serta politisi-politisi yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakat. Kelemahan yang terjadi selama ini, para politisi yang sudah sukses duduk di berbagai jabatan legislatif dan eksekutif umumnya langsung dilanda kemalasan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, dan mulai memanjakan diri

dengan berbagai fasilitas negara dan sibuk dengan berbagai kegiatan yang bisa memperkaya diri, keluarga dan para kroninya. Budaya berpolitik yang buruk ini harus segera ditinggalkan dan ditanggalkan.

Ongkos demokrasi yang sudah sangat mahal, seharusnya sepadan dalam menghasilkan sistem birokrasi dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan partai-partai politik beserta para politisi, kader, simpatisan dan masyarakat bertanggung jawab baik secara institusional maupun moral dalam mewujudkan negara-bangsa yang maju, beradab, sejahtera dan demokratis. (\*)

## Mengenal Tabiat Bangsa Israel<sup>57</sup>

**B**ukan rahasia lagi, sejak zaman prasejarah bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang keras hati dan zalim, fasik serta gemar memutarbalikkan fakta kebenaran. Tak ayal, hingga kini perilaku bangsa Israel dinilai banyak kalangan sebagai sumber pemantik perang abadi di Timur Tengah.

Dan terbukti, salah satu konflik yang tercatat paling abadi dalam sejarah peradaban manusia yakni persengketaan antara bangsa Israel dan Palestina. Israel memiliki kekuatan militer tangguh, berkat dukungan politik Amerika Serikat sebagai negara sekutu terdekatnya. Sedangkan Palestina hanya mengandalkan militan-militan terlatih, menimbulkan pertempuran tak berimbang. Padahal penduduk Palestina—menurut sejarah, pemilik sah tanah air Palestina yang meliputi daerah Jalur Gaza dan Tepi Barat, yang kini masih disengketakan antara Palestina dan Israel.

Karakter dan tabiat bangsa Israel yang suka menyembunyikan bukti kebenaran dan hanya mengakui kebenaran ketika menguntungkan mereka, ditengarai menjadi alasan kenapa banyak perundingan damai yang diprakarsai PBB maupun pihak manapun selalu menuai kegagalan. Dan sebagian besar lantaran Israel melanggar sendiri materi perjanjian yang telah disepakati. Sebagai basis negara Yahudi, Israel juga suka melakukan penindasan terhadap rakyat Palestina.

Tak terhitung lagi berapa jumlah korban jiwa yang tewas akibat keberingasan serdadu Zionis melalui berbagai serangan darat dan serangan udara. Dalam sejumlah ayat Al-Quran, dengan tegas Allah memberikan petunjuk kepada umat Muslim agar selalu mewaspadai sikap apapun yang dilakukan oleh bangsa Yahudi (Israel).

---

<sup>57</sup> Supadiyanto. (2011). *Mengenal Tabiat Bangsa Israel*. Koran Jakarta edisi 10 November 2011.

Buku berjudul: "Mengapa Israel Begitu Kejam" paling tidak terdapat 53 ayat Quran yang menyebut langsung bagaimana karakter dan tabiat buruk yang dimiliki bangsa Israel. Adapun secara lebih spesifik, bangsa Israel memiliki karakter buruk yang amat banyak. Antara lain: keras hati dan zalim, fasik, musuh berbahaya bagi umat Muslim, suka mengubah dan memutarbalikkan kebenaran serta suka menyembunyikan bukti kebenaran.

Tabiat buruk yang lain adalah hanya menerima kebenaran sesuai kehendaknya sendiri, suka memeras dan menindas, suka berkata bohong, mengingkari janji dan melampaui batas. Karakter bangsa Israel paling kita benci adalah suka mengingkari amanah orang, bangsa yang pertama kali kafir kepada Muhammad, mengingkari sifat gaib dan berpaham materialisme serta paling suka berbuat khurafat.

Dalam QS. Annisa 54, disebutkan bangsa Yahudi (Israel) itu memiliki kegemaran memeras ketika diberi kekuasaan. Ada dua alasan kenapa bangsa Israel suka memeras dan menindas? Pertama, mereka tidak senang melihat manusia lain memperoleh kelapangan rezeki, sehingga menjadi bangsa yang lebih hebat dari bangsa Yahudi. Kedua, mereka sekaligus dengki melihat kejayaan umat Muslim yang dapat menyebabkan mereka lemah dan tidak bisa menguasai dunia.

Dalam Protokol Zionisme yang memuat 24 pasal penting berisi putusan-putusan penting dalam upaya menguasai sistem ideologi, politik, ekonomi dan sosial-budaya dunia, membeberkan bagaimana cerdiknya Israel mengarsiteki seluruh kekuatan dunia berada di bawah pengaruhnya. Dan secara defakto, saat ini kekuatan Yahudi sudah menguasai segala lini kehidupan dunia melalui Amerika Serikat. Sebab Amerika Serikat merupakan induk semang dari bangsa Israel.

Strategi di bidang politik, merujuk salah satu pasal dalam Protokol Zionisme tersebut, bangsa Israel (Yahudi) akan menghapus agama-agama yang ada saat ini dengan menjadikannya sebagai ideologi universal. Jalurnya melalui upaya sekulerisme, yakni meninjau kembali substansi agama secara ilmiah, sambil membumikan aliran-aliran kebatinan yang bersumber pada kekuatan gaib, misalkan Hare Kkrisna di

Amerika Serikat. Dalam bidang politik, menurut isi Protokol Zionisme tersebut, akan dilancarkan gerakan serentak bernama freemasonry yang beranggotakan kelompok *elite*. Mereka akan membentuk tatanan pemerintahan dunia baru (*new world order*). Istilah terakhir tadi saat ini sangat santer beredar ketika banyak orang membincang masalah Yahudi.

Dunia mengakui, meskipun secara kuantitas, jumlah penduduk bangsa Isreal yang mayoritas memeluk agama Yahudi tidak besar, tapi berkat kemampuan dan kecerdikan mereka dapat menguasai dunia. Cuman perilaku, karakter dan tabiat bangsa Israel yang amat kapitalistis, materialistis dan suka menindas, menyebabkan banyak kalangan, terutama umat Muslim antipati pada keberadaan bangsa tersebut. Terlebih sikap mereka yang arogan dan beringas dalam memerangi penduduk Palestina, yang dikenal sebagai penduduk yang penuh religius dan ramah tamah. (\*)

**BABAK  
KEBANGKITAN**

## Kembali Ke Khittah Reformasi '98<sup>58</sup>

Orde Reformasi telah lebih berusia 14 tahun. Sepanjang itu, ada gejala pembusukan agenda reformasi yang pernah menggaung seantero Nusantara. Berbagai skandal korupsi menimpa berbagai lembaga negara, lembaga hukum dan korporasi milik negara. Itu berpuncak pada penemuan fakta, bahwa ada banyak wakil rakyat yang menyelewengkan kewenangan dan kekuasaan.

Presiden SBY kini menjadi maskot utama, penguasa rezim Orde Reformasi. Sebelumnya, Habibie, Gus Dur dan Megawati juga memiliki kesempatan pernah mencicipi menjadi orang nomor satu di negeri ini. SBY yang baru saja melakukan perombakan kabinet pada Selasa (18/10) kemarin, memiliki agenda politik “tersamar” di balik langkah politik di atas.

Gampang diduga, akibat dari praktik politik demikian, masyarakat kecewa berat dengan model kepemimpinan di berbagai institusi pemerintahan. Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif; elemen penting penyelenggara negara dinilai melakukan penyimpangan. Kasus-kasus KKN yang menjerat para pejabat negara di tiga institusi di atas, terang-terang mengkhianati amanah yang diberikan rakyat.

Pilkada dan Pemilu langsung, yang memilih para pejabat negara tingkat daerah hingga pusat, tak menjamin terpilih pemimpin amanah, terbebas skandal korupsi. Malah para pemimpin pilihan rakyat, yang menjadi wakil rakyat (DPR, DPRD dan DPD RI), gubernur, bupati, walikota dan wakilnya hingga presiden-wakil presiden, sebagian tersangkut kasus korupsi.

Arah agenda reformasi yang saat ini melenceng jauh dari titik awal ketika semangat reformasi dihembuskan, harus diamankan seluruh elemen bangsa. Kita harus kembali ke *khittah* reformasi '98. Pembelokan agenda reformasi yang telah

---

<sup>58</sup> Supadiyanto. (2011). *Kembali ke Khittah Reformasi '98*. Jogja Raya edisi 31 Oktober 2011.



menyimpang jauh dari komitmen kolektif untuk menyejahterahkan rakyat dan menegakkan hukum, harus dihentikan. Tanpa esadaran bersama terhadap agenda reformasi di atas, bangsa ini terjerumus dalam jurang kenistaan dan penderitaan.

Kita masih ingat, menjelang rezim Orde Baru lengser, banyak orang berharap terjadi angin perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para aktivis kampus pada masa itu merasa optimis, paska lengsernya Soeharto dari tampuk kursi kepresidenan akan mengakhiri zaman pengekangan yang sarat dengan tindakan militerisme, otoriterisme dan koruptorisme.

Publik juga merasa yakin, krisis ekonomi dan gonjang-ganjing politik yang melanda bangsa ini pada masa menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto (Mei 1998), dapat berganti dengan masa yang lebih kondusif dan menjanjikan. Singkat kata, seluruh elemen bangsa ini berharap besar dengan berkuasanya rezim Orde Reformasi melalui pemerintahan B.J. Habibie, kemudian dilanjutkan Gus Dur, Megawati dan SBY, bangsa ini bisa semakin makmur dan sejahtera.

Justru kenyataannya tidak begitu. Duet kepemimpinan SBY-Boediono yang mengklaim diri bahwa pemerintahannya berhasil mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat, dengan menyajikan data-data statistik yang membanggakan, sungguh memperdayai masyarakat. Data-data yang disajikan pemerintah melalui Biro Pusat Statistik (BPS), sudah mengalami pemolesan, agar jauh dari kesan buruk. Data kemiskinan diklaim pemerintah menurun jauh jika dibandingkan 7 tahun lalu, ketika pemerintahan masih dipegang oleh Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz. Angka pengangguran bahkan dikatakan berhasil dikepras sampai angka terkecil, kendati kenyataannya di kota-kota maupun berbagai pelosok pedesaan dan kampung banyak ditemukan orang yang tidak mempunyai pekerjaan (penghasilan) tetap.

Arah agenda reformasi saat ini, jelas sudah semakin kehilangan tujuan. Anggaran negara yang dihimpun dari hasil jerih keringat rakyat, banyak dihambur-hamburkan para penguasa. Hasilnya tak banyak dirasakan rakyat kecil. Bahkan sebagian besar anggaran negara tersebut telah hilang di tengah

jalan, akibat digasak oleh para pejabat negara yang berprofesi juga sebagai koruptor.

Wajar, sekarang banyak kalangan masyarakat yang tak puas pada kinerja pemerintahan SBY-Boediono. *Pe-reshuffle-an* kabinet pada medio Oktober lalu, hanyalah siasat taktis yang dilakukan SBY mengamankan kursi kekuasaan.

Terpuruknya citra pemerintahan SBY-Boediono, karena banyak pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi, serta tergerusnya kepercayaan rakyat pada Partai Demokrat akibat banyak politikus dari partai berlambang bintang *Mercy* tersebut yang terseruk skandal korupsi, disiasati SBY dengan membagi-bagikan kursi kekuasaan menteri, kepada orang-orang yang dinilai mampu mengamankan aset kekuasaan SBY.

Karier SBY sendiri saat ini berada dalam posisi dilematis. Pada 3 tahun masa akhir pemerintahannya, SBY tidak ingin citranya terpuruk. Beliau menginginkan agar ketika ia mengakhiri karier politiknya di Istana Negara, namanya harum sebagai negarawan yang sukses mengantarkan bangsa ini menjadi salah satu negara makmur. Bukan lagi berada pada kumpulan negara yang terseok-seok dalam alam kemiskinan dan penderitaan. (\*)

## Mengembalikan Citra Parpol<sup>59</sup>

**D**alam negara yang menganut sistem demokrasi seperti halnya di Indonesia, Parpol memegang peran amat sentral dalam mengendalikan dinamika kehidupan perpolitikan nasional. Ringannya persyaratan mendirikan partai politik baru paska era Reformasi, ternyata berdampak ganda, yakni berdampak positif dan negatif.

Dampak positifnya, kran demokrasi terbuka lebar. Pendidikan politik bagi publik kian terasah, yang bisa dibaca dari kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Aspirasi masyarakat semakin terakomodir melalui berbagai partai politik yang berbeda-beda. Dinamika politik pun semakin menggeliat, seiring dengan semakin banyaknya pilihan bagi para politikus untuk berkiprah.

Kendati begitu juga berdampak negatif, khususnya bagi perilaku para politikus. Para politikus kerap menyalahgunakan kewenangannya, ketika menjabat sebagai pengurus teras atas pada sebuah Parpol melakukan skandal korupsi. Terjadinya konflik antarpending Parpol baik ketika kampanye maupun di luar kampanye Pemilu (Pemilukada), menjadi catatan buruk bagi kehidupan perpolitikan bangsa ini.

Mengembalikan kembali wibawa Parpol sebagai institusi yang mampu memperjuangkan kesejahteraan rakyat, menjadi tanggung jawab moral dan institusional para petinggi partai politik. Terseretnya sejumlah pengurus partai politik dalam berbagai kasus skandal korupsi, memperburuk citra politisi yang dulu dianggap sebagai para negarawan. Yang terjadi sekarang, banyak politikus yang tidak memiliki mentalitas sebagai negarawan. Mereka lebih banyak memiliki karakter sebagai kalangan oportunist, yang memanfaatkan kepercayaan rakyat

---

<sup>59</sup> Supadiyanto. (2011). *Mengembalikan Citra Parpol*. Pelita edisi 28 Juli 2011.

untuk meraih ambisi pribadi dan kesenangan kelompok/golongan.

Jumlah partai politik di Indonesia yang lebih dari tiga sejak masa Orde Baru lengser, mengakibatkan persaingan antar politikus menjadi semakin sengit. Friksi antar kelompok pendukung Parpol juga kian menganga lebar, sehingga tawuran dan aksi anarkisme pada tingkat *grassroot* meruak. Tidak mudah bagi para politikus mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap garis perjuangan partai politik. Tersegmentasinya partai-partai politik dalam beberapa kelompok besar, seperti Parpol berideologi religius, nasionalis dan kombinasi keduanya; secara alamiah memberikan penanda zaman bahwa ada perbedaan mencolok yang tak bisa disatukan. Itu menjadi pemicu konflik bagi para politikus, secara pemikiran (intelektual) maupun fisik.

Pasifnya masyarakat dalam memperbaiki citra partai politik yang sudah terlanjur buruk di mata publik, bukanlah solusi bagi pencerahan masa depan bangsa ini. Yang dibutuhkan sekarang yakni partisipasi aktif masyarakat dalam berpolitik. Baik melalui saluran-saluran politik yang sudah tersedia, maupun melalui mekanisme pengontrolan melalui media massa cetak dan elektronik.

Keberadaan partai politik dalam bingkai negara demokrasi, memang tidak bisa ditiadakan atau digantikan melalui model lainnya. Yang dibutuhkan hanyalah sistem perpolitikan yang adil dan beradab. Bukan politik hegemoni yang dimanfaatkan oleh para penguasa demi menggolkan kepentingan politik segelintir orang yang memiliki kapital, kedudukan dan massa.

Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup bangsa ini, jangan sekedar dijadikan bahan pembicaran di kalangan intelektual, atau menjadi bahan retorika para politikus dan penguasa di panggung-panggung kekuasaan. Nilai-nilai Pancasila perlu dibumikan dalam dunia politik. Dengan ekspektasi, bangsa ini memiliki politikus-politikus yang prorakyat. Bukan malah sebaliknya melahirkan "tikus-tikus" yang menggeroti kedaulatan bangsa ini, melalui politik hegemoni kekuasaan. Untuk mengembalikan wibawa Parpol di negeri berpenghuni 238 juta jiwa ini, paling tidak ada 5 langkah yang perlu ditempuh.

*Pertama*, membersihkan dunia politik dari aktor-aktor korupsi, sehingga para politikus bukan lagi identik dengan sang koruptor. *Dua*, melarang para pejabat negara mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, camat hingga kepada desa (lurah), turut terlibat dalam kepengurusan partai politik, entah secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga kalau aturan ini berlaku, Presiden SBY dilarang menjadi Dewan Penasehat Partai Demokrat, Hatta Rajasa yang *notabene*-nya seorang menteri dilarang keras menjabat Ketua Umum PAN. Dengan sistem perpolitikan demikian, para politikus yang sudah menduduki jabatan publik bakal menjadi negarawan. Tidak lagi mengurus partai politik. Jika ada pejabat negara yang sampai masih mengurus partai politik, merupakan pelanggaran negara dan yang bersangkutan bisa diberhentikan dari jabatan yang diembannya.

*Tiga*, mempersatukan partai-partai politik menjadi lebih kecil, maksimal jumlah Parpol 3-5 buah saja. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil peluang terjadinya konflik. Di samping juga bertujuan untuk mengefisiensi dana/anggaran negara yang dipergunakan untuk keperluan operasional partaa-partai politik yang ada.

*Empat*, meninjau ulang mekanisme PemiluKada, yang ternyata tidak cukup efektif dalam melahirkan kepala daerah yang bersih dari skandal korupsi. Bahkan adanya Pilkada yang digelar setiap 5 tahun sekali, nyatanya telah memboroskan keuangan negara. *Kelima*, meninjau ulang fungsi dewan legislatif (DPR maupun DPRD) dan memperkuat sistem Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dan hendaknya pada tingkat daerah, dibentuk DPD tingkat kabupaten/kotamadya maupun propinsi. Permasalahannya, fungsi kelegislatifan yang dijalankan oleh institusi DPR dan DPRD tidak cukup efektif dalam mengusung aspirasi rakyat, dan justru fungsi DPD RI yang tidak berasal dari basis partai politik dinilai lebih merakyat. (\*)

## Dwitunggal Pemimpin-Rakyat<sup>60</sup>

**D**i tengah badai krisis kepemimpinan yang kian parah menerpa bangsa ini, sangat relevan menekankan kembali makna filosofis kedwitunggalan rakyat dan pemimpin. Di kala gelombang budaya korupsi terus menjerat para pejabat negara di berbagai instansi (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), amat urgentif bagi bangsa ini menghayati kembali kemanunggalan pemimpin dan rakyat.

Di saat wacana *reshuffle* kabinet bergulir bak bola salju liar yang menerjang apa saja yang dilalui, berimbas pada kegonjang-ganjingan politik dan stabilitas ekonomi, sosial-budaya, pengejawantahan makna hakiki akan rakyat dan pemimpin, sungguh layak digelorakan hingga dasar sumsum tulang kita.

Antara rakyat dan pemimpin, memiliki relasi kuat. Keduanya saling menggantungkan diri pada keberadaan yang lain. Dalam kesadaran peradaban manusia, tentu lebih duluan kesadaran sebagai rakyat yang perlu dimunculkan. Baru pada tahap selanjutnya, ada kesadaran sebagai pemimpin. Anehnya zaman sekarang, paradigmanya terbalik. Banyak orang terobsesi sekaligus berambisi menjadi pemimpin. Sedikit orang berambisi menjadi rakyat. Lahirlah pemimpin ambisius. Sepadan itu, lahir rakyat yang pesimistik. Kontradiktif dengan posisi di atas, tercetak pemimpin prorakyat, yang bisa menyatu dengan rakyat, dan rakyat yang optimististik.

Pemimpin sejati adalah mereka yang dalam mental dan kesadaran akalanya, memiliki kesadaran sejarah sebagai rakyat. Rakyat sejati adalah mereka yang rela mengorbankan jiwa dan kesadaran intelektualnya, mengabdikan kemampuan terbaiknya demi kemajuan bangsa. Ketika rakyat sejati hidup di pedesaan,

---

<sup>60</sup> Supadiyanto. (2011). *Dwitunggal Pemimpin-Rakyat*. Suara Karya edisi 22 September 2011. Diekspos juga oleh Haluan Kepri.

mereka menjelma menjadi petani-petani yang bekerja tidak kenal lelah, mencangkul sawah ladangnya dan menanaminya dengan tanaman produktif. Ketika mereka menetap di tepian pantai, mereka berubah menjadi nelayan yang setia menemani deburan ombak dengan menebarkan jaring-jaring ikan di tengah lautan. Menghasilkan ikan-ikan yang menyuplai kebutuhan gizi dan protein bagi keluarga dan masyarakat. Ketika rakyat tinggal di perkotaan, menjelma menjadi pekerja buruh pabrik, pedagang, tukang parkir, pelayan toko dan profesi lain yang mendatangkan penghasilan halal. Keringat milik rakyat kala bekerja, merupakan pengabdian total bagi kemajuan bangsanya.

Sementara pemimpin sejati selalu siap mengorbankan dirinya bagi kepentingan banyak orang (umum). Mereka sudi meluangkan waktu paling berharganya untuk mencari solusi terarif dan tercerdas bagi permasalahan hidup yang tengah dihadapi masyarakat. Ketika masih banyak orang miskin, para pemimpin sejati selalu siap mengorbankan harta mereka untuk memberdayakan perekonomian keluarga miskin.

Dan bagi pemimpin yang sudah menyatu dengan hati rakyat, mereka siap tidak menerima gaji bulanan sampai akhir masa jabatannya, dan siap secara mental-intelektual mempertanggungjawabkan seluruh kepemimpinannya di depan publik maupun kepada Tuhan. Maka secara tak langsung, pemimpin yang sejati itu lahir dari kesadaran peradaban masyarakat paling bawah yang pernah meerasakan pahit getirnya menjadi keluarga miskin. Mereka sudah terbiasa hidup di bawah penderitaan. Pemimpin sejati juga tidak mudah tergiur pada kemegahawan duniawi, harta, uang, wanita dan hal-hal lain yang membangkitkan gairah syahwati.

Terjebaknya para pemimpin dalam berbagai skandal korupsi, pelan-pelan menghilangkan makna pemimpin sejati dari masa ke masa. Di masa musim kampanye, ada calon pemimpin yang menjanjikan akan menyejahterakan rakyatnya dengan memberikan segala gaji yang diperolehnya kepada rakyat. Padahal itu strategi meraih pemilih, dan setelah berkuasa ia menggerogoti APBN atau APBD untuk memperkaya diri. Atau dengan melakukan aksi pungutan liar yang dikamufleskan ke dalam kebijakan-kebijakan yang diperhalus.

Kedwitunggalan rakyat-pemimpin, atau pemimpin-rakyat, hanya bisa dibumikan dalam kesadaran hati dan mental setiap penduduk bangsa ini, melalui pembentukan karakter yang kuat. Pembangunan karakter, yang menjadi pembentuk identitas kesejatian diri setiap pribadi manusia, dijadikan acuan pokok menuju terwujudnya kemandirian rakyat dan pemimpin.

Menurut penulis, lebih penting mana antara keberadaan rakyat atau pemimpin? Jawaban paling tepat tentu lebih penting yakni keberadaan rakyat. Karena tanpa ada pemimpin pun, rakyat masih bisa hidup damai dan sejahtera. Kalau di balik, tidak ada rakyat, tentunya para pemimpin akan kelimpungan. Karena tak punya *partnership* yang bisa diajak bekerjasama mewujudkan sebuah tujuan diadakannya kepemimpinan. Para pemimpin harus bisa introspeksi diri, keberadaan mereka berkat jasa besar rakyat.

Presiden SBY tidak perlu ragu lagi, ketika akan melakukan kebijakan *reshuffle* kabinet, dalam waktu dekat. Pilih dan angkatlah menteri-menteri baru yang memiliki sejarah hidup pernah hidup melarat dan miskin. Karena itu sudah menjadi "garansi 80 persen", mental yang terbentuk dari sosok orang tersebut sudah teruji melalui penderitaan hidup. Kalau SBY malah mengangkat calon menteri berlatar belakang keluarga konglomerat, pantaslah praktik korupsi menjamur di berbagai kementerian.

Catatan terpentingnya, para pemimpin juga jangan memisahkan jarak sosial dengan rakyat. Istana Negara sesungguhnya menjadi bangunan fisik yang kerap mengurung presiden dalam tempurung berfikir. Sangat mustahil, dalam Istana Negara ada fenomena kemiskinan. Semuanya serba berkelimpahan, bak surga yang meninabobokan. SBY, perbanyaklah tidur di rumah-rumah penduduk miskin. Seperti apa yang pernah dicontohkan khalifah Umar bin Khattab dan Rasulullah Muhammad. (\*)



## Impor Beras dan Solusi Krisis Pangan<sup>61</sup>

Jika tidak segera ditangani serius, krisis pangan bisa memicu terjadinya berbagai permasalahan kompleks terutama berkaitan dengan kedaulatan bangsa ini. Pemerintah yang menempuh kebijakan impor beras, yang dinilai dapat mengatasi masalah krisis pangan nasional, kita nilai sebagai kebijakan yang tidak bijaksana.

Bagaimana mau dikatakan bijaksana, *Iha wong* negara kita masih berstatus sebagai negara agraris, *kok* berani-beraninya pemerintah tetap nekat mengimpor beras dari Muangthai, Vietnam dan negara lain. Padahal dengan menempuh kebijakan tersebut, sama artinya “menghina” eksistensi petani di Tanah Air, yang jumlahnya puluhan juta orang.

Bukankah dengan mendatangkan beras dari luar negeri, nasib petani akan merana. Karena produk beras yang dihasilkan para petani di dalam negeri pasti keok bersaing dengan produk beras impor? Bukan saja kalah dari segi kualitas, tetapi pasti kalah juga dari aspek harga? *Idem* maksud tersebut, harga beras milik para petani lokal pasti akan jeblok dan petani akan mengalami kerugian yang besar.

Ditinjau dari segi kemaslahatan sosial, impor beras hanya sebagai langkah instan (jangka pendek) mengatasi krisis pangan nasional. Pemerintah yang mengandalkan pada kebijakan mengimpor beras, sewaktu-waktu bisa keteteran ketika di negara-negara pengekspor beras mengganti kebijakan dalam negeri mereka, dengan menghentikan proses pengeksporan beras. Dan amat tragis, bagaimana mungkin kualitas petani di Vietnam dan Muangthai bisa mengalahkan kinerja para petani di Indonesia. Karena negara-negara di atas bisa mengekspor beras, sedangkan Indonesia malah mengimpor beras dari dua negara tersebut. Ini menggambarkan bahwa produktivitas petani

---

<sup>61</sup> Supadiyanto. (2011). *Impor Beras dan Solusi Krisis Pangan*. Pelita edisi 3 Oktober 2011.

Thailand dan Vietnam jauh lebih unggul ketimbang petani bangsa kita.

Sangat penting bagi bangsa ini belajar dari keuletan dan kemampuan para petani luar negeri. Kebijakan pemerintah juga harus diarahkan pada petani. Program-program pembangunan yang sebagian besar dilarikan ke arah pembangunan fisik dan industri, perlu dibelokkan menuju pembangunan sektor agraris. Karena walau bagaimanapun Indonesia yang berpenghuni 237 juta jiwa sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Tercatat hampir 47 juta jiwa, saat ini berprofesi sebagai petani. Maka sangat tidak arif, jika pemerintah secara sepihak menerapkan kebijakan impor beras tanpa memperhatikan nasib para petani nasional, sebagai implikasi negatif dari dampak kebijakan yang kurang populer tersebut.

Menurut hasil rapat Menteri Koordinator Perekonomian, awal September 2011 lalu, memutuskan adanya perevisian data produksi beras nasional pada masa yang akan datang. Keputusan ini mendasarkan kalkulasi Biro Pusat Statistik (BPS) yang menghitung ulang tingkat konsumsi beras per orang yang ternyata hanya menghabiskan 113 kilogram per tahun (*Kompas edisi 14 September 2011*).

Padahal data sebelumnya mencatat, konsumsi beras per kapita pertahun di Indonesia sebanyak 139,15 kilogram. Artinya terdapat selisih angka 26,15 kilogram. Dengan demikian konsumsi beras nasional seluruh penduduk Indonesia hanya sebesar 26,8 juta ton per tahun, bukannya 33 juta ton per tahun. Adanya perbedaan data yang dikantongi Kementerian Pertanian dan Perum Bulog, terkait besarnya konsumsi beras nasional pertahun, menimbulkan permasalahan krusial yang dampaknya cukup parah. Tidak kepalang tanggung, kerap kali antara petinggi Kementerian Pertanian dan Perum Bulog bersitegang dalam menggulirkan kebijakan masing-masing, berhubungan dengan perlu atau tidaknya melakukan impor beras.

Perkaranya sepele saja, data yang dikantongi dua institusi tersebut berbeda, karena soal keakurasian data. Perum Bulog sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan impor beras maupun menggalang pengumpulan beras dari

petani nasional, mengalami kebingungan manakala stok beras yang ada di gudang tidak bisa menutupi kebutuhan pokok akan beras nasional. Padahal menurut Kementerian Pertanian, jumlah produksi beras nasional dinilai cukup bisa menyuplai kebutuhan beras nasional.

Reformasi kebijakan perberasan nasional, perlu dilakukan pemerintah. Agar beras, jangan lagi dijadikan alat politik untuk menggoyang stabilitas pemerintahan yang berkuasa. Dalam kondisi perekonomian nasional yang sedang lesu ini, pemerintah jangan menutup-nutupi lagi kalau kondisi pangan nasional sedang buruk alias krisis. Krisis pangan yang sedang menimpa bangsa ini, jangan disembunyikan dengan pernyataan-pernyataan pejabat negara yang menyatakan produksi beras nasional beberapa bulan atau tahun ke depan aman. Adalah sebuah kebodohan yang teramat terang, pemerintah mengatakan kondisi stok pangan nasional aman, tetapi seiring dengan itu Bulog mengimpor beras dari luar negeri.

Sikap ksatria pemerintah untuk mengatakan apa adanya pada rakyat terkait kondisi pangan (beras) nasional secara apa adanya (riil), adalah kunci pokok agar masyarakat bisa semakin hidup hemat dan sederhana. Dan para petani dalam negeri bisa sekuat tenaga meningkatkan produksi beras nasional, dengan bermodalkan seluruh kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki.

(\*)

## Mengatasi Krisis Air dan Pangan di Musim Kemarau<sup>62</sup>

**M**usim kemarau di negeri ini selalu identik dengan krisis air. Hal ini melanda sejumlah daerah di Tanah Air. Salah satu propinsi yang setiap tahun mengalami krisis air yakni Jawa Tengah. Sebuah propinsi yang sejak zaman prakemerdekaan terkenal sebagai lumbung padi.

Ditilik dari kondisi di lapangan, penyebab terjadinya krisis air di kawasan Jawa Tengah cukup sederhana saja. Tiga waduk utama yang selama ini menjadi penyangga utama sumber mata air di propinsi yang dikepalai oleh Gubernur Bibit Waluyo yakni Waduk Gajah Mungkur (Wonogiri), Kedung Ombo (Sragen, Grobogan, Boyolali) dan Waduk Wadaslintang (Wonosobo, Banjarnegara) mengalami penyusutan debit air secara ekstrem (drastis).

Akibatnya mudah ditebak. Lahan-lahan pertanian banyak yang mengalami kekeringan, lantas para petani gagal panen. Sektor kehidupan yang langsung terkena dampak menyusutnya stok air di waduk-waduk raksasa yang disebutkan di atas, adalah sektor perikanan, perkebunan, dan kegiatan industri. Efek domino dari adanya krisis air ini, jelas berimplikasi negatif pada bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dan hankam.

Krisis air, pada akhirnya juga menyebabkan terjadinya krisis pangan. Krisis pangan sendiri berpuncak pada terganggunya ketahanan pangan nasional. Menurunnya jumlah hasil panen para petani padi dan palawija serta tanaman pangan lainnya, akan mengganggu ketercukupan sumber pangan yang beredar di masyarakat. Bukankan minimnya ketersediaan pangan, bakal memberatkan rakyat kecil pada akhirnya.

---

<sup>62</sup> Supadiyanto. (2011). *Mengatasi Krisis Air dan Pangan di Musim Kemarau*. Wawasan edisi 18 Juni 2011.

Perubahan iklim global yang dipengaruhi adanya gejala pemanasan global, telah memicu munculnya beragam bencana alam. Suhu dingin yang amat menusuk tulang ketika malam hari tiba, sebagai pertanda awal bahwa musim kering (kemarau) sudah menyapa kita. Seperti biasa, ketika musim kemarau memuncak, banyak orang yang harus menjual harta milik mereka (tanah, ternak, emas, dll) demi memperoleh air.

Sebagaimana yang dialami oleh sedikitnya 82.862 jiwa yang tinggal di 8 kecamatan di Wonogiri, yang terpaksa harus membeli air seharga Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu setiap 5 ribu liter air bersih (*Wawasan edisi 15 Juni 2011*). Bagi keluarga mampu, membeli air pada musim kemarau bukan menjadi masalah serius. Sebab mereka memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berbeda konteks dengan mereka yang berasal dari keluarga dengan kelas ekonomi lemah, musim kemarau merupakan masa keprihatinan terkait dengan ketersediaan air bagi kebutuhan hidup manusia.

Para pakar memprediksikan, musim kemarau tahun ini bakal berlangsung lebih lama dan panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Ketika malam pun sekarang terasa sangat dingin, yang bagi mereka yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, bisa terkena berbagai penyakit. Seperti flu (batuk, pilek), diare, penyakit mata (bahasa Jawa: beleken) dan jenis penyakit lainnya.

Tibanya musim kemarau, menandai dimulainya "drama" keprihatinan masyarakat. Akan banyak petani yang akan gagal panen. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini, para petani padi di berbagai daerah mengeluhkan adanya "penyakit misterius" yang menyebabkan tanaman padi menjadi layu dan kering. Bila keadaan ini dibiarkan terus-menerus berlanjut, kondisi buruk mengancam keselamatan pangan nasional.

Harus ada upaya-upaya kuratif maupun preventif yang dapat menanggulangi bahaya ancaman musim kemarau, yang identik dengan krisis air dan krisis pangan. Negara ini adalah salah satu negara di dunia yang dikelilingi oleh lautan. Lautan, selain berisi beragam kekayaan hayati maupun nonhayati, memiliki

kandungan air laut yang sebenarnya dapat dijadikan sumber alternatif untuk mengatasi krisis air pada musim kemarau.

Jangan sampai terjadi "negeri agraris" sekaligus "negeri maritim" ini sampai kesulitan air, baik untuk keperluan minum dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau pun untuk keperluan irigasi pertanian, perkebunan dan perikanan. Para intelektual dan peneliti ditantang untuk bisa merekayasa agar air laut yang sangat melimpah ruah itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan bagi sebanyak mungkin rakyat bangsa ini.

Cara preventif yang paling efektif untuk mencegah terjadinya krisis air dan pangan pada musim kemarau, hanyalah dengan jalan memelihara lingkungan hidup di sekitar kita bisa tetap lestari. Konservasi hutan-hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar, perlu digalakkan untuk menjaga stabilitas perputaran air dalam tanah, sehingga dapat menyimpan air dalam tempo yang lebih lama.

Pada situasi seperti sekarang ini, di mana sebagian besar warga masyarakat di kawasan Jawa Tengah dan DIY serta penduduk daerah lainnya yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan air, perlu mendapatkan pertolongan segera. Bantuan air bersih yang harganya bisa dijangkau dengan kocek murah, atau kalau bisa gratis, akan sangat membantu mereka yang mengalami krisis air.

Sedangkan lahan-lahan pertanian yang kekurangan air karena pada musim kemarau ini sudah tidak turun hujan lagi, bisa disiasati dengan melakukan penanaman tanaman palawija atau tumbuhan pangan yang bisa hidup tanpa perlu banyak air. Sehingga kecerdikan para petani dalam menanam tanaman yang bisa tetap hidup kendati sangat minim air, merupakan upaya kreatif guna mencegah agar petani tidak gagal panen.

Kebijakan pemerintah mengimpor beras, kedelai, gandum, gula dan bahan pangan lain, sejatinya bukan langkah cerdas dalam membantu mengatasi situasi krisis pangan yang tengah dihadapi masyarakat. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, apalagi mayoritas penduduk menjadi petani, bisa dijadikan modal utama bagi bangsa ini membangun ketahanan pangan nasional.

Keuletan dan kecerdikan para petani dalam menyikapi kondisi iklim yang tengah kemarau ini, sangat membantu dalam memecahkan masalah-masalah kompleks yang menyeruak pada musim kemarau tahun ini. Melalui cara-cara tadi, diharapkan para petani bisa tetap panen. Mereka juga tidak kekurangan air, karena memiliki persediaan air yang sudah tersimpan apik dalam tanah.

Sehingga ke depan, kawasan yang selama ini dikenal sebagai daerah kantong kekeringan seperti Blora, Rembang, Grobogan, Jepara, Pati, Kudus, Demak, Blora, Rembang, Sragen, Klaten, Wonogiri, Kabupaten Semarang dan Boyolali, Gunung Kidul dan kabupaten lainnya, tidak lagi mengalami krisis air, apalagi krisis pangan. Mampukah kita mewujudkannya, atau sekedar mimpi saja? (\*)

## Spirit Baru Pasca Lebaran<sup>63</sup>

**P**erayaan Lebaran tahun ini meski dirayakan selama 2 kali (Muhammadiyah 30 Agustus dan NU-pemerintah 31 Agustus), tetap berlangsung dengan penuh keharmonisan. Terbukti, perbedaan tersebut justru membawa hikmah besar dalam upaya mendewasakan pemahaman dan pengetahuan umat Muslim khususnya. Hikmah lainnya, perayaan Lebaran yang berbeda tersebut, bisa memecah arus mudik dalam beberapa gelombang, sehingga tidak menyebabkan kemacetan total di jalan raya.

Paska Lebaran usai dirayakan, para pemudik telah kembali lagi beraktivitas normal ke kota masing-masing, menuju rumahnya kembali. Jika direfleksikan bersama, ada oleh-oleh abadi yang tertancap dalam kesadaran hati. Yakni semangat pembaharuan. Semacam spirit baru yang memberikan motivasi (dorongan) kepada masing-masing orang dalam melakukan berbagai aktivitas kerja dan rutinitas lainnya. Lebaran bisa menjadi semacam masa pen-*charger*-an perasaan, pikiran, hati dan fisik kita dengan melakukan proses silaturahmi bersama keluarga, tetangga, rekan sepermainan, rekan kerja, atasan dan siapapun.

Ada proses penyegaran yang terjadi dalam tubuh kita. Setelah selama 11 bulan lebih bekerja di kantor, menuntut ilmu di bangku kampus atau sekolah, entah di dalam negeri maupun luar negeri; menjadikan setiap orang merindukan saat-saat santai melalui Lebaran. Momentum Lebaran menjadi momentum emas bagi setiap orang untuk melepaskan rasa bosan (kepenatan), lelah dan kerinduan terhadap setiap orang yang dicintai di kampung halaman.

Memang benar perayaan Lebaran sudah usai saat ini. Tetapi energi yang terpancar dari perayaan Lebaran masih membekas

---

<sup>63</sup> Supadiyanto. (2011). *Spirit Baru Pasca Lebaran*. Suara Karya edisi 6 September 2011.



dalam hati sanubari kita. Idealnya paska Lebaran ini, mampu membuat kinerja setiap pekerja semakin produktif. Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah semakin meningkat tajam.

Sektor-sektor industri bergeliat dengan penuh rasa optimisme, sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang bermanfaat besar bagi masyarakat luas. Kesadaran manusia dalam beragama dan bermasyarakat, seharusnya juga kian meningkat seiring dengan pencapaian keberhasilan-keberhasilan spiritual yang telah ditempuh setiap orang melalui ibadah puasa (Ramadan) kemarin, yang disempurnakan melalui ibadah sosial bernama zakat dan proses permintaan maaf melalui budaya mudik dan Lebaran.

Potret pengangguran dan kemiskinan yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah, harusnya juga gampang ditanggulangi ketika setiap elemen masyarakat bangsa ini memiliki spirit baru paska Lebaran. Dengan kemampuan pemerintah mematok APBN 2012 yang semakin besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, logika sederhananya bisa dengan mudah mengentaskan berbagai keterpurukan yang dialami berbagai lapisan masyarakat.

Dengan melambani setiap langkah dan kerja kita dengan spirit baru yang dihasilkan dari efek Lebaran, kita berharap pemerintah bersama dengan berbagai *stakeholders* mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa ini. Tanpa didasari semangat pembaharuan, kita meyakini sebarang besarnya anggaran yang dikucurkan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran hanya sia-sia belaka. Soalnya, besar kemungkinan dana anggaran negara yang sangat besar tersebut, bisa bocor di tengah jalan. Menjadi bancakan bagi para koruptor yang egoistik, otoriteristik dan antisosial.

Tingkat kejahatan korupsi yang masih tergolong tinggi menimpa negeri berpenduduk 238 juta jiwa ini, ditinjau dari sisi hukum, menjadi bukti keberhasilan aparat penegak hukum dalam menangkap setiap pelaku korupsi yang merugikan uang negara. Mereka telah menunjukkan kinerja mereka, tanpa melihat status kedudukan, status sosial maupun profesi para tersangka skandal korupsi. Akan tetapi pada aspek lain,

banyaknya kasus korupsi yang terungkap menunjukkan mentalitas yang dimiliki para pejabat negara dan penguasa di negeri ini buruk.

Spirit pembaharuan paska Lebaran juga wajib dihembuskan tidak saja hanya di lingkungan birokrasi (pemerintahan), lembaga penegak hukum dan swasta. Tetapi juga harus dihembuskan di berbagai lembaga pendidikan, LSM, pers, Ormas, Orsospol dan berbagai ranah kehidupan lainnya. Harapannya pembaharuan-pembaharuan dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dioptimalkan, sehingga membawa angin perubahan positif bagi kemajuan Indonesia.

Dan spirit baru paska Lebaran harus terus tersematkan dalam kesadaran jiwa setiap manusia sampai akhir masa nanti. Tanpa melakukan upaya tersebut, keterpurukan demi keterpurukan akan terus menghampiri wajah kehidupan bangsa ini. (\*)

## Reevaluasi Manajemen Mudik Lebaran<sup>64</sup>

**K**ita patut memprihatinkan masih tingginya musibah kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) yang terjadi di berbagai daerah di Tanah Air sepanjang mudik Lebaran tahun ini (H-7 sampai H+2). Mutu manajemen mudik Lebaran kali ini patut dipertanyakan. Mengapa masih saja terus terjadi tragedi Lakalantas yang merenggut keselamatan jiwa banyak orang.

Berdasarkan data Kepolisian Negara RI dan Posko Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2011 Kementerian Perhubungan RI, jumlah kecelakaan lalu lintas selama mudik Lebaran (23 Agustus-2 September 2011) mencapai 3.260 kasus, yang menyebabkan 549 orang meninggal dunia, 900 luka berat, dan 2.217 luka ringan. Jika dibandingkan data lakalantas mudik Lebaran tahun lalu, memang mengalami penurunan secara kuantitas pada jumlah korban meninggal dunia. Tahun lalu, jumlah orang yang meninggal dunia selama mudik tercatat sebanyak 574 orang, luka berat 730 orang dan luka ringan 1.413 orang.

Dengan jumlah pemudik yang mencapai belasan juta orang, terus terang mutu jalan raya dan kualitas angkutan massal di negeri ini perlu dilakukan perbaikan terus-menerus. Apalagi kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas masih rendah, kian menyebabkan tingginya angka Lakalantas.

Dari data yang ada menunjukkan, faktor penyebab kecelakaan mudik Lebaran 2011 didominasi akibat pengendara yang mengantuk (26,06 persen). Sedangkan penyebab lainnya, dipicu kelaikan kendaraan (10,47 persen), melanggar marka jalan (7,66 persen), melebihi batas kecepatan (4,01 persen) dan berkendara sambil menggunakan telpon seluler.

Mengingat mudik Lebaran sudah menjadi acara tahunan yang mentradisi di tengah masyarakat, hendaklah pemerintah yang

---

<sup>64</sup> Supadiyanto. (2011). *Reevaluasi Manajemen Mudik Lebaran*. Wawasan edisi 6 September 2011.

berkuasa lebih serius dalam memanajemenisasi mudik Lebaran. Sehingga angka kecelakaan lalu lintas bisa di-*pressure* hingga titik nol. Kita akui bersama, mudik Lebaran telah membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa. Secara substantif, budaya mudik telah menggeliatkan gairah industri transportasi, industri pariwisata, industri pangan, industri pakaian dan tak ketinggalan usaha kreatif lain.

Gelombang mudik pada Lebaran kali ini sungguh luar biasa. Sekitar 15 juta pemudik berhamburan dari kota-kota besar menuju kampung dan pedesaan. Dan kemudian mereka kembali lagi (arus balik) menuju kota besar. Akibatnya budaya mudik tidak hanya melibatkan faktor manusia saja, tetapi juga masalah pergerakan kendaraan pribadi (motor, mobil) maupun kendaraan umum (bus, kereta api, kapal laut, pesawat terbang dll.) yang menyemut di berbagai jalan protokol, stasiun, terminal, bandara dan tempat publik lain. Budaya mudik di mata sebagian masyarakat perantau, masih dianggap sebagai kewajiban tahunan yang mesti dilakukan demi bersua dengan orang tua dan anggota keluarga lain.

Dalam perspektif kekinian, sejatinya mudik tidak saja mengandung nilai-nilai religiositas semata. Mudik juga mengandung kekuatan silaturahmi, yang dipercayai mampu menembus berbagai dimensi sosial, kultural, diplomasi, ekonomi, politik bahkan pertahanan-keamanan. Meskipun dalam praktiknya, budaya mudik telah membuat problematika nasional seperti kemacetan lalu lintas, lonjakan kriminalitas, mahalnnya harga tiket angkutan massal, hingga kecelakaan (tabrakan).

Bagi mereka yang tak bisa bermudik, merasa bersalah dan kurang afdhol dalam merayakan Lebaran. Semangat mudik sesungguhnya membawa energi positif bagi kemajuan bangsa ini. Kekuatan mudik, secara terminologis berada pada sisi silaturahmi. Kekuatan ini yang memotivasi setiap perantau rela menghabiskan biaya besar pulang kampung. Mereka rela menempuh jarak ratusan kilometer, atau ribuan mil, bahkan selama berhari-hari, hanya ingin menghaturkan permohonan maaf kepada sanak keluarga dan orang tua.

Para pemudik yang umumnya juga membawa uang atau kekayaan lainnya untuk diberikan kepada keluarga di kampung

halaman, secara ekonomis telah membawa dampak positif pada pembangunan kawasan pedesaan. Arus mudik Lebaran yang berpusat dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Ujung Pandang dan kota metropolitan lainnya menuju kawasan desa atau kampung, berkontribusi besar dalam mempercepat pembangunan daerah. Perputaran uang yang selama ini menumpuk (berkutat) di kawasan kota-kota besar, melalui mudik nasional, mengalihkan kapital tersebut menuju kawasan-kawasan yang selama ini jauh dari jangkauan pembangunan.

Peristiwa mudik, juga dapat dimaknai secara inklusif sebagai upaya masif merevitalisasikan posisi kampung dan pedesaan. Kita harus mengakui, kemajuan Iptek telah menempatkan posisi kota sebagai sentra segala jenis aktivitas industri, politik, kebudayaan dan sektor kehidupan lainnya. Sedangkan peran kampung dan pedesaan dengan sendirinya tergeser dan tersisihkan menjadi kawasan yang dipandang sebelah mata oleh para penguasa, pengusaha maupun penegak hukum.

Mudik menjadi peristiwa religius yang membawa dampak berantai pada sisi pemerataan ekonomi. Khususnya ditinjau dari aliran modal (kapital) yang dibawa para perantau (pemudik) menuju kampung halaman masing-masing. Kepulangan para TKI ke Tanah Air pada masa Lebaran, selain membawa pulang banyak devisa negara, mempercepat proses pembangunan di kawasan pedesaan.

Momentum mudik yang terjadi saben tahun, sebenarnya menjadi agenda rutin yang diharap mampu membangkitkan kekuatan bangsa ini. Budaya mudik jangan disalahpersepsikan sebagai penjustifikasian terhadap hidup berfoya-foya dan mewah, merayakan Lebaran seusai menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, dengan berbagai pesta pora yang riskan mengundang kecemburuan sosial. Atau dijadikan ajang pameran oleh para pemudik kepada para tetangga, atas segala kesuksesan yang telah diraih dalam bekerja di kota-kota besar.

Iniilah sesungguhnya kekuatan ampuh di balik tradisi mudik, yang bisa dioptimalisasikan menjadi titik balik kebangkitan bangsa ini. Cuman masalahnya, kalau setiap mudik Lebaran menimbulkan tumbal berupa kecelakaan lalu lintas yang

merenggut nyawa banyak orang, mudik menjadi “musibah nasional” yang paling ditakuti publik. (\*)

## Supremasi Hukum dan Perburuan Koruptor<sup>65</sup>

**T**ak bisa disangkal lagi, tingkat kejahatan korupsi di Indonesia sudah sangat parah. Tak terhitung lagi jumlah uang negara yang raib, dikorupsi berjamaah. Jika mau mengumpulkan seluruh kekayaan negara yang dikorupsi para koruptor sejak rezim Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi ini; dipastikan sudah mencapai triliunan rupiah. Padahal jika uang hasil korupsi itu dikumpulkan, bisa melunasi jumlah utang luar negeri kita yang hampir menyentuh Rp 2 ribu triliun.

Kelambanan aparat penegak hukum menangkap para koruptor, otomatis menjadi preseden buruk bagi lembaga penegak hukum dan pemerintahan SBY-Boediono. Supremasi hukum di negeri ini relevan dipertanyakan. Akibatnya kepercayaan rakyat pada lembaga hukum rendah. Kepercayaan rakyat yang semakin turun terhadap kredibilitas lembaga-lembaga penegak hukum, bisa menyulut kerusuhan massal. Itu sebagai implementasi atas ketakpuasan publik atas upaya penegakan hukum dan pelayanan pada rakyat.

Secara prinsipil, para koruptor adalah orang-orang yang memiliki akses langsung kepada kekuasaan. Jabatan presiden, menteri, wakil rakyat, gubernur, bupati, kepala BUMN, kepala dinas dan jabatan lain merupakan posisi yang riskan terjadi kejahatan korupsi.

Tapi aneh, kecenderungan yang terjadi saat ini, kejahatan korupsi tak hanya dilakukan para penguasa yang memiliki kewenangan luas. Para pelaku skandal korupsi, ternyata tidak didominasi kalangan eksekutif (penguasa), legislatif (wakil rakyat). Tetapi mereka yang berstatus sebagai pengusaha,

---

<sup>65</sup> Supadiyanto. (2011). *Supremasi Hukum dan Perburuan Koruptor*. Pelita edisi 8 Oktober 2011.

pegawai swasta, pegawai rendah turut terkooptasi budaya korupsi.

Berdasar catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) saja, sejak tahun 2001-2011 tercatat 42 orang tersangka koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Status mereka hingga kini masih misterius, tinggal di mana. Upaya melarikan diri ke luar negeri, seperti apa yang pernah dilakukan M. Nazaruddin yang kemudian tertangkap di Cartagena (Colombia), merupakan langkah cerdas yang banyak dilakukan para koruptor di Tanah Air. Cara tersebut ditempuh agar terhindar jeratan hukum, mereka bisa bebas hidup menikmati harta hasil kejahatan korupsi.

Adapun para tersangka koruptor yang kini melarikan diri ke luar negeri antara lain: Hartawan Aluwi, Hendro Wiyanto, Dewi Tantular, Anton Tantular, Hesyam Al-Waraq, Rasat Ali Rizfi (terlibat skandal korupsi Bank Century, merugikan negara Rp 3,11 triliun), Sjamsul Nursalim (terlibat kasus korupsi BLBI Bank BDN, kerugian negara Rp 6,9 triliun dan USD 96,7 juta), Bambang Sutrisno dan Andrian Kiki Ariawan (terlibat korupsi BLBI Bank Surya, merugikan negara Rp 1,5 triliun) dan puluhan koruptor kelas kakap lain yang melarikan diri di luar negeri.

Lemahnya aparat penegak hukum dalam menangkap para koruptor, banyak dimanfaatkan oleh para koruptor kelas kakap meloloskan diri. Salah satu negara favorit para koruptor menghilangkan jejaknya yakni Singapura. Sebuah negara yang dapat ditempuh dalam hitungan jam penerbangan dari kota-kota besar di Indonesia.

Konon kabarnya, para koruptor menjadikan Singapura sebagai negara persembunyian para koruptor karena alasan kepraktisan. Lagipula belum adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura membuat para koruptor semakin betah menjadikan Singapura sebagai tempat *jujagan* yang aman.

Meski sesungguhnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sudah pernah dirintis, namun hasilnya nihil. Pasalnya Singapura meminta satu daerah di Tanah Air yang dijadikan lokasi pelatihan militer Singapura. Banyaknya jadwal penerbangan menuju Singapura, menjadi faktor pendukung lain kenapa para koruptor melarikan diri ke sana. Lokasi Singapura yang mudah serta murah dijangkau dari Indonesia,



mempermudah para koruptor bisa tetap berkomunikasi langsung dengan anggota keluarga dan pengacara atau keluarga.

Memburu para koruptor kelas kakap, memang harus terus digalakkan oleh aparat penegak hukum. Dengan menggandeng pihak Interpol serta mengupayakan perjanjian ekstradisi dengan seluruh negara di dunia ini, dapat mempersempit ruang gerak para koruptor yang bersembunyi di negeri orang.

Namun yang lebih pokok, upaya memberantas kejahatan korupsi, hanya bisa ditempuh dengan mempertegas pelaksanaan hukum positif dan hukum moral di Nusantara. Transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap setiap penggunaan anggaran negara, jauh lebih efektif mencegah peluang terjadinya praktik korupsi.

Dalam konteks demikian, masyarakat juga harus secara aktif mengawasi secara ketat setiap penggunaan anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Dan kinerja para wakil rakyat, yang bertugas mengontrol kebijakan yang digulirkan pemerintah, harus dikritisi seberapa besar komitmennya dalam memperjuangkan nasib kesejahteraan rakyat. (\*)

## PLN di Tangan Dahlan Iskan<sup>66</sup>

**D**alam sejarah dunia ke-PLN-an, Dahlan Iskan tergolong orang yang tak pernah mengambil gajinya sebagai Direktur Utama (Dirut) PLN. Alasannya, “sumber penghidupannya” sudah cukup dari Jawa Pos. Surat kabar yang cukup ternama yang kemudian melahirkan ratusan surat kabar lokal di berbagai daerah. Bermodal penampilan yang amat elegan (gemar memakai sepatu *cats*), kekhasan logat pembicaraan dan ide-ide orisinalitasnya, Dahlan Iskan mampu membuktikan dirinya mampu melakukan pekerjaan rumit dalam bidang kelistrikan, kuncinya dengan mengandalkan pengalaman, intuisi dan *feeling*.

Dialah wartawan pertama yang mampu mengendalikan birokrasi PLN mencapai kemajuan pesat, sehingga mampu memuaskan banyak pelanggan yang sebelumnya banyak diteror gangguan byarpet atau pemadaman listrik. Sangat diakui, energi listrik berperan penting dalam menggerakkan berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Terbatasnya suplai energi listrik dan mahalnya listrik, berpengaruh besar terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat.

Masalahnya, banyak orang yang menggantungkan nasib kehidupannya pada energi listrik. Mulai dari kalangan pengusaha, rumah tangga hingga masyarakat awam sangat terpukul ketika terjadi insiden pemadaman listrik, yang berujung pada kerugian para konsumen listrik.

Peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-66 yang jatuh pada tanggal 27 Oktober 2011, seharusnya menjadi momentum bagi kebangkitan pembangunan dunia kelistrikan nasional. Semenjak Direktur Utama PT PLN (Persero) dipegang oleh Dahlan Iskan sejak Desember 2009, BUMN terbesar kedua di negeri ini mengalami kemajuan luar biasa.

---

<sup>66</sup> Supadiyanto. (2011). *PLN di Tangan Dahlan Iskan*. Koran Jakarta edisi 18 Oktober 2011.

Selama hampir 2 tahun PLN dipegang raja koran dari Surabaya, yang punya 190 koran dan 34 televisi lokal, percetakan, bisnis listrik dan perkebunan, PLN mengalami kemajuan luar biasa. Padahal selama puluhan tahun, nasib PLN benar-benar menjadi bahan hujatan dan kritik, akibat mengalami pemadaman (*byar-pet*), sehingga banyak merugikan pelanggan. Apalagi banyak daerah yang masih belum tersentuh aliran listrik dan daftar antre calon pelanggan yang menginginkan sambungan listrik baru, menjadi problema berat dalam dunia kelistrikan.

Tapi di tangan Dahlan Iskan, kini PLN menuai banyak pujian dan prestasi. Program sejuta sambungan dalam sehari, menjadi gebrakan baru yang bisa mengatasi permasalahan listrik selama 65 tahun berhasil dipecahkan hanya dalam hitungan satu tahun kepemimpinannya.

Padaحال ketika ia ditunjuk menjadi Direktur Utama PLN, banyak orang yang meragukan kepemimpinannya. Bahkan ketika dilantik menjadi Dirut PLN, ratusan pendemo melakukan aksi unjuk rasa menolak pelantikannya menggantikan Fahmi Mochtar. Para pendemo itu menilai Daklan Iskan tidak berpengalaman, dan awam di bidang manajemen kelistrikan. Namun tak disangka, meski latar belakangnya seorang jurnalis tulen, ternyata kemampuan Dahlan Iskan dalam memanajementi PLN mencapai banyak prestasi yang sangat menakjubkan.

Ada 5 masalah pelik menelikung kenapa PLN mengalami banyak hambatan dalam menyediakan energi listrik. Pertama, terbatasnya kemampuan PLN melayani sambungan baru, sehingga menyebabkan daftar tunggu yang panjang. Kedua, kurang sehatnya keuangan PLN karena regulasi tarif, subsidi dan margin pendapatan PLN. Ketiga, tidak seimbangny pertumbuhan sarana pembangkit transmisi dan distribusi dengan pertumbuhan konsumen dan penjualan listrik. Keempat, PLN terjebak biaya tinggi akibat besarnya energi yang dibangkitkan dengan bahan bakar minyak, yang sebelumnya banyak disubsidi pemerintah. Kelima, terjadinya kekurangan daya listrik dan pemadaman bergilir di banyak kota. Berbagai kendala di atas, dijawab Dahlan Iskan dengan solusi cerdas.

Sangat menarik membaca detail berbagai gagasan yang diutarakan dalam buku berjudul: "Indonesia Habis Gelap Terbitlah Terang (Kisah Inspiratif Dahlan Iskan, Gaya Wartawan Mengelola Kelistrikan), karena menyajikan berbagai komentar-komentar orisinal yang mengkritisi tentang mutu dan gaya kepemimpinan Dahlan Iskan. Terdapat 21 tokoh yang menorehkan pendapatnya mengenai gaya kepemimpinan Dahlan Iskan dalam buku eksklusif ini. Mereka adalah Ishadi SK, Sofjan Wanandi, Sabam P. Siagian, Don Kardono, Iwan Darusman M., Muhammad Reza, Murtaqi Syamsuddin, Alvin Edison Woisiri dkk.

Mengutip pendapat Sofjan Wanandi, yang dibutuhkan bangsa ini adalah orang yang bisa *me-manage*, berani melakukan terobosan dan bertanggung jawab. Dahlan Iskan adalah orang bertipe demikian. Dia tidak ada gelar Doktor atau profesor, tapi cepat belajar. (\*)

## SEA Games dan Nasionalisme<sup>67</sup>

**M**ampukah kontingen atlet Indonesia yang berjumlah hampir 1.100 orang menjadi juara dalam berbagai cabang olahraga yang dikompetisikan dalam ajang SEA Games XXVI di Palembang dan Jakarta, sehingga keluar sebagai juara umum? Sebagai tempat perhelatan pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara sejak tanggal 11-22 November 2011, mampukah juga bangsa ini sukses menjadi tuan rumah yang baik, kuasa menyajikan berbagai fasilitas dan pernak-pernik perlombaan olahraga tersebut hingga paripurna?

Pertanyaan pertama, belum bisa kita jawab secara sederhana, mengingat hasil akhirnya baru bisa diketahui pada masa penutupan SEA Games XXVI nanti. Tetapi kita bisa memprediksikan, berdasarkan hasil SEA Games XXV di Laos tahun sebelumnya, Indonesia hanya mampu bertengger pada urutan klasemen ketiga. Atlet nasional kita keok oleh hegemoni atlet-atlet Thailand dan Vietnam.

Dengan jumlah sekitar 15 ribu atlet berbagai negara yang ikut unjuk kemampuan dalam SEA Games XXVI kali ini, target meraih juara umum cukup berat. Apalagi prestasi atlet nasional dalam 10 tahun terakhir mengalami kemunduran cukup signifikan. Kemunduran prestasi para atlet andalan kita, tidak hanya menimpa pada salah satu cabang olahraga. Melainkan menghinggapi hampir semua atlet pada masing-masing cabang olahraga. Masalah pembinaan, kaderisasi atlet yang selama ini banyak dikeluarkan banyak kalangan, belum bisa ditanggulangi secara berkesinambungan.

Sementara itu meninjau substansi pertanyaan poin kedua di atas, bangsa ini harus bertekad kuat dalam menyukseskan hajatan tersebut. Gagal menjadi tuan rumah yang baik, berarti citra Indonesia tercoreng di mata negara-negara Asia Tenggara.

---

<sup>67</sup> Supadiyanto. (2011). *SEA Games dan Nasionalisme*. Jogja Raya edisi 8 November 2011.

Menyukseskan hajatan SEA Games XXVI yang diselenggarakan secara maraton di Jakarta dan Palembang, merupakan bentuk nasionalisme yang harus hadir dalam setiap benak elemen bangsa.

Bagi masyarakat umum, menyukseskan hajatan SEA Games XXVI bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Antara lain dengan menonton langsung acara tersebut di stadion-stadion serta tempat pelaksanaan lomba tersebut atau menyaksikan melalui berbagai media massa cetak dan elektronik. Dukungan juga bisa diberikan melalui doa dan rasa simpatik terhadap perjuangan para atlet nasional. Agar berjaya dalam kompetisi olahraga saban 2 tahun tersebut.

Para generasi muda yang pada masa ultramodern ini mengalami pengikisan rasa nasionalisme, yang berujung pada pendangkalan sikap bela negara. Budaya kapitalisme, liberalisme dan sosilisme-komunisme, yang mengkooptasi segala kebudayaan di muka bumi ini mengakibatkan hilangnya rasa nasionalisme bangsa.

Pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,5 triliun untuk menyukseskan helatan akbar SEA Games XXVI. Nominal sebesar di atas, sungguh sia-sia belaka jika tidak diimbangi dengan "panen medali" yang dipersembahkan oleh atlet-atlet Indonesia. Maka sudah menjadi panggilan jiwa, Indonesia harus bisa sukses menjadi tuan rumah yang baik, sekaligus sukses sebagai juara umum SEA Games XXVI.

Tulisan ini bukan bermaksud mengobral impian semata, tetapi sebagai bukti dan komitmen bersama, dalam turut menyukseskan hajatan yang amat prestisius tersebut. Dunia olahraga, dalam konteks kekinian, mempunyai nilai strategis dalam mendongkrak nama besar dan citra sebuah bangsa. Kalau zaman dahulu, peperangan menjadi ajang aktualisasi yang menunjukkan ketangguhan sebuah bangsa. Kini semua ditransformasikan dalam bentuk olahraga. Sebuah kompetisi yang melibatkan kemampuan intelektual, fisik dan strategis multiaspek.

Bahkan ada tren yang berkembang demikian. Negara mana yang memiliki atlet-atlet tangguh dan berprestasi dunia, dinilai menjadi bangsa yang besar dan maju. Sehingga negara yang

tidak memiliki atlet berprestasi, dapat dikatakan sebagai negara yang kecil dan miskin.

Dalam pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara, SEA Games XXVI kali ini diperlombakan 43 cabang olahraga. Semua kompetisi olahraga tersebut disebarluaskan dan diekspos oleh berbagai jurnalis. Kabarnya, ada lebih dari 3 ribu wartawan yang meliput kegiatan olahraga tersebut. Berdasarkan data yang ada, terdapat total 545 nomor pertandingan yang akan dilaksanakan, atau sekitar 50 pertandingan final *saben* hari.

Kontingen asal Indonesia harus menaklukkan tantangan terberatnya. Dengan membuktikan diri sebagai atlet berprestasi. Bisa merajai seluruh cabang olahraga yang diperlombakan. Para atlet andalan bangsa ini harus berjuang keras menjadi yang terbaik, memiliki catatan prestasi tertinggi, tercepat, terkuat, terjauh dan tergesit.

Presiden SBY tentu harus menjadi orang yang paling pantas merasa malu jika kenyataannya para atlet nasional tidak mampu menjadi juara dan keluar sebagai juara umum. (\*)

## SEA Games dan Kebangkitan Olahraga<sup>68</sup>

**K**ita patut berbangga hati atas penampilan atlet-atlet terbaik yang dimiliki bangsa ini yang mampu menunjukkan dominasinya dalam berbagai cabang olahraga SEA Games XXVI yang dihelat di Jakarta dan Palembang sejak tanggal 11-22 November 2011. Hegemoni atlet-atlet andalan “Merah-Putih” dalam pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut saban dua tahun tersebut, menjadi motivasi kuat bagi bangsa ini bangkit dari berbagai keterpurukan.

Ketangguhan para olahragawan Indonesia tersebut, merepresentasikan atas semangat juang, dedikasi dan kerja keras yang tidak pernah kenal lelah dan putus asa. Triliunan rupiah uang negara yang harus dikeluarkan untuk menyukseskan helatan SEA Games XXVI tersebut, harus juga sukses diikuti dengan panen medali sebanyak mungkin oleh atlet-atlet andalan negeri ini.

Indonesia adalah macan Asia yang sudah lama tertidur dalam mimpi buruknya. Bangsa ini harus segera bangkit dari catatan buruk yang membayangi kehidupan sebagian besar penduduk. Olahraga adalah sarana yang tepat untuk mentransformasikan energi positif pembangunan, tidak hanya meliputi pembangunan aspek fisik semata, tetapi juga meliputi pembangunan spiritualitas dan intelektualitas.

Kalah dan menang dalam kompetisi olahraga, bukan sebagai tujuan utama dihelatnya berbagai kejuaraan. Secara filosofis, kompetisi olahraga diadakan untuk mendidik setiap orang akan arti penting nilai sportivitas, kejujuran, kerja keras, optimisme dan yang tak kalah pokok, pelajaran persaudaraan. SEA Games, kalau hanya dipandang sebagai olahraga fisik semata, hanya mempertaruhkan adu otot dan kekuatan fisik semata. Tetapi kalau dipandang dalam konteks yang lebih luas, SEA Games

---

<sup>68</sup> Supadiyanto. (2011). *SEA Games dan Kebangkitan Olahraga*. Pelita edisi 16 November 2011.



menjadi strategi kebudayaan (kultural) yang bisa mempersatukan beragam perbedaan ideologis, kebangsaan, etnisitas, budaya, politik dan agama. Para atlet dari negara manapun yang menang (unggul) dalam pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut, merupakan orang-orang yang benar-benar memiliki prestasi yang pantas dijunjung tinggi dan dibanggakan.

Penurunan prestasi olahraga nasional yang terjadi dalam beberapa dekade ini, kita nilai dikarenakan masalah pembinaan yang tidak profesional. Soal pembinaan atlet, merupakan persoalan amat substansial. Tidak mungkin tanpa ada upaya pembinaan terhadap para atlet yang intensif, tercipta atlet-atlet andal. Melahirkan atlet yang mampu mengukir prestasi hingga tingkat dunia, tidak bisa ditempuh dalam waktu singkat. Atlet berprestasi tidak bisa diciptakan dalam tempo instan, karena membutuhkan proses dan kesabaran. Pendidikan dan pembinaan terhadap atlet yang holistik, kontinyu dan profesional, sangat mendukung percepatan kebangkitan olahraga nasional dewasa ini.

Target jangka pendek, olahragawan-olahragawan unggulan milik negeri ini harus menjadi jawara-jawara dalam SEA Games XXVI. Target jangka menengahnya, mampu berjaya di tingkat Asia, yakni dalam Asian Games. Dan puncaknya (target jangka panjang), para atlet diorbitkan kuasa menjuarai komperisi Olimpiade dan kontes olahraga tingkat dunia lainnya.

Tiga target di atas hanya tinggal mimpi belaka tanpa dukungan dan komitmen semua kalangan. Idealnya, untuk memulai langkah perlu dilakukan dengan pencarian bibit-bibit atlet (olahragawan) terbaik di tingkat daerah mulai dari tingkat dusun atau kampung, kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga propinsi. Pada wilayah-wilayah hukum yang sudah disebutkan di atas, perlu diadakan pembinaan dan pencarian bibit-bibit atlet potensial daerah. Olahraga memang harus dimasyarakatkan hingga tingkat satuan keluarga dan masyarakat, sehingga di samping masyarakat terjaga derajat kesehatannya, dengan mudah kita bisa menemukan atlet-atlet potensial.

Nasib sebagian atlet andalan nasional dan daerah yang hingga kini belum mendapatkan jaminan kesejahteraan dari

pemerintah, sehingga harus hidup dalam alam penderitaan dan serba kekurangan, potret buram yang sebenarnya tidak boleh terjadi di negeri ini. Menurut hemat penulis, belum adanya jaminan kesejahteraan hidup dari pemerintah, menjadi pemicu utama kenapa banyak orang yang tidak mau berkarier menjadi seorang atlet profesional. Itu menjadi dilema yang harus dihilangkan. Pemerintah yang berkuasa saat ini bertanggung jawab penuh dalam menjamin kehidupan yang layak bagi setiap atlet nasional, sehingga setiap orang kemudian berlomba-lomba menjadi atlet terbaik.

Persoalan lain yang menghambat kemajuan dunia olahraga nasional, adalah berhubungan dengan permasalahan fasilitas infrastruktur dan pendanaan. Keterbatasan dana (anggaran) negara guna membiayai pembinaan atlet-atlet di daerah dan tingkat nasional, hanya bisa diatasi melalui perubahan kebijakan baru oleh pemerintah. Dalam hal ini para wakil rakyat yang duduk di tingkat pusat dan daerah, perlu bekerjasama sekuat tenaga dengan pihak eksekutif (pejabat negara mulai dari Presiden, Gubernur hingga Bupati/Walikota) dalam mengalokasikan dana khusus yang diperuntukkan bagi pembangunan dunia olahraga.

Selama ini kita maklum, dunia olahraga kerap dikesampingkan pemerintah berkuasa. Padahal dunia olahraga menjamin kehidupan bangsa ini semakin meningkat derajat kesehatannya. Dengan olahraga tak saja membuat tiap orang sehat. Tapi juga semakin cerdas, bugar dan berprestasi. Anggaran negara yang dikeluarkan untuk mensubsidi biaya pengobatan bagi warga masyarakat juga dengan sendirinya terminimalisir, seiring peningkatan jumlah orang sehat dan penurunan jumlah penduduk yang sakit.

SEA Games, bukan hanya menjadi pesta olahraga sesaat bagi para atlet yang berasal dari berbagai negara di Asia Tenggara saja. SEA Games memiliki hikmah besar dalam upaya mempersatukan seluruh kepentingan bangsa, melalui adu cepat, adu kuat dan adu gesit yang dilakukan oleh atlet-atlet terbaik masing-masing negara peserta SEA Games XXVI. SEA Games XXVI sesungguhnya merupakan kesempatan emas bagi para atlet bangsa ini menunjukkan kebangkitan olahraga nasional,

dengan mempersembahkan prestasi terbaik di *event* olahraga tingkat regional tersebut. (\*)

## Memberdayakan Penduduk Lansia<sup>69</sup>

**K**ini penduduk lansia menjadi masalah serius di tengah masyarakat. Soalnya jumlah penduduk lansia di Indonesia dari masa ke masa terus bertambah besar. Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), jumlah penduduk lansia sekitar 24 juta jiwa. Padahal tahun 1970 silam, jumlah penduduk lansia di Indonesia baru mencapai 2 juta jiwa.

Menilik data Badan Urusan Kependudukan PBB (Oktober 2011), jumlah penduduk lansia di dunia sudah mencapai 1 miliar orang. Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah penduduk lansia tertinggi setelah China, India dan Amerika Serikat. Negara-negara lain yang memiliki populasi penduduk lansia dalam jumlah tinggi yakni Monaco, Jepang, Jerman, Italia dan Yunani. Negara lain adalah Bulgaria, Austria, Swedia, Slovenia dan Latvia (baca: *Seputar Indonesia edisi 29 Januari 2012*).

Dengan demikian, penduduk lansia sudah menjadi isu dunia, termasuk di Indonesia. Tanpa ada upaya memberdayakan penduduk lansia, akan terjadi permasalahan sosial terkait masa depan dunia. Untuk itu dibutuhkan strategi nasional untuk memberdayakan penduduk lansia agar tidak menjadi beban bagi keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Menurut BKKBN, penduduk lansia adalah mereka yang telah berumur lebih dari 60 tahun. Pertambahan jumlah penduduk lansia di Indonesia disebabkan karena keberhasilan program keluarga berencana dan turunnya angka kematian bayi. Di samping itu pemicunya adalah meningkatkan usia harapan

---

<sup>69</sup> Supadiyanto. (2012). *Memberdayakan Penduduk Lansia*. Suara Karya edisi 29 Februari 2012. (dikutip juga oleh redaksi Haluan Kepri edisi 3 Maret 2012)

hidup di Indonesia yang semakin tinggi. Pada tahun 1980-an, usia harapan hidup rata-rata penduduk Indonesia adalah 52,2 tahun. Tahun 1990, meningkat menjadi 59,8 tahun dan pada tahun 2000 juga meningkat kembali menjadi 64,5 tahun. Sementara pada tahun 2010, usia harapan hidup penduduk Indonesia menjadi 67,4 tahun.

Adapun faktor internal yang menyebabkan naiknya usia harapan hidup penduduk Indonesia adalah tercapainya kesejahteraan serta pelayanan kesehatan yang kian memadai. Namun prihatinnya, lonjakan jumlah penduduk lansia di Tanah Air belum diikuti peningkatan pemberdayaan kalangan manula. Yang banyak ditemukan adalah nasib sebagian penduduk lansia memprihatinkan. Agar terhindar dari bencana buruk tersebut, pemerintah harus serius memperhatikan kesejahteraan, kesehatan dan kelayakan hidup mereka.

Berbagai upaya untuk menjaga eksistensi penduduk lansia agar tetap memiliki nilai positif dalam kontribusinya membangun bangsa, perlu didorong bersama. Di tilik dari segi usia, penduduk lansia bukan usia produktif lagi. Program pemberdayaan penduduk lansia harus diarahkan untuk menjaga eksistensi mereka dalam pergaulan sosial. Karena banyak dijumpai kasus penduduk lansia yang mati karena tak mendapatkan perhatian keluarga, kasus bunuh diri karena stres dan merasa terkucilkan.

Memberdayakan penduduk lansia bertujuan agar mereka tetap percaya diri dan produktif dalam menghasilkan karya yang berguna bagi kehidupan, merupakan impian hidup bagi terciptanya penduduk lansia ideal. Usia tua merupakan proses alamiah yang tidak tertolak, karena sudah menjadi hukum alam. Tetapi bukan lantas menjadi alasan pembenar bagi setiap pihak untuk memvonis penduduk lansia berhenti total dari aktivitas produktif.

Pemerintah Indonesia seharusnya berguru pada negara Jepang, yang telah lama menerapkan program pemberdayaan penduduk lansia secara terpadu. Dan terbaru, Kementerian Kesehatan Jepang memberlakukan program khusus dengan memberikan kartu ucapan musiman kepada setiap penduduk lansia Jepang.

Dampaknya luar biasa, angka kematian penduduk lansia karena dipicu rasa kesepian dapat ditekan drastis. Sesungguhnya membentuk perkumpulan penduduk lansia skala lokal maupun nasional, dapat memotivasi setiap lansia melakukan komunikasi antar lansia dan memompa semangat mereka untuk saling menghasilkan karya apapun yang berguna bagi masyarakat.

Idealnya pemerintah pusat dan daerah harus semakin mengutamakan masalah pelayanan kesejahteraan bagi penduduk lansia. Misalkan dengan memberikan dana sosial kepada setiap penduduk lansia yang besarnya bervariasi. Mengingat penduduk lansia sebagian besar adalah para janda dan duda yang hidup sendiri, sedangkan anak-anaknya telah hidup berkeluarga.

Mayoritas penduduk lansia hidup sendiri dan tidak mempunyai penghasilan menentu, sehingga sebagian besar dari mereka tergolong penduduk miskin. Negara bertanggung jawab besar terhadap nasib kesejahteraan dan kenyamanan hidup penduduk lansia yang kini jumlahnya terus meningkat tajam. (\*)

## Prokontra Publikasi Karya Ilmiah<sup>70</sup>

**D**itjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah akhir bulan Januari 2012 kemarin. Sontak, langsung menuai banyak kritik tajam. SE No. 152/E/T/2012 tersebut mewajibkan tiap mahasiswa (sarjana, magister dan doktor) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah lokal, nasional dan Internasional. Inilah pangkal masalah yang diprotes para petinggi kampus dan mahasiswa.

Jelas, SE tersebut amat memberatkan para mahasiswa menyelesaikan perkuliahan. Apalagi terbatasnya jumlah jurnal ilmiah yang beredar di tengah masyarakat menjadi kendala bagi para calon sarjana, magister dan doktor dalam memuat karya ilmiah. Berdasarkan data Dikti, jumlah jurnal ilmiah Indonesia Mei 2011 tercatat sekitar 7 ribu buah. Tapi yang terbit berkala hanya sekitar 4 ribu jurnal ilmiah. Sedang data LIPI menunjukkan, punya koleksi 67 ribu karya ilmiah, namun hanya 38 ribu karya ilmiah yang dapat diakses.

Sebelum menolak atau menerima kebijakan Ditjen Dikti terkait publikasi karya ilmiah, yang relevan kita pertanyakan adalah siapakah yang berkewajiban mempublikasikan setiap karya ilmiah para mahasiswa di Indonesia? Pertanyaan ini bermaksud meluruskan maksud dan tujuan Ditjen Dikti mengeluarkan SE tersebut, sekaligus untuk menjawab keresahan para mahasiswa mengenai teknis pemublikasian karya ilmiah yang terkesan sulit.

Menurut pandangan penulis, munculnya SE No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah bagi setiap calon sarjana, magister dan doktor merupakan hal yang tak perlu dirisaukan, apalagi ditakuti. Mengapa demikian? Mari kita berfikir secara pragmatis. *Pertama*, bukankah dengan semakin banyak para akademikus mempublikasikan karya ilmiah (atau penelitian)

---

<sup>70</sup> Supadiyanto. (2012). *Prokontra Publikasi Karya Ilmiah*. Harian Jogja edisi 3 Maret 2012.

mereka di berbagai jurnal ilmiah, menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran akademik para intelektual kampus?

*Kedua*, teknis mengenai pemuatan atau tidaknya karya ilmiah para akademikus itu menurut hemat penulis, bukanlah merupakan tanggung jawab sepenuhnya para pembuat karya ilmiahnya sendiri. Melainkan tanggung jawab institusional, yakni kampus di mana mereka bernaung, bekerja dan menuntut ilmu. Jadi tugas utama para intelektual kampus adalah melakukan penelitian.

Perkara mempublikasikan merupakan tanggung jawab pokok intitusi kampus. Siapa yang disalahkan jika ada banyak karya ilmiah berupa skripsi, tesis dan disertasi yang hanya menumpuk di perpustakaan, hingga tak banyak diakses masyarakat? Solusinya adalah dengan mempublikasikannya melalui berbagai jurnal ilmiah.

Mahal biayanya? Itu kalau dicetak, dan sekarang sudah zaman digital. Artinya bisa dimuat melalui jurnal ilmiah *online* atau mengandalkan internet. Maka setiap perguruan tinggi swasta maupun negeri harus memiliki jurnal ilmiah. Tentu akan memudahkan bagi setiap intelektual kampus, khususnya bagi para mahasiswa calon sarjana mempublikasikannya melalui jurnal ilmiah bersangkutan.

Dengan mengandalkan jurnal ilmiah *online*, masalah pembiayaan percetakan seperti dirisaukan para penentang kebijakan SE No. 152/E/T/2012 dapat teratasi. Ke depan, harus dibuat lebih banyak lagi jurnal ilmiah tingkat nasional, di mana sejumlah perguruan tinggi bisa bersinergi dalam melahirkan jurnal ilmiah nasional.

Selama ini banyak kalangan yang menentang keberadaan SE No. 152/E/T/2012 yang akan diberlakukan mulai Agustus 2012 besok, karena berbagai alasan berkaitan dengan minimnya jumlah jurnal ilmiah yang beredar di kampus. Sekarang alasan itu tidak relevan lagi dimunculkan, yakni dengan solusi jurnal ilmiah *online* dan setiap kampus mempunyai jurnal ilmiah sendiri. Di mana dalam konteks ini, petugas perpustakaan kampus memiliki tugas pokok tambahan yakni “mempublikasikan” berbagai karya ilmiah yang wajib dimiliki oleh setiap intelektual kampus.



Jadi tidak lagi memberatkan para mahasiswa. Toh walaupun dengan senang hati para mahasiswa tersebut mempublikasikan karya ilmiah mereka di berbagai jurnal ilmiah, itu merupakan nilai plus mereka. Yang patut digenjut pada setiap calon pemegang gelar sarjana, magister dan doktor adalah kegiatan penelitian. Mentradisikan kegiatan penelitian inilah yang seyogyanya dilakukan Dikti dan petinggi kampus. Bukan malah membuat masalah baru dalam dunia akademik, seperti mensyaratkan setiap mahasiswa calon sarjana, magister maupun doktor menuliskan karya ilmiah pada jurnal ilmiah. Idealnya, Ditjen Dikti perlu mengeluarkan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan SE No. 152/E/T/2012 sehingga tak menimbulkan kerisauan dan tanda tanya di kalangan intelektual kampus sendiri.

Kita paham maksud baik Ditjen Dikti mengeluarkan SE No. 152/E/T/2012. Kita mengapresiasinya. Cuman pokok permasalahannya, lahirnya SE No. 152/E/T/2012 tersebut terkesan "tiba-tiba" dan kurang sosialisasi di tengah kampus, menimbulkan dugaan buruk bahwa Dirjen Dikti tak mampu membaca peta permasalahan akademik yang menyerimpung kebanyakan mahasiswa, di mana mereka rata-rata lulus dalam waktu lama dan rendah dalam hal menghasilkan karya ilmiah.

Untuk menumbuhkan kesadaran intelektual kampus menghasilkan karya ilmiah, memang SE No. 152/E/T/2012 menjadi payung hukum agar setiap kampus berlomba dalam mempublikasikan karya ilmiah. Meski dalam praktiknya, perlu diwaspadai virus plagiatisme dan karya ilmiah pesanan. Artinya, karya ilmiah yang dihasilkan bukan murni karya sendiri, melainkan karya ilmiah milik orang lain atau pihak-pihak yang sengaja membisniskan karya ilmiah.

Sebagai kesimpulan akhir, menurut hemat penulis lahirnya SE No. 152/E/T/2012 tentang publikasi karya ilmiah bagi setiap calon sarjana, magister dan doktor perlu dibahas dan disosialisasikan lagi mengenai teknis pelaksanaannya. Agar tak menimbulkan polemik berkepanjangan, menambah ruwet peta dunia pendidikan. (\*)

## Polemik Publikasi Karya Ilmiah<sup>71</sup>

**P**antaskah para rektor dan akademisi mempolemikkan eksistensi Surat Edaran (SE) No. 152/E/T/2012 tentang publikasi karya ilmiah. Menurut pandangan penulis, sangat tak pantas. Mengapa demikian? Karena itu menyangkut harkat dan martabat mereka sebagai kaum intelektual. Meski kenyataannya, belum lama ini sebanyak lebih dari 3 ribu kampus swasta di Jawa maupun luar Jawa menolak konten (isi) SE Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Sangat disayangkan, sikap arogan dari ribuan petinggi PTS tersebut.

Permasalahan pokoknya adalah mengapa mereka menolak tujuan yang sangat mulia di atas, di mana menurut SE No. 152/E/T/2012 tersebut setiap calon Sarjana, Magister dan Doktor harus menghasilkan karya tulis ilmiah yang bisa termuat di jurnal ilmiah lokal, nasional, regional maupun Internasional. Penulis tidak bermaksud pro pada Ditjen Dikti, tetapi tidak juga antipati pada sikap penolakan yang dilakukan ribuan petinggi PTS di Tanah Air.

Mari kita analisa satu persatu konten SE yang riskan menimbulkan multitafsir tersebut. Pertama, adalah setiap calon Sarjana, Magister dan Doktor harus menghasilkan karya tulis ilmiah. Hal ini rasanya tidak perlu diperdebatkan lagi, karena penulis meyakini setiap kampus sudah memberlakukannya. Kecuali kampus-kampus "siluman" di mana mereka sekedar memperjualbelikan ijazah dan gelar akademik saja. Tetapi yang terakhir tadi tidak usah dipanjang-panjangkan persoalannya. Kita hanya ingin berfokus pada profesionalisme para akademikus saja. Bahwa tugas mereka sebagai intelektual kampus (ilmuwan dan ilmuwati) adalah melakukan penelitian dengan berbagai

---

<sup>71</sup> Supadiyanto. (2012). *Polemik Publikasi Karya Ilmiah*. Kedaulatan Rakyat edisi 6 Maret 2012.

metode penelitian yang sah dan dibenarkan menurut etika intelektual.

Konten kedua SE tersebut, menjadi pangkal polemik yang seolah tak bertepi adalah, hasil karya ilmiah para intelektual kampus tersebut harus dimuat di jurnal ilmiah tingkat lokal, nasional dan dunia. Nah, sesungguhnya yang perlu diperjelaskan lebih rinci oleh Ditjen Dikti adalah masalah yang satu ini. Menurut sumber internal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemuatan karya tulis para akademikus kampus tersebut bisa bermodus dua. Satu, di jurnal ilmiah dalam bentuk cetak. Kedua, di jurnal ilmiah dalam bentuk maya (*online*).

Perkara terpokoknya, seharusnya sebelum Ditjen Dikti mengeluarkan SE di atas, idealnya mereka mengeluarkan SE serupa yang mengharuskan setiap kampus memiliki produk intelektual berupa jurnal ilmiah dalam bentuk cetak dan atau online. Namun persoalannya tidak berhenti sampai di situ. Baiklah, andaikan setiap kampus sudah memiliki banyak jurnal ilmiah cetak dan *online*, jelas menurut instruksi tersebut, belum menjadi solusi bagi mereka yang kini tengah menempuh studi S3 atau proram Doktorat atau PhD.

Sebab mereka harus bisa memuatkan karya ilmiah mereka di jurnal ilmiah yang terakreditasi secara Internasional. Sudah ada berapa jurnal ilmiah di Indonesia yan masuk dalam kategori di atas. Maka solusinya adalah, PTS maupun PTN di Indonesia harus bekerjasama dengan kampus-kampus di luar negeri yang memiliki jurnal ilmiah berkelas Internasional. Semoga memberikan pencerahan. (\*)

## Jurnalistik Masuk Kurikulum Pendidikan<sup>72</sup>

**M**engingat budaya menulis belum menjadi tradisi keilmuan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi; ketrampilan jurnalistik perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Gagasan ini bermaksud agar setiap pelajar, mahasiswa, guru, dosen dan semua unsur yang terlibat dalam proses dunia pendidikan, semakin bergairah dalam membudidayakan tradisi menulis.

Kita harus jujur mengakui, kemampuan para akademikus dalam menghasilkan karya intelektual baik berupa buku, makalah, karya tulis ilmiah populer, hasil penelitian dan semacamnya masih terbilang minimalis. Bandingkan dengan kemampuan para akademikus dan intelektual di negara tetangga sebagaimana di Malaysia. Kemampuan para penulis di Indonesia menghasilkan karya buku dalam setahun hanya sebanyak 8 ribu judul. Beda kasta dengan kemampuan para penulis di Malaysia yang kuasa menerbitkan 150 ribu judul. Dengan Vietnam saja kalah, apalagi dengan Malaysia, kemampuan menulis bangsa kita kalah jauh. Para penulis di Vietnam mampu menerbitkan buku sebanyak 45 ribu judul dalam rentang waktu setahun.

Menelusuri faktor rendahnya kemampuan menulis masyarakat Indonesia, disebabkan karena faktor rendahnya minat baca. Merujuk data yang dikeluarkan *United Nation Development Program* (UNDP) tahun 2010 kemarin, ternyata minat baca masyarakat Indonesia amat rendah. Yakni di antara seribu orang hanya ada 1 orang saja yang punya daya ketertarikan membaca, atau mentradisikan budaya baca. Artinya, jika jumlah penduduk Indonesia sebanyak 238 juta jiwa, maka yang punya minat budaya baca cuman sebanyak 238 ribu orang saja, atau hanya

---

<sup>72</sup> Supadiyanto. (2011). *Jurnalistik Masuk Kurikulum Pendidikan*. Kedaulatan Rakyat edisi 14 Desember 2011.

seperseribu dari totalitas jumlah penduduk Indonesia. Cukup memperhatikan, bukan?

Melihat permasalahan yang ada, maka untuk mendongkrak budaya baca dan tradisi menulis di negeri ini, butuh perjuangan yang sangat keras. Salah satunya dengan menjadikan jurnalistik bisa masuk menjadi kurikulum pendidikan nasional. Harapannya, setiap orang bisa menulis dan mempublikasikan karyanya melalui berbagai media massa cetak dan elektronik. Bukankah di negeri ini ada ratusan bahkan ribuan media cetak dan elektronik yang siap menampung hasil karya intelektual dari setiap penduduk bangsa ini?

Untuk itu wartawan, yang memiliki keahlian khusus dalam dunia tulis-menulis perlu dilibatkan dalam menghidupkan budaya baca dan tradisi menulis di lingkungan sekolah dan kampus. Kalau perlu, jangan lagi jurnalistik hanya dijadikan kegiatan ekstrakurikuler pada lembaga-lembaga pendidikan, tetapi menjadikannya sebagai pelajaran dan atau mata kuliah pokok.

Dan terbukti kesahihannya, banyak guru dan dosen yang gagal menghasilkan karya tulis yang bisa termuat di media massa, sehingga sangat wajar juga jika kemudian banyak pelajar dan mahasiswa yang tak bisa menulis karya intelektual. Alasan mereka, guru dan dosen mereka saja tidak bisa melakukannya, apalagi mereka? (\*)

## Apa Kabar Mahasiswa Pengusaha?<sup>73</sup>

**A**da jutaan mahasiswa di Indonesia. Namun dari sekian juta mahasiswa yang kuliah di berbagai PTN/S di seluruh Indonesia tersebut, berapa banyak mahasiswa yang memiliki mental pengusaha? Minimnya jumlah mahasiswa yang terobsesi (bercita-cita kuat menjadi pengusaha, menyebabkan kelemahan ekonomi bangsa ini. Tidak percaya? Terbukti sekali para lulusan perguruan tinggi (kampus) tercatat banyak yang menganggur. Kenapa bisa demikian?

Bukankah mereka manusia-manusia *linuwih*, yang cerdas secara intelektual? Sebenarnya apa sih tujuan diadakannya pendidikan tinggi, kalau kenyataannya malah mencipta generasi pengangguran. Mubazir bukan, ongkos atau biaya pendidikan di kampus yang menyediot dana besar, tetapi tidak menghasilkan Sarjana yang multitalenta, memiliki mentalitas sang pengusaha. Memprovokasi para mahasiswa menjadi pengusaha, menjadi jawaban mutlak atas problema perekonomian yang menimpa negeri berpenduduk 238 juta jiwa ini.

Sebenarnya sudah agak terlambat memprovokasi seseorang menjadi pengusaha ketika ia sudah duduk di bangku kuliah. Yang lebih efektif adalah ketika ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Jadi pola yang mestinya dibentuk dalam kurikulum pendidikan nasional, mulai dari bangku SD, SMP, SMA/SMK/MA hingga PT harus terintegrasi dalam satu siklus. Terpokok dengan mencangkokkan kurikulum berbasis *entrepreneurship* dalam satuan mata pelajaran maupun mata kuliah. Energi pendidikan bangsa ini harus dikerahkan sepenuhnya untuk membangun perekonomian nasional.

Betapa ampuhnya perekonomian bangsa ini, ketika para pelajar dan mahasiswa menjadi manusia yang produktif secara ekonomi (finansial). Lebih tegasnya, tentu akan menarik dan

---

<sup>73</sup> Supadiyanto. (2012). *Apa Kabar Mahasiswa Pengusaha*. Kedaulatan Rakyat edisi 19 Mei 2012.

amat potensial sumber daya manusia negeri ini, di kala jutaan pelajar dan mahasiswa tersebut dapat menghasilkan uang atau modal. Tidak seperti sekarang ini, di mana mereka masih menggantungkan segala kebutuhan pada orang tua. Untuk mencapai tujuan di atas, para pelajar dan mahasiswa perlu dididik secara intensif untuk hidup mandiri dan berwirausaha.

Misalkan dengan mendidik anak-anak SD untuk beternak ayam di lingkungan pedesaan atau pegunungan. Bagi anak-anak yang tinggal di kawasan perkotaan dilatih menjadi pedagang. Atau usaha kreatif lainnya, sehingga melatih mereka terampil dalam berwirausaha. Ide ini bisa dikloning dalam berbagai metode berwirausaha di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Yang lebih prinsip, bagaimana para pelajar dan mahasiswa digembleng dapat menghasilkan karya yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Karya di sini bermakna fisik maupun nonfisik. Karya berupa mainan anak-anak, alat-alat elektronika atau karya intelektual berupa penelitian, buku dan semacamnya.

Soal kreativitas, para pelajar dan mahasiswa Indonesia tak kalah jika dibandingkan dengan siswa dan mahasiswa luar negeri. Mau bukti? Dalam berbagai kompetisi pelajar dan mahasiswa tingkat dunia, anak-anak Indonesia mampu menjadi pemenang. Saya tidak mau menderet berbagai prestasi luar biasa yang berhasil ditorehkan anak-anak bangsa ini.

Masalahnya, cuman pada kepedulian dan komitmen pemerintah dan masyarakat yang masih rendah dalam menempa mental dan keterampilan hidup para pelajar dan mahasiswa Indonesia. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan berat dan besar bagi seluruh elemen bangsa. (\*)

## Kisah Hidup yang Menggugah<sup>74</sup>

Ini adalah kumpulan kisah hidup manusia-manusia biasa yang sungguh luar biasa. Di mana kisah ini merupakan pengalaman reflektif dan orisinal yang dikisahkan secara jujur dan apa adanya oleh orang-orang biasa yang bekerja di bawah Yayasan Tarakanita. Yayasan Tarakanita adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang mengkhususkan diri untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kemanusiaan.

Para pengisah cerita hidup ini berasal dari beragam latar belakang seperti perawat, guru, pustakawan, suster, tukang kebun, karyawan administrasi, satpam dan lain sebagainya. Kisah-kisah hidup yang sangat inspiratif dan menggugah perasaan ini, dibebankan oleh 25 penulis yang hingga kini masih terus ikhlas dan mengabdikan di bawah Yayasan Tarakanita.

Buku berjudul: "*Dalam Dekapan Dada Kangguru*" yang ditulis secara keroyokan (berjamaah) oleh 25 penulis dan dieditori oleh V. Banu Hastha Kunjana ini menarik dijadikan pelajaran berharga bagi para pembaca yang ingin membangkitkan semangatnya. Di dalamnya tidak saja terdapat kisah yang inspiratif, melainkan juga cerita perjalanan hidup yang penuh dengan kesedihan, kebahagiaan, perjuangan hidup serta percintaan sejati.

Dalam kata pengantarnya, budayawan Arswendo Atmowiloto menyatakan, sesungguhnya kebenaran bisa disampaikan melalui cerita, melalui dan bersama tokoh para raja, para pejalan kaki, bahkan kisah Tuhan Yesus dan para rasul. "Dan kini para awam menuliskan kesaksian sebagai bagian dari doa disertai air mata dan suka cita," tulis Arswendo Atmowiloto, yang juga pernah menikmati getirnya kehidupan dengan hidup di dalam penjara di masa pemerintahan Orde Baru silam.

---

<sup>74</sup> Supadiyanto. (2012). *Kisah-Kisah Hidup yang Menggugah*. Koran Jakarta edisi 24 Mei 2012.



Salah satu kisah hidup yang paling menarik diungkapkan oleh Sophia Estin ERni Lestari, mengisahkan tentang perjuangannya bersama rekan-rekannya dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan TK dan SD Tarakanita di Gading Serpong dan Citra Raya Tangerang.

"Dua minggu kami buka pendaftaran tapi tak satupun calon siswa yang mendaftar. Suster memutuskan untuk melakukan promosi *door to door*, promosi dari rumah ke rumah. Perum Kelapa Dua adalah perumahan pertama yang kami sasar. Tapi hasilnya nihil," ujarnya, yang tertera dalam buku tersebut pada halaman 14.

Kisah lain yang tidak kalah penuh semangat perjuangan dibeberkan oleh Victoria Kristinawati. "Selama tiga bulan di Ende, aku bahagia karena bisa membagikan ilmuku. Adalah sebuah kehormatan, aku bisa terlibat dalam program Sister Hospital untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di Ende. Selama di Ende, aku pun mendapat pengalaman yang sangat berharga. Akan selalu ada jalan keluar untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi kalau aku tidak menyerah dan mau berusaha untuk mengatasinya," demikian pengakuan Victotria Kristinawati melalui cerita kisah berjudul: "*Dekapan Kangguru yang Menyembuhkan*", yang tercantum dalam paragraf terakhir cerita tersebut.

Dengan cukup cerdas, kisah terakhir buku ini diakhiri dengan pemaparan oleh Shamat Saefudin. Melalui kisah cerita berjudul "Si Pitung dari Tarakanita", ia bermaksud menegaskan sekali lagi bahwa pengabdian yang tulus, perjuangan yang ekstra keras dan pantang berputus asa serta selalu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membuahkan kesuksesan dan berbagai kebaikan di mata umat manusia..

Buku kisah hidup yang dituturkan dengan jujur dan tanpa tendensi seperti inilah yang sesungguhnya menjadi kekuatan buku ini. Di balik keluguan para pencerita kisah hidup dalam buku setebal 203 halaman ini, merupakan energi positif yang bisa dijadikan pembangkit asa di tengah berbagai permasalahan hidup yang menjerat kehidupan manusia. Secara filosofis, berbagai kisah hidup tersebut diharapkan mampu menjadi inspirasi kolektif di tengah krisis kepemimpinan di negeri ini.

G.P Sindhunata, SJ memberikan komentarnya, yang tercantum dalam kulit buku tersebut, bahwa buku tersebut memberikan inspirasi kita untuk memahami bahwa sebuah kebesaran dibangun dengan batubata-batubata pemberian diri dan pengorbanan dari mereka-mereka yang sederhana, kecil dan tidak berarti.

Sayangnya buku ini tidak mencantumkan tanggal terbitnya buku ini. Hanya saja kebetulan saya pernah menghadiri acara bedah buku dan *launching* buku ini di Asrama Santikara Yogyakarta pada awal April 2012 lalu, dengan menghadirkan pembicara utama Arswendo Atmowiloto. (\*)

## **Menunggu Kejutan Pasca National Summit 2009<sup>75</sup>**

**K**ita sebagai rakyat Indonesia masih setia menunggu munculnya berbagai gebrakan progresif yang siap dilakukan pemerintahan dan kabinet baru. Kejutan-kejutan yang sangat ditunggu-tunggu banyak rakyat adalah seperti mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi nasional hingga 15 persen (walau pemerintah cuma mematok angka 7 persen). Menekan habis angka pengangguran sampai nol persen meski pemerintah hanya punya nyali menargetnya 5-6 persen, keluarga miskin di-pressure sampai titik paling netral, meskipun pemerintah hanya berani mematok angka 8-10 persen.

Kita juga menunggu gebrakan pemerintahan baru itu seperti rekor pencapaian harga kebutuhan pokok murah, upah pekerja baik sektor formal, informal, swasta maupun PNS di atas standar. Kejutan lain yang kita gadang-gadang yaitu pelayanan publik memuaskan, akses menuju birokrasi dipermudah, sandang-papan terjangkau, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan memadai dengan biaya terbatas atau kalau bisa gratis.

Sedangkan kita juga menunggu kado kejutan dari pemerintah dalam bidang kebirokrasian berupa nihilnya skandal korupsi dalam birokrasi dan BUMN, penegakan hukum tanpa tebang pilih, utang negara lunas dan pembangunan di berbagai daerah gencar. Meski senyatanya bangsa ini masih dililit krisis perekonomian, di mana menyebabkan masih banyaknya penduduk miskin dan pengangguran melalui adanya komitmen pemerintahan baru yang diarsiteki duet serasi SBY-Boediono membikin program kerja kabinet 100 hari, 1 tahun sampai 5 tahun ke depan itu minimal membikin lega hati kita.

---

<sup>75</sup> Supadiyanto. (2009). *Menunggu Kejutan Pasca National Summit 2009*. Suara Pembaruan edisi 2 November 2009.

Pemerintahan baru yang masih seumur jagung itu, kini terlihat masih terus giat melakukan berbagai pembenahan, koordinasi dengan berbagai kalangan pemangku jabatan baik di daerah maupun pusat. Terakhir kali, pemerintah malahan memprakarsai adanya pertemuan akbar bertajuk National Summit 2009 yang diselenggarakan di hotel terkemuka di Jakarta (Bidakara dan Ritz Carlton Pacific Place) sejak tanggal 28-30 Oktober 2009.

Pertemuan nasional yang melibatkan setidaknya 1.300 peserta yang mereka itu terdiri atas pemangku kepentingan dalam program pembangunan nasional, yakni segenap menteri, pejabat eselon I departemen terkait, gubernur, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin dan Kadin daerah, anggota DPR, dan DPRD, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, bankir dan sejumlah pakar. Pertemuan yang digagas untuk melejitkan pembangunan dan berbagai layanan publik di negeri berpenghuni 230 juta jiwa ini, secara spesial, dibuka langsung oleh Presiden SBY dan juga ditutup langsung oleh Wapres Boediono.

Itu artinya, pasangan SBY-Boediono menilai momen acara tersebut sangat strategis dalam mengawali karirnya memimpin bangsa ini. Para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, juga melalui pertemuan nasional tersebut bisa mengkomunikasikan langkah-langkah strategis masing-masing yang akan ditempuh kepada seluruh peserta acara tersebut, sekaligus meminta masukan, saran dan usulan demi perbaikan program pembangunan yang siap digencarkan tersebut.

Kini hajatan National Summit 2009 sudah usai. Produk budaya yang ditunggu sekarang oleh 230 juta penduduk Indonesia adalah gerakan-gerakan nyata dari hasil rembuan nasional tersebut. Program-program yang muluk, tanpa pengeksesuan program yang cerdas hingga tak pernah terealisasi sepanjang 5 tahun pemerintahan SBY-Boediono bisa menjadi batu sandungan yang mengganjal pembangunan nasional.

Pasca rampungnya National Summit 2009 tersebut yang hanya diikuti oleh orang-orang yang berposisi penting di Tanah Air, kita berharap komitmen para peserta pertemuan akbar itu

untuk tidak hanya menjadikan program pemerintahan sebagai bahan omongan di kantor-kantor pejabat, tapi mulai dari sekarang harus direalisasikan dalam program yang merakyat dan membumi.

Data di lapangan menunjukkan, masih ada puluhan juta penduduk miskin. Ada jutaan pengangguran juga yang sangat butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka. Permasalahan-permasalahan milik penduduk yang pernah ditimpa musibah alam berupa gempa bumi, tsunami, banjir dan luapan lumpur serta tanah longsor hingga sekarang juga masih menyisakan banyak kendala.

Belum lagi, soal pemberantasan terorisme di Indonesia, peningkatan mutu TKI, penegakan hukum, perbaikan mutu layanan kesehatan dan pendidikan nasional, perbaikan kualitas pelayanan publik dan seabrek problema bangsa yang segera membutuhkan jawaban konkrit.

Berlama-lama berdebat soal solusi-solusi bagaimana meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan penduduk di meja parlemen dan ruang-ruang pertemuan; hanya membikin rakyat kian bosan. Akhiri kebiasaan buruk itu dan segera lemparkan “mata kail pembangunannya” ke tengah “samudera kehidupan rakyat”. (\*)

## Media Massa, Isu Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal<sup>76</sup>

**A**da tiga tema besar yang diangkat melalui pemaparan tulisan pendek ini. Pertama eksistensi pers (media massa), kedua terkait isu-isu terkini lingkungan hidup dan ketiga berhubungan langsung dengan masalah kearifan lokal (*local wisdom*). Media massa dan lingkungan hidup serta kearifan lokal pada prinsipnya memiliki korelasi erat, khususnya dalam menentukan arah berbagai kebijakan pembangunan yang diambil oleh para pemimpin dunia. Isu-isu lingkungan hidup pada abad ultramodern menuju postmodern ini menjadi permasalahan serius yang dibahas dalam berbagai forum dunia.

Seperti dalam KTT ASEAN ke-19 di Bali yang berlangsung pada 16-19 November 2011 kemarin. Di mana dalam KTT ASEAN ke-19 yang mempertemukan 10 kepala negara (pemerintahan) ASEAN dengan 8 negara mitra dialog, berhasil menelorkan 9 kesepakatan meliputi pencapaian konkret untuk mempererat tiga pilar konektivitas ASEAN, penguatan pertumbuhan ekonomi regional, membangun arsitektur yang lebih efisien dan efektif bagi kerja sama regional.

Selain itu juga menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara, memperkuat peran ASEAN di kancah internasional, peningkatan kerja sama ekonomi di Asia Timur, kerja sama membangun platform dan tindakan nyata ketahanan pangan, energi, dan air sekaligus perubahan iklim, kerja sama

---

<sup>76</sup> Supadiyanto. (2011). *Media Massa, Isu Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal*. makalah Seminar&Latihan Kepemimpinan Sylva Indonesia di Auditorium Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 23 November 2011 (dimuat di Kompasiana edisi 29 November 2011).

bidang penanggulangan ancaman nontradisional, seperti bencana alam, terorisme, dan kejahatan transnasional serta kerja sama menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Timur. Dalam pertemuan puncak ASEAN-PBB ke-4 di Nusa Dua, Bali (19 November 2011), Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon juga pernah mengatakan PBB siap bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengatasi tantangan-tantangan global. Seperti adanya perubahan iklim, ketahanan pangan, dan energi serta penghormatan hak asasi manusia.

Hal ini menunjukkan betapa isu-isu kelestarian lingkungan hidup dengan segala pernak-perniknya, saat ini menjadi tema sentral dalam membangun kemajuan pembangunan setiap negara tanpa terkecuali. Di tengah zaman yang terus mengalami percepatan teknologi dan ilmu pengetahuan yang luar biasa, namun pada saat bersamaan juga terjadi percepatan pengrusakan terhadap lingkungan hidup yang tak kalah luar biasanya, dibutuhkan komitmen tinggi dari para penguasa dunia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Negara-negara berkembang dan miskin yang dianggap sebagai pusat-pusat pengrusakan hutan dan lingkungan hidup, sementara negara-negara maju yang dituduh sebagai pengepul yang menadah hasil pengrusakan hutan dan lingkungan hidup di negara-negara berkembang (miskin), sejatinya merupakan dua kondisi yang saling berkelindaan. Satu pihak sebagai pelaku pengrusakan lingkungan hidup, sedangkan pada pihak yang lain berada pada posisi sebagai "pencetus" kenapa terjadi kerusakan lingkungan hidup. Secara konseptual, kerusakan lingkungan hidup, menurut hemat penulis dapat dicegah tangkal melalui dua jalan yang sistematis. Pertama dengan menghidupkan kembali semangat kearifan lokal, serta dengan cara pendekatan melalui media massa.

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai kedaerahan yang mengilhami dan menginspirasi tumbuhnya humanisme dan keunikan budaya yang hidup dalam lingkungan tertentu. Nukleus dari kearifan lokal adalah masalah pesan moral dan nilai optimisme. Dalam setiap kearifan lokal, pastilah tumbuh dan berkembang menyesuaikan dengan budaya lokal yang

berkembang subur pada sebuah daerah atau kawasan. Kearifan lokal bisa tumbuh pada sebuah daerah, tetapi kemudian meluas dan membesar hingga diakui kebenarannya sebagai kebenaran universal.

Kehancuran hutan akibat praktik ilegal logging, sesungguhnya tercipta akibat musnahnya kearifan lokal. Hutan dalam konteks budaya tradisional merupakan "ibu kandung" yang harus dijaga kelangsungannya, kelestariannya. Proses penebangan hutan, yang bertujuan mengambil kayu-kayu hutan itu untuk keperluan industri modern, yang pada akhirnya menghancurkan tatanan nilai kearifan lokal. Dan kita tentu maffhum, industri-industri modern itu berpusar dan berpusat di negara-negara maju. Dengan sangat jelas, negara-negara berkembang yang pada umumnya masih memiliki hutan cukup luas, menjadi tambang bahan mentah bagi negara-negara maju-industrialistis. Bukankan dengan demikian, ada mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara provokasi negara maju atas negara berkembang dan miskin dalam hal perusakan lingkungan. Meski pada propagandanya, negara-negara maju mengampanyekan "*go green*" dan gerakan mencintai lingkungan hidup. Termasuk dengan memberikan dana bantuan maupun hibah yang diberikan oleh negara maju kepada negara miskin, sehingga memaksa mendekte pemerintahan negara miskin tunduk dan takluk pada kekuatan negara-negara pendonor (maju).

Pada abad yang serbamodern ini, kita harus semakin mengembangkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan kearifan lokal. Langkah ini penting dilakukan, agar dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berat ini. Terjadinya pengrusakan lingkungan hidup dan alam, sebenarnya merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh umat manusia. Khususnya oleh para mereka yang bergerak dalam bidang industri kayu dan yang bersentuhan dengan alam. Pengrusakan lingkungan pada akhirnya menjadi bom bunuh diri ekologis. Bencana banjir, kemarau panjang, krisis pangan, kebakaran hutan, adalah krisis lingkungan hidup yang menohok kesadaran manusia. Menebang pohon memang boleh dilakukan, sepanjang



dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Tetapi tetap dilakukan Indonesia adalah negara besar yang luasnya hampir 8 juta kilometer persegi, memiliki hutan tropis sangat luas seluas 120 juta hektar, terbentang dari ujung paling barat hingga ujung paling timur. Sayangnya, hutan Indonesia yang begitu indah tersebut terjadi pengrusakan yang luar biasa. Daya pengrusakannya, menurut data yang dikantongi *World Bank* mencapai 0,6-1,3 juta hektar per tahun. Secara garis besar, pengrusakan hutan Indonesia diakibatkan praktik *illegal logging*, yang berujung pada musnahnya hutan-hutan khususnya yang terjadi di luar Jawa. Pembangunan di Pulau Jawa sendiri yang terjadi sangat masif dan besar-besaran, kita akui menjadikan pulau yang tidak luas ini berkembang sangat maju, tetapi mengalami permasalahan lingkungan hidup terutama sekali dapat dilihat ketika musim kemarau maupun musim penghujan.

Lebih dari 100 juta jiwa hidup dan menetap di Pulau Jawa. Jawa sentris, di mana pusat-pusat peradaban bangsa ini hingga era Orde Reformasi ini masih menjadikan Jawa sebagai sentral berbagai pusat-pusat pemerintahan, perdagangan, pariwisata dan kehidupan vital lainnya, mengandung perspektif bahwasannya pembangunan telah mengakibatkan terkikisnya luas hutan Indonesia.

Secara ideal, bagaimana konsep pembangunan bangsa ini perlu diimbangi melalui pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Kearifan lokal adalah sumber spirit yang dapat membawa banyak perubahan gaya hidup dan cara berfikir kita. Nenek moyang kita mewariskan begitu banyak kearifan lokal yang bisa dilacak melalui nasehat-nasehat, petuah, dan perilaku keseharian yang bisa menentramkan hati dan fikiran kita. Kearifan lokal terlahir dari sikap hidup manusia mengarifi segala apa yang tercipta di dunia ini. Setiap bangsa pastilah memiliki banyak pelajaran moral yang hidup dan terpatri dalam benak kesadaran setiap warga masyarakat, yang turut mempengaruhi warna kehidupan bangsa.

Amerika terkenal dengan kearifan lokalitas tentang pelajaran kedisiplinannya, Eropa mempunyai kearifan lokal berupa ketelitian dan kerja kerasnya. Sementara Asia, termasuk di

Indonesia memiliki kehidupan spiritualitas yang tinggi. Sedangkan Australia memiliki semangat pembaharuan yang luar biasa, dan Afrika mengajarkan kepada kita akan tata nilai kebudayaan.

Media massa memegang kendali utama dalam mengelola berbagai isu internasional, regional, nasional, hingga lokal dalam berbagai bidang kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam bidang ekologis, media massa juga menjadi penting dalam menciptakan kualitas ekologis dan tata kelola lingkungan hidup di berbagai belahan dunia, include di Indonesia.

Kesadaran ekologis yang hidup dalam jiwa masing-masing praktisi pers (media massa), menjamin adanya perhatian yang luas terhadap upaya-upaya sistematis dalam memulihkan kembali kelestarian lingkungan hidup. Di Indonesia, kini terdapat sekitar 30 ribu wartawan profesional yang bekerja pada berbagai media cetak dan elektronik. Kendati jumlah akuratnya, belum ada data yang bisa dijadikan rujukan kuat. Tetapi diprediksikan jumlah wartawan Indonesia tidak lebih jauh dari angka di atas. Jumlah yang terbilang tidak besar jika dibandingkan luas wilayah Indonesia yang mencapai hampir 8 juta kilometer persegi. Di masa rezim Orde Baru (selama 32 tahun), Indonesia hanya mempunyai 289 media cetak (lokal dan nasional), 6 stasiun televisi dan 740 radio.

Yang memprihatinkan, keangkuhan pemerintahan Soeharto pada masa itu melakukan pembredelan terhadap sejumlah surat kabar yang dianggap memojokkan citra pemerintah yang berkuasa. Jika mau didata, ada banyak media massa yang terkena berangus (bredel) oleh pemerintah. Paska rezim Orde Baru tumbang, jumlah media cetak melonjak 6 kali lipatnya. Era reformasi yang ciri khasnya keterbukaan dan kebebasan, telah memicu kelahiran media massa. Dari yang semula hanya 289 media, meroket menjadi 1.687 penerbitan. Jika mau dihitung, berarti setahun paskareformasi telah lahir 1.389 media cetak baru. Atau bisa dibilang ada 140 media baru per bulan. Dengan lain kata muncul hampir ada 5 media baru per hari. Jumlah media massa cetak itu terus berkurang, dan pada tahun 2009, tercatat sebanyak 830 buah, televisi 60 buah media, radio

berizin 2 ribu buah dan radio tanpa izin mencapai 10 ribu media yang masih eksis.

Merujuk data *Internet World "IWS" Stats*, terdapat lebih dari 1,4 miliar pengguna internet (total penduduk dunia 7 miliar jiwa). Penduduk China, tercatat sebagai pengguna internet terbesar di dunia yang bisa mencapai 338 juta orang. Sedang jumlah pengguna internet di Indonesia hingga tahun 2009 mencapai lebih dari 30 juta orang. Dari jumlah itu, sejuta orang di antaranya adalah pengguna blog (*blogger*). Padahal jumlah blogger tahun 2007 cuma 300 ribu orang, tahun 2008 naik menjadi 600 ribu orang. Bulan Juli 2009 lalu, jumlah situs di internet seluruh dunia mencapai 239,6 juta. Angka ini meningkat sekitar 1,5 juta orang dari survei bulan Juni 2009. Menurut *Netcraft*, hal ini disebabkan adanya peningkatan signifikan jumlah *blogger* di dunia yang terbaca dari layanan Google's Blogger. Dilihat dari data *Netcraft* sebelumnya, pada Januari–Juli 2009, total penambahan situs di internet adalah sebanyak 54,1 juta buah.

Yang melegakan hati, terutama di kalangan pelaku bisnis media cetak, hingga detik ini media cetak masih tetap hadir di negara-negara yang penetrasi internetnya tinggi. Menurut *Internet World Stats* (2008), di Singapura misalnya, penetrasi internetnya 67,8 persen, Jepang 73,8 persen, Jerman 67 persen, Denmark 80,4 persen, Belanda 82,9 persen.

Kepedulian para jurnalis dalam membangkitkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kelestarian lingkungan hidup dan hutan Indonesia, menjadi amat substansial guna menangkal setiap tindak-tanduk dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat yang berdampak terhadap perusakan lingkungan hidup.

Permintaan kertas dunia yang terus saja meningkat tajam dari tahun ke tahun, berdampak luas pada permintaan kayu-kayu hutan. Sebab bahan baku pembuatan hutan adalah kayu hutan. Bukankah koran, majalah, tabloid, buku dan aneka produk pers lainnya, berasal dari kertas. Sehingga wajarlah kalau ada aktivis lingkungan hidup yang benci dan antipati terhadap eksistensi media massa cetak. Karena turut berpartisipasi secara tak langsung terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan hidup. Sulit

dibayangkan, bagaimana media cetak tidak membantu kerusakan hutan, sedangkan untuk menghasilkan 1 ton *pulp* (bubur kertas) saja diperlukan 4,5 meter kubik kayu.

Indonesia ada pada urutan ke-9 di jajaran negara produsen pulp dunia, hingga bisa menyumbang 2,5-2,7 juta ton per tahun. Posisi teratas produsen *pulp* dan kertas dunia tetap dipegang Amerika Serikat, yang produksinya melimpah mencapai 52,6 juta ton *pulp* dan 82 juta ton kertas.

Hemat penulis, mengganti media cetak dengan media elektronik (online) menjadi solusi cerdas untuk menyasiasi keadaan dilematis di atas. Tetapi pastilah gagasan ini akan mendapatkan tentangan keras dari berbagai pelaku industri pers dan dari kalangan wartawan sendiri. Tetapi yang terpokok, kepedulian para jurnalis mengekspos berita-berita seputar lingkungan hidup dan kehutanan, menjadi solusi cerdas dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan Indonesia.

Sejumlah perguruan tinggi Indonesia yang memiliki Fakultas Kehutanan (FKH) yang bertugas melahirkan generasi rimbawan andal dan para Sarjana Kehutanan, pada era perdagangan bebas dan modernisasi ini, memiliki tantangan kuat seiring dengan munculnya permasalahan global yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Hutan yang menjadi paru-paru dunia, perlu dijaga kelestariannya. Bagaimana menciptakan sebuah negara maju, namun tetap memiliki hutan-hutan yang lestari. Indonesia kini berada pada jurang "kehancuran hutan nasional".

Kalau proses pengrusakan itu tidak segera dihentikan, dan tidak ada upaya pemulihan terhadap eksistensi hutan-hutan yang sudah rusak tersebut, maka masa depan bangsa ini benar-benar mencapai taraf peradaban yang semakin mengkhawatirkan. Idealnya para Sarjana Kehutanan atau calon rimbawan menjadi motor dan penggerak dalam upaya-upaya advokatif dalam memulihkan kelestarian hutan Indonesia. (\*)

## **Menjaga Independensi, Profesionalitas, dan Integritas (Komisioner) KPID DIY demi Mewujudkan Kualitas Media Penyiaran di DIY yang Istimewa, Bermartabat, dan Mencerdaskan Publik<sup>77</sup>**

**K**omisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY sebagai perwujudan dari lembaga negara independen memikul tanggung jawab besar dalam melindungi segenap lapisan masyarakat dari dampak negatif media penyiaran (radio dan televisi). KPID DIY juga berkewajiban menjamin masyarakat mendapatkan terpaan informasi (berita) yang aktual, akurat, dan mencerdaskan. Maraknya tayangan kekerasan, pornografi (erotisme), iklan pengobatan alternatif yang menyesatkan serta konten yang tidak mendidik lainnya di berbagai stasiun televisi dan radio menunjukkan bahwa kesadaran para pengelola media penyiaran akan melek regulasi (media penyiaran) masih cukup rendah. Prihatinnya lagi, para penonton (pemirsa) juga pesimistis (apatis) dalam mengkritisi dan mengadukan kepada KPID DIY manakala menemukan berbagai konten yang melanggar.

Di tengah kondisi di atas, eksistensi KPID DIY menjadi sangat strategis dalam upaya penegakan hukum di bidang penyiaran. Hadirnya para komisioner KPID maupun KPI yang independen, profesional, dan berintegritas menjadi tuntutan zaman. Tantangan KPID DIY sebagai salah satu bagian dari regulator bidang penyiaran nasional dalam menciptakan iklim penyiaran

---

<sup>77</sup> Supadiyanto. (2017). *Menjaga Independensi, Profesionalitas, dan Integritas (Komisioner) KPID DIY demi Mewujudkan Kualitas Media Penyiaran di DIY yang Istimewa, Bermartabat, dan Mencerdaskan Publik*. Situs Komisi Penyiaran Indonesia [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id). edisi 20 September 2017.

yang sehat di era konvergensi multimedia massa ini semakin berat. Jika dikodifikasikan, ada tiga persoalan krusial dan serius yang menjadi tantangan para komisioner KPID DIY ke depan.

*Pertama*, persoalan besarnya adalah masih minimnya berbagai lembaga penyiaran televisi berjaringan yang menayangkan program siaran lokal minimal 10 persen dari seluruh waktu bersiaran perhari. Justru kini sejumlah lembaga penyiaran televisi berjaringan malah menayangkan program-program asing yang durasinya lebih dari 30 persen dari seluruh waktu bersiaran perhari. Bahkan ada stasiun televisi jaringan yang menayangkan program asing lebih dari 50 persen dari seluruh waktu bersiaran perhari. Fakta ini menjadi ironisitas di tengah dominasi program asing dan program nasional (Jakarta) yang menohok keberadaan berbagai stasiun televisi dan radio lokal (berjaringan). Berdasarkan pantauan intensif KPID DIY terhadap program siaran lokal di berbagai stasiun televisi di DIY—sejak kali pertama saya bekerja pada bidang pengawasan isi siaran per 1 Desember 2014 kemarin hingga hari ini (baca: 13 Juli 2017), menemukan fakta bahwa ada 5 stasiun televisi yang program asingnya berdurasi lebih dari 30 persen. Mereka adalah: ANTV Yogyakarta, RTV Yogyakarta, Global TV Yogyakarta, MNC TV Yogyakarta, dan Trans TV Yogyakarta.

Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang resmi berlaku efektif mulai 21 Mei 2017—kemarin, dilatarbelakangi oleh semangat untuk meningkatkan kualitas isi media penyiaran sebab masih buruknya kualitas/mutu tayangan/siaran televisi dan radio DIY. Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran sebagai regulasi operasional atas Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 di atas memberikan “angin segar” dalam upaya menjamin terselenggarakannya program siaran lokal di berbagai stasiun televisi dan radio berjaringan dengan durasi yang diberlakukan. Selain itu, tiga regulasi daerah tersebut menjadi “ikhtiar” bagi

upaya penguatan Lembaga Penyiaran Komunitas yang selama ini “dilemahkan” dan “dimarjinalisasikan”.

Media penyiaran yang terdiri dari televisi dan radio sejatinya merupakan medium di mana publik memiliki hak dominan untuk menentukan kualitas siarannya. Sebab radio dan televisi dapat memancar dengan baik karena memanfaatkan gelombang elektromagnetik (frekuensi) yang merambat melalui udara yang dimiliki oleh semua orang. Karena frekuensi adalah milik publik, maka sesungguhnya para pengelola media penyiaran (baca: pemilik/pengusaha media) statusnya hanya meminjam atau “mengontrak” frekuensi milik publik tersebut. Dominasi program asing yang kini marak menyerbu tayangan-tayangan berbagai stasiun televisi di Tanah Air, termasuk di DIY; sebut langsung saja ANTV yang dominan menayangkan program drama dari India; menjadi ironisitas di tengah minim bahkan nihilnya tayangan program siaran lokal di DIY. Gempuran program “Jakartanan” juga “men-jubeli” tayangan berbagai stasiun televisi membuktikan bahwa status lembaga penyiaran di daerah hanya dijadikan sebagai lembaga perelai siaran. Artinya, para pengelola media di daerah tidak berproduksi sebab siarannya hanya “copy paste” dari stasiun induk siaran di Jakarta.

Anehnya juga, kini pemirsa televisi (remaja dan anak-anak) di DIY kini jauh lebih familiar Sinema India berjudul: *Gopi*, *Anandhi*, dan *Mohabbatein* daripada program lokal berjudul: Angkringan atau Kuncung Bawuk. Mereka lebih menggandrungi program kartun India berjudul: *Shiva* atau *Doraemon* daripada siaran kartun berjudul: Adit, Sopo dan Jarwo. Gempuran program siaran asing sesungguhnya tidak hanya berasal dari India, tetapi juga berasal dari Turki, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, China, bahkan Malaysia.

Adanya Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran tersebut mengatur lebih tegas bahwa berbagai stasiun televisi berjaringan yang ada di DIY wajib menayangkan program siaran lokal dengan durasi minimal 10 persen dari seluruh waktu siaran per hari. Sedangkan radio berjaringan berkewajiban menayangkan program siaran lokal dengan durasi minimal 60 persen dari seluruh waktu siaran per hari. Di samping itu untuk bisa menjamin terselenggaranya program siaran lokal di DIY,

setiap lembaga penyiaran baik televisi maupun radio wajib mempunyai kantor dan studio siaran yang berdomisili di DIY. Mengingat hingga saat ini ada sejumlah lembaga penyiaran yang tidak memiliki kantor di DIY, yang ada hanya tiang pancang pemancarnya saja. Sanksi atas pelanggaran atas Perda Penyiaran yaitu berupa sanksi teguran yang dipublikasikan di media dan sanksi denda yang besarnya ditentukan sesuai dengan putusan Peraturan Gubernur DIY.

Keprihatinan lain terkait dengan isi siaran televisi yaitu masih maraknya tayangan pornografi (erotisme), kekerasan verbal maupun non verbal, makian (cercaan) maupun hinaan, serta minimnya tayangan berbahasa Jawa. Dalam Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran tersebut juga memerintahkan kepada berbagai pengelola lembaga penyiaran untuk menayangkan minimal satu program siaran berbahasa Jawa. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar eksistensi bahasa Jawa di tengah masyarakat terus terjaga. Tergerusnya penggunaan bahasa Jawa terutama di kalangan generasi muda di DIY akibat berbagai faktor, terutama akibat dampak negatif dari media massa. Dengan adanya tayangan program berbahasa Jawa di atas, diharapkan keberadaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari masyarakat Yogyakarta dapat terjaga dengan baik.

Ada dua hal penting lain yang diamanahkan oleh Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yaitu kewajiban pemerintah provinsi DIY untuk memperkuat keberadaan radio komunitas yang tersebar di DIY. Yakni dengan memberikan fasilitasi dalam hal perizinan maupun pengadaan peralatan siar. Keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dapat menjadi alternatif media pencerdas bagi publik, mengingat dominasi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang umumnya digelontor program-program yang penuh dengan tayangan erotisme, kekerasan, dan hiburan tidak sehat.

Terakhir, Perda tentang Penyelenggaraan Penyiaran juga menjadi kunci bagi penguatan eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) DIY sebagai lembaga negara independen yang bertugas mengawasi isi siaran dan mengatur infrastruktur



industri media penyiaran. Kesuksesan KPID DIY menghelat Anugerah Penyiaran DIY 2017 pada 20 April 2017 kemarin, tidak lepas dari kelahiran Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Dalam Anugerah Penyiaran DIY 2017 tersebut diberikan apresiasi dan penghargaan kepada berbagai program acara terbaik (mutunya) di televisi dan radio yang bersiaran di DIY. Dengan demikian, para pengelola lembaga penyiaran akan berlomba-lomba memproduksi dan menayangkan program siaran yang berkualitas baik dan tidak melanggar regulasi.

*Kedua*, persoalan besar lainnya adalah masih tingginya pelanggaran isi siaran yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi dan radio yang bersiaran di DIY. Sejak KPID DIY berdiri pada Juni 2004 hingga sekarang; tercatat ada sebanyak 185 surat teguran maupun pemberhentian program siaran dan pelarangan penayangan program yang pernah dikeluarkan oleh KPID DIY. Kalau dikategorisasikan lagi, jumlah surat sanksi yang diberikan oleh KPID DIY sepanjang tahun 2011 sebanyak 6 buah, ada 1 buah surat sanksi tahun 2012, dan 10 surat sanksi tahun 2013, lantas menjadi 11 surat sanksi tahun 2014, 84 surat sanksi sepanjang tahun 2015, 59 surat sanksi tahun 2016, dan sebanyak 16 surat sanksi pada Januari-September 2017. Jumlah surat sanksi yang diberikan KPID DIY kepada berbagai stasiun televisi dan radio yang melanggar di atas, membuktikan bahwa para pengelola media penyiaran masih banyak melakukan pelanggaran regulasi penyiaran. Kesadaran dan kemauan para pekerja media penyiaran untuk meleak regulasi penyiaran menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Ketegasan para komisioner KPID DIY, termasuk KPI Pusat dan KPID se-Indonesia dalam menegakkan regulasi penyiaran menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Tanpa adanya langkah tersebut, berbagai pelanggaran serupa bakal terulang kembali di masa mendatang.

Faktanya sekarang, lanskap industri media massa cetak maupun elektronik hanya dikuasai oleh 13 korporasi swasta nasional (yang memiliki jaringan di berbagai kota/daerah) menjadi “ancaman besar” bagi terjaganya prinsip keberagaman konten (*diversity of content*), keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*). Adapun korporasi raksasa yang

menguasai peta industri media massa (cetak maupun elektronik) di Indonesia adalah *MNC Group; Kompas Gramedia Group; Elang Mahkota Teknologi Mahaka Media, CT Group, Beritasatu Media Holdings/Lippo Group, Media Group; Visi Media Asia (Bakrie & Brothers); Jawa Pos Group; MRA Media; Femina Group; Tempo Inti Media; Media Bali Post Group* (Nugroho, Yanuar. dkk. 2012 dan Lim, M. 2012).

Dampak dari hegemoni korporasi media raksasa ini, tentu saja mengakibatkan nasib media penyiaran publik, komunitas, dan lokal menjadi keok bersaing dengan “para gajah-raksasa” di atas yang didukung penuh oleh kekuatan modal yang “tanpa batas”, kekuatan sumber daya manusia yang tinggi, serta teknologi telekomunikasi, media, dan informatika (Telematika) yang unggul, dan koneksi atau jaringan perusahaan media lintas negara. Adanya dominasi kepemilikan saham berbagai perusahaan media penyiaran oleh segelintir pengusaha media, berdampak pada “keseragaman” isi siaran sekaligus “keseragaman” pelanggaran yang dilakukan. Apalagi para pemilik media penyiaran tersebut menggunakan jaringan medianya untuk menggolkan ambisi politiknya. Misalnya saja, menggunakan jaringan media mereka untuk “berkampanye politik” padahal di luar masa kampanye politik yang diperkenankan sesuai dengan regulasi yang ada. Penyalahgunaan media penyiaran untuk kepentingan pribadi para politisi atau segelintir orang maupun kelompok untuk meraih kekuasaan; sangat bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ambisi para politisi untuk memanfaatkan media penyiaran untuk menggolkan keinginan mereka menguasai kekuasaan juga tampak pada Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang baru (versi 19 Juni 2017), di mana muncul salah satu klausul di mana akan dilahirkan satu jenis lembaga penyiaran baru bernama Lembaga Penyiaran Khusus, di mana lembaga penyiaran yang didirikan dan dimiliki oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, partai politik atau pemerintah daerah. Desain ini jelas sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa ini. Sebab jika pasal tersebut diloloskan, partai politik akan berlomba-lomba mendirikan lembaga penyiaran. Kita akan

mengulangi zaman (*dejavu* sejarah), di mana pada masa Orde Lama, pers harus berafiliasi dengan partai politik. Kalau sudah demikian, bagaimana mungkin pers termasuk media penyiaran bisa netral dari kepentingan para pemilik media yang *notabene*-nya juga politisi?

Persoalan besar *ketiga* yang dihadapi adalah regulasi penyiaran yang tumpang tindih. Hal ini mengakibatkan adanya benturan sejumlah regulasi, sehingga menjadi kontraproduktif. Sebagai contoh sederhana adalah adanya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ternyata telah “menjegal” bahkan “membunuh” keberadaan KPID di sejumlah provinsi di Indonesia yang dipayungi hukum Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab dalam Undang-Undang di atas tidak mengakomodir keberadaan KPID di seluruh Indonesia sebagai kewenangan pemerintah daerah. Akibat parahnya, tafsir dari regulasi tersebut adalah tugas KPID tidak termasuk dalam urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, sehingga urusan penyiaran menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerintah daerah/provinsi tidak memiliki kewajiban untuk membiayai operasional KPID melalui skenario APBD-nya. Efek buruk dari regulasinya salah satunya menimpa KPID Sumatera Barat, di mana sejak awal tahun 2017 kemarin “dibekukan” akibat pemerintah daerah tidak menganggarkan lagi pembiayaan untuk KPID Sumatera Barat (baca: <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33982-kpi-pusat-ambil-alih-proses-edp-pemohon-izin-penyiaran-dari-pa-saman-barat-sumbar>).

Namun gonjang-ganjing yang menimpa KPID se-Indonesia pasca terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut “sementara” bisa terselesaikan dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 903/2930/Sj tentang Kelembagaan dan Penganggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Komisi Informasi Daerah yang baru saja diterbitkan pada 22 Juni 2017 kemarin; di mana pemerintah daerah wajib mendukung pelaksanaan tugas KPID yang dibebankan pada APBD melalui mekanisme hibah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemerintah daerah telah menganggarkan dukungan kegiatan KPID dalam bentuk program dan kegiatan pada dinas yang menyelenggarakan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika atau pada perangkat daerah lainnya, maka pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran tersebut dalam bentuk belanja hibah kepada KPID, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.

Persoalan regulasi lain yang “kontroversial” adalah adanya wacana perevisian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah cukup lama didengar publik. Memang dari segi temporal, UU tersebut telah berusia lebih dari 15 tahun. Padahal ada begitu banyak dinamika dan perubahan di bidang penyiaran yang berjalan sangat cepat. Sebagaimana pesan substantif dari prinsip hukum progresif yang pernah diprakarsai oleh Profesor Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus selalu menyesuaikan gerak perubahan zaman. Bukan zaman yang harus mengikuti hukum.

Ada beberapa hal mendasar yang wajib dielaborasi untuk merevisi UU Nomor 32 Tahun 2002. *Pertama*, UU Nomor 32 Tahun 2002 belum mengatur secara khusus mengenai industri penyiaran digital. Memang sudah ada Permenkominfo RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran *Multipleksing* Melalui Sistem Terrestrial; namun hal tersebut belum cukup kokoh sebagai “pondasi hukum” untuk mengatur mengenai implementasi industri televisi digital di Indonesia. Dalam konteks DIY sudah ada 22 lembaga penyiaran televisi swasta digital yang sebagiannya sudah memperoleh IPP Prinsip. Dari 22 lembaga penyiaran televisi swasta digital di atas, hingga saat ini baru ada dua stasiun televisi digital yang sudah bersiaran dengan menggunakan MUX yang dikelola oleh TVRI Yogyakarta. RUU Penyiaran mewacanakan MUX akan dikelola oleh LPP (untuk televisi), dan RTRI dan LPS yang sudah ber-IPP (radio). Dalam RUU Penyiaran yang baru ternyata juga tidak membatasi adanya kepemilikan perusahaan media. tentunya hal ini sangat membahayakan sebab bisa terjadi monopoli media.

Persoalan besar lain mengenai eksistensi KPI sendiri. Ada banyak hal yang harus direvisi khususnya Pasal 8 mengenai wewenang, tugas dan kewajiban KPI. Idealnya, kewenangan KPI semakin diperluas lagi, misalnya sampai pada tahap memberikan IPP dan atau tidak memberikan IPP perpanjangan kepada lembaga penyiaran televisi dan radio—yang selama ini dijalankan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Bahkan pada pasal 8, pada ayat 3 huruf b dan c: tugas dan kewajiban KPI disebutkan: “ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran”; dan “ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait”. Secara redaksional, kata “ikut membantu” dan “ikut membangun” artinya sama dengan tidak menjadikan KPI sebagai subjek pokok; hanya sekadar sebagai subjek pembantu saja. Dengan demikian, wajarlah kalau kemudian kedudukan KPI hanya sekadar sebagai “pelengkap” saja bagi Kemenkominfo RI selama ini. Padahal kita mafhum, posisi Menkominfo RI yang sangat politis (karena mengangkat menteri menjadi hak prerogatif presiden). Menjadikan KPI (pusat maupun daerah) sebagai subjek/regulator utama dalam dunia penyiaran (digital) adalah sesuatu yang mutlak.

Pada pasal 9, ayat 3 yang menyatakan bahwa masa jabatan komisioner KPI hanya tiga tahun saja; sebaiknya perlu diperpanjang lagi. Pendeknya usia jabatan, membuat kinerja para komisioner tidak bisa optimal. Idealnya, masa jabatan komisioner KPI adalah lima tahun dan memungkinkan untuk dipilih kembali untuk satu periode kembali. Mengenai struktur keorganisasian KPI (pusat dan daerah) harusnya lebih disistematisasikan; sebab selama ini masing-masing KPID terkesan bekerja sendiri-sendiri; sebagai dampak karambol dari sistem yang tidak hirarkis. Apakah jika terjadi perubahan hubungan organisasi KPI/D yang semula koordinatif menjadi hirarkis; akan mengurangi nilai sebagai lembaga independen negara? Tergantung pada otoritas dan implementasi para komisioner sendiri menjadi regulator.

Adapun anggaran operasional yang dimiliki oleh masing-masing KPID juga berbeda-beda; tergantung pada besar kecilnya APBD masing-masing provinsi. KPID yang berdomisili

pada Provinsi atau Daerah Ekonomi Maju; anggaran yang diperoleh menjadi “gemuk-besar”; sedangkan KPID yang berada di daerah “IDT”, menjadi “kurus-kecil”. Sebagaimana yang dialami oleh KPID DIY.

Eksistensi LPP, LPS, LPK, dan LPB (pada pasal 14-29) juga harus didudukkan kembali secara proporsional; baik dalam hal perizinan maupun program siaran. Munculnya inisiatif DPR RI untuk menggolkan RUU RTRI perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Pada satu sisi hal tersebut bisa menguatkan kedudukan LPP baik secara pendanaan maupun kualitas program siaran—yang selama ini terseok-seok. Namun pada aspek lain, langkah tersebut dikhawatirkan oleh para pengusaha media swasta; LPP akan menjadi ancaman bisnis baru bagi mereka jika status TVRI, RRI, maupun LPP Lokal dikeluarkan dari empat jenis jasa penyiaran (sebagaimana yang sudah menjadi tradisi sebelumnya).

Menurut pandangan penulis, RUU RTRI itu seharusnya juga mengakomodasikan LPK; sehingga menjadi RUU RTRI dan Radio Televisi Komunitas (RTK); mengingat kedudukan LPK selama ini menjadi “gurem” yang sangat kerdil dalam jagat penyiaran. Padahal kontribusinya sangat vital, sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat arus bawah atau dalam bahasa jurnalistik disebut sebagai pewarta warga (*citizen journalism*). Negara juga berkewajiban untuk membuat regulasi khusus terkait keberadaan LPK; karena perlakuan yang didapatkan oleh LPK selama ini cukup minimalis dan diskriminatif.

Soal perizinan misalnya, hendaknya tidak lagi disentralistiknya di Jakarta; tetapi sejak proses Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), Forum Rapat Bersama (FRB), dan Evaluasi Uji Coba Siaran Sementara (EUCS), Izin Perpanjangan IPP dan sebagainya dipusatkan di daerah atau lokasi di mana calon lembaga penyiaran (radio dan televisi) akan bersiaran; sehingga hal ini akan memberikan informasi lebih akurat; karena “para pejabat di pusat” akan turun “turba” ke bawah. Berani tidak, DPR RI mengelaborasi RUU RTRI dan RUU RTK?

Mengenai sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 55 ayat 2; dalam praktiknya membutuhkan waktu relatif lama. Pemberian kewenangan bagi KPI untuk bisa menindak dan

memberikan sanksi yang bersifat cepat misalkan segera dapat menghentikan acara siaran langsung maupun tunda (rekaman) dari lembaga penyiaran televisi maupun radio dinilai melanggar berat norma-norma yang ada dalam pasal-pasal Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS). Akan lebih sempurna lagi; jika KPI/D diberikan otoritas penuh untuk menjalankan sanksi pada poin f (tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran) dan poin f (pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran); yang selama ini masih dikendalikan oleh Menkominfo RI.

Revisi PPP dan SPS menjadi hal yang urgen dan darurat mengingat adanya banyak perkembangan zaman dan kemajuan Telematika. Sebagai contoh sederhana, bagaimana P3 dan SPS belum cukup tangguh untuk menjerat bagi berbagai stasiun televisi yang menyiarkan kembali program acara yang pernah ditayangkan; namun hanya berubah nama program acaranya; padahal isi dari program acaranya sama. Bagaimana kalau PPP (atau P3) dan SPS ini “dikawinkan” atau “dilebur” saja menjadi satu kesatuan tunggal; sehingga menjadi P3SPS; bukan disendirikan—sebagaimana selama ini? Dengan demikian, akan lebih komplis dan aktual. Penegakan P3 dan SPS adalah harga mati; agar KPI/D bisa lebih kokoh lagi.

Revisi (pembaharuan) atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran—yang dibidani oleh sebagian pelaku sejarah dari mereka yang juga pernah melahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; adalah langkah yang benar dan tepat untuk segera direalisasikan. Tantangan zaman yang semakin berat, era globalisasi yang semakin menghebat, kompetisi bisnis multimedia yang kian sengit; sementara degradasi moral-spiritual semakin menggila menimpa 250 juta penduduk ini; harus segera diantisipasi dengan benteng kokoh bernama “perevisian UU Penyiaran”. Tentu akan lebih elegan lagi; jika spirit perevisian UU Penyiaran tersebut disinergisasikan dengan perevisian UU Pers (Nomor 40 Tahun 1999), UU Telekomunikasi (Nomor 36 Tahun 1999), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Nomor 11 Tahun 2008), UU Keterbukaan Informasi Publik (Nomor 14 Tahun 2008). Bangsa ini membutuhkan Undang-Undang Konvergensi Multimedia

Massa, maupun Telematika. Hanya keberanian (nyali) dari ratusan anggota DPR RI 2014-2019 yang bermental visioner saja dan dukungan penuh dari publik dan pelaku bisnis multimedia massa sendiri yang mampu merealisasikannya; atau publik akan terus-menerus menjadi tumbalnya.

Khusus untuk KPID DIY, di tengah berbagai keterbatasan yang dimiliki selama ini, para komisioner yang baru ke depan harus lebih kreatif lagi dalam menjalankan berbagai program kerja, tugas pokok dan fungsinya. Harus jujur diakui, dalam melaksanakan 5 wewenang, serta 6 tugas-kewajibannya (sebagaimana yang tersurat dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8); KPI/D DIY memiliki banyak keterbatasan. *Pertama*, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Di tingkat pusat, jumlah komisioner KPI sebanyak 9 orang; sedangkan di daerah hanya sebanyak 7 orang saja (Bahkan RUU Penyiaran yang baru akan mendesain komisioner KPID hanya berjumlah 5 orang saja). Kelemahan lainnya, yaitu adanya Sumber Daya Finansial (SDF) yang terbatas. Jumlah SDM, SDF yang terbatas mengakibatkan tidak bisa tercapainya secara optimal (maksimal) kinerja KPI/D setiap tahunnya. KPI adalah "duta rakyat" di sektor penyiaran di tingkat pusat; dan KPID adalah "wakil rakyat" di bidang penyiaran di daerah. Berbagai kelemahan di atas bisa diatasi dengan cara melakukan berbagai kerjasama dengan banyak pihak, meningkatkan profesionalitas dan kedisiplinan secara organisatoris, penguatan KPID DIY melalui implementasi Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan regulasi turunan dan induknya; melibatkan masyarakat dalam pemantauan isi siaran, dan mendukung terealisasinya RUU Penyiaran yang baru di mana regulasi tersebut pro publik.

Bangsa ini harus memiliki "cetak biru" dunia penyiaran paling tidak hingga 20-25 tahun ke depan (tahun 2037-2042) secara jelas. Untuk membuat cetak biru dunia penyiaran tersebut, tentu membutuhkan para arsitek hukum penyiaran yang andal, sehingga mampu menghasilkan karya arsitektur penyiaran yang visioner dan pro publik. Senyampang dengan itu, kini DPR RI Komisi 1 tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dipersiapkan untuk menggantikan UU RI Nomor



32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan RUU Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI). Dua jenis RUU di atas (Penyiaran dan RTRI) menjadi sangat strategis dalam menciptakan arsitektur media penyiaran di era konvergensi media (digital). Publik harus ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan berbagai pemikiran progresif dan kreatif dalam mengawal terlahirnya berbagai regulasi di bidang penyiaran. Sebab berbicara masalah dunia penyiaran menyangkut berbagai hal yaitu aspek: sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan-keamanan, teknologi, komunikasi, hukum, legalitas, dan kedaulatan bernegara.

Habisnya masa jabatan para komisioner KPID DIY 2014-2017 pada awal Oktober 2017 adalah sebuah keniscayaan. Dengan segala “kelebihan dan kekurangan” yang dicapai oleh KPID DIY 2014-2017, termasuk prestasi yang paling membanggakan adalah kemenangan KPID DIY dalam mempertahankan keputusan hukumnya yang sempat digugat oleh salah satu pemohon lembaga penyiaran swasta analog (MY TV/MNC Group) pada tahun 2015 silam, hingga tingkat Mahkamah Agung; dapat menjadi pelajaran dan pengalaman berharga dalam hukum penyiaran di Indonesia. Adanya peningkatan durasi program siaran lokal yang ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi berjaringan dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan literasi media menjadi hal positif.

Namun demikian, pengawalan akan implementasi Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran menjadi “pekerjaan kantor” yang menunggu untuk dituntaskan agar arsitektur media penyiaran di DIY semakin istimewa. DIY membutuhkan para komisioner KPID DIY 2017-2020 yang independen, berintegritas, dan profesional. Tahun depan merupakan “tahun-tahun politik” di mana media penyiaran riskan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para pemiliknya dan para politisi. Karena di samping ada hajatan politik berupa Pilkada serentak di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulonprogo pada 2020, juga ada pesta demokrasi nasional berupa Pemilu Legislatif dan Presiden 2019. Semoga bermanfaat dan menginspirasi publik! (\*)

## Penutup (Kesimpulan)

**B**angsa ini memiliki banyak potensi andalan yang bisa dijadikan modal besar menjadi bangsa yang kuat (digdaya) di pentas dunia—entah secara ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional (ipoleksosbudhankam). Agar negeri ini bisa bangkit, terhindar dari krisis multidimensi, hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan kesadaran historis setiap penduduk. Kesadaran historis yang kebanyakan kini telah hilang di hadapan generasi muda bangsa, dikarenakan terdegradasi nilai-nilai luhur kultur bangsa oleh budaya asing yang cenderung bersifat liberal, hedonis dan radikal.

Kesadaran historis itu sendiri menyangkut masalah identitas dan jatidiri pembentuk bangsa. Yakni meliputi sejarah perjuangan, pedoman hidup, dasar negara, hukum negara dan konsensus-konsensus lain yang sifatnya mengikat dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran sejarah bangsa perlu ditanamkan kepada setiap orang semenjak kecil, melalui berbagai aktivitas yang bisa memompakan semangat nasionalisme dan patriotisme. Presiden Soekarno pernah berujar, “Jasmerah... Jangan sekali-kali melupakan sejarah”.

Pada momentum itulah, pembelajaran nilai-nilai perjalanan sejarah bangsa sejak zaman prasejarah, kerajaan, pergerakan nasional, kemerdekaan hingga saat ini, amat penting dilakukan secara intensif dan kontinyu melalui pendokumentasian sejarah yang kemudian lebih lazim kita sebut sebagai studi kearsipan. Penumbuhan rasa cinta Tanah Air dan sikap kenegarawan, secara langsung dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran nilai-nilai perjalanan sejarah bangsa.

Eksistensi kaum intelektual pada posisi demikian sangat strategis dan penting, terutama dalam menjaga dan melestarikan segala hal yang berkaitan dengan dinamika sejarah bangsa yang multikultural ini. Kaum intelektual juga sangat urgentif sebagai calon pemimpin bangsa, yang diharapkan bisa menjaga karakter dan falsafah hidup yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Lunturnya rasa nasionalisme dan patriotisme yang melanda sebagian generasi muda, lebih banyak disebabkan faktor tata pergaulan dan gaya hidup yang bertentangan dengan jatidiri bangsa. Pembelajaran sejarah pergerakan nasional yang dititikberatkan pada generasi muda, mencegah terjadinya pembusukan karakter dan pandangan hidup. Pada jangka panjang, kesadaran masyarakat untuk mengarsipkan segala hal yang berkenaan dengan perjalanan sejarah bangsa sebagai tradisi. Tradisi mendokumentasikan dan mengarsipkan momentum urgentif baik yang bersifat personal, institusional, komunal, maupun nasional.

Rendahnya kesadaran sejarah bangsa ini yang dimiliki masyarakat luas, menimbulkan pengeroposan rasa nasionalisme pada segala bidang kehidupan. Membangkitkan kesadaran sejarah bangsa ini, salah satunya bisa ditempuh dengan mengembangkan tradisi menulis yang biasanya dikembangkan di lingkungan akademis (kampus dan lembaga pendidikan), yang kemudian menjadi sebuah kebutuhan dasar. Seiring itu, keterampilan jurnalistik yang bersinggungan dengan kemampuan tulis-menulis, sangat dibutuhkan guna mendukung budaya pendokumentasian dan pengarsipan sejarah nasional. Dunia jurnalistik dan dunia pengarsipan, menjadi dua kutub kehidupan yang saling membutuhkan.

Hanya sayangnya, kaum intelektual hingga kini masih rendah dalam hal kemampuan menulis terutama di media massa cetak dan elektronik. Fenomena ini sangat kontraproduktif dengan tuntutan akademis yang mengharuskan mereka sebagai subjek pencerahan bangsa. Melalui pemberian ruang khusus di media massa bagi kaum intelektual dalam menuangkan gagasan mereka kesadaran sejarah, diyakini dapat mendongkrak rasa nasionalisme dan patriotisme kita.

Buku berjudul: ***"Masa Depan Indonesia, Bangkit atau Bangkrut! (Prisma Pemikiran Progresif di Berbagai Surat Kabar)"*** ini sebagai bukti komitmen intelektual dalam memberikan kontribusi pemikiran yang sudah terekspos di berbagai media massa. Maka tugas yang diemban kaum intelektual menjadi semakin berat dari masa ke masa. Keterbatasan jumlah kaum intelektual yang memiliki

kemampuan plus dalam hal jurnalisme, juga menjadi permasalahan tersendiri yang hingga detik ini masih menjadi pembahasan di tingkat pemegang kekuasaan.

Sesungguhnya tugas terberat kaum intelektual pada zaman modern ini adalah membangkitkan kesadaran historis dan nasionalisme dari setiap WNI. Belum banyak terpublikasikannya gagasan dari para intelektual mengenai pentingnya kesadaran sejarah di Tanah Air, diakui berbagai kalangan sebagai kelemahan prinsipil yang patut dicarikan solusi. Langkah aktif dan intensif kaum intelektual dalam menyosialisasikan melalui berbagai media massa (cetak serta elektronik), kita yakini dapat menjadi langkah cerdas untuk mengatasi kelemahan di atas.

Bangsa-bangsa besar selalu menghargai perjalanan sejarah. Mereka selalu memiliki kesadaran sejarah tinggi. Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman dll adalah negara-negara yang menjunjung tinggi perjalanan sejarah melalui pendokumentasian tersistematis. Bangsa Indonesia juga sudah waktunya menjadi bangsa yang beradab, yang selalu mengutamakan masalah kesadaran sejarah. Karena kesadaran sejarah menjadi semangat dasar yang terus membawa pencerahan bagi peradaban manusia. Dengan demikian, membangkitkan kesadaran historis bangsa ini harus digelorakan. Segala hal yang bersangkutan dengan fakta-fakta (data) penting berbagai peristiwa bersejarah perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, mesti dihayati dengan baik dalam benak setiap masyarakat.

Momentum Pemilu 2019, merupakan pintu gerbang paling menentukan apakah Indonesia akan bangkit? Atau sebaliknya, bakal bangkrut? Indonesia berpotensi besar menjadi bangkit kalau dikelola oleh para pemimpin yang profesional. Sebaliknya, Indonesia menjadi bangkrut jika dikelola oleh para pemimpin yang koruptif, manipulatif, dan tidak visioner. Pemilu di masa mendatang: Pemilu 2024, Pemilu 2029; Pemilu 2034, Pemilu 2039; Pemilu 2044; Pemilu 2049; dst. merupakan babak sejarah baru di masa depan yang sangat menentukan pergantian pucuk kepemimpinan nasional maupun daerah. Mari, kita sukseskan bersama pergantian kepemimpinan nasional tersebut! (\*)

## Sumber Referensi (Daftar Pustaka)

- Badan Pusat Statistik. (2012, 2018). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2017-2018*. Bisa diakses melalui: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2018.html>
- Bank Indonesia. (2018). *Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia*. Klik situs: <https://www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Pages/SULNI-Oktober-2018.aspx>
- Chomsky, Noam. (2017). *Who Rules the World?* Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Herman, Edward S. dan Noam Chomsky. (1994). *Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media*. Vintage: London.  
<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33982-kpi-pusat-ambil-alih-proses-edp-pemohon-izin-penyiaran-dari-pasaman-barat-sumbar>.
- Kompas edisi 14 September 2011
- Koran Sindo Jateng edisi 1 Maret 2013
- Kovach, Bill dan Tom Rosentiel. (2006). *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Lim, Merlyna. (2012b). *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia. USA: Media Lab Arizona State University Tempe, Arizona United States, The Ford Foundation*.
- Lorraine Ranga Boro. (2014). *Jajak Pendapat Timor Timur dalam Perspektif Perlindungan Hukum Masyarakat Sipil Pasca Konvensi Jenewa 1949*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Mannsbach, R. Dan Rafferty, K., (2012). *Pengantar Politik Global* (Penerjemah Amat Asnawi). Bandung: Nusa Media.
- Muljana, Slamet. (2013). *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LkiS.

- Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, dan Shita Laksmi. (2012). *Mapping The Lanscape of The Media Industry in Contemporary Indonesia. Report Series: Engaging Media, Empowering Society: Assesing Media Policy and Governance in Indonesia through the Lens of Citizen's Rights.* Jakarta: CIPG (Centre for Innovation Policy and Governance), Hivos People Unlimeted, Fourd Foundation.
- Pradana, Hafid Adim. (2016). *Chessboard Politics dalam Kompleksitas Rezim Negara-Negara Pecahan Uni Soviet.* Malang-Yogyakarta: Pusat Kajian Sosial Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Malang dan Buku Litera.
- Republika edisi 9 Maret 2012
- Sen, Krishna dan David Hill. (2000). *Media, Culture, and Politics in Indonesia.* New York: Oxford University Press.
- Seputar Indonesia edisi 29 Januari 2012
- SKH Kedaulatan Rakyat edisi 27 September 2012
- Supadiyanto, *Konglomerasi Media*, Koran Jakarta edisi 27 Februari 2013, bisa diakses: <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/113449>
- Supadiyanto. (2009). *Menunggu Kejutan Pasca National Summit 2009.* Suara Pembaruan edisi 2 November 2009.
- Supadiyanto. (2013). *Globalisasi dan Ketidakadilan Universal.* Harian Umum Pelita edisi 20 Maret 2013. Klik: <http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/03/19/globalisasi-dan-ketidakadilan-universal#.UUkCutQyhe4>
- Supadiyanto. (2014). *Darurat Sektor Pertanian.* Koran Jakarta edisi 24 Oktober 2014.
- Supadiyanto. *Antara Teroris dan G30S/PKI.* Wawasan edisi 29 September 2011.
- Supadiyanto. *Apa Kabar Mahasiswa Pengusaha.* Kedaulatan Rakyat edisi 19 Mei 2012.
- Supadiyanto. *Artis Vs Artis, Siapa Menang?.* Harian Umum Pelita edisi 15 Januari 2013.
- Supadiyanto. *Artis, Politikus dan Dunia Berpura-pura.* Jateng Pos-Jogjakarta Post edisi 4 Februari 2013.
- Supadiyanto. *Beda Tipis Parpol dan PT.* Wawasan edisi 23 Desember 2011.

- Supadiyanto. (2012). *Berburu Honor dengan Artikel, Tips dan Strategi Menangguk Rupiah dari Surat Kabar*. Jakarta: Elex Media Komputindo (Kompas Gramedia Group).
- Supadiyanto. *Berlombalah menjadi Pejabat Antikorupsi*. Harian Umum Suara Karya edisi 3 Juli 2012.
- Supadiyanto. *Dampak Sinetron Terhadap Watak Anak*. Harian Bernas edisi 9 dan 11 Juli 2016.
- Supadiyanto. *De-eksistensi KPK*. Jogja Raya edisi 8 September 2011.
- Supadiyanto. *Dereligositas Wakil Rakyat*. Lampungpost edisi 17 Juni 2011.
- Supadiyanto. *Dwitunggal Pemimpin-Rakyat*. Suara Karya edisi 22 September 2011.
- Supadiyanto. *Godaan Syahwat Kekuasaan*. Lampungpost edisi 17 Maret 2011.
- Supadiyanto. *Histeria Miss Universe 2011*. Wawasan edisi 19 September 2011.
- Supadiyanto. *Hoaks dan Cerdas Bermedia*. Harian Jogja edisi 30 Oktober 2018.
- Supadiyanto. *ICT, Solusi Masalah Kemiskinan dan Pengangguran*. SKH Kedaulatan Rakyat edisi 26 Juni 2012 dan sebagian gagasannya dipresentasikan dalam *International Seminar&National Symposium bertajuk "Global Competitiveness Through Research Supporting Commercial Industry" di Hyatt Regency Hotel Yogyakarta, Sabtu (23/6/2012)*.
- Supadiyanto. *Impor Beras dan Solusi Krisis Pangan*. Pelita edisi 3 Oktober 2011.
- Supadiyanto. *Jurnalistik Masuk Kurikulum Pendidikan*. Kedaulatan Rakyat edisi 14 Desember 2011.
- Supadiyanto. *Kalau Harga BBM Naik*. Wawasan edisi 3 Maret 2012.
- Supadiyanto. *Kembali ke Khittah Reformasi '98*. Jogja Raya edisi 31 Oktober 2011.
- Supadiyanto. *Kisah-Kisah Hidup yang Menggugah*. Koran Jakarta edisi 24 Mei 2012.
- Supadiyanto. *Komodifikasi Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Harian Jogja edisi 16 Februari 2013. bisa diakses:

<http://epaper.harianjogja.com/index.php/?IdCateg=2013021611410>

- Supadiyanto. *KPI dan Cetak Biru Penyiaran*. Harian Bernas edisi 25 Juni 2016.
- Supadiyanto. *Lebaran, Laburan, Leburan, dan Liburan*. Harian Bernas edisi 4 Juli 2016.
- Supadiyanto. *Masa Depan LPP TVRI dan RRI*. Harian Bernas edisi 21 Juli 2017.
- Supadiyanto. *Masalah Baru Regulasi Media Penyiaran (bagian 1 dan 2)*. Harian Bernas edisi 13-14 Juli 2016.
- Supadiyanto. *Matematika Politik Pilgub Jateng*. Barometer edisi 1 April 2013.
- Supadiyanto. *Media Massa dan Kaderisasi Pemimpin*. Harian Umum Barometer edisi 20 Februari 2013.
- Supadiyanto. *Media Massa, Isu Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal*. makalah Seminar&Latihan Kepemimpinan Sylva Indonesia di Auditorium Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 23 November 2011 (dimuat di Kompasiana edisi 29 November 2011).
- Supadiyanto. *Media Penyiaran untuk Kedaulatan NKRI*. Harian Jogja edisi 4 Mei 2017.
- Supadiyanto. *Medsos Perlu UU Tersendiri*. Koran Jakarta edisi 18 November 2017.
- Supadiyanto. *Melawan Fenomena "Deindonesianisasi"*. Pelita edisi 25 Januari 2013.
- Supadiyanto. *Memaknai Hasil Pilkada Serentak*. Koran Jakarta edisi 21 Juli 2018.
- Supadiyanto. *Memberdayakan Energi Alternatif*. Suara Karya edisi 11 November 2014.
- Supadiyanto. *Memberdayakan Penduduk Lansia*. Suara Karya edisi 29 Februari 2012 (dikutip juga oleh redaksi Haluan Kepri edisi 3 Maret 2012).
- Supadiyanto. *Membongkar Relasi Media, Politik dan Demokrasi*. Koran Jakarta edisi 18 Januari 2013.
- Supadiyanto. *Mengamankan Agenda Reformasi*. Lampungpost edisi 19 Oktober 2011.
- Supadiyanto. *Mengatasi Krisis Air dan Pangan*. Wawasan edisi 18 Juni 2011.



- Supadiyanto. *Mengembalikan Citra Parpol*. Pelita edisi 28 Juli 2011.
- Supadiyanto. *Mengenal Tabiat Bangsa Israel*. Koran Jakarta edisi 10 November 2011.
- Supadiyanto. *Menggoyang Kekuasaan Cikeas*. Suara Karya edisi 14 Juli 2011.
- Supadiyanto. *Mengintip Kredibilitas Capres 2014*. Jogja Raya edisi 15 September 2011.
- Supadiyanto. *Menjadikan Harjo sebagai Identitas Jogja*. Harian Jogja edisi 22 Mei 2014.
- Supadiyanto. *Menjaga Independensi, Profesionalitas, dan Integritas (Komisioner) KPID DIY demi Mewujudkan Kualitas Media Penyiaran di DIY yang Istimewa, Bermartabat, dan Mencerdaskan Publik*. Situs Komisi Penyiaran Indonesia [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id). edisi 20 September 2017. Bisa diakses: <http://www.kpi.go.id/index.php/id/16-kajian/34119-menjaga-independensi-profesionalitas-dan-integritas-komisioner-kpid-di-y-demi-mewujudkan-kualitas-media-penyiaran-di-diy-yang-istimewa-bermartabat-dan-mencerdaskan-publik>
- Supadiyanto. *Mental Korupsi di Gunung Kidul*. Jogja Raya edisi 15 Agustus 2011.
- Supadiyanto. *Menyoal Data Keluarga Miskin dan Kaya*. Harian Umum Barometer edisi 4 Maret 2013.
- Supadiyanto. *Menyoal Rekrutmen CPNS*. Koran Jakarta edisi 1 Februari 2012.
- Supadiyanto. *Mudik, Reunifikasi, dan Ekonomi Lebaran*. Harian Bernas edisi 12 Juli 2016.
- Supadiyanto. *Paket Ekonomi dan Liberalisasi*. Koran Jakarta edisi 17 Juni 2016.
- Supadiyanto. *Parpol, Kekuasaan dan Konflik Kepentingan Bernegara*. Jateng Pos-Jogjakarta Pos edisi 11 Februari 2013.
- Supadiyanto. *Parpol, Korupsi dan Ruwetnya Demokrasi*. Wawasan edisi 3 Februari 2012.
- Supadiyanto. *Pemilu 2014 dan Manuver Politik ala Ken Arok*. Jateng Pos-Jogjakarta Pos edisi 26 Januari 2013.
- Supadiyanto. *Pengumuman SBMPTN dan Sukses Kuliah*. Harian Bernas edisi 28 Juni 2016.

- Supadiyanto. *Peta Kekuatan 10 Partai*. Harian Umum Pelita edisi 31 Januari 2013, dapat diakses: <http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/01/30/peta-kekuatan-10-partai#.UQmnGNQyhe4>
- Supadiyanto. *Pilgub Jateng dan Politik Hegemoni*. Wawasan edisi 22 Januari 2013.
- Supadiyanto. *Pilkada, Istana dan Keraton*. Jogja Raya edisi 26 September 2011.
- Supadiyanto. *PLN di Tangan Dahlan Iskan*. Koran Jakarta edisi 18 Oktober 2011.
- Supadiyanto. *Polemik Publikasi Karya Ilmiah*. Kedaulatan Rakyat edisi 6 Maret 2012.
- Supadiyanto. *Politik dan Diskriminasi Gender*. Harian Umum Suara Karya edisi 9 Februari 2013; <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=320830>
- Supadiyanto. *Politik Transaksional*. Harian Umum Suara Karya edisi 27 Februari 2013, bisa diakses: <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=322128>
- Supadiyanto. *Politisasi Media Massa*. Suara Karya edisi 25 Juni 2013.
- Supadiyanto. *Prokontra Publikasi Karya Ilmiah*. Harian Jogja edisi 3 Maret 2012.
- Supadiyanto. *Reevaluasi Manajemen Mudik Lebaran*. Wawasan edisi 6 September 2011.
- Supadiyanto. *Refleksi 185 Tahun Kabupaten Bantul*. Harian Jogja edisi 21 Juli 2016.
- Supadiyanto. *Relasi Korupsi dan Kemiskinan di Jateng*. Koran Sindo edisi 4 Maret 2013.
- Supadiyanto. *Relasi Media Massa dan Sistem Demokrasi*. Harian Umum Barometer edisi 26 Februari 2013.
- Supadiyanto. *Resafel Kabinet dan Agenda Pemilu 2014*. Wawasan edisi 10 Oktober 2011.
- Supadiyanto. *Ruang Kompetisi Semakin Sempit*. Harian Bernas edisi 5 Agustus 2016.
- Supadiyanto. *SEA Games dan Kebangkitan Olahraga*. Pelita edisi 16 November 2011.
- Supadiyanto. *SEA Games dan Nasionalisme*. Jogja Raya edisi 8 November 2011.

- Supadiyanto. *Setelah Lulus SMA/K Jangan Bingung*. Kedaulatan Rakyat edisi 3 Juni 2014.
- Supadiyanto. *Sinergi Keluarga dan Negara dalam Mendidik Anak*. Harian Bernas edisi 2 Juli 2016.
- Supadiyanto. *Spirit Baru Pasca Lebaran*. Suara Karya edisi 6 September 2011.
- Supadiyanto. *Supremasi Hukum dan Perburuan Koruptor*. Pelita edisi 8 Oktober 2011.
- Supadiyanto. *Taktik Memberdayakan Penduduk Miskin*. Barometer edisi 19 Maret 2013.
- Supadiyanto. *TNI dan Syahwat Kekuasaan*. Jogja Raya edisi 5 Oktober 2011.
- Supadiyanto. *Tri Dharma PT untuk Kemajuan Bangsa*. Kedaulatan Rakyat edisi 27 Desember 2014.
- Wawasan edisi 15 Juni 2011
- [www.internetlvestats.com](http://www.internetlvestats.com)
- [www.pixabay.com](http://www.pixabay.com)
- [www.sbmpn.ac.id](http://www.sbmpn.ac.id)

## Profil Penulis



**Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom.** adalah Ketua Pogram Studi Sarjana Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Yogyakarta. Pernah menjadi dosen tetap dan tamu pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Penyiaran Akademi Komunikasi Indonesia (AKINDO) YPK, Program Studi Penyiaran Akademi Komunikasi Radya Binatama/AKRB (AMIKOM Group). Turut membidani perubahan bentuk Akademi Komunikasi Indonesia YPK menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Perubahan Bentuk AKINDO YPK menjadi STIKOM Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai Ketua Penjaminan Mutu AKINDO YPK (2016-2018). Adalah alumni Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang. Menjadi lulusan terbaik dan tercepat dengan IPK: 4,00 masa studi 1 tahun 5 bulan pada Wisuda ke-134 Universitas Diponegoro pada 29 April 2014. Beliau juga berprofesi sebagai penulis artikel (kolumnis) di berbagai surat kabar lokal dan nasional sekaligus redaktur Harian *Online* Kabar Indonesia (HOKI) yang berkantor pusat di Belanda dan Koran *Online* *Pewarta* Indonesia. Pernah menjadi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY Periode 2014-2017 dengan jabatan Ketua/Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Televisi dan Radio se-DIY.

Sering kali memakai nama pena, Espede Ainun Nadjib. Ahli bidang jurnalistik, ilmu komunikasi, metode penelitian, dan regulasi media. Sejak awal tahun 2012 ini direkrut menjadi tenaga pengajar Pelatihan Menulis *Online* HOKI. Sejak tahun 2000 hingga sekarang menjadi peneliti senior pada *Intan of Cultural Research Centre* (ICRC) Jateng-DIY. Kini juga menjadi *Director of Centre for Media and Political Institute*.

Penyuka lagu-lagu romantis milik Broery Marantika ini, sejak masih kuliah sudah pernah bekerja menjadi wartawan di surat

kabar milik Dahlan Iskan, Jawa Pos Radar Solo (Jawa Pos *Group*), dan Solopos (Bisnis Indonesia *Group*). Sejak tahun 2008, berhijrah menjadi redaktur di Harian *Online* Kabar Indonesia (HOKI) dan Koran *Online* Pewarta Indonesia (KOPI). Penulis yang memiliki filosofi hidup “menulis adalah jalan hidupku” ini, pernah menyabet predikat/gelar *The Citizen Reporter of The Year* (2007). Sekarang lebih memfokuskan diri menjadi peneliti dan dosen, serta penulis artikel (opini) di berbagai surat kabar dan media elektronik lokal dan nasional.

Di samping itu menjadi dosen/pengajar jurnalistik Intistute Jurnalistik Rakyat Indonesia (IJRI) di Kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Ratusan karya tulis maupun karya jurnalistik yang lain pernah terpublikasikan di berbagai media cetak dan elektronik antara lain: Jawa Pos, Indopos, Kompas, Bisnis Indonesia, Koran Sindo/Seputar Indonesia, Suara Pembaruan, Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat, Bernas Jogja, Harian Jogja, Merapi, KR Bisnis, Minggu Pagi, Solopos, Bernas Jogja, Jogja Raya, Radar Jogja, Radar Solo, Suara Merdeka, Suara Karya, Wawasan, Lampung Post, Tribun Jogja, Pelita, Harian Bhirawa, Medan Bisnis, Bangka Pos, Barometer, Harian Global, Joglo Semar, Malioboro Ekpress, Koran Pak Oles, Meteor, Praba, Pewarta Indonesia, Kabar Indonesia, Kompasiana, Koran Jakarta, Banjarmasin Post, Batam Post, Bangkapos, Padang Ekspres, Kaltim Post, dsb.

Sekarang mulai aktif menyuplai artikel untuk dikirimkan ke surat kabar berbahasa Inggris. Berkat keahlian dalam bidang jurnalistik dan komunikasi massa, ratusan kali diundang secara rutin menjadi narasumber seminar, *workshop* dan diklat jurnalistik tingkat lokal maupun nasional di berbagai kota di Indonesia.

Antara lain pernah diundang menjadi narasumber forum Internasional maupun nasional di lingkungan Markas Besar TNI, Dinas Penerangan TNI AD, Departemen Pendidikan Nasional, UI Jakarta, ISI Surakarta, UGM, UIN Sunan Kalijaga, UNY, UAD, UII, Universitas Diponegoro, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Teknologi Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, INSTIPER, STIKES Muhammadiyah Gombang, STIE Surakarta, Gedung Dewan Pers Jakarta, Dinas Pendidikan

Pati Jateng, Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Pondok Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo, Dinas Pendidikan Pati, PCNU Bantul, Perpustakaan Kota Yogyakarta, Kopassus TNI AD Jakarta Timur, KPID DIY, dll. Kerap menjadi narasumber utama diskusi publik yang disiarkan langsung oleh TVRI Yogyakarta, ADI TV, RBTV, Recho Buntung FM, GCD FM, JIZ FM, Rakosa Female Radio, Merapi Indah FM, OVA FM dan sebagainya.

Hobi membaca dan mengoleksi berbagai surat kabar di Indonesia sejak tahun 2000 hingga sekarang. Serta gemar menulis dan fotografi. Salah satu hasil bidikannya pernah menjadi nominator terbaik dalam Lomba Foto Wartawan Pekan Olahraga Propinsi (Porprov) DIY 2011. Selain itu juga pernah menjadi Pemenang Utama Lomba Urun Rembug kategori Pariwisata dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-88 tahun 2004, Juara I LKT Kemanusiaan HUT PMI ke-60 dan Dies Natalies UIN Sunan Kalijaga Yogya ke-54, juara II Lomba Essay Jogja Education Fair 2005 (JEF '05), Juara I LKTM menulis di media massa kategori Opini se-UIN Sunan Kalijaga (2005/2006), Juara III LKTM menulis di media massa kategori Puisi se-UIN Sunan Kalijaga (2005/2006), Juara Harapan III LKTI dalam rangka Dies Natalies ke-53 UIN Sunan Kalijaga Yogya 2004 yang diikuti mahasiswa S1/S2 dan menjadi mahasiswa terproduktif menulis di media massa cetak di lingkungan UNY dan UIN Sunan Kalijaga Yogya (2005/2006).

Saat ini menjabat sebagai Sekretris Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Pusat, turut pula mendeklarasikan berdirinya PPWI 11 November 2007 di Jakarta. Pernah diundang menjadi Dewan Juri Lomba Nasional Menulis Surat Buat Presiden RI 2009, Dewan Juri Lomba Menulis Artikel Tentang Hubungan RI-Maroko 2011, Dewan Juri Lomba Menulis Puisi Hari *Valentine* 2008, dan Dewan Juri Menulis Artikel tentang Kriteria Capres RI serta Anggota DPR RI 2014, Dewan Juri Lomba Menulis Artikel Nasional 2018, Dewan Juri KPID DIY Award 2017, dan sebagainya. Telah menulis 11 buku yang sudah diterbitkan antara lain: *"Masa Depan Indonesia, Bangkit atau Bangkrut! Prisma Pemikiran Progresif di Berbagai Surat Kabar"* (2018), *"Rahasia Opini Termuat di Koran, Refleksi Pengalaman Pribadi Menulis di Berbagai Surat Kabar Lokal dan*

*Nasional*" (2018), "*Eksplorasi Pekerja Media di Era Konvergensi Media dalam Menegakkan Kedaulatan Komunikasi*" (2014), "*Berburu Honor Dengan Artikel, Tip dan Strategi Menangguk Rupiah*" (2012), "*Jadi Penulis Andal Modal Dengkul*" (2008), "*Imperium Tikus-Tikus (Al-Exa)*" (2008), "*Hai Bumiku Surgaku*" (2009) dan "*Booming Profesi Pewarta Warga, Wartawan&Penulis*" (2009), "*Indonesia-Maroko: Lebih Dari Persahabatan*" (editor, 2012) dan "*70 Tahun Perjalanan Hidup Mang Ucup (versi Bahasa Indonesia dan Inggris)*" (2012). Hasil-hasil penelitiannya dalam bidang komunikasi dan masalah sosial sudah diterbitkan dalam 22 jurnal dan prosiding yang dipresentasikan pada forum ilmiah nasional dan Internasional.

Mengakhiri masa lajangnya pada Ahad, 26 Desember 2010 dengan mempersunting Imroatun Fatimah, SPd. I (Guru SMK dan Staf Panwaslucam) dan dikarunia dua anak bernama Ilham Ainun Habibullah Supadiyanto (7 tahun) dan Muhammad Faqih Supadiyanto (3 tahun). Supadiyanto adalah anak terkecil dari 6 bersaudara, terlahir di Sleman, 14 Agustus 1981, bertepatan Hari Pramuka. Berasal dari keluarga petani tulen. Ayah bernama (almarhum) Suwadi Utomo (petani dan pengendang) dan ibu kandung bernama Dalikem (petani). Sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib masa depan bangsa, menginisiasi berdirinya Forum Indonesia (F0-1) pada tahun 2009. Di waktu luang selalu menyempatkan diri lari pagi (*jogging*) dan melakukan kegiatan sosial.

Merampungkan pendidikan dasar di kampung kelahiran yakni SD Muhammadiyah Ngijon III Sragan. Kemudian menamatkan bangku SMP Muhammadiyah Gedongan dengan selalu menyandang predikat peringkat 1. Melanjutkan pendidikan di SMA N I Minggir Sleman Yogyakarta dan lulus tahun 1999, juga dengan mengantongi predikat ranking 1-3. Lantas bekerja selama satu tahun sebagai pembantu rumah tangga, penjaga wartel, karyawan warung kaki lima (pecel lele) sambil melanjutkan Studi Sarjana di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta (IKIP Yogyakarta) dan pada Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (IAIN Yogyakarta) lulus dengan IPK: 3,32 pada tahun 2008. Selain itu juga pernah mengenyam pendidikan

di Jurusan Jurnalistik Akademi Komunikasi Yogyakarta (AKY) dengan mendapatkan beasiswa dari SKH Kedaulatan Rakyat. Pernah menyandang beasiswa Supersemar dan beasiswa prestasi. Kini juga dipercaya menjadi Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Minggir (2018-2019), serta Ketua Umum Paguyuban Penulis Wetan Progo (P2W PRO).

Berbagai prestasi yang pernah dicapai sebagai berikut:

- Juara III Penelitian Terbaik Kategori Media Cetak Indonesia Media Research Awards and Summit (IMRAS) 2014 oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat.
- Dinobatkan menjadi Lulusan Terbaik sekaligus Tercepat pada Wisuda ke-134 Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dengan IPK: 4,00 lama studi 1 tahun, 5 bulan (dari 2.200 lulusan).
- Juara II Lomba Esai tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tingkat Umum 2014.
- Pemenang Utama Lomba Urun Rembug kategori Pariwisata dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-88 tahun 2004.
- Juara I LKT Kemanusiaan HUT PMI ke-60 dan Dies Natalies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke-54.
- Juara II Lomba Essay Jogja Education Fair 2005 (JEF '05).
- Juara I LKTM menulis di media massa kategori Opini se-UIN Sunan Kalijaga (2005/2006).
- Juara III LKTM menulis di media massa kategori Puisi se-UIN Sunan Kalijaga (2005/2006).
- Juara Harapan III LKTI dalam rangka Dies Natalies ke-53 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004 yang diikuti mahasiswa S1/S2.
- Mahasiswa terproduktif menulis artikel di media massa cetak se-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005/2006).
- Pemenang Lomba Foto Pekan Olahraga Provisnsi (Porprov) IX DIY 2011 khusus wartawan.
- Ketua Dewan Juri Lomba Esai Mahasiswa se-Indonesia bertajuk Festival IPS 2014 yang dihelat oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan PPWI.
- Ketua Dewan Juri Lomba Esai Mahasiswa se-Indonesia bertajuk Festival IPS 2015 yang dihelat oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan PPWI.



- Ketua Dewan Juri Lomba Esai Mahasiswa se-Indonesia bertajuk Festival IPS 2016 yang dihelat oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan PPWI.
- Ketua Dewan Juri Lomba Nasional Menulis Surat Buat Presiden 2009.
- Dewan Juri Lomba Internasional Menulis Artikel Hubungan RI-Maroko 2011.
- Dewan Juri Lomba Nasional Menulis Artikel Kriteria Presiden RI Ideal 2014.
- Dewan Juri Lomba Nasional Menulis Artikel Kriteria Anggota DPR RI Ideal 2014.
- Dewan Juri Lomba Menulis Puisi Hari Valentine 2008.
- Dewan Juri Utama Lomba Menulis Feature dalam rangka Gebyar KPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Oktober 2012.
- Ketua Dewan Juri Lomba Menulis Esai Nasional dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2013 yang diadakan Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) – PPWI.
- Ketua Dewan Juri Lomba Menulis Esai Mahasiswa se-Indonesia dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2014 yang diadakan Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) – PPWI.
- Dinobatkan menjadi Citizen Reporter of The Year (2007).
- Anggota Dewan Juri Anugerah Penyiaran (KPID DIY Award) DIY 2017.
- Ketua Dewan Juri Lomba Menulis Artikel Nasional 2018.
- Dewan Juri Lomba Video Ramadan 2018.
- Terlibat aktif dalam merancang Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyiaran Penyiaran.
- Terlibat aktif dalam diskusi perubahan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk memperbarui P3SPS versi 2012.
- Terlibat aktif dalam diskusi dan seminar mengenai perevisian Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Bagi pembaca yang ingin menjalin komunikasi dengan penulis, dipersilakan menghubungi *e-mail:padiyanto@yahoo.com* atau nomor kontak: 0817-9447-204. (\*)

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH : BUKU (BERSERTIFIKAT HAK CIPTA/HKI)**

Judul Buku : Masa Depan Indonesia Bangkit atau Bangkrut! Prisma  
 Pemikiran Progresif di Berbagai Surat Kabar

Penulis Jurnal Ilmiah : Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom.

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Buku : Masa Depan Indonesia Bangkit atau Bangkrut!  
 Prisma Pemikiran Progresif di Berbagai Surat Kabar

b. Nomor/Volume : Cetakan I, ISBN: 978-602-5880-09-4

c. Edisi (bulan/tahun) : November 2018

d. Penerbit : Sukarno Pressindo

e. url dokumen : .....

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi <input type="checkbox"/>	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terindeks DOAJ <input type="checkbox"/>	
e. Kelengkapan unsur isi buku/book chapter (10%)				1		0,9
f. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3		2,75
g. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				3		2,85
h. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				3		2,5
<b>Total = (100%)</b>				10		9
<b>Kontribusi Pengusul (Penulis Tunggal/Mandiri)</b>						(100%)
<b>Komentar Peer Review</b>	1. Tentang kelengkapan unsur isi buku/book chapter <i>cukup bagus</i>					
	2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan .					

....b. ungu...rampai tulisan lebih faktual

3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi

.....Cukup bagus

4. Tentang Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit

.....Cukup

Yogyakarta, 01 September 2020

Reviewer 1



(Dra. Sudaru Murti, M.Si.

NIP: 990823660537806183

Unit kerja: Prodi D3 Penyiaran  
STIKOM Yogyakarta

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : BUKU (BERSERTIFIKAT HAK CIPTA/HKI)**

Judul Buku : Masa Depan Indonesia Bangkit atau Bangkrut? Prisma Pemikiran

Progressif di Berbagai Surat Kabar

Penulis Jurnal Ilmiah : Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom.

a. Nama Buku : Masa Depan Indonesia Bangkit atau Bangkrut?

Prisma Pemikiran Progressif di Berbagai Surat Kabar

b. Nomor/Volume : Cetakan I, ISBN: 978-602-5880-09-4

c. Edisi (bulan/tahun) : November 2018

d. Penerbit : Sukarno Pressindo

e. url dokumen :

<http://repository.stikomogyakarta.ac.id/1711/SERTIFIKAT%20HKI-DOKUMEN-REVIEW%20BUKU%20SUPADYANTO.pdf>

Hasil Penilaian Peer Review :

Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah		Nilai	Bobot	Skor	Bobot	Skor	Kontribusi Pengusul (Penulis Tunggal/Mandiri)
Nilai Akhir Yang Diperoleh	<input type="checkbox"/>	0,80					
Nasional	<input type="checkbox"/>	1					a. Kelengkapan unsur isi buku/book chapter (10%)
Nasional Tidak Terakreditasi	<input type="checkbox"/>	3					b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)
Nasional Terakreditasi	<input type="checkbox"/>	3					c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)
Nasional Tidak Terakreditasi	<input type="checkbox"/>	3					d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)
Nasional Terakreditasi	<input type="checkbox"/>	10					Total = (100%)
Nasional Tidak Terakreditasi	<input type="checkbox"/>						Kontribusi Pengusul (Penulis Tunggal/Mandiri)
Nasional Terakreditasi	<input type="checkbox"/>						



**Komentar Peer  
Review**

1. Tentang kelengkapan unsur isi buku/book chapter Cukup lengkap.
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan . Cukup mendalam dalam mengupas isu-isu actual khususnya dalam bidang komunikasi.
3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi Data tersaji dengan aktual, namun metodologinya tidak tersaji dengan baik.
4. Tentang kelengkapan unsur dan kualitas penertbit Penerbit buku cukup populer.

Yogyakarta, 01 September 2020  
Reviewer 2



(Yuni Retnowati, M.Si.)

NIP: 196706182005012001

Unit kerja: Prodi SI Ilmu  
Komunikasi STIKOM Yogyakarta